



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah di Kabupaten Purbalingga diperlukan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2025-2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian visi daerah yang memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah dan Indikator Utama Pembangunan sesuai dengan karakteristik Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB VI : PENUTUP

- (2) Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada:

- a. RPJPN Tahun 2025-2045;
- b. RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045; dan
- c. RTRW.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, non-alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2024
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-283/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan Daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Purbalingga menyusun RPJPD untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan jabaran dari tujuan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan Rencana RPJPD terbagi dalam tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Purbalingga sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Sistematika RPJPD mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan merupakan pengambilan alternatif yang dianggap alternatif terbaik dengan sumber daya yang tersedia secara tepat, efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan daerah secara terencana dan sistematis, yang tanggap akan perubahan dengan memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing organisasi kelembagaan yang ada. RPJPD disusun untuk memberikan arah dan tujuan jangka panjang daerah dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kabupaten Purbalingga telah memiliki dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025. Dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 akan berakhir pada tahun 2025 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang

periode selanjutnya yaitu periode tahun 2025-2045 sebagai respon terhadap tuntutan kinerja pembangunan yang ada.

RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman pembangunan kewilayahan serta rekomendasi KLHS RPJPD sebagai upaya mitigasi terhadap kondisi lingkungan hidup. Sebelum dilakukan penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, dilakukan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 terlebih dahulu baik evaluasi kebijakan, pelaksanaan maupun hasilnya. Hal itu dikarenakan evaluasi dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat.

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 menunjukkan bahwa visi dan misi pembangunan Kabupaten Purbalingga memiliki keselarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Visi pembangunan memiliki keselarasan dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih “mandiri”. Misi pembangunan memiliki keselarasan dan perbedaan hanya pada konteks dan peran masing-masing wilayah pembangunan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Demikian pula dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga dirumuskan selaras dengan misi pembangunan. Namun, beberapa arah kebijakan masih bersifat makro dan belum ada kebijakan penataan ruang terutama untuk pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang sesuai dengan RTRW. Ke depannya penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan, serta RTRW sebagai pedoman pembangunan wilayah.

Di dalam sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, bersifat kualitatif sehingga tidak ada angka target untuk menilai kinerja yang ada dalam setiap sasaran pokoknya. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya sasaran pokok harus menunjukkan indikator kinerja beserta targetnya dengan memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis serta target kinerja indikator makro baik pada provinsi maupun nasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, penjaringan masukan dan *focus group discussion* dengan pakar, praktisi serta akademisi, tahap penyusunan rancangan

awal, rancangan, serta rancangan akhir sampai dengan tahap penetapan RPJPD. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistic-tematik, integratif dan spasial. Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJPD secara holistik harus mampu menjadi panduan dan memberi arah bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga dalam jangka panjang yang mencakup seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, menjadi tantangan kabupaten dan kota untuk bersama-sama melakukan pembangunan yang inklusif. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, perlu untuk memberikan fokus perhatian pada sektor-sektor prioritas dan pembangunan regional. Peningkatan di bidang ekonomi diharapkan menjadi salah satu hal yang mampu mendorong industrialisasi dan menciptakan sumber-sumber ekonomi yang baru sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Disamping itu pembangunan juga harus memperhatikan lingkungan karena konsekuensi yang disebabkan oleh isu lingkungan dapat mengganggu keefektifan pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kemajuan pembangunan lainnya.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2045 diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan jangka panjang yang memberikan kontribusi dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan baik secara regional Kabupaten Purbalingga, maupun secara nasional untuk terciptanya semangat perubahan dan kolaborasi. RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 ke depannya akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD diharapkan tercipta pula keselarasan pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai. Kemudian dari RPJMD tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh dan arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 170-3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 20. Surat Edaran Bersama / SEB Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PPN / Ka . Bappenas No. 600.2/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 ttg Penyeragaman RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
 21. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyeragaman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, seperti diuraikan sebagai berikut:

- 1) RPJPN Tahun 2025-2045
Pada dasarnya dokumen RPJPN merupakan perencanaan jangka panjang Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia tersebut, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN khususnya dalam hal keselarasan dengan visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan dan indikator kinerja utama pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara pembangunan daerah dengan nasional sehingga perwujudan cita-cita Indonesia Emas 2045 secara inklusif dapat terwujud.

2) RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Pada dasarnya salah satu kebijakan pembangunan nasional yang harus didukung oleh Provinsi Jawa Tengah adalah menempatkan Jawa Tengah sebagai penunjang pangan dan industri nasional dalam dua puluh tahun ke depan. Kebijakan tersebut termuat dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Sama halnya dengan keselarasan dengan dokumen RPJPN, dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 juga harus disusun secara imperatif dengan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam hal keselarasan dengan visi, sasaran visi, misi/agenda pembangunan, sasaran pokok, arah pembangunan, periode atau tahapan pembangunan daerah dan indikator utama pembangunan (IUP). Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara pembangunan kabupaten dengan provinsi secara berjenjang dan berkesinambungan, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan satu kesatuan dengan tujuan pembangunan nasional tahun 2045.

3) RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

Pada dasarnya dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. RTRW memberikan norma, batasan dan arahan terhadap pembangunan, pemanfaatan serta pengendalian terhadap sumberdaya yang ada. Lain dari itu RTRW juga menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program pembangunan jangka panjang daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 disusun dengan melakukan harmonisasi dengan RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 khususnya keselarasan dalam arahan rencana tata ruang pada struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah dengan baik demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 juga memperhatikan:

1) Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

Selama periode RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 terdapat 4 periode RPJMD yaitu RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2010, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 dilakukan dengan mempedomani pencapaian sasaran tiap periode RPJMD Kabupaten Purbalingga yang sudah dilaksanakan selama 4 periode tersebut. Oleh karena itu dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan hasil

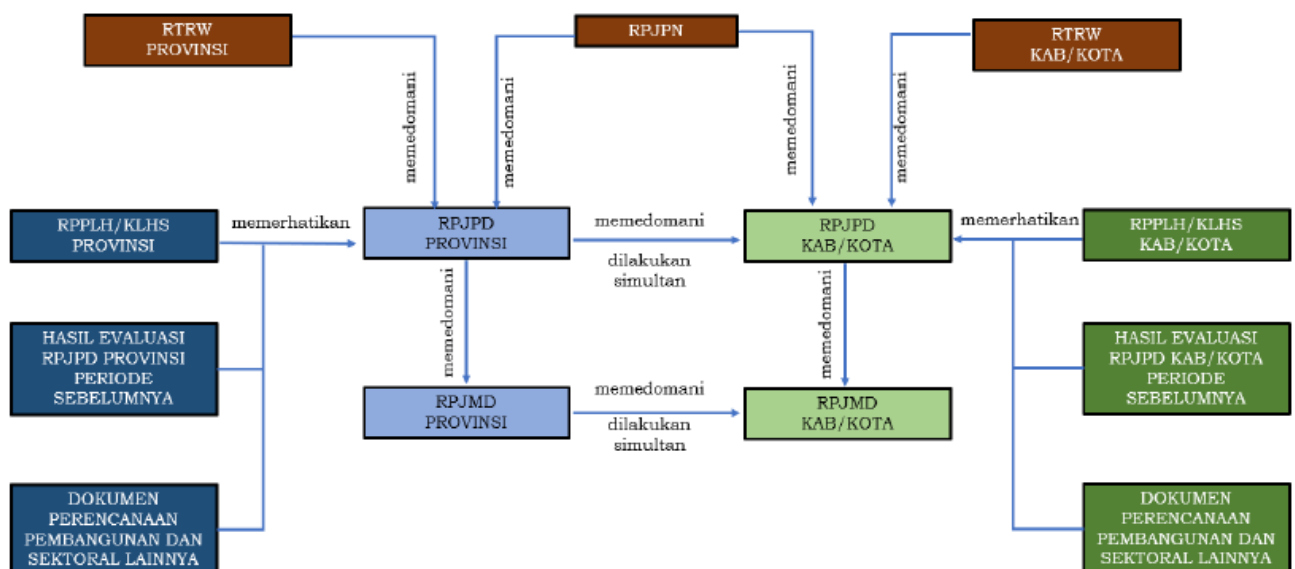
evaluasi tersebut khususnya dalam hal tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya.

2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib penyusunan dokumen RPJPD dilengkapi dengan dokumen KLHS. Penyusunan dokumen KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dokumen RPJPD. Oleh karena itu dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan substansi isu strategis, arah kebijakan dan skenario pembangunan yang tertuang dalam KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.

3) Rencana sektoral lainnya yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti: *Grand Design* Kependudukan, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Induk Persampahan, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan SPAM, Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3), Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) dan dokumen sektoral lainnya.

Skema keterkaitan penyusunan RPJPD dengan dokumen lainnya disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 ttg Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 adalah untuk merumuskan cita-cita pembangunan Kabupaten Purbalingga dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yaitu:

- 1) Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2025-2045;
- 2) Mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan dan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Purbalingga yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, khususnya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi tentang capaian pembangunan periode 2005-2022, gambaran umum dan analisis kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Pada bab ini juga akan dijabarkan proyeksi dinamika demografi dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun hingga tahun 2045, serta pengembangan pusat pertumbuhan sesuai amanat regulasi dan diinternalisasi kinerja RTRW serta arah kebijakan pembangunan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat tentang permasalahan pembangunan daerah yang berbasis analisis capaian kinerja sepuluh tahun terakhir dan menjadi dasar perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, serta

memperhatikan pula isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan daerah sekitar di Kabupaten Purbalingga.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memuat Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) Kabupaten Purbalingga periode tahun 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan dan sasaran pokok yang dijabarkan secara operasional dalam indikator kinerja beserta target yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 tahun dan terbagi dalam 4 (empat) periode.

BAB VI PENUTUP

Bab ini harapan berkenaan dengan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.

BAB II

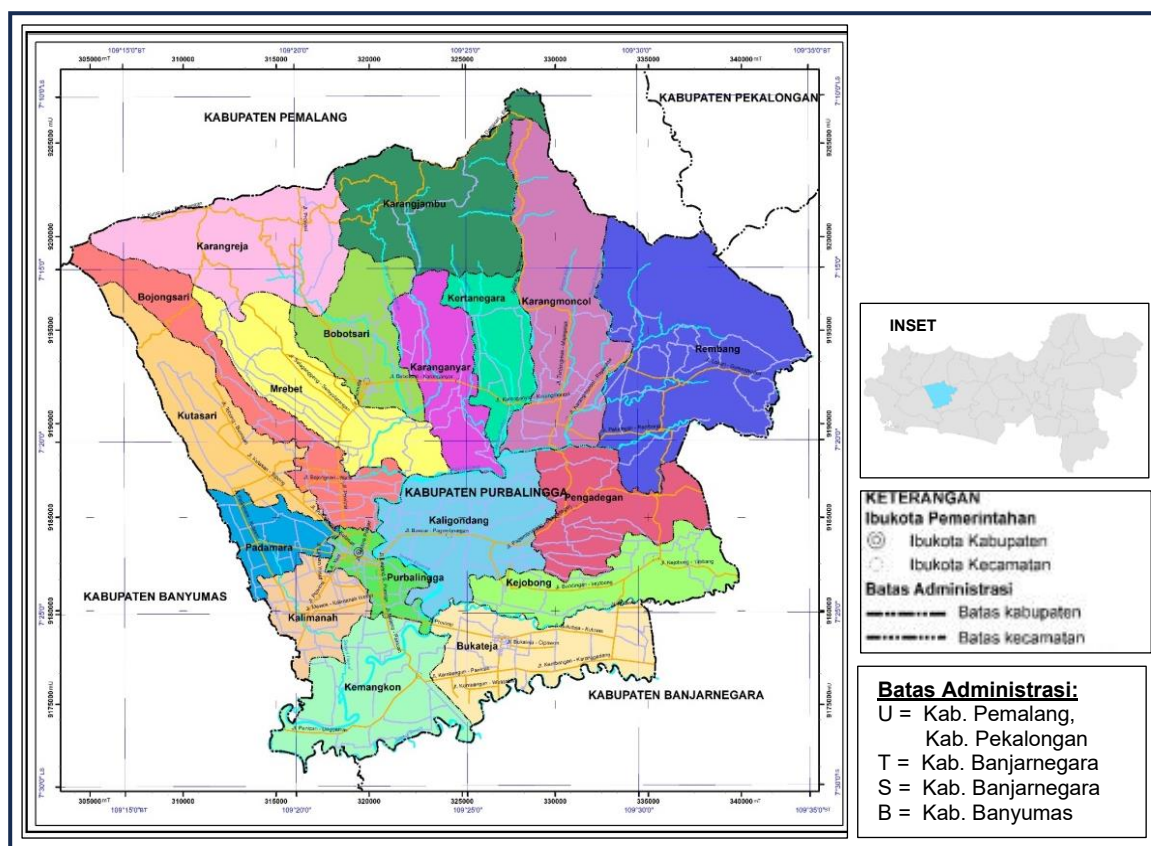
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya dengan koordinat lokasi antara $101^{\circ} 11''$ - $109^{\circ} 35''$ BT dan $7^{\circ} 10''$ - $7^{\circ} 29''$ LS". Secara administrasi, Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan yang terbagi menjadi 224 desa dan 15 kelurahan. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 80.576 Ha atau sekitar 2,35 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai batas-batas administrasi seperti disajikan dalam Gambar 2.1.

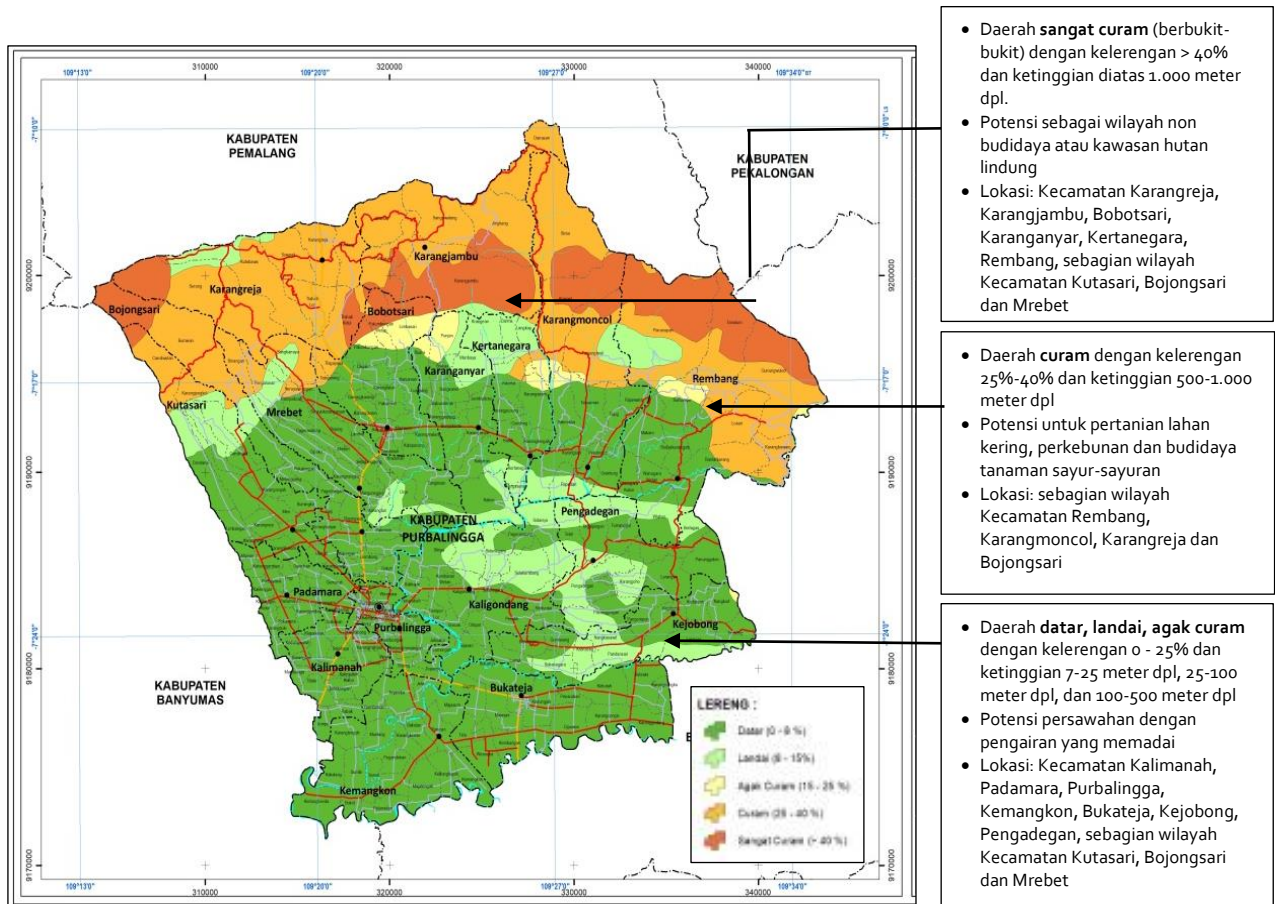


Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 1. Peta Administratif Kabupaten Purbalingga

2.1.1.2 Kondisi Morfologi dan Topografi

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwarter dengan karakteristik morfologi pada ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Karakteristik kelerengan dan ketinggian wilayah di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

2.1.1.3 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Kabupaten Purbalingga memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan. Persebaran jenis tanah dan karakteristiknya di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel II.1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

Kelas	Jenis Tanah	Karakteristik	Lokasi
I	Alluvial , tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat peka terhadap erosi Berwarna kelabu, coklat, dan hitam. Merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar 	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
II	Latosol	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat sedang/agak peka terhadap erosi Berwarna merah kuning dan coklat tua 	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari,

Kelas	Jenis Tanah	Karakteristik	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> Berbentuk dari bahan induk vulkanik, berasosiasi dengan negosol coklat 	Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karangmoncol, Rembang
IV	Grumosol, Podsolik.	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat sangat tinggi/peka terhadap erosi Berwarna coklat atau hitam kelabu Berbentuk dari endapan liat, batuan bekuan dan intermedior Dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan. 	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
V	Regosol	<ul style="list-style-type: none"> Bersifat amat sangat tinggi/sangat peka terhadap erosi Berbentuk dari batuan endapan dan bekuan Kurang baik untuk pertanian 	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

2.1.1.4 Kondisi Klimatologi dan Hidrologi

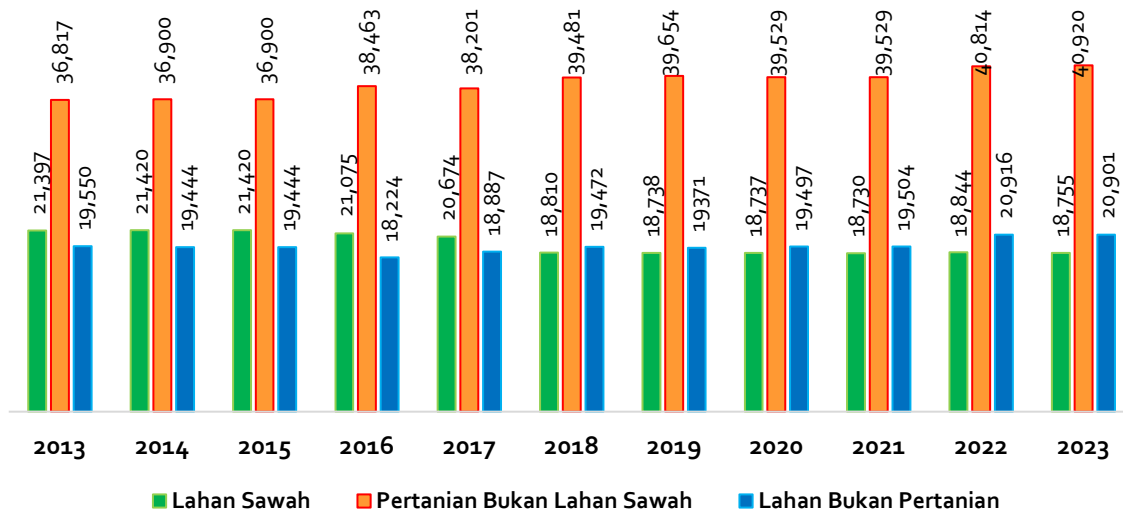
Tipe iklim di Kabupaten Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti. Sebagian wilayah Kabupaten Purbalingga terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata jumlah curah hujan pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.928,67 mm dan suhu udara berkisar antara 22°C - 33°C.

Dilihat dari kondisi hidrologinya, terdapat dua Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu sub DAS Klawing dan sub DAS Serayu Tengah. Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja.

Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing. Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu: Sungai Ponggawa, Sungai Tungtung Gunung, Sungai Gemuruh, Sungai Laban, Sungai Kajar, Sungai Kuning, Sungai Lembereng, Sungai Wotan, Sungai Tlahap, Sungai Gintung, Sungai Soso, Sungai Tambra, Sungai Lebak, dan Sungai Muli. Debit air sungai itu sendiri dalam setahun tidak tetap, karena debit air sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu.

2.1.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga sebagian besar masih didominasi oleh lahan pertanian baik yang berupa lahan sawah maupun bukan lahan sawah. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kenaikan pada lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian, sementara lahan sawah semakin menurun luasannya, seperti dapat dilihat dalam Gambar 2.3.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 3. Perkembangan Luasan Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2023

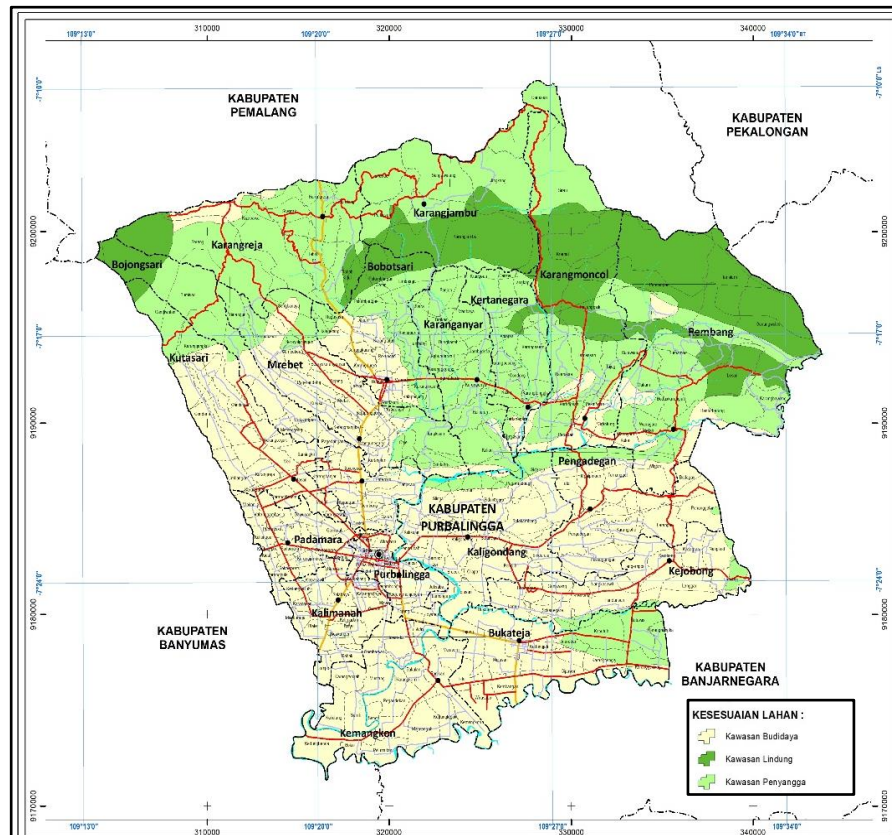
Dalam kurun waktu 10 tahun (2013 s.d 2023), lahan sawah mengalami penurunan secara luasan sebesar 14,09%. Kondisi eksisting di lapangan yang terjadi yaitu ada beberapa lahan sawah yang telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan. Sementara itu, luasan lahan bukan sawah selama 10 tahun terakhir mengalami kenaikan khususnya pada penggunaan lahan untuk kebun campur maupun tegalan. Secara proporsi, tegalan mempunyai luasan yang lebih besar. Tegalan tersebut digunakan untuk tanaman sayuran maupun buah-buahan.

Penggunaan lahan bukan pertanian selama 10 tahun terakhir juga mengalami kenaikan yang sebagian besar merupakan kawasan terbangun baik itu untuk perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan. Disamping itu, juga ada penggunaan lahan berupa hutan lindung yang berada pada wilayah utara Kabupaten Purbalingga.

Didasarkan pada kondisi topografi, klimatologi dan jenis tanah yang telah dijelaskan di atas, kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga dapat dikategorikan menjadi kawasan lindung, kawasan penyangga dan kawasan budidaya. Peta kesesuaian lahan di Kabupaten Purbalingga disajikan dalam Gambar 2.4.

Untuk kawasan lindung yang ada di Kabupaten Purbalingga, berupa kawasan hutan lindung yang secara lokasi berada pada kelerengan > 40% dan memiliki registrasi sebagai hutan lindung dengan luasan 10.385 Ha berdasarkan SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004. Kawasan hutan lindung merupakan wilayah konservasi yang tidak diperbolehkan untuk menjadi kawasan terbangun. Hal tersebut juga dikarenakan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan bencana gerakan tanah karena terdapat

zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

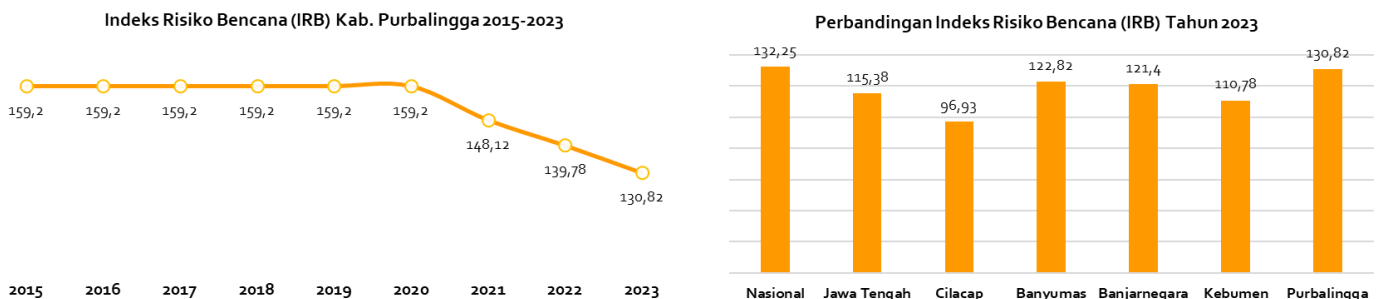
Gambar 2. 4. Peta Kesesuaian Lahan di Kabupaten Purbalingga

Selain kawasan lindung, terdapat juga terdapat kawasan penyangga yang berupa kawasan resapan air yang berada di lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Utara dengan struktur tanah yang mampu meresapkan air hujan dan mempunyai vegetasi yang mendukung penyimpanan air tanah. Disamping kawasan resapan, terdapat juga terdapat kawasan sempadan sungai dan sempadan mata air yang merupakan kawasan di sekeliling sungai dan mata air untuk mempertahankan kelestarian fungsi utama air, kawasan ruang terbuka hijau baik berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, serta kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga. Kawasan penyangga yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut menjadi kawasan yang menopang keberadaan kawasan lindung untuk menjaga lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Di samping, area kawasan penyangga juga merupakan kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet dengan ancaman bahaya erupsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menjadi pertimbangan khusus untuk menjadikannya sebagai kawasan terbangun.

Kemudian kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga juga menjadi kawasan budidaya yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Hal ini dikarenakan secara teknis kawasan tersebut mempunyai daya dukung yang sesuai dan bebas dari bencana alam. Penggunaan lahan eksisting saat ini diarahkan pada zonasi pemanfaatan ruang yang utamanya untuk kegiatan budidaya baik untuk pertanian, industri, maupun permukiman. Kawasan pertanian yang berupa lahan basah terdiri dari lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang dipertahankan luasannya karena menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pembangunan yang bersifat non pertanian baik untuk permukiman maupun industri diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur.

2.1.1.6 Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Purbalingga memperoleh skor 130,82 yang menunjukkan kategori risiko bencana sedang. Kategori risiko bencana Kabupaten Purbalingga menempati peringkat 8 di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana dengan ancaman bencana antara lain: tanah longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara beberapa kabupaten sekitar yang ada di kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas.



Sumber : BNPB, 2016-2024

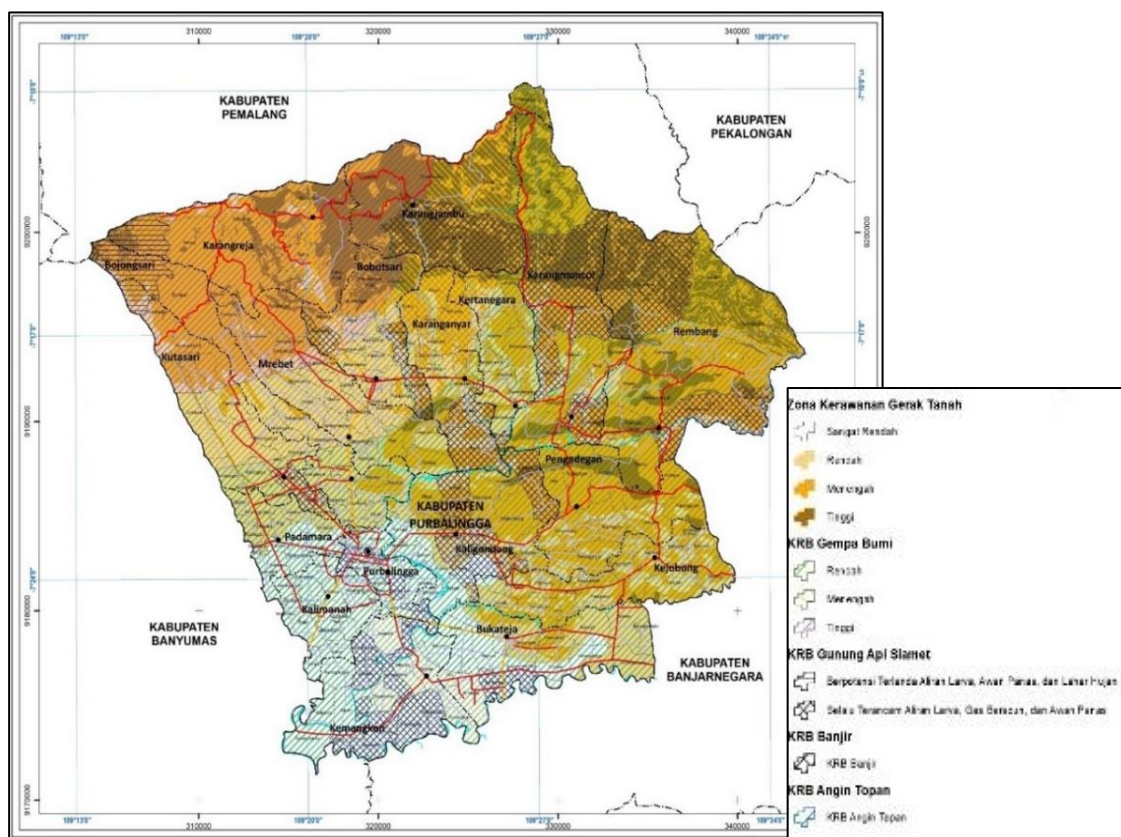
Gambar 2. 5. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2023

Kerawanan bencana yang ada di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. KRB tersebut perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada. Permukiman dan sarana prasarana yang sudah terbangun pada zona risiko bencana tinggi dapat dilakukan rekayasa geoteknik untuk mengurangi tingkat kerentanan. KRB di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Kawasan rawan bencana gerakan tanah
- Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet

- Kawasan rawan bencana angin topan
- Kawasan rawan bencana banjir

KRB gerakan tanah/longsor, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah (kelerengan 30 – 50 %) dan zona tingkat kerentanan tinggi (kelerengan 50 - 70 % dan > 70 %). Kondisi lereng tersebut mempunyai potensi dan kecenderungan untuk bergerak karena berada pada zona risiko gerakan tanah menengah dan tinggi dengan jarak yang cukup dekat pada struktur geologi sesar mendatar kiri dan lipatan sinklin. Beberapa wilayah yang termasuk dalam KRB gerakan tanah/longsor diantaranya adalah desa-desa di Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Bobotsari, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Kutasari, Bojongsari dan Mrebet seperti dapat dilihat dalam Gambar 2.6.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 6. Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Selain KRB gerakan tanah/longsor, terdapat juga KRB letusan Gunung Api Slamet. Pada dasarnya areal Gunung Api Slamet berada dalam beberapa wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal dan Purbalingga. Sebagian kawasan puncak hingga kaki Gunung Api Slamet berada dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. Gunung Slamet termasuk dalam fisiografi Gunung Api Kuarter dan Gunung Api Slamet, yang merupakan gunung api yang masih aktif.

Beberapa wilayah yang termasuk dalam KRB Gunung Api Slamet di Kabupaten Purbalingga yaitu: desa - desa di Kecamatan Karangreja, Bojongsari dan Kutasari.

KRB lain yaitu angin topan dan banjir yang meliputi sebagian Kecamatan Kemangkon, sebagian Kecamatan Bukateja, sebagian Kecamatan Kaligondang, sebagian Kecamatan Purbalingga, sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bobotsari, sebagian Kecamatan Karanganyar, sebagian Kecamatan Karangmoncol, sebagian Kecamatan Rembang, sebagian Kecamatan Karangjambu, dan sebagian Kecamatan Kertanegara.

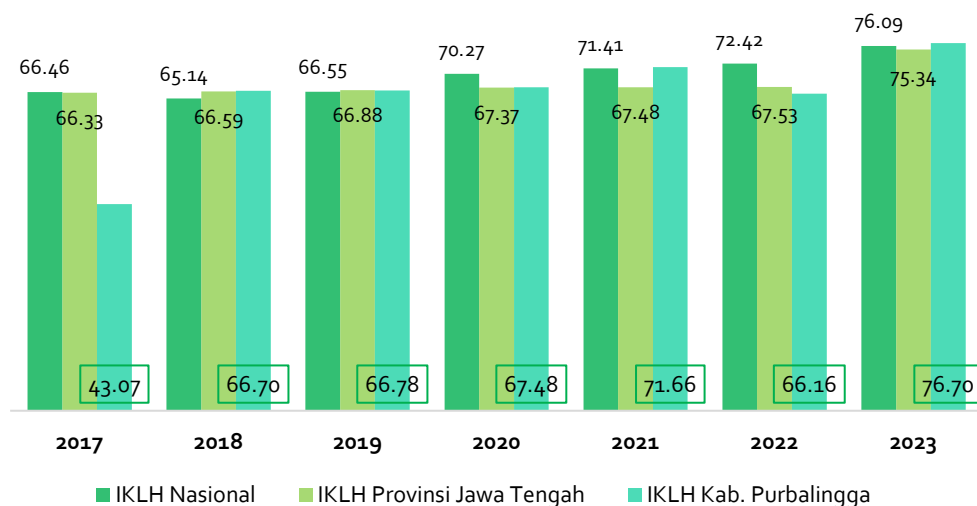
2.1.1.7 Kondisi Lingkungan

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk menilai daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga, salah satunya dapat dilihat pada hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pengukuran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan metode yang cukup signifikan. Tahun 2013 hingga 2015, menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup. Penilaian SPM tersebut meliputi: Pelayanan perlindungan sumber air; Pelayanan pencegahan pencemaran air; Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air; Pelayanan pencegahan pencemaran udara; Pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah dan Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dengan keseluruhan kinerjanya mencapai 100%.

Mulai 2016 hingga saat ini, perhitungan IKLH yang digunakan adalah perhitungan yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun indikator kinerja untuk Kabupaten/Kota meliputi: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas tutupan Lahan. Proporsi pembobotannya terdiri dari 30% IKA, 30% IKU dan 40% IKTL.

IKLH di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 7 tahun termasuk fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 IKLH berada pada nilai 43,07 kemudian meningkat signifikan sampai dengan tahun 2021 sebesar 71,66. Namun kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 66,16 dan kembali naik di tahun 2023 menjadi 66,88 dengan kategori sedang. Terdapat perubahan perhitungan IKLH untuk tahun 2023 karena perbedaan metode perhitungan IKA, IKU, dan IKL, sehingga hasil konversi nilai IKLH tahun 2023 menjadi 76,7. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai IKLH Jawa Tengah dan Nasional. Konversi nilai IKLH tersebut akan diberlakukan selanjutnya untuk tahun 2025 sebagai baseline RPJPD. Perbandingan nilai IKLH disajikan dalam Gambar 2.7.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2018-2024

Gambar 2. 7. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2017– 2023

Berdasarkan nilai konversi tahun 2023, secara komposit IKLH, nilai kualitas air berada pada angka 76,09 dengan kategori mutu air baik (70-90). Namun masih terdapat pencemaran air yang terjadi khususnya pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia). Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa parameter pencemaran yang melebihi baku mutu pada sungai walaupun dengan status cemar ringan.

Sedangkan pada kualitas udara berada pada angka 86,05 dengan kategori baik (70-90). Tingkat kualitas udara tersebut tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Sementara itu kualitas tutupan lahan yang merupakan tutupan vegetasi luasan hutan, semak belukar dan perkebunan, mengalami kenaikan menjadi 60,46. Nilai IKTL tersebut berada pada kategori sedang (50-70).

Tabel II.2. Indeks Komponen IKLH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2023

No.	Komponen IKLH	Satuan	Tahun							
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
									(Rumus Lama)	(Konversi Rumus Baru)
1	Indek Kualitas Air (IKA)	%	30	68	46,67	43,33	54,4	55,83	56,67	76,09
2	Indek Kualitas Udara (IKU)	%	62,5	82,15	88,76	90,49	86,44	89,29	88,7	86,05
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	%	40	54,15	65,38	68,34	73,94	41,13	44,04	60,46
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	43,07	66,7	66,78	67,48	71,66	66,16	66,88	76,7

Sumber: DLH Kab. Purbalingga dan DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2018-2024

B. Daya Dukung Air

Berdasarkan analisis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, kondisi daya dukung air di Kabupaten Purbalingga saat ini masih dapat dikatakan surplus, artinya ketersediaan air yang ada mampu mencukupi kebutuhan. Ketersediaan air di Kabupaten Purbalingga mencapai 1.140.554.230,65 m³/tahun dan kebutuhannya 837.988.367,46 m³/tahun, sehingga terjadi surplus air mencapai 302.565.863,19 m³/tahun. Apabila dilihat berdasarkan tingkat terlampaunya, maka terdapat 29,92% wilayah yang daya dukung airnya sudah terlampaui dan sisanya sebesar 70,08% wilayah Kabupaten Purbalingga statusnya belum terlampaui.

Tabel II.3. Daya Dukung Air di Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	Bobotsari	60.524.535,41	42.724.610,03	17.799.925,37	64,69	35,31
2	Bojongsari	81.263.743,95	46.824.186,25	34.439.557,70	70,40	29,60
3	Bukateja	62.662.447,01	73.700.583,06	-11.038.136,05	35,51	64,49
4	Kaligondang	69.865.674,05	65.119.258,83	4.746.415,22	70,62	29,38
5	Kalimanah	39.857.521,05	40.975.948,63	-1.118.427,58	31,65	68,35
6	Karanganyar	53.983.925,19	52.789.623,47	1.194.301,72	45,83	54,17
7	Karangjambu	72.644.599,85	32.943.875,40	39.700.724,45	91,56	8,44
8	Karangmoncol	107.610.947,52	71.077.334,35	36.533.613,17	69,36	30,64
9	Karangreja	76.717.736,45	26.791.152,56	49.926.583,89	98,39	1,61
10	Kejombang	38.111.021,93	32.923.729,54	5.187.292,39	92,71	7,29
11	Kemangkong	72.651.180,12	69.235.515,38	3.415.664,74	43,92	56,08
12	Kertanegara	35.371.035,46	33.545.844,46	1.825.191,00	52,13	47,87
13	Kutasari	66.959.338,89	42.045.613,71	24.913.725,18	73,45	26,55
14	Mrebet	69.044.598,03	55.135.688,99	13.908.909,04	64,35	35,65
15	Padamara	30.436.461,10	33.165.747,88	-2.729.286,78	23,84	76,16
16	Pengadegan	39.902.205,59	34.902.922,07	4.999.283,51	95,01	4,99
17	Purbalingga	18.355.516,18	15.863.262,22	2.492.253,96	54,48	45,52
18	Rembang	144.591.742,87	68.223.470,61	76.368.272,27	87,10	12,90
Total		1.140.554.230,65	837.988.367,46	302.565.863,19	70,08	29,92

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Purbalingga 2025-2045

Hasil perhitungan kebutuhan air untuk penetapan daya dukung daya tampung air dalam KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan. Perhitungan ketersediaan dilakukan melalui sistem grid yang mampu merepresentasikan daya dukung dan daya tampung air dalam bentuk spasial dengan mempertimbangkan kecenderungan jasa lingkungan pengatur air. Kemudian dilakukan identifikasi status

daya dukung dan daya tampung air tiap grid dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid. Kondisi status daya dukung daya tampung air terlampaui merupakan kondisi yang mana kebutuhan lebih tinggi jika dibandingkan ketersediaannya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai negatif (-), begitu sebaliknya.

Hasil perhitungan kecenderungan jasa lingkungan pengatur air menunjukkan penurunan 0,23% per tahun atau 5,31% hingga tahun 2045. Sehingga, proyeksi ketersediaan air pada tahun 2045 mengalami penurunan. Proyeksi daya dukung air dihitung berdasarkan ketersediaan air permukaan. Pada ketersediaan air permukaan, terjadi peningkatan ketersediaan dari tahun 2022 mencapai 1.140.554.230,65 m³/tahun diproyeksikan menjadi 1.097.957.552,54 m³/tahun pada tahun 2045. Dengan proyeksi kebutuhan air pada tahun 2045 mencapai 606.966.303,80 m³/tahun, maka status daya dukung air permukaan Kabupaten Purbalingga total pada tahun 2045 belum terlampaui/surplus sebesar 472.991.248,74 m³/tahun.

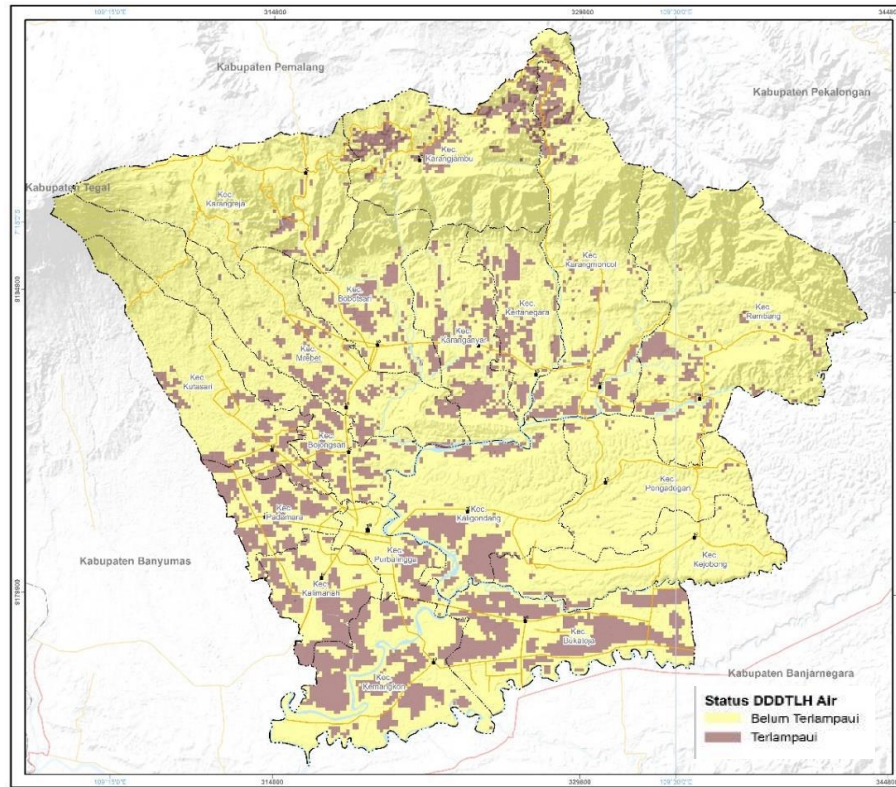
Tabel II.4. Proyeksi Daya Dukung Air di Kabupaten Purbalingga Tahun 2045

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air (m ³)	Selisih (m ³)	Status	Luas (%)	
						Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Kemangkon	67.807.465,18	48.681.846,31	19.125.618,87	Belum Terlampaui	65,39%	34,61%
2	Bukateja	57.497.781,86	52.196.160,90	5.301.620,96	Belum Terlampaui	58,64%	41,36%
3	Kejobong	33.266.168,04	23.022.730,10	10.243.437,94	Belum Terlampaui	95,25%	4,75%
4	Kaligondang	62.965.671,08	45.436.438,23	17.529.232,85	Belum Terlampaui	81,58%	18,42%
5	Purbalingga	16.067.875,38	10.346.808,18	5.721.067,20	Belum Terlampaui	77,99%	22,01%
6	Kalimanah	34.855.693,01	28.688.093,76	6.167.599,25	Belum Terlampaui	59,07%	40,93%
7	Kutasari	62.917.663,33	33.251.940,92	29.665.722,41	Belum Terlampaui	83,79%	16,21%
8	Mrebet	63.213.068,66	39.214.510,66	23.998.558,00	Belum Terlampaui	83,90%	16,10%
9	Bobotsari	59.414.948,77	29.209.741,28	30.205.207,49	Belum Terlampaui	84,44%	15,56%
10	Karangreja	78.896.902,93	25.862.469,81	53.034.433,12	Belum Terlampaui	96,15%	3,85%
11	Karanganyar	48.895.305,00	33.999.455,12	14.895.849,88	Belum Terlampaui	76,27%	23,73%
12	Karangmoncol	104.778.281,98	46.105.787,54	58.672.494,44	Belum Terlampaui	86,36%	13,64%
13	Rembang	139.648.303,74	54.738.096,91	84.910.206,83	Belum Terlampaui	93,64%	6,36%
14	Bojongsari	76.973.283,75	32.953.760,66	44.019.523,08	Belum Terlampaui	85,43%	14,57%
15	Padamara	26.159.372,20	22.421.792,97	3.737.579,23	Belum Terlampaui	57,92%	42,08%
16	Pengadegan	35.138.268,96	25.039.635,01	10.098.633,96	Belum Terlampaui	98,10%	1,90%
17	Karangjambu	78.823.305,98	32.574.601,28	46.248.704,70	Belum Terlampaui	84,05%	15,95%
18	Kertanegara	32.638.192,68	23.222.434,16	9.415.758,52	Belum Terlampaui	74,37%	25,63%
Jumlah		1.079.957.552,54	606.966.303,80	472.991.248,74	Belum Terlampaui	82,73%	17,27%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2045

Berdasarkan sebaran spasial terhadap proyeksi daya dukung air maka 82,73% wilayah di Kabupaten Purbalingga dalam status belum terlampaui dan hanya sekitar 17,27% wilayah dalam status terlampaui yang mana relatif besar berada di Kecamatan Bukateja, Kalimanah, dan Padamara. Kondisi status belum terlampaui tersebut

menunjukkan bahwa surplus air di Kabupaten Purbalingga pada masa yang akan datang akan mencapai 606,9 juta m³ dengan daya dukung air permukaan 1,779 dan daya dukung air permukaan artinya ketersediaannya masih mencukupi untuk kebutuhan baik untuk penduduk (sosial), pertanian dan industri.



Sumber : KLHS RPJPD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2045

Gambar 2. 8. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Purbalingga Tahun 2045

C. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan analisis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, pada dasarnya kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Purbalingga masih dalam kondisi surplus mengingat Kabupaten Purbalingga masih mempunyai potensi sawah yang luas. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Purbalingga sebesar 96.896,10 ton/tahun, dan kebutuhannya 76.895,94 ton/tahun sehingga masih surplus sebesar 20.000,16 ton/tahun. Apabila dilihat berdasarkan persentasenya, maka terdapat 79,11% lahan yang belum terlampaui daya dukung pangannya dan 20,89% sudah terlampaui.

Tabel II.5. Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Ketersediaan (Ton/tahun)	Kebutuhan (Ton/tahun)	Selisih (Ton/tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui(%)
1.	Bobotsari	5.025,66	4.106,74	918,92	77,10%	22,90%
2.	Bojongsari	6.289,79	5.140,06	1.149,73	74,61%	25,39%
3.	Bukateja	6.132,87	7.617,20	-1.484,33	59,85%	40,15%
4.	Kaligondang	6.583,90	5.039,32	1.544,58	79,99%	20,01%

No.	Kecamatan	Ketersediaan (Ton/tahun)	Kebutuhan (Ton/tahun)	Selisih (Ton/tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui(%)
5.	Kalimanah	3.576,54	3.982,52	-405,97	58,38%	41,62%
6.	Karanganyar	4.795,65	3.197,81	1.597,83	84,55%	15,45%
7.	Karangjambu	6.057,10	2.811,61	3.245,49	94,91%	5,09%
8.	Karangmoncol	8.421,37	4.549,80	3.871,57	91,28%	8,72%
9.	Karangreja	6.270,21	3.154,01	3.116,20	91,37%	8,63%
10.	Kejobong	3.772,33	3.370,15	402,18	78,97%	21,03%
11.	Kemangkon	6.469,19	8.105,08	-1.635,90	55,58%	44,42%
12.	Kertanegara	3.112,25	2.281,41	830,84	81,91%	18,09%
13.	Kutasari	5.540,53	4.837,24	703,29	71,07%	28,93%
14.	Mrebet	5.994,42	5.219,15	775,27	71,86%	28,14%
15.	Padamara	2.769,91	2.613,18	156,72	66,09%	33,91%
16.	Pengadegan	3.980,63	2.633,70	1.346,93	87,35%	12,65%
17.	Purbalingga	1.576,53	1.576,53	-1.147,10	39,37%	60,63%
18.	Rembang	10.527,21	10.527,21	5.013,91	89,89%	10,11%
	Total	96.896,10	76.895,94	20.000,16	79,11%	20,89%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Purbalingga 2025-2045

Perhitungan proyeksi daya dukung pangan didasarkan pada proyeksi luas lahan pertanian pangan pada rencana pola ruang Kabupaten Purbalingga yang dispasialkan melalui sistem grid. Sementara itu untuk perhitungan kebutuhan pangan untuk penetapan daya dukung pangan menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dari sektor rumah tangga dengan berbasis jumlah penduduk. Secara keseluruhan berdasarkan proyeksi daya dukung pangan Kabupaten Purbalingga tahun 2045 maka kondisinya masih surplus sebesar 1.237,43 ton/tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Purbalingga lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Dengan rincian ketersediaan pangan sebesar 91.296,10 ton/tahun dan kebutuhan pangan di Kabupaten Purbalingga mencapai 90.058,66 ton/tahun.

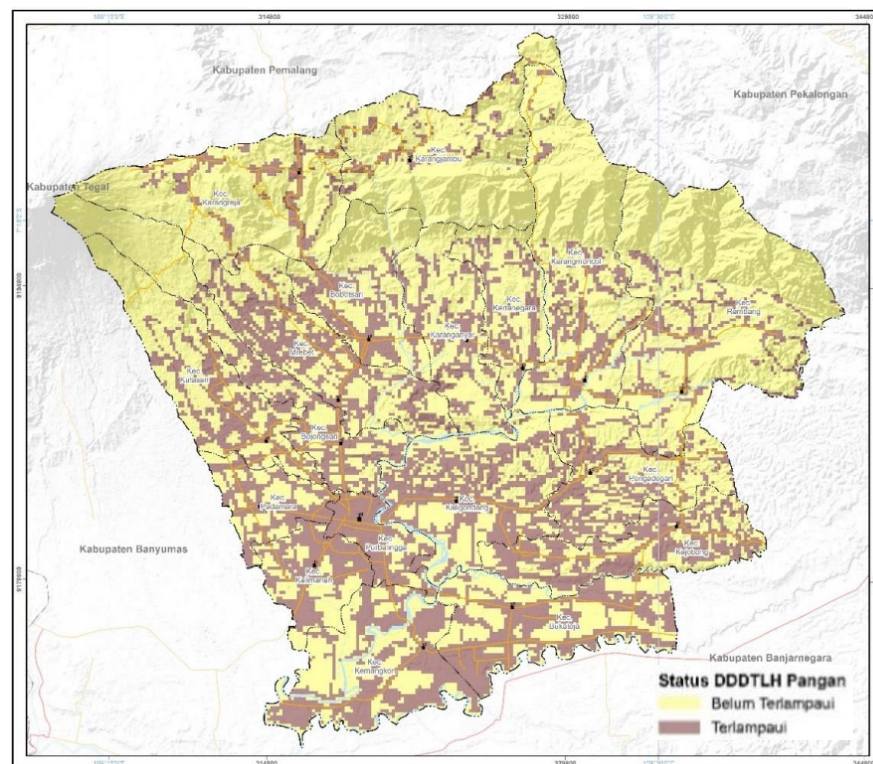
Tabel II.6. Proyeksi Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2045

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (ton)	Kebutuhan (ton)	Selisih (ton)	Status	Luas (%)	
						Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Kemangkon	6.266,21	8.026,39	-1.760,18	Terlampaui	50,49%	49,51%
2	Bukateja	5.792,62	8.167,95	-2.375,33	Terlampaui	48,84%	51,16%
3	Kejobong	3.229,44	5.657,55	-2.428,11	Terlampaui	41,93%	58,07%
4	Kaligondang	5.889,62	7.559,08	-1.669,46	Terlampaui	50,44%	49,56%
5	Purbalingga	1.452,18	3.198,29	-1.746,11	Terlampaui	22,39%	77,61%
6	Kalimanah	3.307,27	5.008,79	-1.701,51	Terlampaui	40,46%	59,54%
7	Kutasari	5.498,66	5.209,73	288,93	Belum Terlampaui	63,57%	36,43%
8	Mrebet	5.554,58	6.438,89	-884,31	Belum Terlampaui	52,78%	47,22%
9	Bobotsari	4.742,52	4.316,03	426,49	Belum Terlampaui	68,18%	31,82%

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (ton)	Kebutuhan (ton)	Selisih (ton)	Status	Luas (%)	
						Belum Terlampaui	Terlampaui
10	Karangreja	6.440,50	3.893,13	2.547,37	Belum Terlampaui	82,23%	17,77%
11	Karanganyar	4.209,02	3.857,07	351,94	Belum Terlampaui	66,30%	33,70%
12	Karangmoncol	7.833,86	5.254,01	2.579,85	Belum Terlampaui	78,02%	21,98%
13	Rembang	10.272,73	4.925,14	5.347,59	Belum Terlampaui	85,27%	14,73%
14	Bojongsari	6.154,20	5.473,44	680,76	Belum Terlampaui	69,02%	30,98%
15	Padamara	2.501,78	3.565,46	-1.063,68	Terlampaui	43,96%	56,04%
16	Pengadegan	3.303,87	4.231,77	-927,91	Terlampaui	55,15%	44,85%
17	Karangjambu	6.039,16	2.658,04	3.381,12	Belum Terlampaui	88,89%	11,11%
18	Kertanegara	2.807,90	2.617,89	190,01	Belum Terlampaui	64,41%	35,59%
Jumlah		91.296,10	90.058,66	1.237,44	Belum Terlampaui	65,21%	34,79%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2045

Namun apabila dilihat pada setiap kecamatannya, terdapat 9 kecamatan mengalami defisit pangan pokok yaitu Kecamatan Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Kejobong, Kemangkon, Mrebet, Pengadegan dan Purbalingga.



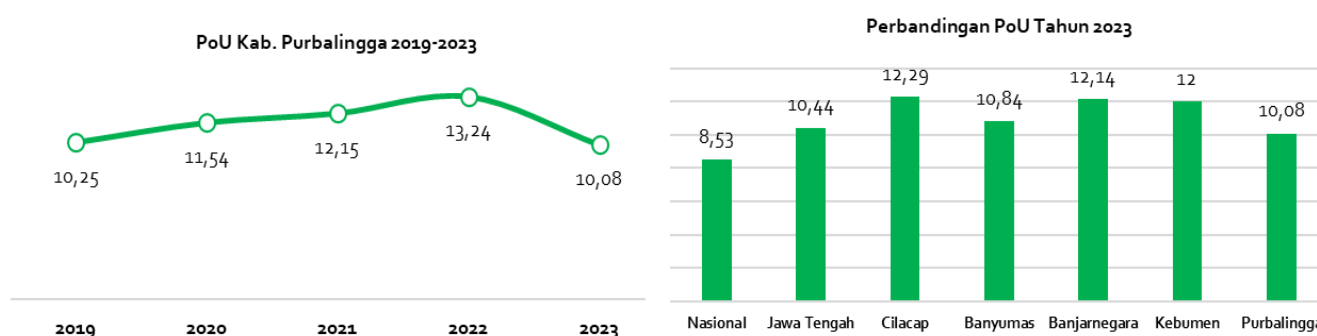
Sumber : KLHS RPJPD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2045

Gambar 2. 9. Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2045

Untuk menilai ketidakcukupan konsumsi pangan, salah satu indikator yang digunakan yaitu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment/PoU*). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi

pangan menunjukkan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kondisi di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa sekitar 10,44 % total penduduk Provinsi Jawa Tengah mengkonsumsi kalori di bawah kebutuhan kalori minimum untuk hidup sehat dan aktif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan PoU menurun sampai dengan -2,3 %.

Kecukupan pangan di Purbalingga mengalami perubahan yang fluktuatif. Tahapan tahun 2019 s.d. 2022 mengalami kenaikan dari 10,25 menjadi 13,34. Pertumbuhan PoU dalam 5 tahun tersebut yaitu sebesar 0,75 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 10,08 % penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Dibanding dengan kabupaten lainnya, angka PoU di Kabupaten Purbalingga tersebut masih lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, namun masih jauh dari angka nasional.



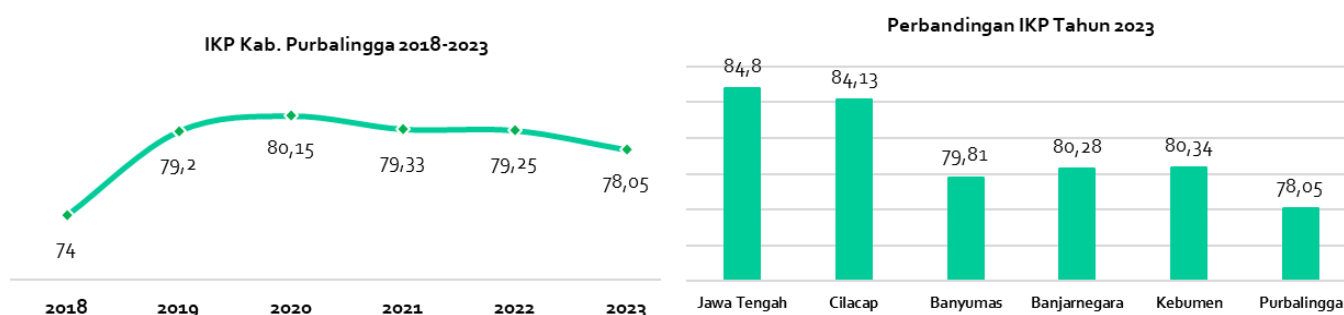
Sumber: Bapanas, 2020 – 2024

Gambar 2. 10. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

Apabila dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP), maka IKP Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai IKP Kabupaten Purbalingga berada pada angka 74, naik menjadi menjadi 80,15 pada tahun 2020, namun kemudian di tahun 2021 terus menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi 78,05. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IKP Kabupaten Purbalingga paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen.

Dilihat dari komposisinya, terjadi penurunan dimensi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada dimensi ketersediaan dan keterjangkauan, sedangkan pada dimensi pemanfaatan terjadi kenaikan.

Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor ketersediaan pangan yang berupa masih rendahnya rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stok beras pemerintah daerah, serta faktor keterjangkauan pangan yang berupa masih banyaknya penduduk di bawah garis kemiskinan, rendahnya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran dan kurangnya akses listrik. Pada faktor pemanfaatan terdapat kenaikan pada rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan dan angka harapan hidup pada saat lahir serta penurunan pada persentase rumah tangga tanpa akses air bersih dan persentase balita stunting.



Sumber: Bapanas, 2019 – 2024

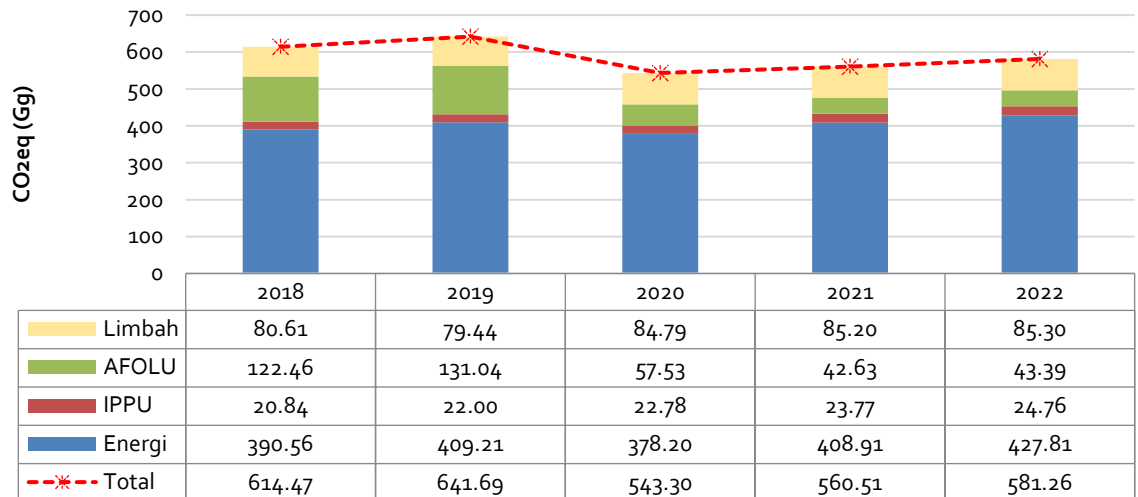
Gambar 2. 11. IKP Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

D. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan kelompok gas dari hasil aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, penggunaan pupuk pertanian, dan lain sebagainya yang berdampak pada pemanasan global dan krisis iklim. Untuk mengukur emisi, ada dua metode yaitu dengan aplikasi SIGNSMART dan dengan aplikasi AKSARA.

SIGNSMART (Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional-Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan) bertujuan mengukur emisi GRK secara nasional dan daerah dengan basis elektronik dan teknologi informasi, berfungsi untuk monitoring, pelaporan, dan verifikasi data estimasi emisi GRK. Aplikasi ini menampilkan data emisi GRK dari berbagai sektor, termasuk kehutanan, pertanian, industri, energi, limbah, dan penggunaan lahan. Inisiatif dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Berdasarkan aplikasi SIGNSMART, besaran emisi gas rumah kaca Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 581,26 Gg CO₂eq dan mengalami peningkatan emisi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan emisi sebesar 560,61 Gg CO₂eq.

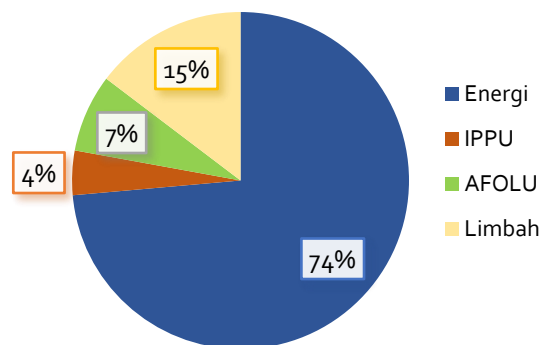


Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2024

Gambar 2. 12. Emisi dan Serapan GRK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022

Dalam kurun waktu 2018-2022, terjadi tren penurunan emisi sebesar **33,21 Gg CO₂eq atau 6%**. Jika dilihat di masing-masing sektor, maka untuk sektor pengadaan dan penggunaan energi meningkat 9%, IPPU 16%, dan sektor limbah 5%. Emisi tahun 2019 merupakan emisi tertinggi selama tahun 2018-2022, dan kontribusi terendah berada di tahun 2017. Adanya perubahan naik atau turunnya emisi di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (1) Penurunan emisi tahun 2020 di sektor energi, (2) Peningkatan emisi dari sektor IPPU, (3) Peningkatan di sektor AFOLU, (4) Peningkatan emisi di sektor pengelolaan limbah.

Emisi dan serapan GRK Kabupaten Purbalingga tahun 2022 didominasi oleh sektor energi sebesar 74% atau setara dengan 427,81 Gg CO₂eq. Emisi tersebut bersumber dari kegiatan transportasi, industri manufaktur dan residential. Kemudian diikuti oleh sektor limbah 15% atau 85,30 Gg CO₂eq (emisi terbesar dari limbah cair domestik dan industri), sektor AFOLU 7% atau 43,39 Gg CO₂eq (emisi terbesar dari peternakan dan pertanian) dan sektor IPPU 4% atau 24,76%. Kontribusi emisi GRK untuk masing-masing sektor mempunyai proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang ada di Kabupaten Purbalingga. Berikut ini merupakan diagram proporsi sumber emisi berdasarkan sektornya.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2024

Gambar 2. 13. Proporsi Sumber Emisi GRK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

AKSARA (Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) merupakan wadah/ platform perekaman aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi. AKSARA bertujuan sebagai bagian dari inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk mengurangi emisi GRK sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. AKSARA berfokus pada penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta berperan memantau dan merencanakan aksi nasional rendah karbon. Inisiatif berasal dari Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan perhitungan dari laporan aksi mitigasi penurunan emisi GRK pada aplikasi AKSARA, total aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga sebanyak 19 kegiatan dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebanyak 448.568,91 ton CO₂eq. Potensi penurunan emisi kumulatif ini memberikan kontribusi sebesar 3,63 % pada capaian Provinsi Jawa Tengah.

Pengukuran potensi penurunan emisi kumulatif ini menggunakan aplikasi AKSARA yang mulai diinput sejak tahun 2021 dengan melaporkan aksi mitigasi sejak tahun 2018. Dari hasil aksi mitigasi yang dilaporkan, ada kecenderungan yang berubah dari banyaknya kontribusi sektor-sektor terkait. Pada tahun 2019, sektor transportasi memberikan kontribusi paling banyak dalam upaya penurunan emisi yaitu sebanyak 5.894,00 tonCO₂eq, yaitu dari kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Kontribusi terbanyak kedua diduduki oleh sektor hutan dan lahan sebesar 2.880,36 tonCO₂eq ditopang dari kegiatan pembangunan dan pengembangan taman tematik serta penanaman tanaman hijau. Selain itu didukung sektor energi senilai 66,86 tonCO₂eq yang berasal dari pembangunan biogas ternak sapi.

Sementara setahun kemudian, yaitu di tahun 2020, penurunan emisi 100% ditopang sektor transportasi sebesar 3.620,00 tonCO₂eq melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Namun demikian, di tahun 2023,

justro sektor pertanian 100% berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 436.050,66 tonCO₂eq. Adapun kegiatan pertanian yang memberikan kontribusi pada potensi penurunan emisi kumulatif antara lain kegiatan pertanian cerdas iklim dan *Scaling Up Climate Smart Agriculture (CSA)* SIMURP berupa pemupukan berimbang, irigasi intermittent, dan Penggunaan Pupuk Organik. Selain itu, ada juga kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati serta pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.

E. Persampahan

Kondisi persampahan di Kabupaten Purbalingga dilihat dari jumlah timbulan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan sampah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah timbulan sampah mencapai 464.244 kg/hari, kemudian semakin meningkat mencapai 509.920 kg/hari dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 1.027.333 jiwa dan timbulan sampah 0,5 kg/jiwa.

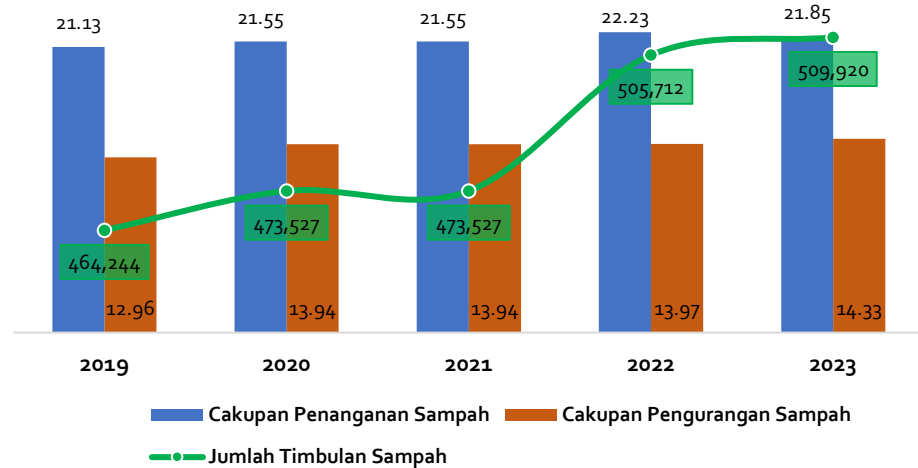
Sementara itu dilihat dari penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga, mekanismenya dimulai dari proses pemilahan sampah organik dengan anorganik, kemudian dikumpulkan dan diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi 2 buah transfer depo yang berada di sekitar GOR Goentoer Darjono dan RTH Kecamatan Bobotsari, serta 22 buah pangkalan kontainer sampah. Saat ini, belum ada TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di Kabupaten Purbalingga. Di dalam Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), Kabupaten Purbalingga direncanakan minimal ada satu TPST di masing-masing area. Kabupaten Purbalingga dibagi dalam 5 area yang tiap area meliputi beberapa kecamatan.

Selain TPS, telah tersedia juga Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS₃R) untuk penanganan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Pada tahun 2022, telah terbangun TPS₃R sebanyak 10 unit yang meliputi: TPS₃R Kalikabong dan TPS₃R Babakan Kec Kalimanah, TPS₃R Jatisaba dan TPS₃R Bancar Kec. Purbalingga, TPS₃R Karangpule Kec. Padamara, TPS₃R Sempor Lor Kec. Kaligondang, TPS₃R Selaganggeng Kec. Mrebet, TPS₃R Bandingan Kec. Kejobong, TPS₃R Kutabawa dan TPS₃R Serang Kec. Karangreja. Kemudian pada tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 7 TPS₃R yang meliputi: TPS₃R Kutasari Kec. Kutasari, TPS₃R Karangaren Kec. Kutasari, TPS₃R Kalapacung Kec. Bobotsari, TPS₃R Karangasem Kec. Kertanegara, TPS₃R Pekiringan, TPS₃R Tunjungmuli dan TPS₃R Grantung Kec. Karangmoncol.

Di TPS₃R Kalikabong, terdapat beberapa alat seperti: mesin pemilah, bangunan biopond dan incenerator, sehingga TPS₃R Kalikabong dapat melakukan pengelolaan sampah sampai selesai (*zero waste*). Fungsi TPS₃R di Kalikabong tersebut menjadi semacam mini TPST. Fungsi TPS₃R di Kalikabong tersebut kemudian direplikasi untuk TPS₃R Bancar dan TPS₃R Babakan agar dapat melakukan pengelolaan *zero waste*.

Sampah yang berasal dari TPS dan dari jalanan perkotaan akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara itu, sampah dari TPS₃R yang berupa sampah residu yang sudah tidak dapat dilakukan proses 3R juga akan diangkut ke TPA. TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu TPA Kalipancur yang berada di Desa Bedagas Kec. Pengadegan dengan luasan zona aktif *landfill* 1 seluas 0,8 Ha dan tersedia calon *landfill* 2 seluas 1,6 Ha. *Landfill* 1 didesain sistem *sanitary landfill*, dengan di bagian bawah dilengkapi dengan lapisan geotekstil dan geomembran, serta saluran lindi. Saluran lindi dibuat agar air lindi tidak meresap ke dalam tanah, tetapi dapat ditampung di Tempat Pengelolaan Air Lindi. Namun dalam prakteknya di TPA Kalipancur, penutupan *landfill* secara berkala dengan lapisan tanah tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya dilema TPA cepat penuh sehingga TPA terkesan seperti *open dumping*.

Dari mekanisme penanganan sampah yang dilakukan di atas, cakupan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan namun dengan nilai dan laju kenaikan yang kecil. Pada tahun 2019 sebesar 21,13% naik menjadi 21,85% di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbunan sampah yg ditangani masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbunan sampah yang ada. Begitu pula dengan cakupan pengurangan sampah di Kabupaten Purbalingga, pengurangan sampah juga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, nilai dan laju kenaikan cakupan pengurangan sampah yang relatif kecil yaitu dari 12,96% di tahun 2019 menjadi 14,33% di tahun 2023.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar 2. 14. Cakupan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019– 2023

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jumlah sampah terolah pada sumber sampah di Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang teridentifikasi yaitu sampah yang terolah di TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok. Jumlah sampah terolah pada fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. TPA
Jumlah TPA di Kabupaten Purbalingga yaitu 1 unit. Jumlah sampah terolah pada TPA Kalipancur yaitu sejumlah 8 ton/hari.
- b. Bank Sampah
Jumlah bank sampah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 72 unit, namun yang aktif hanya 43 unit atau 61,43%. Jumlah sampah terolah pada bank sampah yaitu sejumlah 15,05 ton/hari.
- c. KSM TPS 3R
Jumlah TPS3R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2023 sebanyak 17 unit. TPS3R yang aktif sebanyak 5 TPS3R yaitu TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga; TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah; TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah; TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja; dan TPS3R Desa Kutabawa, Kec. Karangreja. Jumlah sampah terolah pada TPS3R yaitu sejumlah 10 ton/hari.
- d. KSM Pengelola Sampah Mandiri
Jumlah KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2023 sebanyak 14 KSM. Jumlah sampah terolah pada KSM yaitu sejumlah 28 ton/hari.

e. Pengepul Rongsok

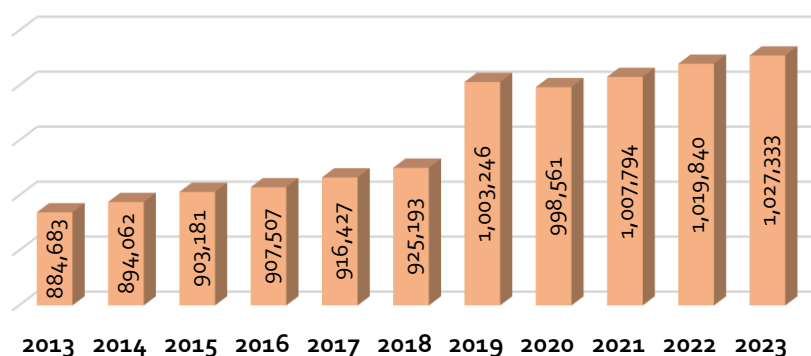
Jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga kurang lebih sebanyak 4 unit pada setiap kecamatan, sehingga estimasi jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 72 unit. Jumlah sampah terolah pada pengepul rongsok yaitu sejumlah 20.016 ton/hari.

Jumlah total sampah terolah pada seluruh fasilitas pengolahan sampah di atas yaitu sebesar 81.066 ton/hari, sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 yaitu 509,92 ton, maka **persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah** yaitu sebesar 15,9 %.

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga mempunyai kenaikan selama 10 tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2022. Data BPS menunjukkan perkembangan yang meningkat pada tahun 2013 sebesar 884.683 jiwa meningkat menjadi 1.027.333 jiwa di tahun 2023. Komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Purbalingga hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 519.734 jiwa (50,58%) sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 507.599 (49,42%). Menurut perhitungan sex ratio, pada tahun 2023 rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Purbalingga berada pada angka 102,39 % yang menunjukkan bahwa tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 102 penduduk laki-laki.

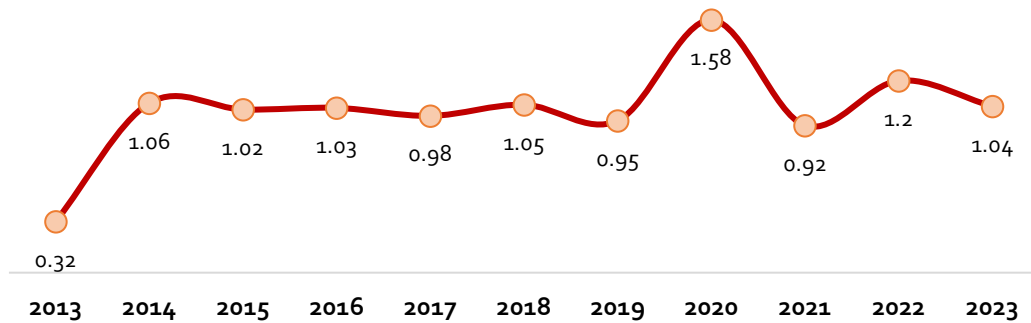


Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 15. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2023

Kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tersebut mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif. Kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 0,32 menjadi 1,06. Kenaikan signifikan juga terjadi lagi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu

dari 0,95 menjadi 1,58. Kemudian laju tersebut turun di tahun 2021 menjadi 0,92 dan kembali naik menjadi 1,2 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 menurun menjadi 1,04. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya angka kelahiran dan kematian. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun tersebut disebabkan angka kelahiran yang tinggi dan menurunnya angka kematian di tahun 2023.



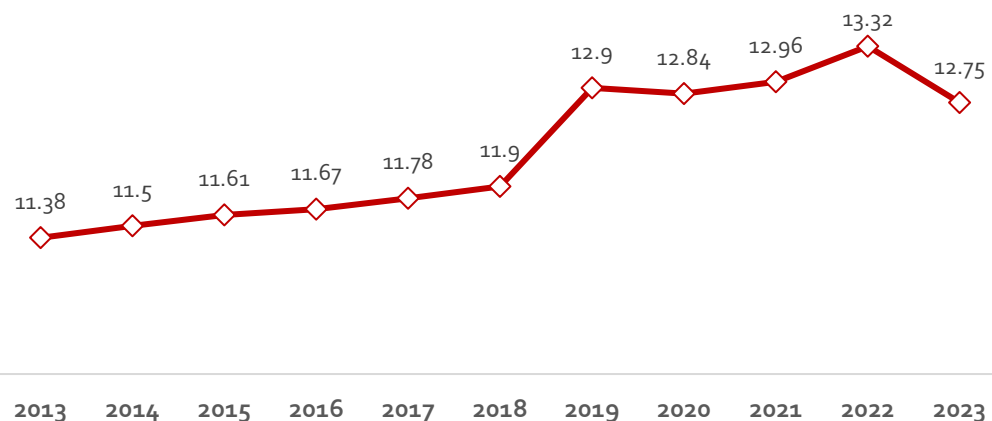
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 16. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

2.1.2.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kenaikan jumlah penduduk dalam kurun waktu 10 tahun sejalan dengan kenaikan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk mengalami kenaikan dengan jumlah penduduk sebesar 11,38 jiwa/ha s.d tahun 2013 dan 12,75 jiwa/ha di tahun 2023. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga termasuk klasifikasi rendah. Hal ini karena menurut SNI-03-1733-2004, kepadatan penduduk <150 jiwa/ha diklasifikasikan rendah.

Berdasarkan distribusi penduduk dalam kecamatan, pada tahun 2022 kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Purbalingga dengan kepadatan 36,45 jiwa/ha yang artinya bahwa dalam setiap hektar luas wilayah di Kecamatan Purbalingga ditempati oleh penduduk sebanyak 36 jiwa. Kepadatan penduduk terendah pada Kecamatan Karangjambu dengan kepadatan 5,93 jiwa/ha.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

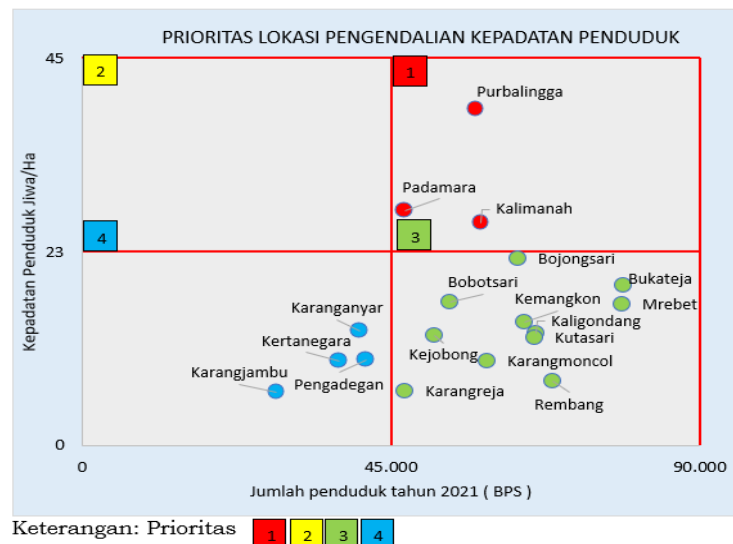
Gambar 2. 17. Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

Tabel II.7. Distribusi Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
1	Kemangkon	66.096	4.846	13,64
2	Bukateja	80.709	4.496	17,95
3	Kejobong	52.507	4.014	13,08
4	Kaligondang	67.556	5.144	13,13
5	Purbalingga	57.071	1.566	36,45
6	Kalimanah	59.203	2.324	25,47
7	Kutasari	67.519	3.781	17,86
8	Mrebet	80.505	5.143	15,65
9	Bobotsari	54.406	3.554	15,31
10	Karangreja	48.171	6.201	7,77
11	Karanganyar	41.206	3.521	11,70
12	Karangmoncol	60.209	7.198	8,37
13	Rembang	69.982	9.879	7,08
14	Bojongsari	64.470	4.499	14,33
15	Padamara	48.169	1.790	26,91
16	Pengadegan	42.095	4.125	10,21
17	Karangjambu	29.040	4.895	5,93
18	Kertanegara	38.419	3.601	10,67
Jumlah		1.027.333	80.576	12,75

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2024

Dilihat dari prioritas wilayahnya, grafik pengendalian kepadatan penduduk berdasarkan distribusi penduduk per kecamatan tersebut dapat digambarkan pada kuadran pertama, ketiga dan keempat.



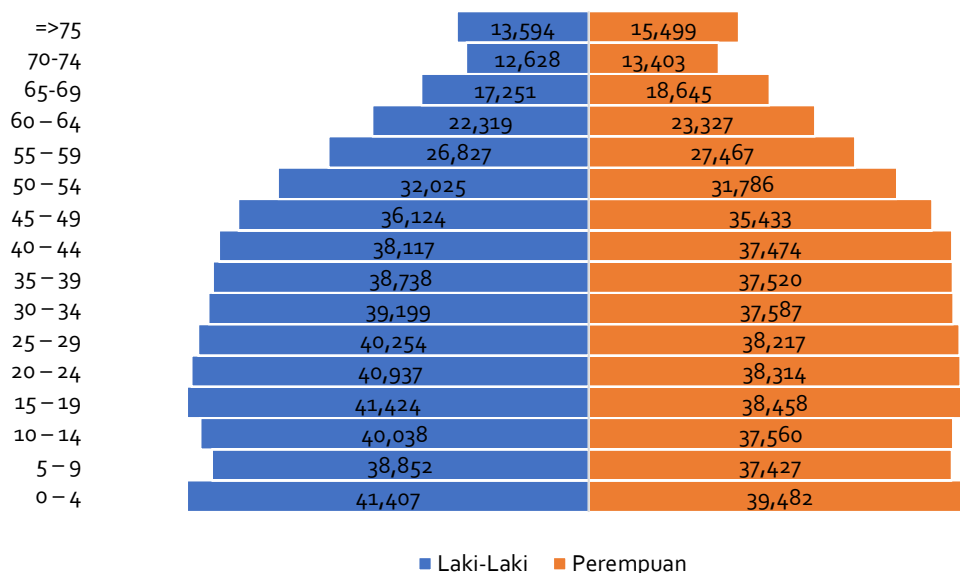
Sumber : Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Purbalingga, 2023

Gambar 2. 18. Prioritas Wilayah Pengendalian Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Prioritas pertama meliputi wilayah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kecamatan Kalimanah dengan kepadatan penduduk lebih dari 23 jiwa/Ha dan jumlah penduduk lebih dari 45.000 jiwa. Kemudian, prioritas ketiga meliputi wilayah Kecamatan Bojongsari, Bukateja, Bobotsari, Mrebet, Kemangkon, Kaligondang, Kutasari, Kejobong, Karangmoncol, Rembang dan Kecamatan Karangreja dengan kepadatan penduduk kurang dari 23 jiwa/Ha dan jumlah penduduk lebih dari 45.000 jiwa. Selanjutnya, prioritas keempat meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Pengadegan dan Kecamatan Karangjambu dengan kepadatan penduduk kurang dari 23 jiwa/Ha dan jumlah penduduk kurang dari 45.000 jiwa.

2.1.2.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Sementara itu jika dilihat dari sisi kelompok umur, pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga untuk kelompok umur 0-14 lebih dominan dibanding kelompok usia lainnya. Kondisi ini menunjukkan banyaknya jumlah kelahiran pada tahun 2023. Kemudian, dominansi jumlah penduduk menurut kelompok umur diikuti dengan kelompok umur 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 10-14 tahun. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan kelompok usia produktif/kerja sehingga Kabupaten Purbalingga mempunyai persediaan penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan. Pada kelompok usia lanjut/tidak produktif yaitu kelompok umur >65 tahun, komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida *expansive* yang biasa dimiliki oleh negara berkembang, dengan sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2024

Gambar 2. 19. Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dimana pada tahun 2013 sebesar 577.256 jiwa meningkat menjadi 701.547 jiwa di tahun 2023. Dari jumlah penduduk usia produktif tersebut, angka beban ketergantungan penduduk cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, rasio ketergantungan penduduk sebesar 53,24 menjadi 46,44 di tahun 2023 yang artinya setiap 100 penduduk produktif (15-64 tahun) masih menanggung beban 46 penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Menurunnya angka beban ketergantungan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Sementara itu, jumlah penduduk usia >65 tahun semakin naik dari tahun ke tahun.

Tabel II.8. Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Usia Belum Produktif (0-14 tahun)	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (>65 tahun)	Angka Beban Ketergantungan (%)
2013	884.683	241.695	577.256	65.731	53,24
2014	894.062	234.691	587.309	72.062	52,23
2015	903.181	234.070	594.408	74.703	51,95
2016	907.507	235.191	597.285	75.031	51,94
2017	916.427	231.399	604.873	80.155	51,51
2018	985.543	233.635	610.593	80.965	51,52
2019	1.003.246	231.631	678.986	92.629	47,76
2020	1.011.425	233.273	682.205	83.083	46,37
2021	1.021.920	238.136	669.582	100.076	50,51
2022	1.035.959	237.749	677.572	104.519	50,51
2023	1.027.333	234.766	701.547	91.020	46,44

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

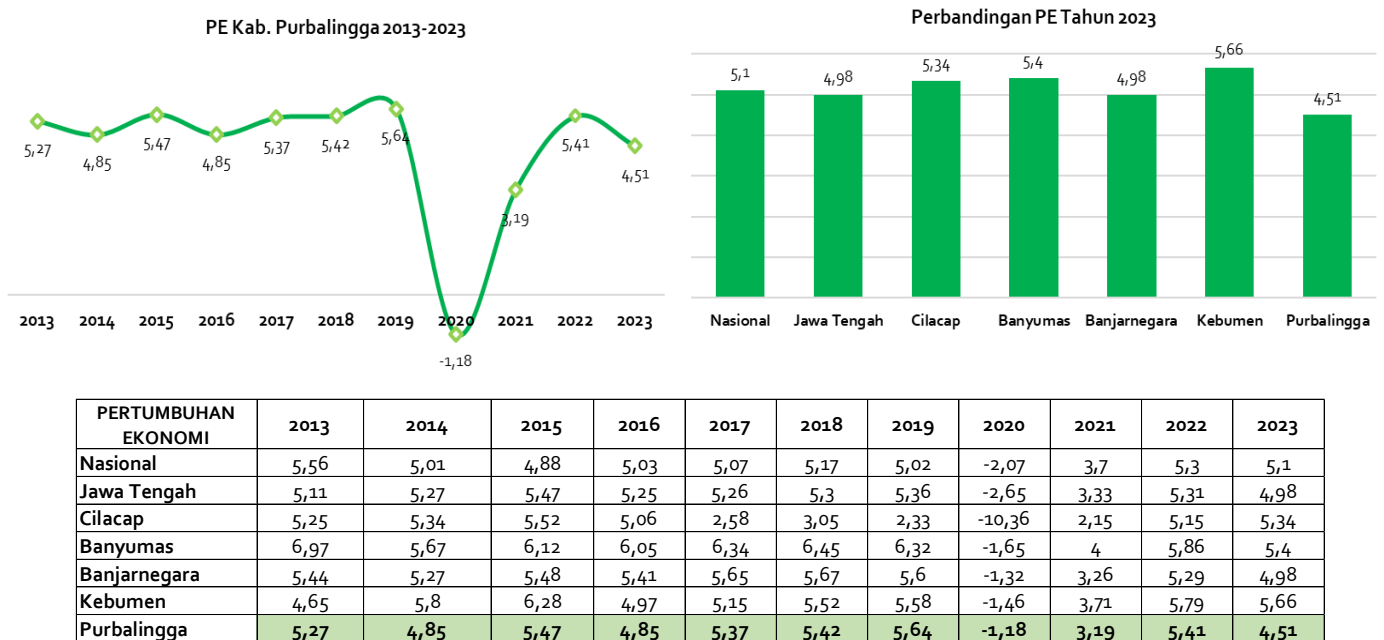
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama tahun 2013 sampai dengan 2023. Hal ini ditunjukkan dengan lajur pertumbuhan sebesar 5,27 pada tahun 2013 dan penurunan drastis pada tahun 2020 dengan kontraksi sebesar -1,18. Kontraksi negatif ini dikarenakan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi beberapa sektor perekonomian di Kabupaten Purbalingga khususnya sektor industri (-0,24%), akomodasi (-1,81%), konstruksi (-2,91%), perdagangan (-4,08%) dan transportasi (-30,09). Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3,19 dan di tahun 2022 tumbuh positif ke angka 5,41. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya daerah dalam pemulihan kinerja ekonomi pasca covid-19. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali turun di angka 4,51. Dibandingkan dengan daerah sekitar, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023

masih di bawah Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen. Grafik fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dalam Gambar 2.18.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

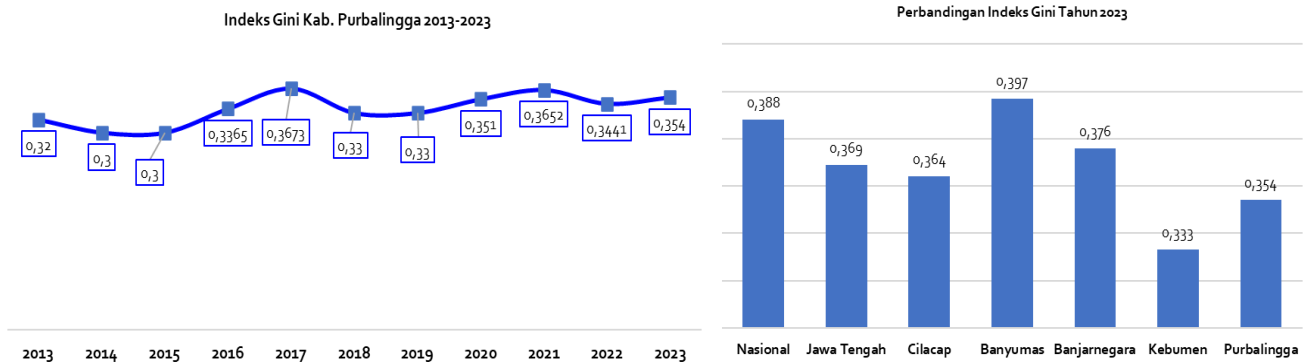
Gambar 2. 20. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

2.2.1.2 Indeks Gini

Indeks gini pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 berarti ketimpangan sempurna terjadi. Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 indeks gini di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, indeks gini sebesar 0,32 kemudian naik menjadi 0,351 di tahun 2020 dan 0,3652 di tahun 2021. Kenaikan tersebut terjadi akibat dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan naiknya angka keparahan kemiskinan sehingga menyebabkan ketimpangan semakin tinggi. Kemudian di tahun 2022 menurun menjadi 0,3441 dan tahun 2023 menjadi 0,354. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan telah melandainya pandemi Covid 19.

Indeks gini di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan berada pada level moderat. Apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, maka indeks gini di Kabupaten Purbalingga lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 0,369 dan nasional yang sebesar

0,388. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dan nasional mempunyai ketimpangan pendapatannya lebih besar.

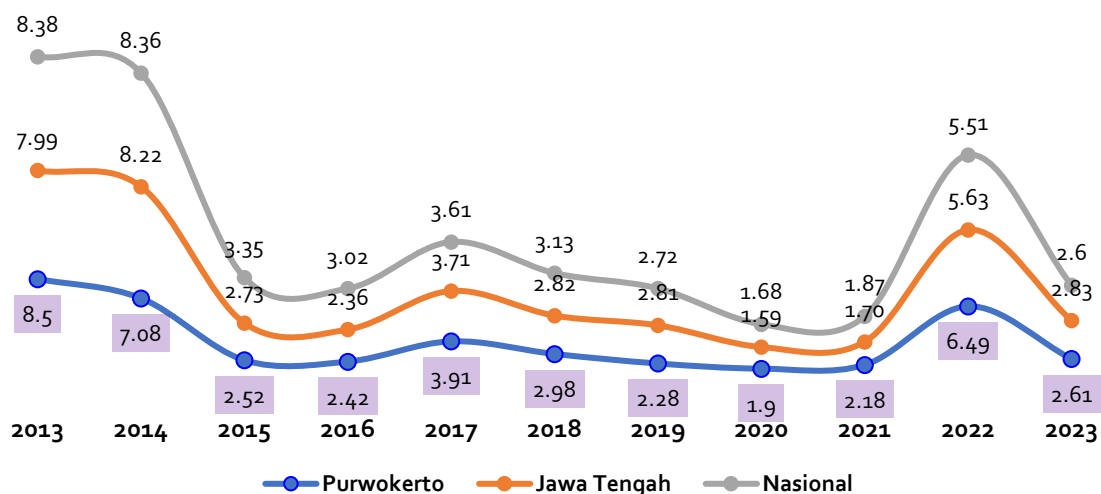


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 21. Indeks Gini Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

2.2.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013-2023 cenderung berfluktuasi. Inflasi tertinggi pada tahun 2013 yaitu 8,5% sementara inflasi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,9% ketika terjadi pandemic Covid-19. Mulai tahun 2020, inflasi di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 kota di Jawa Tengah dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto. Pada tahun 2022, inflasi mengalami kenaikan menjadi 6,49. Kenaikan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Namun kemudian, pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun di angka 2,61 yang menunjukkan menurunnya harga beberapa kelompok pengeluaran. Beberapa komoditas dominan yang menjadi penyumbang utama inflasi tersebut antara lain: beras, daging ayam ras, telur, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, minyak goreng.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

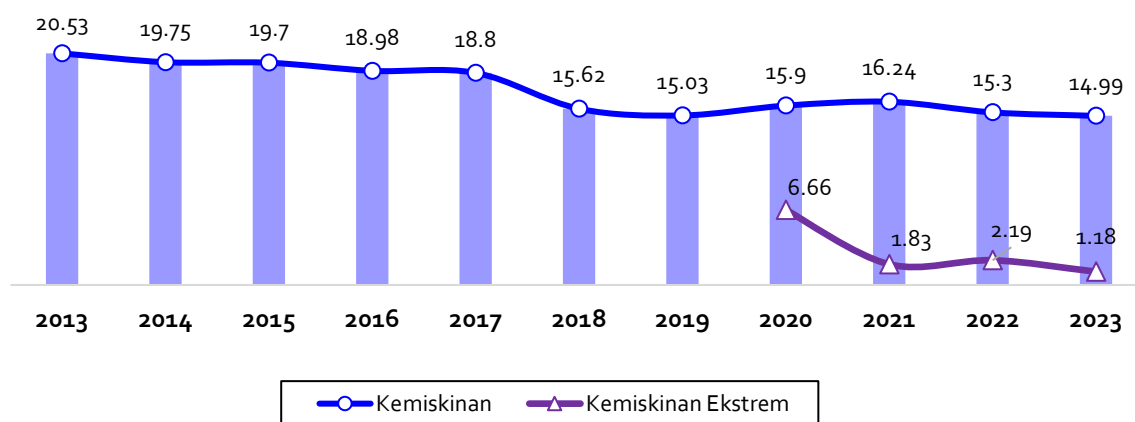
Gambar 2. 22. Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 - 2023

2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Dalam kurun waktu tahun 10 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menunjukkan angka yang fluktuasi. Pada tahun 2013 angka kemiskinan berada pada angka 20,53 % berangsur-angsur menurun menjadi 15,03 % pada tahun 2019. Namun kemudian pada tahun 2020 angka kemiskinan naik menjadi 15,90 dan tahun 2021 kembali naik menjadi 16,24 %. Salah satu penyebab kenaikan angka kemiskinan yaitu adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Terbukti dengan landainya angka penderita Covid-19 serta tidak adanya pembatasan aktifitas sosial, perekonomian daerah kembali menggeliat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 15,3 % dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 14,99 %.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, maka angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tersebut menempati peringkat ke-5 terbesar di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo dan Pemalang. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Banjarnegara namun lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen.

Di tengah-tengah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, dampak Covid-19 pada tahun 2020 – 2021 juga menyebabkan sebagian dari penduduk jatuh pada kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah Rp. 10.739,00/kapita/hari atau sebesar Rp. 322.170,00/kapita/bulan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga mencapai 6,66 %, kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 1,83 % namun naik kembali menjadi 2,19 %. Di tahun 2023 menurun di angka 1,18 % seperti dapat dilihat dalam Gambar 2.21.



Ket: Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Estimasi Perhitungan Satgas Data P3KE

ANGKA KEMISKINAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	11,37	11,47	11,22	10,85	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	7,29
Jawa Tengah	14,44	13,58	13,58	13,27	13,01	11,31	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77
Cilacap	15,24	14,21	14,39	14,12	13,94	11,2	10,73	11,46	11,67	11,02	10,99
Banyumas	18,44	17,45	17,52	17,23	17,05	13,5	12,53	13,26	13,66	12,84	12,53
Banjarnegara	18,71	17,77	18,37	17,46	17,21	15,46	14,76	15,64	16,23	15,2	14,9
Kebumen	21,32	20,5	20,44	19,86	19,6	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	16,34
Purbalingga	20,53	19,75	19,7	18,98	18,8	15,62	15,03	15,9	16,24	15,3	14,99

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

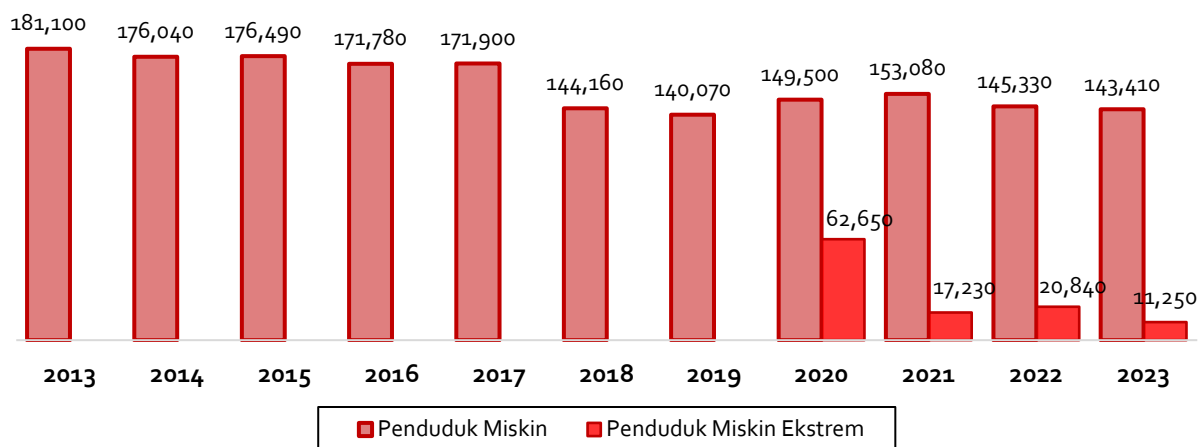
Gambar 2. 23. Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 - 2023

Batas Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Purbalingga merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan, mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2013, GK Kabupaten Purbalingga berada pada angka sebesar Rp. 265.262 perkapita per bulan semakin meningkat menjadi Rp. 439.208 perkapita perbulan di tahun 2023. Hal ini bermakna mereka yang berada di bawah garis tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup paling dasar.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, semakin menurun dari 181.000 jiwa pada tahun 2013 menjadi 140.070 pada tahun 2019. Di tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 145.330 jiwa dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 143.410 jiwa.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin ekstrem yang muncul akibat pandemi Covid 19 yaitu sebesar 62.650 jiwa. Kemudian jumlahnya turun menjadi 17.230 jiwa pada tahun 2021, namun kembali naik menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022. Pada tahun 2023 berhasil turun menjadi 11.250 jiwa seiring dengan penanganan pada kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu, pergerakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purbalingga agak melandai dan mengalami penurunan dari 3,20 di tahun 2013 menjadi 2,52 pada tahun 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,73 di tahun 2013 menjadi 0,58 di tahun 2023. Kondisi penurunan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran penduduk miskin memiliki tren atau cenderung mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil. Di samping itu, kondisi tersebut juga menggambarkan bahwa ada perbaikan ekonomi sehingga mampu mengurangi kesenjangan penduduk miskin dari garis kemiskinan.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 24. Jumlah Penduduk Miskin dan Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 - 2023

Tabel II.9. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

No	Tahun	Garis Kemiskinan (GK)	Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1.	2013	265.262	181.100	3,20	0,73
2.	2014	275.022	176.040	3,26	0,80
3.	2015	283.366	176.490	3,37	0,85
4.	2016	301.862	171.780	3,85	1,2
5.	2017	313.343	171.900	2,79	0,68
6.	2018	324.735	144.160	2,79	0,74
7.	2019	355.702	140.070	2,24	0,47
8.	2020	375.199	149.500	2,32	0,43
9.	2021	384.183	153.080	2,10	0,41
10.	2022	407.849	145.330	2,08	0,48
11.	2023	439.208	143.410	2,52	0,58

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 %. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.

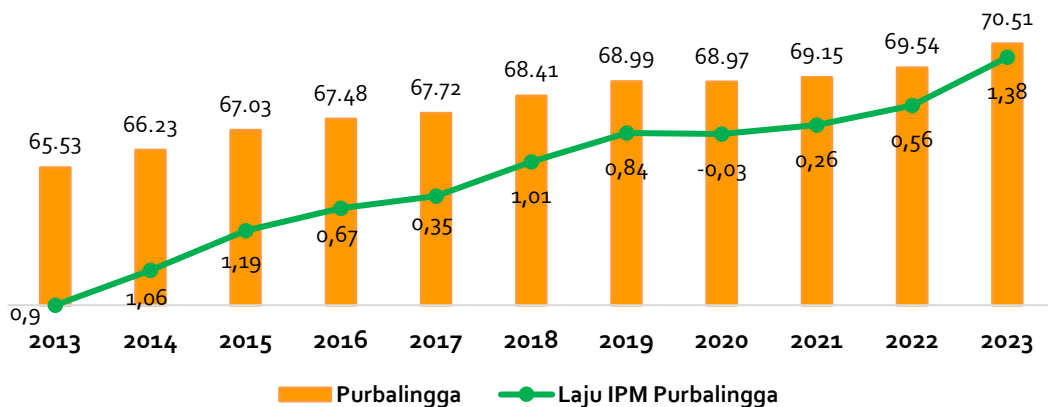
Di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2022 terdapat 62 desa prioritas penanggulangan kemiskinan (desa merah) mendasarkan hasil pemetaan kuadran antara Indeks Desa Membangun dengan jumlah warga desil 1 pada desa tersebut. Kemudian pada tahun 2023, terdapat 38 desa miskin ekstrem yang memerlukan pendampingan dalam upaya mencapai target 0 % kemiskinan ekstrem. Hal tersebut didasarkan pada pemetaan kuadran Indeks Kesulitan Geografi dengan jumlah warga desil 1 pada desa tersebut. Terdapat 8 sektor intervensi dalam penghapusan

kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga terdiri dari: RTLH, air bersih, listrik, sanitasi /jamban, disabilitas, keluarga berisiko stunting, Anak Tidak Sekolah, tidak bekerja/pengangguran.

Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah Kabupaten dan dari tingkat masyarakat. Disamping itu, didukung pula dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, nilai IPM berada pada angka 65,53 naik secara bertahap sampai dengan tahun 2023 menjadi 70,51. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tersebut berada pada rentang 60 hingga 70 sehingga diklasifikasikan pada kategori sedang dan menempati peringkat ke-29 di Provinsi Jawa Tengah. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tersebut masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Banjarnegara. Pada dasarnya nilai IPM mengalami kenaikan, namun laju pertumbuhannya kecil. Walaupun demikian, kenaikan IPM tersebut menunjukkan adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan.



IPM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	68,31	68,9	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	72,8	73,2	73,8	74,4
Jawa Tengah	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,12	72,8	73,39
Cilacap	66,8	67,25	67,77	68,6	68,9	69,56	69,98	69,95	70,42	70,99	72,04
Banyumas	68,55	69,25	69,89	70,49	70,75	71,3	71,96	71,98	72,44	73,17	73,96
Banjarnegara	62,84	63,15	64,73	65,52	65,86	66,54	67,34	67,45	67,86	68,61	69,16
Kebumen	64,86	65,67	66,87	67,41	68,29	68,8	69,6	69,81	70,05	70,79	71,88
Purbalingga	65,53	66,23	67,03	67,48	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54	70,51

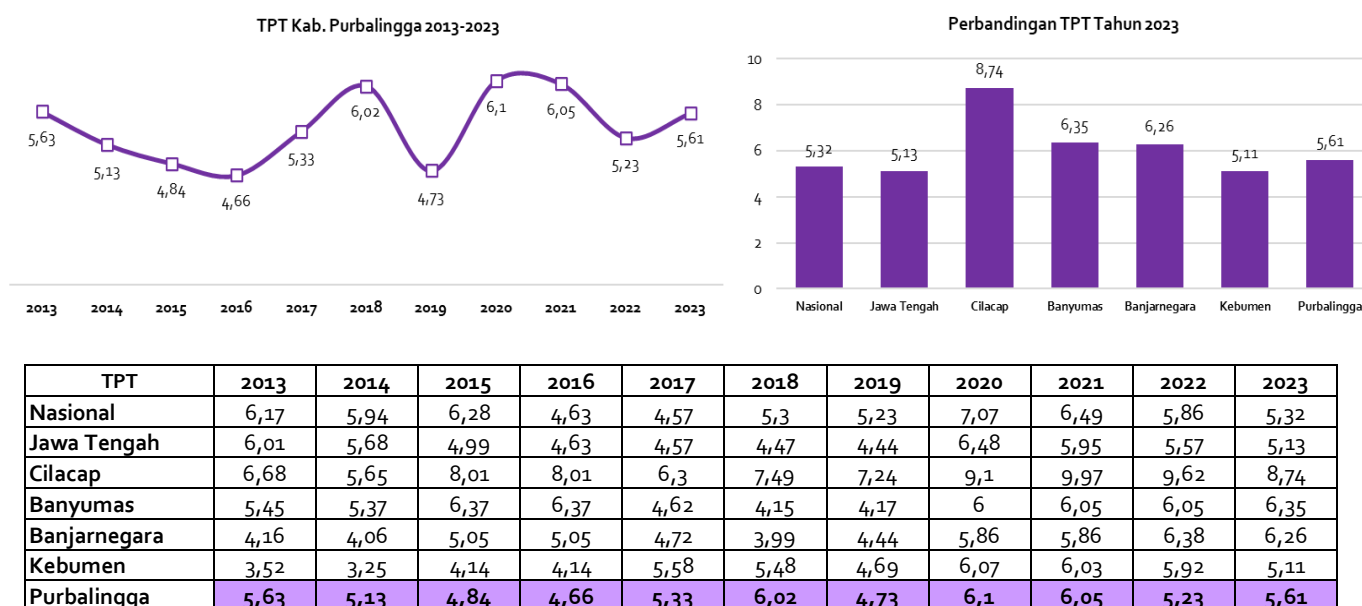
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 25. IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, TPT berada pada angka 5,63 % dan kemudian berangsur turun mencapai angka 4,66 % pada tahun 2016. Kemudian, TPT mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2018 sampai dengan angka 6,02 %. Di tahun 2019, TPT mengalami kondisi baik karena terjadi penurunan sampai dengan 4,73 %, namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan mencapai 6,1 akibat pandemic Covid-19. Kenaikan tersebut dikarenakan banyak usaha ekonomi produktif yang terhambat bahkan terhenti karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping itu, banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja dan faktor ketidakmampuan kompetensi SDM penduduk Kabupaten Purbalingga untuk mengakses tenaga kerja juga menjadi penyebab utama.

Kemudian, pada tahun 2021 TPT kembali menurun menjadi 6,05 % dan pada tahun 2022 menjadi 5,23 %. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga semakin menurun. Namun pada tahun 2023 TPT naik di angka 5,61 % seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga yang diakibatkan oleh sejumlah pemutusan hubungan kerja pada beberapa perusahaan yang sedang mengalami kendala. Capaian TPT di Kabupaten Purbalingga tersebut masih di bawah rata-rata TPT Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Banjarnegara.



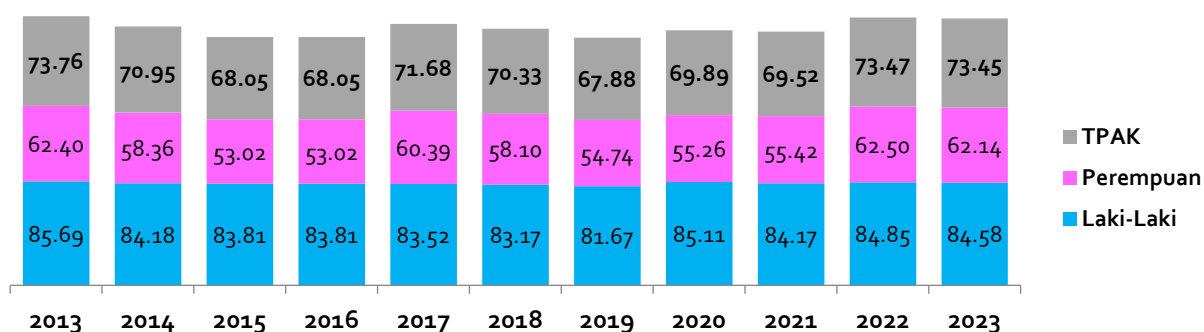
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 26. TPT Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

2.2.1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, pada tahun 2023 TPAK Kabupaten Purbalingga naik menjadi 73,45%. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, TPAK di Kabupaten Purbalingga mempunyai angka yang lebih tinggi dari angka Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Banjarnegara namun lebih rendah dari Kabupaten Kebumen.

Kenaikan TPAK di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan bahwa kenaikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja atau penduduk usia kerja. TPAK yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Dengan naiknya pasokan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga maka harus diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai. Dilihat dari jenis kelaminnya, TPAK di Kabupaten Purbalingga lebih besar laki-laki dibandingkan dengan perempuan.



TPAK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	66,6	66,6	65,8	66,3	66,7	67,3	67,53	67,77	67,81	68,64	69,5
Jawa Tengah	70,43	69,68	67,86	67,86	69,11	68,81	68,85	69,43	69,58	70,84	71,72
Cilacap	66,31	63,24	62,39	62,39	66,22	62,62	65,34	67,79	62,91	65,65	66,6
Banyumas	63,95	64,27	60,17	60,17	65,19	67,74	67,34	66,66	65,07	64,75	64,6
Banjarnegara	73,44	75,2	72,61	72,61	70,95	71,97	70,09	69,69	69,76	72,17	71,64
Kebumen	71,48	74,57	70,43	70,43	66,84	65,75	68,72	69,63	67,76	71,57	74,54
Purbalingga	73,76	70,95	68,05	68,05	71,68	70,33	67,88	69,89	69,52	73,47	73,45

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 27. TPAK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

2.2.1.8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan kesejahteraan berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan

kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Kondisi terakhir pada tahun 2023 yaitu sebesar 84,70 %.

Tabel II.10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

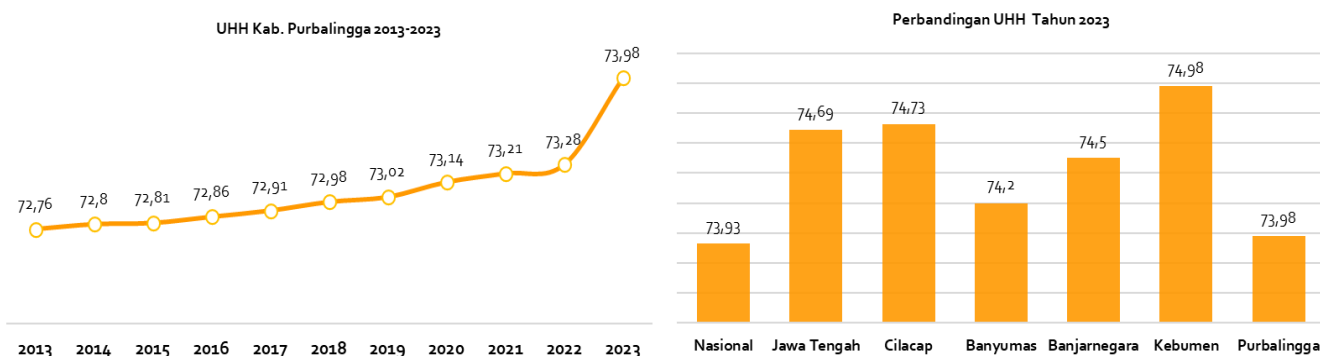
No	Tenaga Kerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	51.101	38.423	39.194	43.872	47.698	44.785
2	Jumlah Tenaga Kerja	53.147	49.811	49.540	53.946	59.781	52.875
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	96,15	77,14	79,12	81,33	79,79	84,70

Sumber: Dinnaker Kab. Purbalingga, 2019-2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2013 – 2023 terus mengalami kenaikan dari 72,76 pada tahun 2013 menjadi 73,98 pada tahun 2023. Angka kenaikan tersebut menunjukkan kondisi yang baik, karena mengindikasikan bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,98 tahun. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, maka UHH di Kabupaten Purbalingga tersebut menempati peringkat ke-3 terbawah di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes dan Pemalang. Capaian UHH Kabupaten Purbalingga tersebut juga masih berada di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar, namun lebih tinggi dibanding UHH nasional.

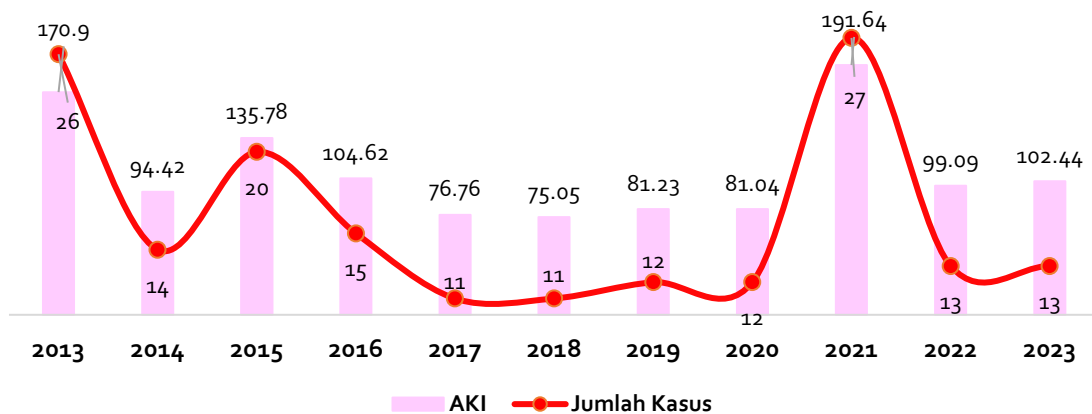


Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 28. UHH Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

2.2.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Jumlah Kematian Ibu

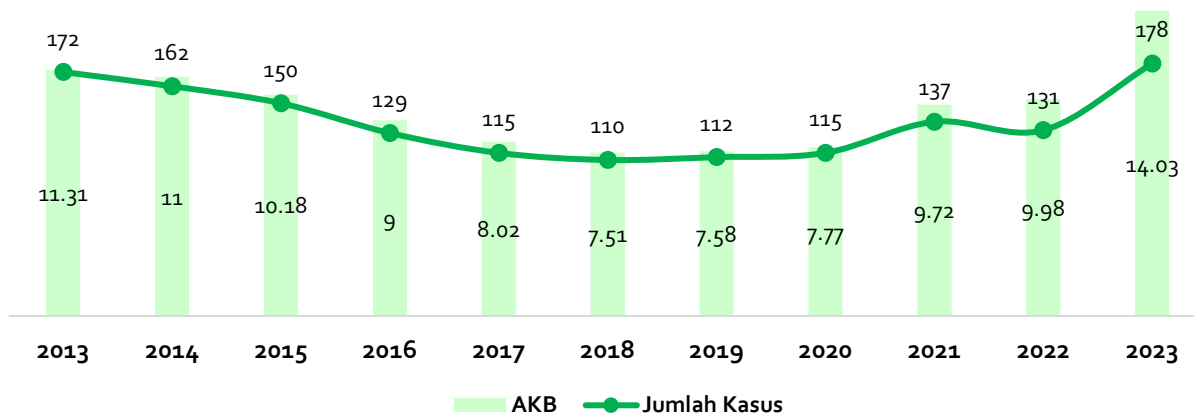
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013, tercatat AKI sebesar 170,9 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 26 kasus. AKI kemudian mengalami penurunan, kenaikan dan kembali turun di angka 75,05 pada tahun 2018 sebanyak 11 kasus kematian. AKI kembali mengalami kenaikan dari angka 75,05 menjadi 191,64 di tahun 2021. Pada tahun 2021 AKI mengalami kenaikan tertinggi dalam 10 tahun terakhir dengan 27 kasus kematian. Kemudian pada tahun 2022, AKI mengalami penurunan menjadi 99,09 dengan 13 kasus. Namun pada tahun 2023 dengan jumlah kasus yang sama, AKI kembali naik menjadi 102,44. Kenaikan tersebut terjadi dikarenakan jumlah kelahiran hidup yang menurun. Apabila dilihat dari penyebab AKI, maka kasus kematian ibu terbanyak akibat adanya pendarahan dan eklamsia. Disamping itu, kasus kematian ibu juga adanya penyakit degeneratif jantung yang terjadi.



Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 29. AKI dan Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, AKB tercatat sebesar 11,31 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 172 kasus. AKB kemudian mengalami penurunan dimana kondisi penurunan terbaik dalam 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 dengan angka 7,51 dan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 110 kasus. AKB kemudian mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021 sebesar 9,72 dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 137 kasus. Pada tahun 2022, AKB mengalami penurunan dengan angka yang relatif kecil sebesar 9,98 dengan 131 kasus. Namun di tahun 2023 AKB kembali naik di angka 14,03 dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 178 kasus.

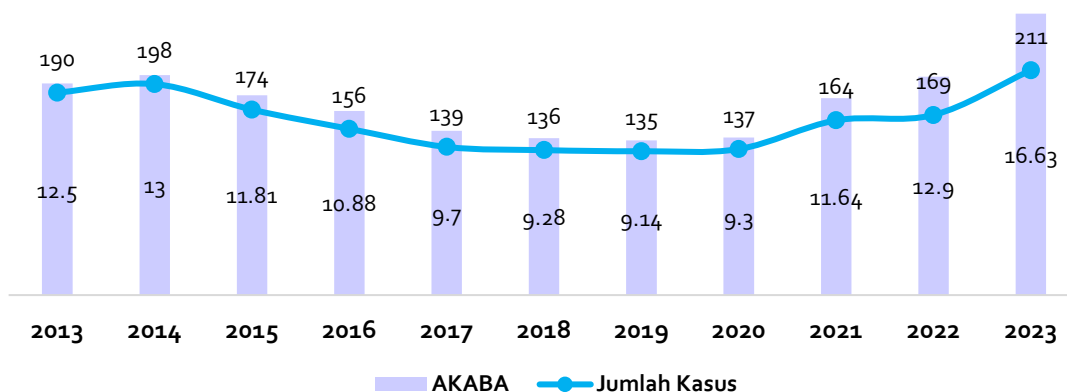


Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 30. AKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

Penyebab kematian bayi tersebut dilatar belakangi oleh tata laksana terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi yang kurang optimal, seperti indikasi kurangnya asupan gizi yang berakibat pada BBLR, serta adanya kelainan kongenital, asfiksia, kelahiran prematur, sepsis, ikterus dan penyakit penyertaan lain yang diderita ibu hamil. Masih tingginya jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa perlu perhatian khusus untuk meminimalisir kasus kematian bayi ke depannya.

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013, AKABA tercatat sebesar 12,5 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 190 kasus. Penurunan paling banyak terjadi di tahun 2019 sebesar 9,14 dengan jumlah kasus kematian balita sebanyak 135 kasus. AKABA mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 16,63 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 211 kasus. Angka tersebut merupakan kenaikan paling tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. AKABA tersebut menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita di Kabupaten Purbalingga harus menjadi perhatian ke depan, dimana kesehatan balita berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal serta tingkat pelayanan kesehatan pada balita.



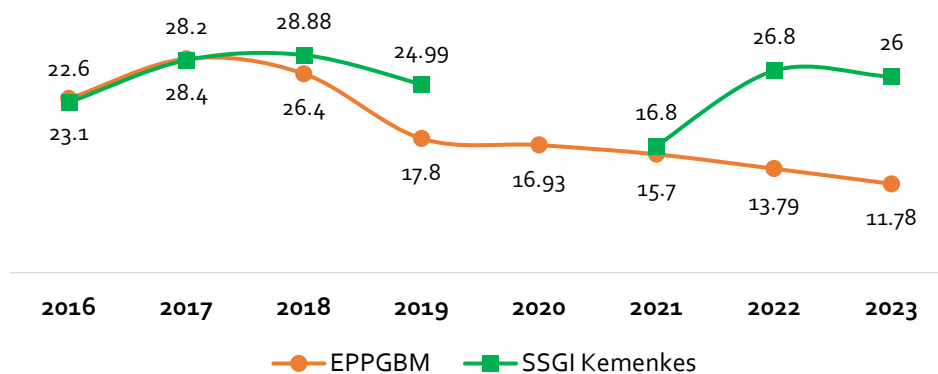
Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 31. AKABA Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Kekurangan gizi masa anak sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin dan mineral yang spesifik dan berhubungan dengan mikronutrien maupun makronutrien tertentu. Kekurangan gizi secara kronis salah satunya ditunjukkan dengan kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Terdapat 2 data yang digunakan dalam menilai prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga yaitu data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia). Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir dan berdasarkan data EPPGBM, angka prevalensi stunting mengalami penurunan dari 23,1 di tahun 2016 menjadi 11,78 di tahun 2023. Berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting mengalami kenaikan dari 22,6 di tahun 2016 menjadi 26 di tahun 2023.

Pada dasarnya, penyebab terjadinya stunting itu sangat kompleks. Penyebab yang sering terjadi yaitu adanya malnutrisi pada ibu dan anak. Hal lain yang menjadi penyebab secara tidak langsung yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat. Diperlukan adanya intervensi lintas sektor melibatkan seluruh *stakeholders* secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa.



Ket: Tahun 2023 Data Sementara Stunting SSGI

Sumber : Kemenkes, Dinkes Kab. Purbalingga, 2017 - 2024

Gambar 2. 32. Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2023

2.2.2.4 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) dan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Salah satu penyakit menular yang menjadi perhatian utama di Indonesia salah satunya yaitu penyakit Tuberkulosis (TB). Secara nasional, Indonesia menjadi negara kedua dengan kontribusi kasus TB terbesar, dengan jumlah kasus 969.000 dan kematian 93.000 jiwa per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati dengan jumlah perkiraan insiden tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018, *treatment coverage* TB berada pada angka 56,77 % kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 75,80 %. Kemudian di tahun 2021 dan 2022, *treatment coverage* TB mengalami penurunan mencapai 43,83 %. Namun tahun 2023 *treatment coverage* TB kembali naik pada angka 78,80 %. Angka tersebut telah mencapai target nasional yang sebesar 70 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga semakin baik. *Treatment coverage* TB tersebut menunjukkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dari perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang terjadi.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dengan jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 berada pada angka 83,13 % berangsur-angsur naik menjadi 91,17 % di tahun 2023. *Treatment Success Rate* TB pada dasarnya menunjukkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dari jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara tuntas sampai sembuh merupakan salah satu upaya yang terpenting dalam memutus penularan TBC di masyarakat.

Tabel II.11. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No	Kasus TB	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Seluruh Kasus Tuberkulosis	kasus	589	1.356	1.004	987	1.784	2.363
2	Jumlah Perkiraan Insiden Tuberkulosis	kasus	1.138	1.802	1.802	1.802	2.369	2.446
3	Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati	kasus	646	1.147	1.366	1.049	1.038	1.925
4	Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Sembuh dan Menyelesaikan Pengobatan	kasus	537	998	1.208	913	929	1.755
5	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	%	56,77	63,65	75,80	58,21	43,82	78,70
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	83,13	87,01	88,43	87,04	89,50	91,17

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2019-2024

2.2.2.5 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penerima JKN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2018, persentase kepesertaan JKN mencapai 93,02% kemudian meningkat menjadi 100,46%. Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program JKN pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.040.705 jiwa sehingga persentasenya mencapai 100,46%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga sudah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dimana seluruh penduduk sudah tercover BPJS Kesehatan.

Tabel II.12. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No.	Kepesertaan JKN	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	jiwa	852.443	897.695	857.351	869.258	989.221	1.040.705
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	93,02	89,5	85,9	86,3	98,2	100,46

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2019-2024

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah. Tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin.

Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Ketiga dimensi tersebut yaitu ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Sementara itu, kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.

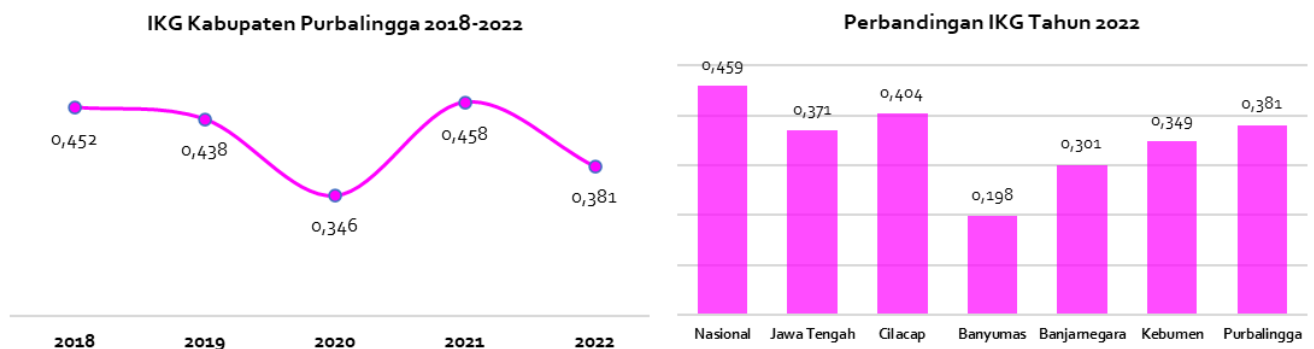
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 menunjukkan angka 60,94 dengan kategori berkembang. Angka di Provinsi

Jawa Tengah berada pada angka 58 dan nasional berada pada angka 56. Kondisi di Kabupaten Purbalingga sudah cukup bagus karena sudah berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Pembangunan keluarga pada dasarnya merupakan unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia, oleh karena itu perlu untuk terus mendapat perhatian ke depannya agar menjadi lebih maju.

2.2.2.7 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 0,452 di tahun 2018 menjadi 0,381 di tahun 2022. Capaian IKG di Kabupaten Purbalingga tersebut masih di bawah di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, namun masih di atas Nasional dan Kabupaten Cilacap.

Penurunan ini menunjukkan kondisi yang baik karena tingkat ketimpangan gender semakin rendah, dimana dilihat dari indikatornya terdapat peningkatan capaian pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh adanya kesadaran perempuan untuk melahirkan hidup di fasilitas kesehatan, sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh peningkatan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2023

Gambar 2. 33. IKG Kabupaten Purbalingga Tahun 2018– 2022

2.2.2.8 Jumlah Kejadian Konflik SARA

Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Purbalingga digambarkan pada beberapa kondisi salah satunya yaitu jumlah potensi konflik dan jumlah konflik sosial. Pada dasarnya, potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Purbalingga terjadi karena adanya perbedaan latar belakang kepentingan serta kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Pemikiran yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial. Disamping itu, perbedaan kepentingan juga dapat menjadi munculnya konflik sosial.

Potensi konflik yang dilaporkan oleh masyarakat adalah yang dilaporkan melalui Pemerintah Daerah atau melalui Aparat Penegak Hukum. Potensi konflik yang lebih cepat dilaporkan akan memberikan respon pencegahan serta penanganan yang lebih tepat sehingga potensi tersebut tidak menjadi konflik. Sebelum menjadi besar, potensi konflik dapat dicegah dengan bantuan keterlibatan masyarakat baik secara mandiri maupun kelembagaan. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pelaporan potensi konflik tersebut membawa dampak baik bagi penurunan konflik di Kabupaten Purbalingga.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dari jumlah potensi konflik yang dilaporkan, ada yang kemudian menjadi konflik dan ada pula yang dapat diredam tidak menjadi konflik. Pada tahun 2022, dari 41 potensi konflik yang dilaporkan, konflik yang dapat diredam sebanyak 39 potensi konflik sehingga hanya 2 yang menjadi potensi konflik. Pada tahun 2023 dari 71 potensi konflik yang dilaporkan, sebanyak 66 potensi dapat diredam sehingga terjadi konflik sosial di masyarakat sebanyak 5 konflik.

Dari 5 konflik sosial tersebut sebagian besar berupa konflik sosial masyarakat dan tidak ada konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya upaya mitigasi untuk pencegahan konflik yang dapat mengganggu kondisi ketentraman di Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.13. Jumlah Konflik dan Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018– 2023

No.	Konflik Sosial	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Potensi Konflik yang Dilaporkan	potensi	11	8	12	7	41	71
2	Jumlah Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik	laporan	0	0	0	0	39	66
3	Jumlah Konflik Sosial	konflik	11	8	12	7	2	5
4	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bakesbangpol Kab. Purbalingga, 2019-2024

2.2.2.9 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator penyusunan yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, yakni

ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

Pada tahun 2018, IPK Jawa Tengah cukup tinggi di angka 60,05 lebih tinggi dari IPK nasional yaitu 53,74. Pada tahun berikutnya, IPK Jawa Tengah mencapai 60,94 sebelum kemudian terus menurun pada 2020 (59,12) dan 2021 (55,24). Akan tetapi pada 2022, angka IPK kembali meningkat hingga 59,43. Beberapa kondisi kebudayaan di Kabupaten Purbalingga yang mendukung Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah tergambarkan yaitu sebagai berikut.

A. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Untuk menghitung Indeks Kebudayaan khususnya pada dimensi pendidikan, salah satunya yaitu persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian. Muatan Lokal (Mulok) merupakan sebuah kegiatan kurikuler yang didesain untuk meningkatkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan kearifan lokal masing-masing daerah, meliputi bahasa, kesenian, dan ragam budaya lainnya. Mulok secara tidak langsung merupakan bentuk pengembangan pendidikan yang kreatif dan terbarukan. Pendidikan yang kreatif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk seni budaya, kerajinan kriya, pendidikan jasmani dan olahraga, bahasa, dan teknologi. Mulok memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku positif pada siswa, serta membantu mereka memahami dan menghormati budaya dan tradisi Indonesia.

Jumlah guru mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 yaitu sebanyak 225 orang baik untuk jenjang SD dan SMP, sehingga persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian yaitu sebesar 40,98%. Distribusi guru mulok disajikan dalam tabel II.12.

Tabel II.14. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Guru Mulok Bahasa Daerah	Satuan	Tahun 2023
1	Jumlah Guru Mulok Bahasa Daerah dan atau Ekskul Kesenian	orang	225
	a. Muatan Lokal Bahasa Daerah		87
	b. Prakarya		61
	c. Seni dan Budaya		58
	d. Seni Musik		9
	e. Seni Tari		10

No.	Guru Mulok Bahasa Daerah	Satuan	Tahun 2023
2	Jumlah Satuan Pendidikan (SD dan SMP)	unit	549
3	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	persen	40,98

Sumber: Dindikbud Kab.Purbalingga, 2024

B. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan

Kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya banyak terdapat di Kabupaten Purbalingga. Beberapa jenis Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Objek Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati Purbalingga, yang meliputi: SK Bupati Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya. Kemudian SK tersebut diperbaharui ke dalam SK Bupati Nomor 432/209 Tahun 2021 dan selanjutnya menjadi SK Bupati Nomor 432/107 Tahun 2022.

Jumlah cagar budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya maupun situs cagar budaya mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari keseluruhan jumlah cagar budaya yang dicatatkan tersebut, jumlah cagar budaya yang dilestarikan juga semakin meningkat walaupun secara kuantitas jumlahnya kecil yaitu dari 41 unit di tahun 2020 menjadi 53 unit di tahun 2023 yang sebagian besar merupakan benda cagar budaya. Benda cagar budaya tersebut perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

Sementara itu di Kabupaten Purbalingga termuat dalam Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kebudayaan Daerah Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 430/400 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi dengan berbagai kebudayaan lainnya seperti perpaduan budaya Jawa-Arab, Jawa-Cina, Banyumas-Sunda, budaya klasik dan budaya modern dalam berbagai bentuk ekspresi yang muncul dalam bentuk seni tari, seni wayang, seni lukis, nyanyian tradisional dan seni kontemporer serta modern.

Pada PPKD Kabupaten Purbalingga tercantum 10 objek pemajuan kebudayaan yang meliputi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional

dan cagar budaya. Sampai dengan tahun 2023 dari 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut, sudah 7 objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan atau dikembangkan. Masih terdapat 3 objek pemajuan kebudayaan lagi yang belum dilestarikan atau dikembangkan yaitu teknologi tradisional, olahraga tradisional dan manuskrip. Ketiga pemajuan kebudayaan tersebut perlu dilestarikan lagi melalui kerja bersama masyarakat, pelaku kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dari jumlah cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dan dicatatkan tersebut, persentase yang dilestarikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari 15,28 persen di tahun 2020 naik menjadi 18,41 di tahun 2023.

Tabel II.15. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2023

No.	Jenis Cagar Budaya	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Total Cagar Budaya yang dicatatkan	unit	295	291	290	308
	a. Jumlah Benda Cagar Budaya	unit	227	225	225	226
	b. Jumlah Bangunan Cagar Budaya	unit	36	36	36	48
	c. Jumlah Struktur Cagar Budaya	unit	6	7	7	12
	d. Jumlah Situs Cagar Budaya	unit	26	23	22	22
2	Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	unit	41	51	58	53
3	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dicatatkan	unit	6	6	6	7
4	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	unit	5	5	5	5
5	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dicatatkan	unit	301	297	296	315
6	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	unit	46	56	63	58
7	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen	15,28	18,86	21,28	18,41

Sumber: Dindikbud Kab.Purbalingga, 2021-2024

C. Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang erat kaitannya dengan manusia. Kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses menggunakan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok dengan kebudayaan tertentu. Kesenian menurut jenisnya terdiri dari seni suara, seni tari, seni sastra, dan seni rupa dimana fungsi dari kesenian tak hanya sebatas media berekspresi yang menjadi sarana untuk menyalurkan berbagai jenis ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang

berkaitan dengan kehidupan, tetapi juga sebagai media untuk mewariskan berbagai bentuk adat istiadat.

Kelompok kesenian yang tercatat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 sebanyak 345 kelompok dimana dari 345 kelompok tersebut sebanyak 157 kelompok aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian. Beberapa kelompok kesenian yang terdiri atas seni pertunjukan rakyat di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi begalan, angguk, aplang atau dames, calung, ebeg atau kuda lumping, lengger dan slawatan. Dari kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian diperoleh persentase sebesar 45,5 persen. Angka tersebut menunjukkan belum semua kelompok kesenian yang tercatat aktif mengadakan pertunjukan kesenian. Hal tersebut sangat berkaitan dengan beberapa faktor seperti: jumlah pelaku seni yang terbatas, kondisi peralatan dan perlengkapan yang masih terbatas serta kondisi keuangan yang belum mendukung.

D. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga yaitu Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, Museum Tempat Lahir (MTL) Jenderal Soedirman dan Petilasan Ardilawet (Desa Wisata Panusupan). Masing-masing tempat bersejarah tersebut mempunyai karakteristik tersendiri.

Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja atau disingkat dengan Museum Soegarda merupakan museum pertama yang didirikan di Kabupaten Purbalingga. Museum tersebut terletak di kompleks Pendopo Dipokusumo yang memiliki ribuan koleksi sejarah terutama benda peninggalan masa prasejarah. Keberadaan museum tersebut sangat penting untuk menambah wawasan masyarakat dalam mengenalkan sejarah terutama seluk-beluk kisah Kabupaten Purbalingga. Di dalam museum menampilkan koleksi benda-benda bernilai sejarah dan budaya yang menggambarkan pilar kesuksesan hidup seseorang yang juga menjadi filosofi dalam kehidupan seseorang. Pilar-pilar tersebut terdiri dari kukila, senjata, turangga (kendaraan), wanita (busana dan perhiasan), dan griya (perlengkapan rumah). Terdapat pula koleksi Wayang Suket Mbah Gepuk yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional tahun 2020.

MTL Jenderal Soedirman merupakan tempat lahir Jenderal Soedirman yang didirikan untuk mengenang perjuangan Jenderal Soedirman di tempat kelahirannya. Bangunan di kompleks monumen ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu rumah kelahiran dan perpustakaan. Petilasan Ardilawet

merupakan salah satu wisata sejarah yang terletak di Desa Wisata Panusupan, Kecamatan Rembang yang juga tempat beradanya petilasan Pangeran Wali Syekh Djambu Karang Putra Prabu Brawijaya, Rja Pajajaran yang semasa mudanya bernama Adipati Mendang (Raden Mundingwangi). Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah pengunjung di tempat bersejarah semakin meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.16.

Tabel II.16. Jumlah Pengunjung Museum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No.	Museum	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja	orang	2.860	5.653	8.830
2	Jumlah Pengunjung MTL Jenderal Soedirman	orang	5.930	1.7356	12.177
3	Jumlah Pengunjung Petilasan Ardilawet (Desa Wisata Panusupan)	orang	239	1.594	3.425
4	Jumlah Total Pengunjung Tempat Bersejarah	orang	9.029	24.603	24.432

Sumber: Dindikbud dan Dinporapar Kab.Purbalingga, 2022-2024

E. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca perlu dikembangkan.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga cenderung menurun. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 961 unit perpustakaan yang terdiri dari 1 unit perpustakaan umum, 94 perpustakaan desa/kel, 603 perpustakaan sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), 15 perpustakaan pondok pesantren, 27 perpustakaan rumah ibadah, 30 perpustakaan khusus, dan 191 layanan perpustakaan keliling. Begitu pula dengan jumlah pengunjung perpustakaan umum di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan. Penurunan terjadi ketika pandemi covid-19 dimana terdapat pembatasan sehingga pengunjung museum terbatas.

Tingkat pemanfaatan perpustakaan pada tahun 2018 berada pada angka 0,01 % kemudian naik menjadi 0,09 % di tahun 2019. Namun kemudian ketika pandemi covid-19 semakin menurun menjadi 0,04 di tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan semakin menurunnya minat kunjungan ke perpustakaan sebagai bagian dari budaya membaca masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.17. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No.	Perpustakaan	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	orang	13.813	88.962	24.747	42.061	46.195	42.410
2	Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga	orang	925.193	1.003.246	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	persen	0,01	0,09	0,02	0,04	0,05	0,04

Sumber: Dinarpus Kab.Purbalingga, 2019-2024

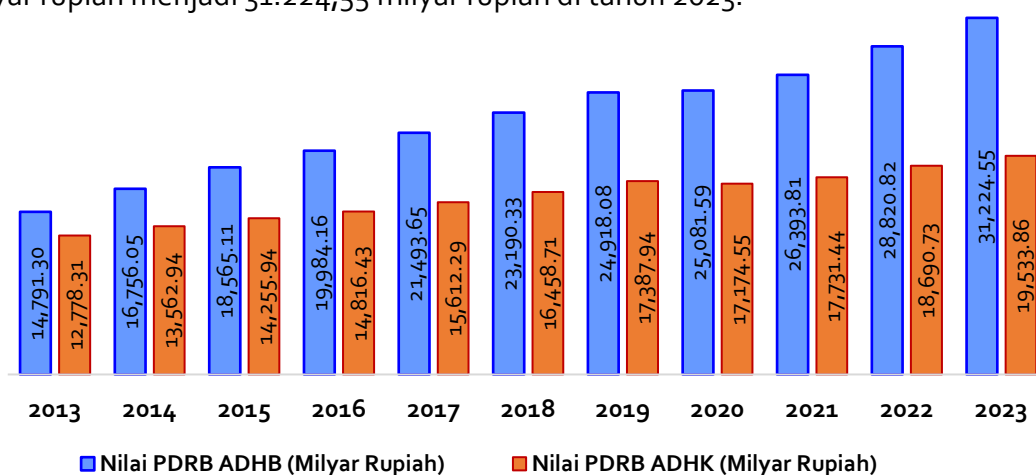
2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

PDRB ADHK maupun PDRB ADHB di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB ADHK sebesar 12.778,31 milyar rupiah menjadi 19.533,86 milyar rupiah di tahun 2023. Khusus di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19 mengalami sedikit penurunan namun tidak signifikan. PDRB ADHB, pada tahun 2013 sebesar 14.791,29 milyar rupiah menjadi 31.224,55 milyar rupiah di tahun 2023.



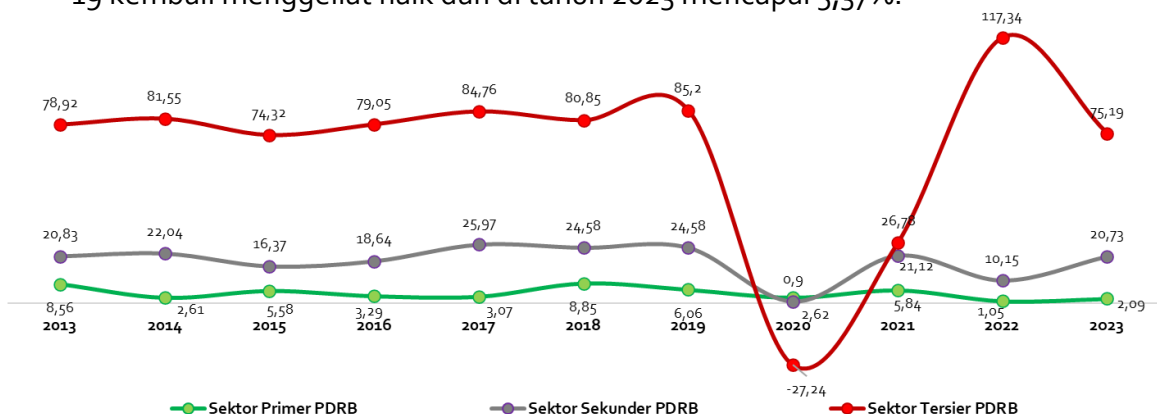
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 34. PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha ADHB & ADHK 2013 – 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga secara riil dapat dilihat dari laju pertumbuhan menurut sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Dari tahun 2013 sampai tahun 2023, laju pertumbuhan sektor primer yang berupa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalan, cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2023, laju pertumbuhan sektor pertanian menjadi 1,04%. Kenaikan dan penurunan di sektor pertanian tidak terlalu drastis, bahkan pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 laju pertumbuhannya cenderung naik dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang mengalami penurunan bahkan sampai minus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian cenderung stabil dapat bertahan di tengah dampak pandemi covid-19.

Laju pertumbuhan sektor sekunder yang berupa Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta Konstruksi, dalam kurun waktu 10 tahun juga mengalami kenaikan penurunan. Penurunan drastis terjadi ketika pandemi covid-19 pada tahun 2020 dimana sektor industri pengolahan mengalami kontraksi penurunan sampai dengan -0,24%. Hal tersebut terjadi karena pembatasan yang terjadi ketika covid-19 mengakibatkan berkurangnya ekspor di sektor industri pengolahan. Pandemi covid-19 sektor industri kembali merangkak naik bahkan pada tahun 2023 sudah mencapai 5,1%.

Kemudian laju pertumbuhan sektor tersier yang berupa Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate; Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya, juga mengalami kenaikan penurunan. Penurunan drastis juga terjadi ketika pandemi covid-19 pada tahun 2020 dengan sektor perdagangan mengalami kontraksi penurunan sampai dengan -4,08%. Namun kemudian pasca pandemi covid-19 kembali menggeliat naik dan di tahun 2023 mencapai 5,37%.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 35. Laju Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

Laju pertumbuhan PDRB dari ketiga sektor primer, sekunder dan tersier PDRB yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan bahwa sektor tersier merupakan sektor yang paling pesat perkembangannya di Kabupaten Purbalingga dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut semakin terlihat paska pandemi covid-19 dengan adanya kenaikan signifikan pada beberapa sektor seperti jasa transportasi dan pergudangan, jasa akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Pada jasa transportasi dan pergudangan, kenaikan terjadi seiring dengan meningkatnya distribusi maupun ekspedisi barang antar wilayah.

Tabel II.18. Laju Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

No.	Sektor PDRB	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,54	1,03	5,03	3,05	2,53	4,05	1,54	1,91	1,2	4,28	1,04
2	Pertambangan dan Penggalian	6,02	1,58	0,55	0,24	0,54	4,8	4,52	0,71	4,64	-3,23	1,05
3	Industri Pengolahan	7,46	7,8	6,01	4,96	5,86	5,13	7,33	-0,24	3,8	3,76	5,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,26	6,39	2,35	3,95	4,63	4,79	5,62	3,24	5,98	4,03	5,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	3,44	1,62	2,1	6,8	6,73	5,38	0,81	4,39	0,94	4,92
6	Konstruksi	4,86	4,41	6,39	7,63	8,68	5,82	6,25	-2,91	6,95	1,42	5,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,89	4,73	4,19	4,91	6,44	5,56	6,5	-4,08	5,68	3,91	5,37
8	Transportasi dan Pergudangan	8,94	8,45	8,37	5,56	6,31	5,08	9,12	-29,78	2,69	71,89	6,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,19	7,59	7,01	5,79	6,46	8,51	10,06	-1,81	4,44	12,58	13,52
10	Informasi dan Komunikasi	5,98	12,69	8,77	8,35	15,95	12,8	11,65	10,11	5,76	2,52	10,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	3,68	7,5	8,97	5,27	3,5	3,63	1,62	2,24	0,74	2,41
12	Real Estate	9,59	7,09	7,52	6,73	6,08	5,92	5,69	-0,01	2,21	2,71	6,72
13	Jasa Perusahaan	12,88	7,6	8,34	10,42	9,13	9,77	10,95	-2,83	3,05	5,5	7,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,29	0,75	5,3	2,39	1,97	3,54	3,74	-0,23	-0,38	1,4	4,61
15	Jasa Pendidikan	9,36	9,16	7,56	7,7	8,61	7,8	7,64	-0,22	0,21	2,22	5,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	11,28	6,53	9,7	9,29	8,76	6,99	6,15	0,21	2,24	5,57
17	Jasa lainnya	9,23	8,53	3,23	8,53	9,25	9,61	9,23	-6,16	0,67	11,63	6,86
PDRB (ADHK)		5,27	4,85	5,47	4,85	5,37	5,42	5,64	-1,18	3,19	5,41	4,51

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Apabila dilihat dari struktur ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, maka terjadi pergeseran kontribusi

lapangan usaha yaitu dari pertanian ke industri pengolahan. Kondisi tersebut semakin terlihat pasca pandemi covid 19 dimana persentase industri pengolahan pada tahun 2021 menunjukkan angka 28,07 % sedangkan persentase pertanian berada di angka 26,51 %. Di tahun 2023, industri pengolahan kembali bertahan di angka 28,29% dan pertanian di bawahnya yaitu di angka 25,60%.

Tiga besar sektor yang menunjukkan kontribusi tertinggi berdasarkan PDRB ADHB selain pertanian dan industri yaitu perdagangan. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kenaikan dan cenderung stabil karena adanya upaya-upaya yang mendorong perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa sektor tersebut cenderung memiliki daya tahan yang bagus dalam menghadapi pandemi covid 19.

Tabel II.19. Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

No.	Sektor PDRB	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,83	29,74	29,8	28,47	27,27	27,25	26,22	27,03	26,51	26,26	25,60
2	Pertambangan dan Penggalian	4,63	4,86	5,09	4,85	4,62	4,62	4,54	4,55	4,57	4,13	3,93
3	Industri Pengolahan	24,81	25,52	25,72	26,53	26,85	26,81	27,24	27,61	28,07	27,82	28,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,12	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Konstruksi	5,72	5,68	5,68	5,75	5,94	6,13	6,24	6,1	6,38	6,25	6,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,27	12,6	12,31	12,38	12,65	12,58	12,74	12,36	12,58	12,56	12,6
8	Transportasi dan Pergudangan	2,98	3,03	3,08	3,12	3,32	3,08	3,19	2,28	2,28	3,79	4,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,21	2,23	2,28	2,35	2,33	2,3	2,39	2,36	2,38	2,5	2,66
10	Informasi dan Komunikasi	1,64	1,58	1,56	1,53	1,65	1,78	1,87	2,04	2,06	1,94	1,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,15	2,11	2,26	2,3	2,28	2,23	2,24	2,26	2,26	2,18
12	Real Estate	1,04	1,03	1,03	1,05	1,06	1,07	1,06	1,06	1,04	1	0,99
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	2,82	2,78	2,83	2,79	2,68	2,63	2,64	2,47	2,35	2,33
15	Jasa Pendidikan	5,57	5,64	5,51	5,66	5,89	6,01	6,18	6,29	6,05	5,74	5,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,98	0,99	1,04	1,08	1,1	1,12	1,21	1,15	1,09	1,08
17	Jasa lainnya	1,78	1,82	1,75	1,86	1,9	1,96	2,01	1,9	1,84	1,96	1,99
PDRB (ADHB)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

2.3.1.2 Kontribusi Sektor PDRB

A. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian

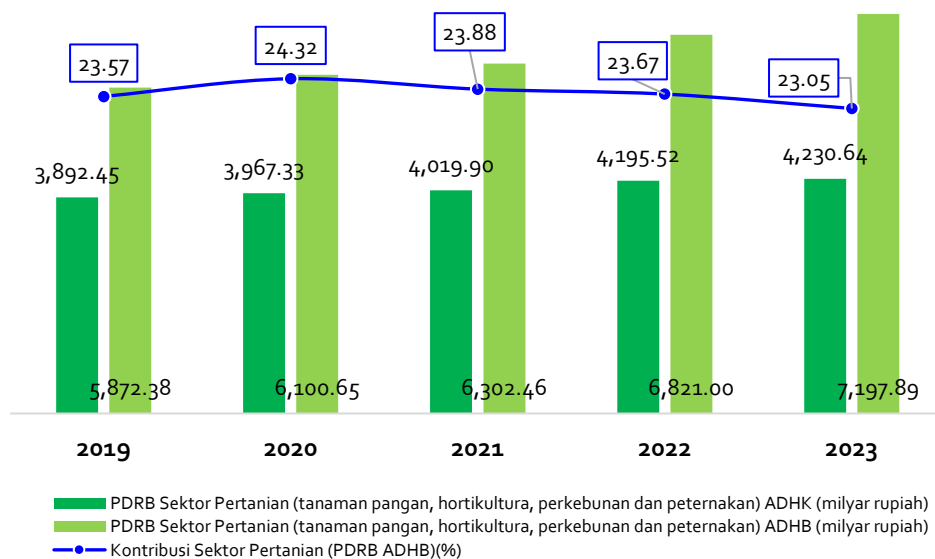
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, PDRB sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, rasio PDRB sektor pertanian yaitu sebesar 23,57% kemudian meningkat menjadi 24,32% ketika terjadi pandemi covid 19 di tahun 2020. Setelah itu, sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 23,88% di tahun 2021, 23,67% di tahun 2022 dan 23,05% di tahun 2023. Walaupun mengalami penurunan, sektor pertanian masih memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga. Kategori lapangan usaha pertanian menempati urutan kedua setelah lapangan usaha industri pengolahan.

Apabila dilihat dari komoditas pertaniannya, produksi pertanian dibedakan menjadi pertanian tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi dan ketela), hortikultura (sayur dan buah-buahan), perkebunan (kelapa, kopi, teh, lada, dan kakao) dan peternakan (sapi, kambing, ayam dan itik). Beberapa perkembangan produksi pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel II.20.

Tabel II.20. Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2023

No	Produksi Pertanian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Padi	ton	281.364,53	205.172,06	189.156,64	179.003,25	201.237,00	159.679,19
2	Produksi Jagung	ton	36.835,00	48.266,89	69.029,42	42.373,40	36.868,00	40.933,15
3	Produksi Kedelai	ton	11.461,00	3.092,14	175,08	614,91	277	213,14
4	Produksi Ubi kayu	ton	82.556,00	52.658,30	59.451,82	33.766,73	32.630,00	59.181,93
5	Produksi Ubi Jalar	ton	1.684	3.662,40	4.792,47	3.919,40	4.971,52	4.644,93
6	Produksi Buah-Buahan	ton	192.349,70	175.552,80	238.040,90	309.001,70	153.370,35	226.827,69
7	Produksi Sayuran	ton	37.888,50	32.165,30	51.227,63	57.750,63	53.168,89	70.250,01
8	Produksi Kelapa Deres	ton	56.336,56	55.928,06	55.600,94	55.623,17	28.287,63	56.202,36
9	Produksi Kopi	ton	283,3	288,52	292	290,99	39,97	212,4
10	Produksi Teh	ton	21,5	16,6	16,19	16,03	6,89	16,62
11	Produksi Lada	ton	287,99	281,75	189,37	185,38	182,73	199,05
12	Produksi Kakao	ton	3,62	3,28	3,32	2,85	1,39	0,63
13	Populasi Ternak Sapi	ekor	12.029	12.335	12.448	12.524	12.967	12.651
14	Populasi Ternak Kambing	ekor	259.180	259.181	259.271	259.206	260.599	259.409
15	Populasi Ternak Ayam	ekor	6.016.277	6.673.375	6.739.300	6.684.993	6.723.775	6.772.815
16	Populasi Ternak Itik	ekor	75.600	66.140	66.402	67.858	67.994	68.139

Sumber: Dinperten Kab. Purbalingga, 2019-2024



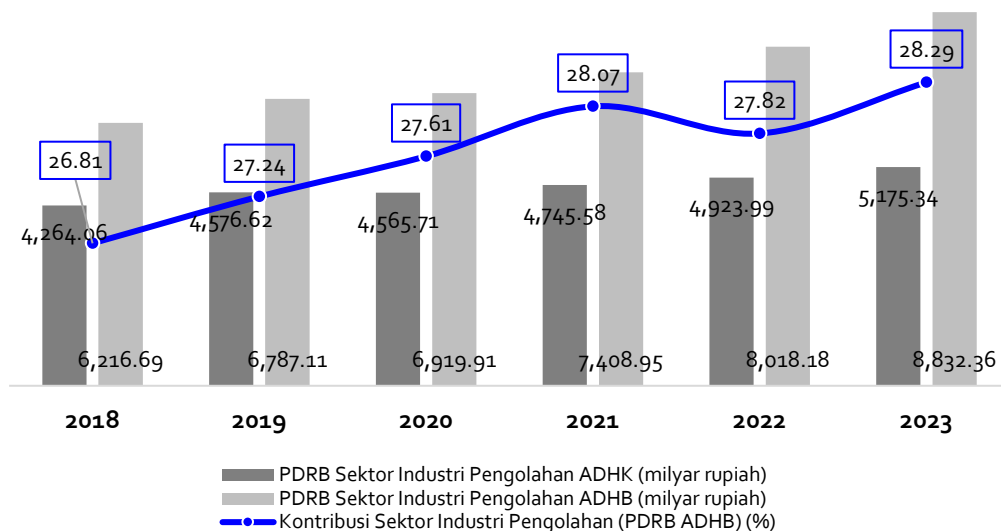
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar 2. 36. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

B. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, rasio PDRB sektor industri pengolahan yaitu sebesar 26,81% kemudian meningkat menjadi 27,24% di tahun 2019, 27,61% di tahun 2020 dan 28,07% di tahun 2021. Ketika terjadi pandemi covid 19, rasio PDRB sektor industri pengolahan sempat mengalami penurunan di angka 27,82% namun kemudian naik kembali menjadi 28,29% di tahun 2023.

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi tertinggi dalam PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun bukan merupakan sektor basis, sektor industri pengolahan memberikan *share* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Beberapa produk unggulan industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga baik skala besar maupun kecil di Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya gula kelapa, knalpot dan komponen otomotif, kerajinan sapu glagah, kerajinan tempurung kelapa dan glugu, rambut palsu dan bulu mata palsu, gerabah, kayu lapis, batik dan makanan olahan. Pemasaran industri tersebut sampai ke seluruh Indonesia bahkan dipasarkan ke luar negeri baik secara online maupun offline.

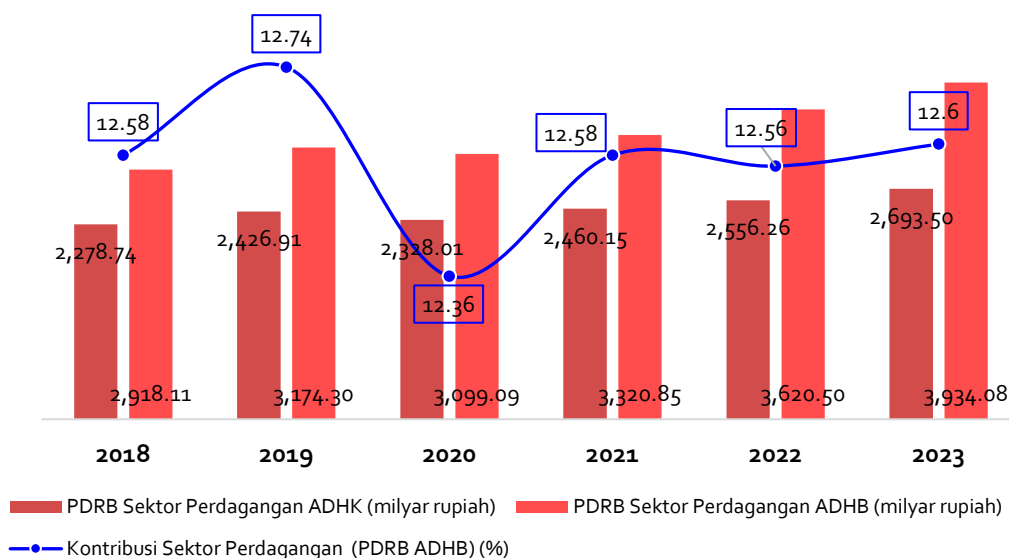


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar 2. 37. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

C. Rasio PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan juga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga. Sektor perdagangan juga menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan pertanian. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio PDRB sektor perdagangan cenderung mengalami kenaikan dan stabil. Pada tahun 2018, rasio PDRB sektor perdagangan yaitu sebesar 12,58% kemudian meningkat menjadi 12,74% di tahun 2019. Namun ketika pandemi covid 19 sektor perdagangan mengalami penurunan sampai dengan 12,36% dan kemudian pasca pandemi covid-19 kembali naik menjadi 12,58% di tahun 2021, 12,56% di tahun 2022 dan 12,6% di tahun 2023.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

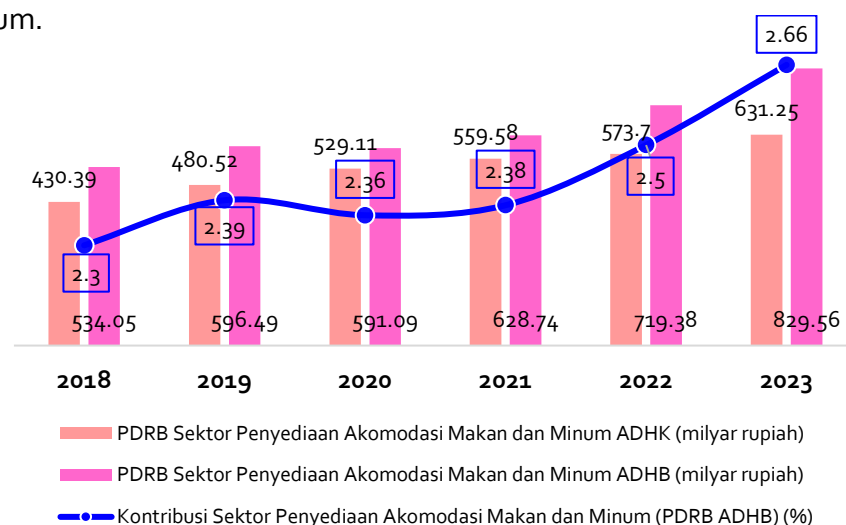
Gambar 2. 38. Rasio PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

D. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum berkontribusi dalam aktivitas terkait pariwisata, baik itu dalam penyediaan akomodasi bagi wisatawan maupun penyediaan jasa makan dan minum. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum cenderung meningkat.

Pada tahun 2018, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yaitu sebesar 2,3% kemudian meningkat menjadi 2,39% di tahun 2019. Namun ketika pandemi covid 19 sektor penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami penurunan menjadi 2,36%. Pengaruh kebijakan pemerintah untuk menutup obyek-obyek wisata selama pandemi Covid 19 berlangsung mempengaruhi nilai tambah dari sektor penyediaan akomodasi makan dan minum. Kemudian pada tahun 2021 sektor penyediaan akomodasi makan dan minum kembali naik menjadi 2,38%, dan semakin meningkat menjadi 2,56% di tahun 2022 dan 2,66% di tahun 2023.

Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi tujuan wisata. Beberapa wisata alam, buatan maupun budaya menjadi daya tarik tersendiri karena memiliki keindahan alam dan panorama; kebudayaan yang diminati oleh wisatawan; serta bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi: wisata alam (Gua Lawa, Pendakian Gunung Slamet), wisata budaya (MTL. Jend. Soedirman), wisata buatan (Owabong, Sanggaluri Park, TWP Purbasari Pancuran Mas, Kolam Renang Tirta Asri Walik) serta beberapa desa wisata lainnya. Pengembangan kawasan wisata tersebut akan sangat berpengaruh terhadap PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum.



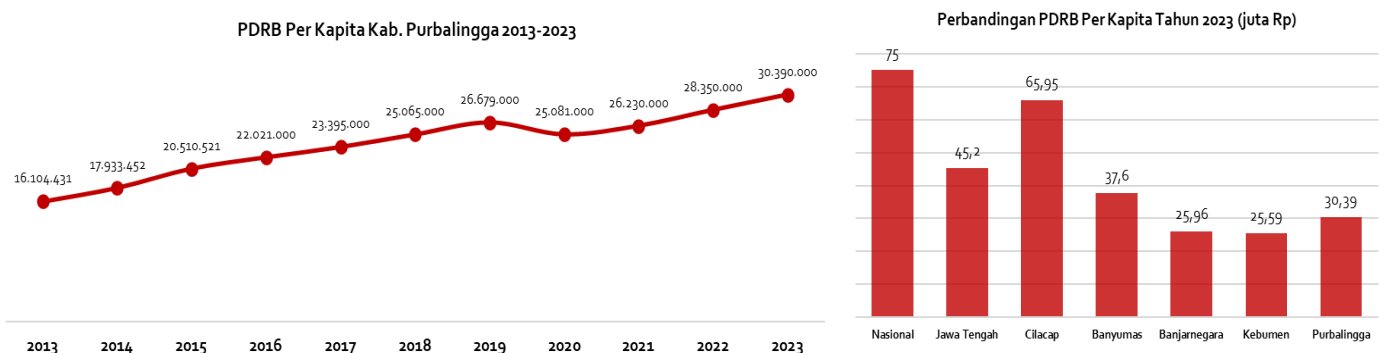
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar 2. 39. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

2.3.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita (ADHB), yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Banyak sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB perkapita (ADHB) Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2013-2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Pada tahun 2013, PDRB perkapita di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 16.104.431,9 kemudian meningkat mencapai Rp 30.390.000 di tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, PDRB per kapita di Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Banyumas namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

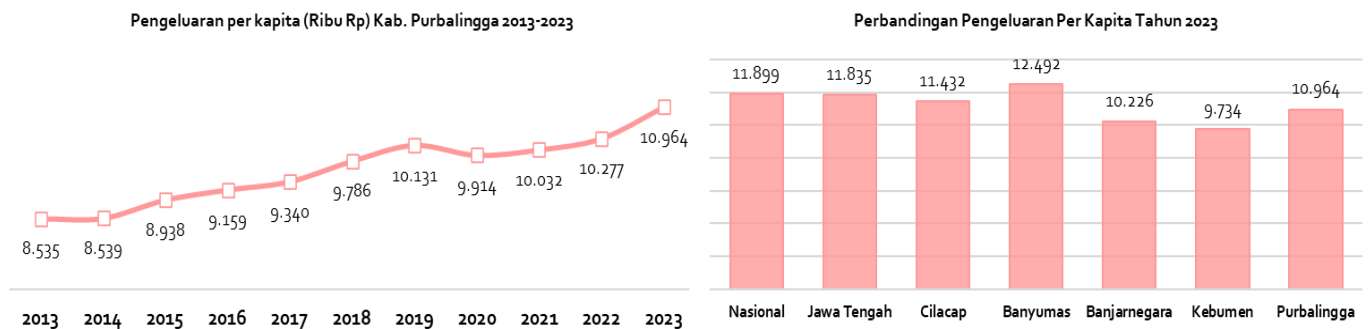
Gambar 2. 40. PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

2.3.1.4 Pengeluaran Per Kapita

Dalam komponen IPM, terdapat komposit pengeluaran per kapita yang menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2013 – 2023 terus meningkat dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.535.280 menjadi Rp 10.964.000 pada tahun 2023. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Purbalingga terus membaik. Capaian pengeluaran per kapita tersebut menempati peringkat ke-26 di Provinsi Jawa Tengah.

Dibanding dengan kabupaten sekitar, pengeluaran per kapita di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap dan Banyumas, namun masih di atas Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen. Disparitas pengeluaran per kapita antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen masih relatif besar. Disparitas tersebut perlu mendapat perhatian khusus agar ketimpangan pembangunan manusianya tidak semakin melebar.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2023

Gambar 2. 41. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2013–2023

2.3.1.5 Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2020 penurunan kunjungan wisata mencapai 58% yaitu dari 3.279.590 wisatawan pada tahun 2019 menjadi 1.387.912 wisatawan di tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan pengaruh dari pandemi Covid 19. Pada tahun tersebut terdapat kebijakan pemerintah untuk menutup obyek-obyek wisata selama pandemic berlangsung. Hal ini secara otomatis mempengaruhi pendapatan dari obyek wisata. Paska pandemi Covid 19, tren kunjungan wisata di tahun 2023 mulai pulih dan pendapatan dari obyek wisata naik menjadi 2.593.497 wisatawan.

Tabel II.21. Kunjungan Wisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No	Kunjungan Wisata	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	3.793.272	3.279.590	1.387.912	1.068.495	2.344.279	2.593.507
2	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	orang	3.793.184	3.279.441	1.387.862	1.068.495	2.344.273	2.593.497
3	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	88	149	50	0	6	10

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2019-2024

2.3.1.6 Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah penduduk yang bekerja dalam hal berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar di Kabupaten Purbalingga semakin menurun, sedangkan angkatan kerja semakin meningkat. Oleh karena itu, rasio kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dari angka 4,22% pada tahun 2018 kemudian turun menjadi 2,60 di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang berusaha dibantu buruh semakin menurun sehingga penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha juga semakin kecil.

Tabel II.22. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2023

No.	Kewirausahaan Daerah	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar)	orang	20.555	16.173	17.041	18.144	11.272	15.156
2	Jumlah Angkatan Kerja	orang	487.440	476.896	500.261	503.682	538.507	583.408
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,22	3,39	3,41	3,60	2,09	2,60

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024 (diolah)

2.3.1.7 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Kondisi di Purbalingga dalam kurun waktu 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB menurun yaitu dari 0,758 % di tahun 2022 menjadi 0,702 % di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah semakin menurun, dikarenakan banyak koperasi yang tidak aktif sehingga terjadi penurunan aset.

Tabel II.23. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2023

No.	Volume Usaha Koperasi	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1	Volume Usaha Koperasi	rupiah	218.476.485.476	219.276.867.277
2	PDRB ADHB	rupiah	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,758	0,702

Sumber: DinkopUKM dan BPS Kab. Purbalingga, 2023-2024 (diolah)

2.3.1.8 Return on Aset (ROA) BUMD

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. ROA BUMD di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi pada kisaran 3,82 di tahun 2019 menjadi 3,07 di tahun 2023.

Perusahaan BUMD yang ada di Kabupaten Purbalingga sejumlah 6 unit terdiri dari PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda), PT. BPRS Buana Mitra Perwira, Perumda BPR Artha Perwira, Perumda Air Minum Tirta Perwira, Perumda Owabong dan Perumda Puspahastama. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ROA BUMD yang ada di Kabupaten Purbalingga yang dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan total aset ke-6 BUMD menunjukkan bahwa rata-rata tingkat produktivitas perusahaan yang bergerak dalam sektor air minum cenderung lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan, pariwisata dan pangan.

ROA perusahaan yang bergerak dalam sektor air minum dan keuangan (bank perkreditan rakyat) menunjukkan angka yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata dan pangan. Bahkan ketika pandemi covid-19, ROA perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata mengalami kontraksi sampai dengan -10,14%. Sementara itu, perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan malah cenderung mengalami kenaikan signifikan sampai dengan 35,68%. Namun paska pandemi covid-19, perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan mengalami penurunan yang drastis. Tingkat produktivitas sektor pariwisata dan pangan sangat fluktuatif mengikuti perubahan kondisi daerah.

Tabel II.24. Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	PT. BPR BKK Purbalingga					
	Laba Bersih (Rp)	11.431.713.845	11.748.466.803	12.073.247.420	14.006.468.006	14.487.417.098
	Total Aset (Rp)	448.806.715.057	415.309.142.632	429.811.020.293	450.028.130.482	451.456.889.573

No	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
	ROA BUMD (%)	2,55	2,83	2,81	3,11	3,21
2	PT. BPRS Buana Mitra Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	3.099.785.080	3.410.935.639	4.417.141.065	5.428.665.576	6.252.736.395
	Total Aset (Rp)	165.899.152.276	185.464.803.368	210.963.974.291	264.771.152.154	336.709.466.946
	ROA BUMD (%)	1,87	1,84	2,09	2,05	1,86
3	Perumda BPR Artha Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	5.136.572.682	4.288.780.905	4.437.706.887	5.334.290.321	4.200.542.196
	Total Aset (Rp)	115.918.498.541	106.986.989.086	125.212.090.099	137.656.426.111	148.000.113.584
	ROA BUMD (%)	4,43	4,01	3,54	3,88	2,84
4	Perumda Air Minum Tirta Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	6.507.427.326	7.223.042.407	7.649.361.549	7.918.951.864	8.858.741.201
	Total Aset (Rp)	113.868.183.916	121.305.819.039	126.548.822.788	130.868.524.318	136.106.793.196
	ROA BUMD (%)	5,71	5,95	6,04	6,05	6,51
5	Perumda Owabong					
	Laba Bersih (Rp)	8.265.229.920	-7.657.214.189	-865.077.864	4.451.055.082	2.598.163.224
	Total Aset (Rp)	86.676.855.230	75.502.791.486	75.390.784.616	83.036.800.202	86.892.804.537
	ROA BUMD (%)	9,54	-10,14	-1,15	5,36	2,99
6	Perumda Puspahastama					
	Laba Bersih (Rp)	1.273.487.723	2.731.896.758	1.677.418.300	-14.600.954.806	-638.108.755
	Total Aset (Rp)	4.279.472.637	7.656.532.558	11.777.153.416	5.063.764.139	4.734.601.334
	ROA BUMD (%)	29,76	35,68	14,24	-288,34	-13,48
7	Agregat laba bersih seluruh BUMD	35.714.216.576	21.745.908.323	29.389.797.357	22.538.476.043	35.759.491.359
	Agregat aset seluruh BUMD	935.448.877.657	912.226.078.169	979.703.845.503	1.071.424.797.406	1.163.900.669.170
	ROA BUMD (%)	3,82	2,38	3,00	2,10	3,07

Sumber: Bag. Perekonomian Setda Kab. Purbalingga, 2015-2024 (diolah)

2.3.1.9 Disparitas Harga

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Terdapat 13 komoditas bapak (barang pokok) yang terdiri dari 1. Beras Medium, 2. Gula Pasir, 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana, 4. Daging Sapi Paha Belakang, 5. Daging Ayam Ras, 6. Telur Ayam Ras, 7. Tepung Terigu, 8. Kedelai Impor, 9. Cabe Merah Keriting, 10. Cabe Rawit Merah, 11. Bawang Merah, 12. Bawang Putih Impor Kating, dan 13. Ikan Kembung. Beberapa harga pangan 13 komoditas barang pokok di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

Tabel II.25. Harga Pangan Komoditas Barang Pokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Komoditas	Rata-rata	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Standar Deviasi	Koefisien Variasi
1	Beras Premium	15.614	16.231	14.443	1.015	6,50
2	Kedelai Biji Kering (Impor)	11.950	12.100	11.650	260	2,17
3	Bawang Merah	30.455	31.923	29.286	1.344	4,41
4	Bawang Putih Bonggol	35.295	35.885	35.000	511	1,45

No	Komoditas	Rata-rata	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Standar Deviasi	Koefisien Variasi
5	Cabai Merah Keriting	58.204	67.241	49.846	8.718	14,98
6	Cabai Rawit Merah	45.457	51.586	36.286	8.091	17,80
7	Daging Sapi Murni	134.936	135.000	134.808	111	0,08
8	Daging Ayam Ras	36.172	38.692	34.238	2.284	6,31
9	Telur Ayam Ras	28.155	30.577	26.095	2.263	8,04
10	Gula Pasir Curah/Lokal	16.546	17.000	16.176	418	2,53
11	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	17.028	17.293	16.577	393	2,31
	Minyak Goreng Curah	14.229	14.732	13.867	450	3,16
12	Tepung Terigu (Curah)	10.079	10.238	10.000	137	1,36
	Tepung Terigu Kemasan (non-curah)	12.540	12.619	12.500	69	0,55
13	Ikan Kembung	30.725	31.931	28.667	1.791	5,83

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2024

2.3.1.10 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah semakin tinggi. Semakin besar rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu dari 0,39% di tahun 2018 menjadi 0,26% di tahun 2023. Pada dasarnya tren pajak daerah di Kabupaten Purbalingga secara jumlah semakin meningkat, namun PDRB juga mengalami kenaikan yang lebih signifikan, sehingga rasio pajak daerah terhadap PDRB persentasenya lebih kecil.

Tabel II.26. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No	Pajak Daerah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penerimaan Pajak Daerah	rupiah	57.568.782.641	62.233.743.866	58.829.669.048	61.714.017.788	73.252.952.786	79.871.252.230
2	PDRB ADHB	rupiah	14.791.296.000.000	24.918.080.000.000	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	%	0,39	0,25	0,23	0,23	0,25	0,26

Sumber: Bakeuda dan BPS Kab. Purbalingga, 2023-2024 (diolah)

2.3.1.11 Total Dana Pihak Ketiga (DPK)/PDRB

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perbankan di Kabupaten Purbalingga yang meliputi BPR

BKK Purbalingga (Perseroda), BPRS Buana Mitra Perwira, BPR Artha Perwira dan Bank Jateng KC Purbalingga.

Total DPK terhadap PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai total DPK terhadap PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio total DPK terhadap PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, perbandingan total DPK perbankan di Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan PDRB semakin menurun. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan semakin menurun dimana kondisi tahun 2023 berada pada angka 4,71%.

Tabel II.27. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No	Dana Pihak Ketiga	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Dana Pihak Ketiga	rupiah	3.393.227.634.634	3.682.088.284.540	4.000.107.003.173	4.099.106.921.021	4.115.231.570.709
2	PDRB ADHB	rupiah	24.918.080.000.000	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	5,56	5,43	5,66	4,94	4,71

Sumber: OJK Purwokerto, 2020-2024 (diolah)

2.3.1.12 Total Kredit/PDRB

Total kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Total kredit terhadap PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, perbandingan total kredit perbankan di Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan PDRB meningkat dengan laju yang kecil. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha usaha dalam perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Kondisi pada tahun 2023 total kredit /PDRB berada pada angka 6,24%.

Tabel II.28. Total Kredit/PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

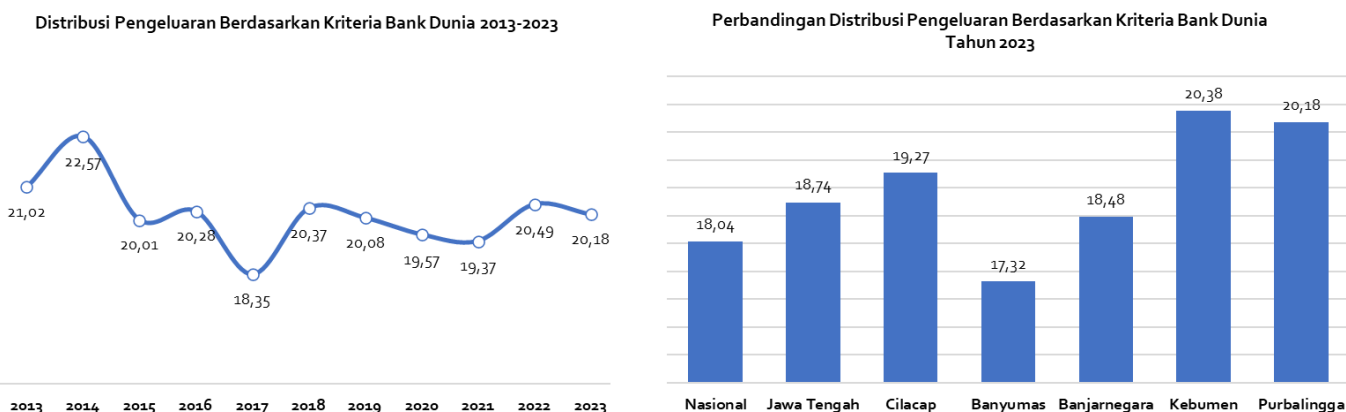
No	Kredit	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Kredit	rupiah	3.833.155.971.043	4.164.076.408.588	4.711.355.286.476	5.249.911.301.217	5.622.093.882.020
2	PDRB ADHB	rupiah	24.918.080.000.000	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000
3	Total Kredit/PDRB	%	6,13	6,29	6,28	6,23	6,24

Sumber: OJK Purwokerto, 2023-2024 (diolah)

2.3.1.13 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 % penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 % penduduk terendah lebih besar dari 17 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia untuk Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung stabil, dengan persentase pengeluaran pada kelompok 40 % penduduk terendah selalu lebih besar dari 17 % sehingga menunjukkan ketimpangan rendah.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

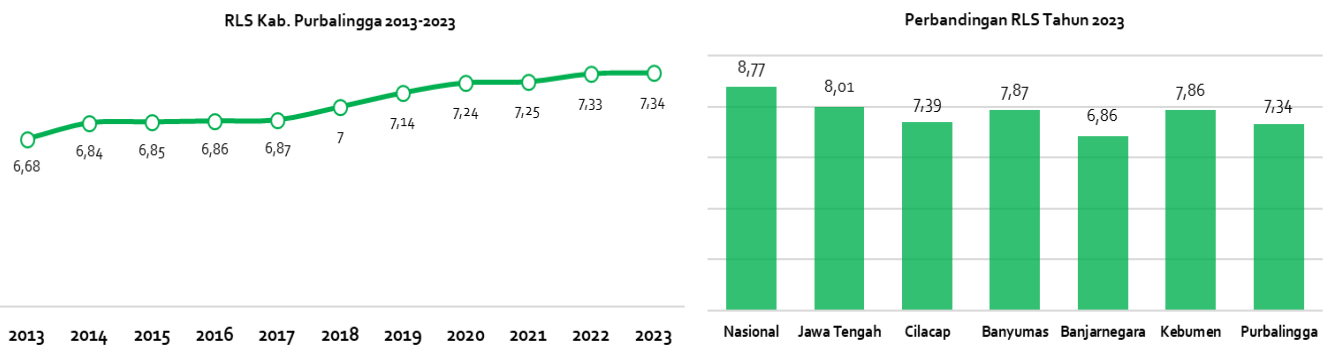
Gambar 2. 42. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2013 – 2023 mengalami peningkatan secara moderat, yang menunjukkan kondisi yang baik. Pada tahun 2013 berada pada angka 6,68 tahun kemudian di akhir tahun 2023 meningkat sebesar 7,34 tahun. Nilai pada tahun 2023 tersebut menunjukkan bahwa penduduk bersekolah di Kabupaten Purbalingga rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP.

RLS di Kabupaten Purbalingga tersebut menempati peringkat ke-9 terbawah di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Blora, Cilacap, Tegal dan Grobogan. Dibanding dengan kabupaten sekitar, RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah RLS Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Cilacap dan Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Banjarnegara.



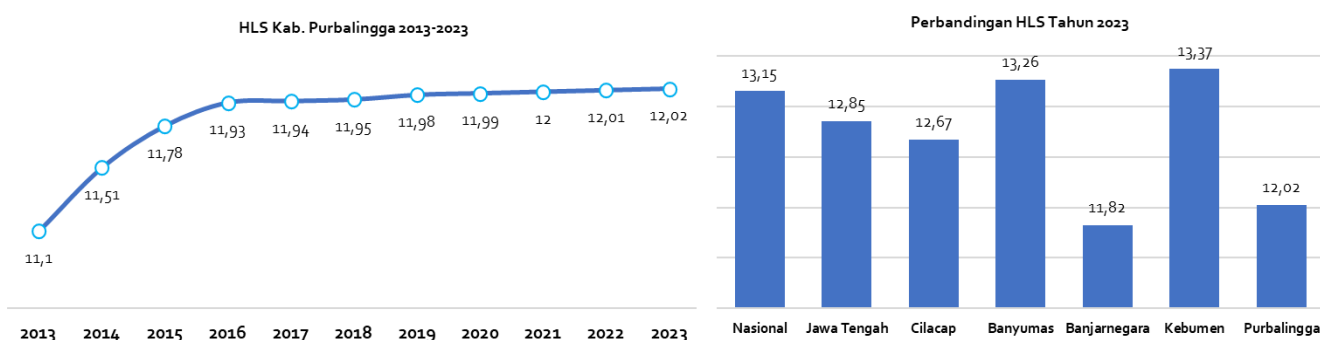
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2014-2023

Gambar 2. 43. RLS Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2022

2.3.2.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2013 – 2023 dimana pada tahun 2013 berada pada angka 11,1 tahun kemudian meningkat menjadi 12,02 tahun pada tahun 2023. Dalam 10 tahun terakhir HLS Kabupaten Purbalingga meningkat 1 tahun, dimana kenaikan tersebut menunjukkan kondisi yang baik. Angka HLS Purbalingga pada tahun 2023 sebesar 12,02 tahun menunjukkan bahwa warga Purbalingga berpeluang untuk melanjutkan sekolahnya hingga 12 tahun lamanya atau sampai lulus SMA dan lanjut ke Diploma 1.

HLS di Kabupaten Purbalingga tersebut menempati peringkat ke-4 terbawah di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Wonosobo, Pemalang dan Banjarnegara. Dibanding dengan kabupaten sekitar, HLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah HLS Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Kebumen, namun masih di atas Kabupaten Banjarnegara.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 44. HLS Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

2.3.2.3 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Pada tahun 2022, Kemendikburistek meluncurkan platform Rapor Pendidikan Indonesia sebagai tema peluncuran episode kesembilan belas program Merdeka Belajar. Rapor pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik evaluasi internal maupun eksternal yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (*output*). Rapor pendidikan juga dapat digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisis, merencanakan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan dapat melihat secara detail elemen-elemen per dimensi, sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di tempat masing-masing dengan data yang objektif dan tersaji secara terintegrasi.

Di dalam rapor pendidikan, terdapat beberapa indikator yaitu kemampuan literasi dan numerasi yang dibagi pada jenjang SD dan SMP. Hasil rapor pendidikan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dari skor literasi dan numerasinya sebagai berikut:

Tabel II.29. Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi dan Numerasi) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2023

No.	Literasi Numerasi	Satuan	Tahun	
			2022	2023
	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):			
1	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	56,15	66,64
2	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	59,22	59,15
3	c) Numerasi SD/Sederajat	%	31,49	49,39
4	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	43,14	42,42

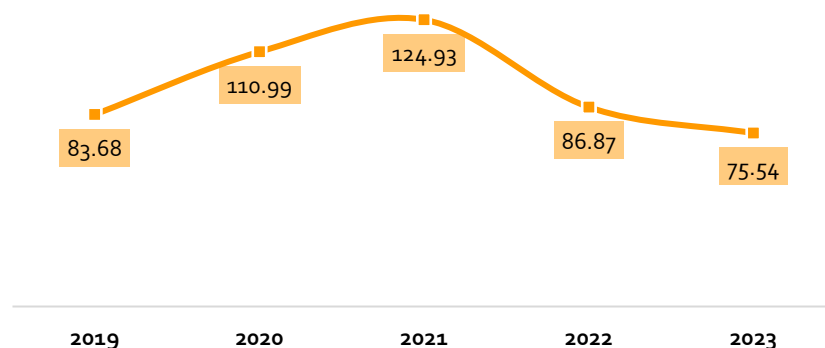
Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2023-2024

Dari skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD di Kabupaten Purbalingga di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Walaupun mengalami kenaikan namun skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD belum mencapai kompetensi minimum , karena masih dibawah 75%. Sementara itu, skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SMP di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, dengan skor kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD juga belum mencapai kompetensi minimum , karena masih dibawah 75%. Pada jenjang SMP perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

2.3.2.4 Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 Tahun

Salah satu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yaitu pelayanan dasar pendidikan PAUD/Pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 – 6 tahun di Kabupaten Purbalingga mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2023, APS usia 5-6 tahun yaitu sebesar 75,54 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 24,46 % penduduk usia PAUD (5-6 tahun) di Kabupaten Purbalingga yang belum memiliki kemampuan atau kemauan untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 5-6 tahun. Kemampuan tersebut diartikan kemampuan dalam hal kepeminatan maupun kemampuan finansial. Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian lagi ke depannya karena pada jenjang PAUD menjadi tahap awal pendidikan anak yang dapat memberi rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.



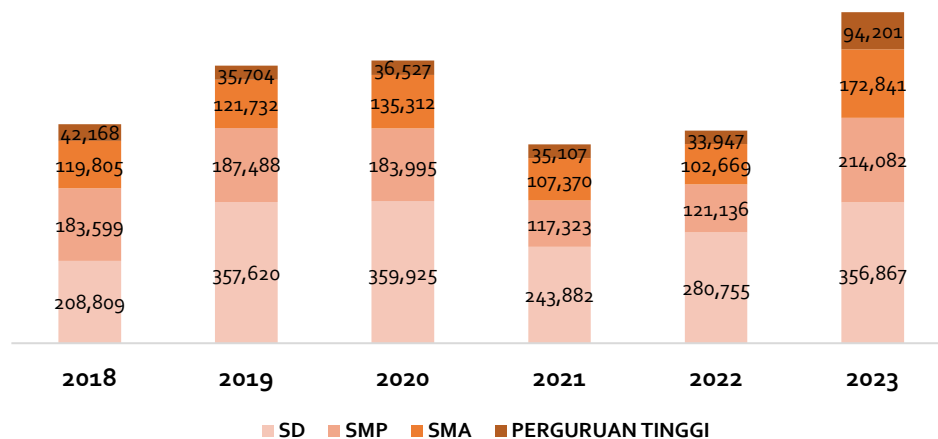
Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar 2. 45. Angka Partisipasi Sekolah Usia 5 – 6 Tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

2.3.2.5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

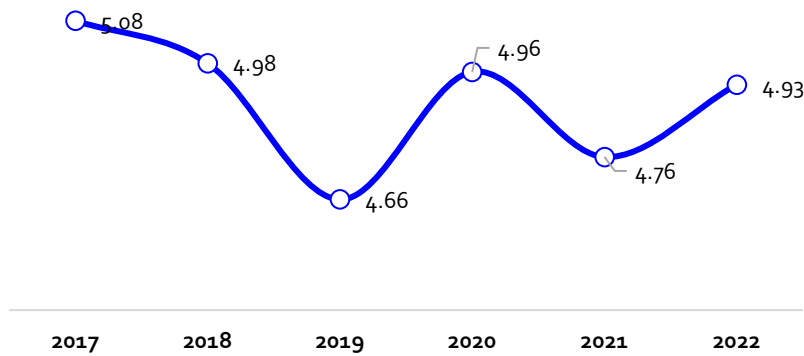
Komposisi penduduk bekerja di Kabupaten Purbalingga menurut pendidikannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa penduduk bekerja dengan tamat SD masih lebih besar dibanding dengan tamat SMP, tamat SMA & SMK maupun tamat Perguruan Tinggi (PT). Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Purbalingga sebagian besar sudah mampu menamatkan pendidikan sekolah dasar/ sederajat dan lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Purbalingga masih banyak yang dapat menampung untuk tamat SD. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan tinggi (DI, DII, DIII, DIV/S1) mempunyai persentase yang lebih kecil.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berada pada angka 5,08 % namun kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2019 di angka 4,66 %. Pada tahun 2020, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas kembali naik menjadi 4,96, menurun di tahun 2021 dan kembali naik menjadi 4,93 di tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi semakin meningkat dan secara tidak langsung menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik dimana penduduk semakin banyak yang sadar pentingnya pendidikan tinggi.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024

Gambar 2. 46. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2023

Gambar 2. 47. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2022

2.3.3 Daya Saing Infrastruktur

2.3.3.1 Kinerja Infrastruktur Jalan

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga sesuai kewenangannya pada dasarnya terdiri dari ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Pemalang. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, panjang jalan kewenangan kabupaten yang ada di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Pada tahun 2013, panjang jalan adalah 710.204 km kemudian bertambah menjadi 888.087 km pada tahun 2017 dan kemudian bertambah lagi menjadi 952.602 km di tahun 2023 karena ada penambahan beberapa ruas jalan antar desa yang alih status menjadi jalan kabupaten.

Tabel II.30. Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2023

No.	Kondisi Jalan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kondisi baik	km	431.558	515.250	587.983	608.251	746.539	503.293	678.090	593.877	625.166	566.679	443.981
2	Kondisi sedang	km	133.652	106.150	86.577	94.377	88.914	256.174	100.590	103.243	163.167	191.728	306.940
3	Kondisi rusak	km	144.994	88.804	109.673	60.889	49.826	75.008	28.750	83.673	43.015	64.704	52.410
4	Kondisi rusak berat	km	0	0	0	20.716	2.808	53.612	80.660	107.294	56.739	64.977	149.271
Total Panjang Jalan		km	710.204	710.204	784.233	784.233	888.080	888.080	888.080	888.080	888.080	888.080	952.602

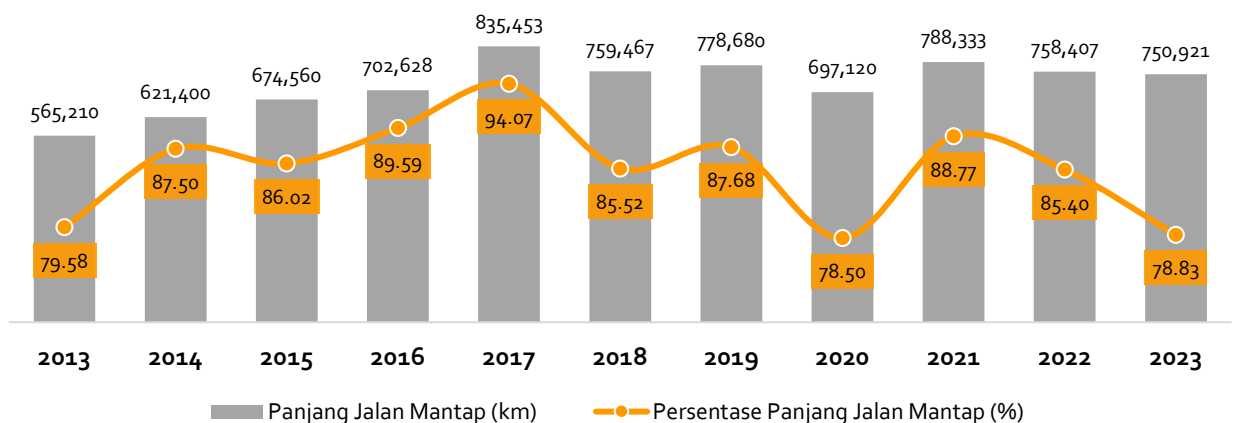
Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2014-2024

Dilihat dari kondisinya, jalan kondisi baik dan sedang semakin meningkat secara kuantitas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2023, jalan kondisi baik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa ruas jalan kabupaten yang kondisinya baik ada yang beralih status menjadi jalan provinsi.

Sementara itu, jalan kondisi rusak semakin menurun secara kuantitas, yang menunjukkan bahwa semakin banyaknya kondisi jalan yang mengalami peningkatan menuju ke arah baik dan sedang.

Namun, permasalahan yang terjadi yaitu jalan kondisi rusak berat malah semakin meningkat secara kuantitas. Hal tersebut terjadi seiring dengan penambahan beberapa jalan antar desa yang beralih status menjadi jalan kabupaten sehingga menambah kuantitas jalan kondisi rusak berat.

Dari kenaikan dan penurunan kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga tersebut, dapat diketahui perkembangan persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap (kondisi jalan baik dan sedang) di Kabupaten Purbalingga, dimana selama 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap mencapai 79,58% kemudian semakin meningkat dimana peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai 94,07%. Namun kemudian, terjadi kenaikan dan penurunan jalan kondisi permukaan mantap seiring dengan fluktuasi anggaran dana alokasi untuk penanganan jalan. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 78,5 %. Kemudian, sampai dengan tahun 2023 persentase panjang jalan mantap mencapai 78,83%.



Sumber: DPU-PR Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 48. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013– 2023

2.3.3.2 Kinerja Infrastruktur Perhubungan

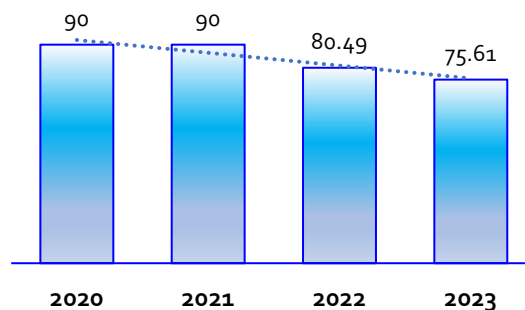
Sistem transportasi di Kabupaten Purbalingga didukung dengan adanya sistem jaringan transportasi darat berupa sistem jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Untuk menunjang kegiatan transportasi darat, terdapat beberapa terminal yang terdiri dari: 1 terminal Tipe A yaitu Terminal Bobotsari yang dikelola Pemerintah Pusat, 1 terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga yang dikelola Pemerintah Provinsi, dan 4 terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Daerah

Kabupaten Purbalingga meliputi: Terminal Bukateja, Kejobong, Penaruban, dan Jompo.

Terdapat pula sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga dengan adanya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (JBS) yang berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Kemangkong. Keberadaan Bandara JBS di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dari kabupaten sekitar seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Pemalang dan Kebumen. Saat ini, Bandara JBS juga digunakan untuk penerbangan komersil dan *feeder* umroh. Keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya.

Sementara itu, moda transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga saat ini terdiri dari: mikro bus, angkutan kota, angkutan desa dan taksi. Bahkan saat ini juga telah didukung dengan keberadaan BRT (*Bus Rapid Transit*) Purwokerto-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja dengan *shelter* yang terpusat pada konektivitas Terminal Jompo, Terminal Purbalingga dan Terminal Bukateja.

Keberadaan moda transportasi berupa angkutan kota dan angkutan desa, sangat mempengaruhi rasio konektivitas jalan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rasio konektivitas jalan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan akibat berkurangnya trayek angkot dan angkudes. Jumlah trayek angkot semakin menurun dari 14 trayek menjadi 12 trayek. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kebutuhan penumpang yang melewati jalur trayek tersebut, sehingga trayek tersebut menjadi non aktif. Sedangkan jumlah trayek angkudes juga semakin menurun dari 22 trayek menjadi 19 trayek. Hal tersebut dikarenakan banyak armada yang tidak layak beroperasi dan perlu peremajaan. Berkurangnya minat masyarakat terhadap angkot dan angkudes perlu diantisipasi dengan penyediaan angkutan umum massal yang lebih nyaman dan terjangkau, agar dapat bisa merubah *mindset* masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.



Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2014-2024

Gambar 2. 49. Rasio Konektivitas Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2023

Selain didukung dengan keberadaan moda transportasi, sistem jaringan transportasi di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan fasilitas kelengkapan jalan yang terpasang pada jaringan jalan. Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan terutama pada rambu jalan yang terpasang di jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari keseluruhan fasilitas kelengkapan jalan tersebut, pada tahun 2023 terhitung sebanyak 145 ruas jalan di Kabupaten Purbalingga yang memenuhi minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan. Apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh ruas jalan yang ada yaitu sejumlah 466 ruas, maka **persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan yaitu sebesar 31,12 %**. Persentase tersebut tergolong kecil, sehingga diperlukan perhatian ke depannya untuk pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan pada setiap ruas jalannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tabel II.31. Fasilitas Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang pada Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No.	Sarana Perhubungan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan	unit	4.773	5.107	5.586	5.841	6.060	6.462
	1. Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	unit	113	116	118	132	139	139
	2. Penambahan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	unit	13	3	2	14	7	0
	3. Rambu Jalan	unit	817	867	977	1.087	1.220	1.220
	4. Penambahan Rambu Jalan	unit	44	50	110	110	133	0
	5. Guardrail	m2	3.184	3.364	3.632	3.632	3.668	3.668
	6. Penambahan Guardrail	m2	200	180	268	0	36	0
	7. Paku Marka	unit	559	659	759	759	759	759
	8. Penambahan Paku Marka	unit	N/A	100	100	0	0	0
	9. Traffic Cone	unit	100	100	100	231	274	274
	10. Penambahan Traffic Cone	unit	100	0	0	131	43	0
	11. Marka jalan	m2	0	0	0	0	0	400,80
	12. CCTV	unit	0	1	0	0	0	1

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2019-2024

Terkait dengan aspek peningkatan keselamatan jalan, pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan kabupaten merupakan salah satu perhatian penanganan sektor perhubungan di Kabupaten Purbalingga. Data kecelakaan lalu lintas di Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 579 kejadian sampai dengan tahun 2023 sebanyak 660 kejadian. Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Kabupaten Purbalingga berada di ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu ruas jalan Purbalingga – Bobotsari, Ruas Jalan Bobotsari – Pemalang, Purbalingga – Sokaraja dan Purbalingga – Klampok.

Tabel II.32. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Laka Lantas	kejadian	579	439	443	690	660
2.	Jumlah Meninggal	jiwa	79	77	56	105	63
3.	Jumlah Luka Berat	orang	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Luka Ringan	orang	712	495	508	843	782
5.	Kerugian Materiil	Rp. (000,-)	344.300	239.100	187.500	352.400	434.400
6.	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	angka	579	439	443	690	660

Sumber: Polres dan Dinhub Kab. Purbalingga, 2024

Begitu pula dengan tingkat kemacetan di Kabupaten Purbalingga yang terjadi khususnya pada jam kerja (pagi dan sore hari), menunjukkan bahwa semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang ada. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga untuk meminimalisir tingkat kemacetan akibat semakin banyaknya kendaraan motor pribadi salah satunya dengan menyediakan transportasi umum massal yang nyaman. Transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga masih membutuhkan beberapa perbaikan dengan mengintegrasikan jaringan transportasi darat dan udara melalui integrasi BRT, angkutan kota, dan angkutan perdesaan agar pelayanan menjadi lebih optimal dan memudahkan masyarakat dalam mobilitasnya sehingga tercipta keamanan, kenyamanan dan saling terintegrasi.

Tabel II.33. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

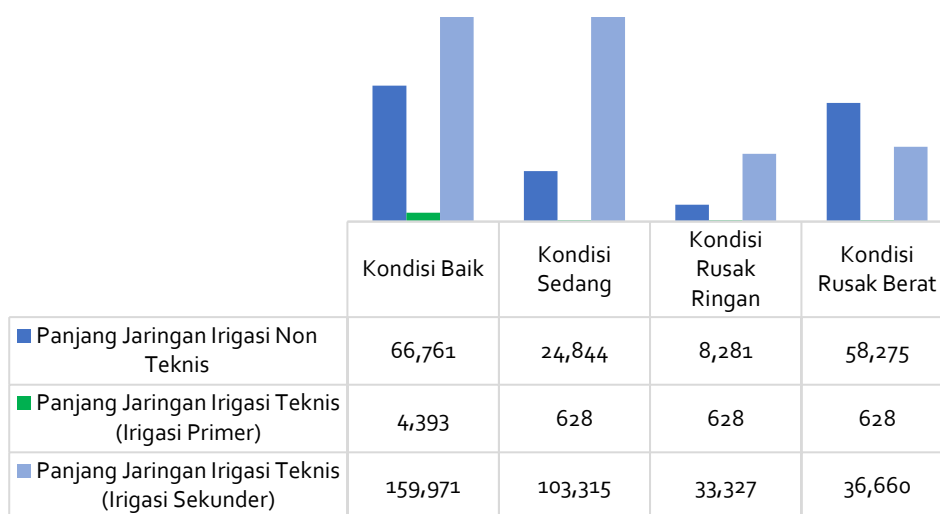
No.	Uraian	Satuan	Tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	A-1 Mobil penumpang pribadi/ Plat hitam	unit	18.231	20.437	20.264	22.229	23.924	25.555	27.470	29.118
2.	A-2 Mobil penumpang umum/ Plat kuning	unit	773	745	750	753	756	778	782	785
3.	A-3 Mobil penumpang pemerintah/ Plat merah	unit	374	384	382	403	406	415	434	449
4.	B-1 Bus/Micobus/ Plat hitam	unit	100	125	127	139	154	167	179	196
5.	B-2 Bus/Micobus umum/ Plat kuning	unit	227	223	241	249	253	251	256	265
6.	B-3 Bus/Micobus Pemerintah/ Plat merah	unit	16	16	35	37	37	40	40	40
7.	C-1 Mobil pickup/light truck/truck (mobil beban)/ Plat hitam	unit	9.919	10.584	10.566	11.008	11.364	11.770	12.101	12.319
8.	C-2 Mobil pickup/light truck/truck (mobil beban umum)/ Plat kuning	unit	1.493	1.526	1.549	1.649	1.706	1.758	1.810	1.832

No.	Uraian	Satuan	Tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	C-3 Mobil pickup/light truck/truck (mobil beban pemerintah)/ Plat merah	unit	96	99	100	106	109	114	119	124
10.	D-1 Kendaraann khusus (alat berat) pribadi/ Plat hitam	unit	23	22	22	23	23	23	23	-
11.	D-2 ndaraann khusus (alat berat) pemerintah/ Plat merah	unit	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	E-1 Sepeda motor pribadi/ Plat hitam	unit	321.235	341.974	343.002	363.421	375.861	393.286	409.605	426.315
13.	E-2 Sepeda motor pemerintah/ Plat merah	unit	2.708	2.688	2.662	2.714	2.733	2.752	2.787	2.932
JUMLAH		unit	355.195	378.823	379.700	402.731	417.326	436.909	455.606	474.275

Sumber: UPPD Kab. Purbalingga, 2023

2.3.3.3 Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten

Potensi sumber daya air di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya cukup berlimpah, baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Kondisi jaringan irigasi baik teknis maupun non teknis di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dengan laju peningkatan yang relatif kecil. Dilihat dari kondisinya, sebagian besar jaringan irigasi mempunyai kondisi yang baik walaupun masih ada beberapa kondisi jaringan irigasi yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Kondisi sistem irigasi dengan prasarana fisik yang mengalami kerusakan akan menyebabkan sitem irigasi tidak bisa berfungsi secara optimal.



Sumber: DPU-PR Kab. Purbalingga, 2024

Gambar 2. 50. Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Dalam menilai kinerja sistem irigasi di Kabupaten Purbalingga, saat ini yang masih tercatat hanya pada aspek kondisi prasarana fisik dengan melihat pada bangunan irigasi yang ada baik berupa bendung maupun Daerah Irigasi (DI). Jumlah bendung di Kabupaten Purbalingga sampai dengan saat ini mencapai 207 unit. Jumlah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga yaitu berjumlah 255 DI dengan luas daerah irigasi yaitu 19.159 Ha.

Dari luasan daerah irigasi tersebut, yang mampu terlayani jaringan irigasi selama 6 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Indeks kinerja sistem irigasi menunjukkan penurunan pada 3 tahun awal, kemudian 2 tahun berikutnya kinerjanya beranjak naik. Namun pada tahun 2023, indeks kinerja sistem irigasi kembali menurun pada angka 72 %. Kinerja irigasi tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya peningkatan terhadap pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kinerja kondisi fisik prasarana tersebut juga perlu mendapat perhatian pada aspek produktifitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, serta kondisi P3A agar kinerja sistem irigasi dapat lebih komprehensif dilaksanakan.

Tabel II.34. Indeks Kinerja Sistem Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2023

No.	Kondisi Irigasi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Daerah Irigasi	ha	19.158	19.158	19.158	19.159	19.159	19.159
2	Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi	ha	13.729	13.327	12.644	14.368	14.560	13.794
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	71,66	69,56	66	74,99	76	72

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2019-2024

2.3.3.4 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: 1). Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan 2). Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Klasifikasi rumah tangga memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu 1). Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2). Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²; 3). Memiliki akses air minum layak; dan 4). Memiliki akses sanitasi layak.

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 6 tahun terakhir semakin meningkat. Hal tersebut

terjadi seiring dengan peningkatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dilaksanakan pada berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jumlah RTLH didasarkan pada data PBDT 2015, dimana dalam kurun waktu delapan tahun terakhir intervensi penanganannya semakin meningkat.

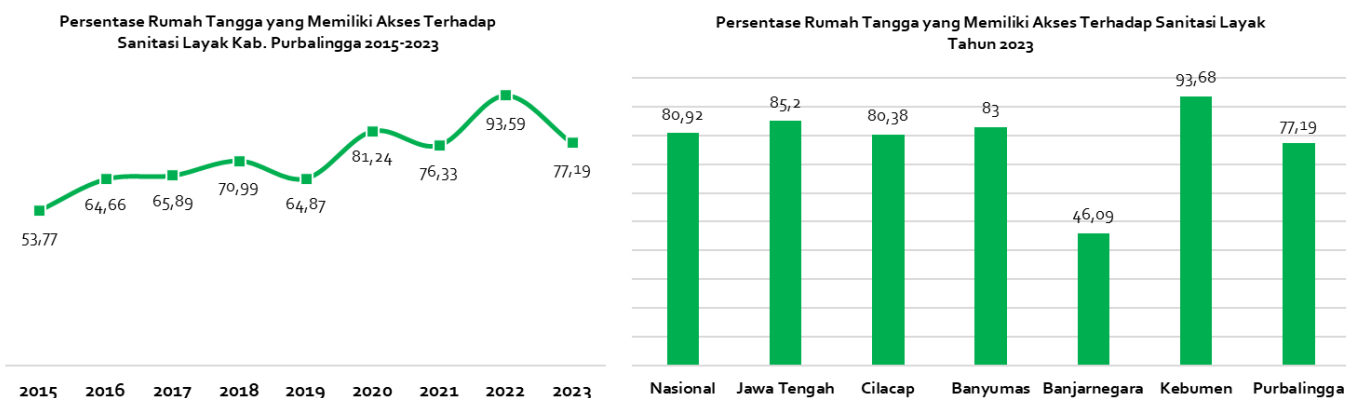
Tabel II.35. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No.	Akses Hunian Layak	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah	unit	247.354	248.032	248.710	248.949	247.852	247.852
2	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	unit	177.750	178.428	179.106	179.345	198.936	201.419
3	Tambahan Intervensi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	unit	11.229	15.161	17.356	19.370	20.688	23.171
4	Jumlah RLH dan RTLH yang diintervensi	unit	188.979	193.589	196.462	198.715	219.624	224.590
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,40	78,05	78,99	79,82	88,61	90,61

Sumber: BPS dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2019-2024

2.3.3.5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kondisi sanitasi di Kabupaten Purbalingga saat ini ditunjukkan pada kondisi sanitasi layak dimana persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak baru mencapai 53,77 % kemudian meningkat sampai dengan tahun 2018 di angka 70,99 %. Kemudian tahun berikutnya mengalami penurunan dan kembali naik dimana mencapai kenaikan tertinggi dalam 8 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 93,59 %. Akan tetapi, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan mencapai 77,19%. Kondisi tersebut terjadi khususnya pada kawasan perdesaan. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Kebumen, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2016-2024

Gambar 2. 51. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2023

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Purbalingga memiliki akses terhadap sarana jamban baik ke sarana-sarana pribadi dan umum/komunal. Akan tetapi sistem pembuangan limbah sarana jamban masih ada yang disalurkan ke tempat pembuangan yang kurang baik kualitasnya dan ke tempat terbuka seperti lubang besar (cubluk) maupun ke sungai. Kondisi sanitasi tersebut belum menunjukkan akses sanitasi aman. Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Saat ini sudah terdapat SPALD-T di Kabupaten Purbalingga, namun belum terdapat IPLT untuk mewadahi pengolahan lumpur tinja. Kondisi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 masih sebesar 0,82 persen dengan rincian yang ditunjukkan pada tabel II.36.

Tabel II.36. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

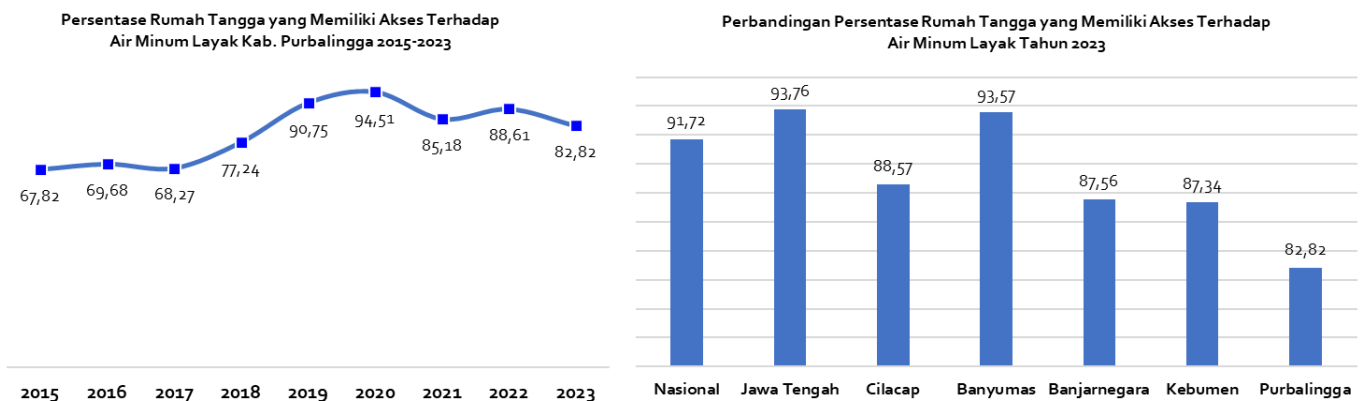
No.	Akses Sanitasi Aman	Satuan	2023
1	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	unit	321.025
2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	unit	2.635
3	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap IPLT	unit	0
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,82

Sumber: BPS dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2024

2.3.3.6 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa

Kondisi air minum di Kabupaten Purbalingga saat ini ditunjukkan dengan akses terhadap air minum layak. Selama kurun waktu 9 tahun terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten

Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak sudah mencapai angka 67,82 % kemudian naik terus dengan kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2020 di angka 94,51 %. Kemudian pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak mengalami penurunan di angka 85,18 % dikarenakan adanya penambahan jumlah rumah non perpipaan sehingga menyebabkan berkurangnya akses air minum untuk masyarakat. Kemudian di tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak naik menjadi 88,61 %, namun turun kembali di tahun 2023 menjadi 82,82%. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak Kabupaten Purbalingga paling rendah dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2016-2024

Gambar 2. 52. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2023

Kenaikan dan penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Purbalingga tersebut terjadi karena terkait dengan ketersediaan air baku. Secara umum, semua desa/kelurahan telah mendapatkan alokasi air minum baik melalui PDAM, Pamsimas, maupun SPAM yang dikelola desa. Apabila dilihat dari kondisi daya dukung air di Kabupaten Purbalingga saat ini, masih dapat dikatakan surplus artinya ketersediaan air yang ada mampu mencukupi kebutuhan airnya. Namun demikian, masih terdapat di beberapa desa yang belum tersedia 100%. Kendala yang dihadapi antara lain kondisi topografi serta ketiadaan sumber air baku yang memadai. Walaupun demikian, upaya peningkatan akses air minum harus terus ditingkatkan, baik melalui perluasan akses layanan PDAM, pembangunan SPAM regional kecamatan untuk mengatasi beberapa wilayah desa yang tidak memiliki sumber air baku.

Dilihat dari jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang terhubung dengan jaringan perpipaan PDAM, akses terhadap air minum perpipaan di

Kabupaten Purbalingga belum memenuhi sebagian besar kecamatan yang ada khususnya pada Ibu Kota Kecamatan (IKK). Di Kabupaten Purbalingga, baru 13 Kecamatan yang dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM yaitu Purbalingga, Bobotdari, Kutasari, Kejobong, Mrebet, Rembang, Bukateja, Kemangkon, Padamara, Kalimanah, Kaligondang, Bojongsari, dan Karangreja. Akses terhadap air siap minum perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 dapat ditunjukkan pada tabel II.37.

Tabel II.37. Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Akses Sanitasi Aman	Satuan	2023
1	Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL)	unit	59.427
2	Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM	unit	172.090
3	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	34,53

Sumber: PDAM dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2024

2.3.3.7 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twitter, whatsapp) dalam 3 bulan terakhir menurut jenis kelamin di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa akses internet telah digunakan oleh sebagian besar (>50 persen) penduduk. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas anak usia 5 tahun ke atas sudah dapat mengakses internet untuk media sosial sehingga penggunaan media digital di kalangan anak-anak dan remaja sudah marak dilakukan. Secara rinci dapat ditunjukkan pada tabel II.38.

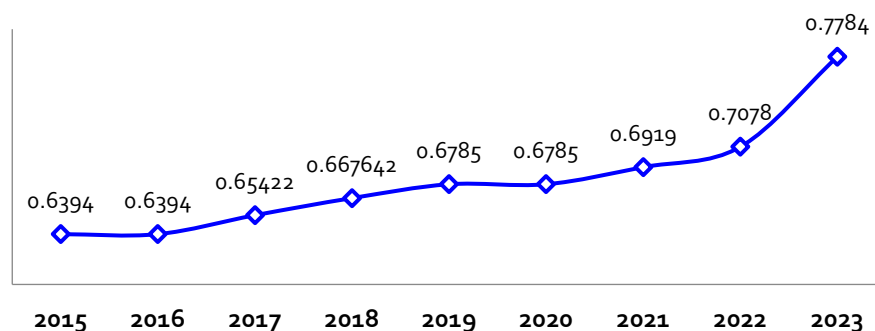
Tabel II.38. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Wilayah	Satuan	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
Nasional	%	52,52	47,48	50,00
Provinsi Jawa Tengah	%	65,79	58,67	62,20
Kabupaten Purbalingga	%	56,84	55,10	55,96

Sumber: BPS, 2021

2.3.3.8 Persentase Desa Mandiri

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-beda. Salah satu indikator untuk mengetahui pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Purbalingga khususnya status desanya yaitu dengan melihat nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks komposit yang dibentuk dalam menghitung IDM berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga selalu naik dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, dimana dari tahun 2015 mempunyai angka sebesar 0,6394 kemudian naik di angka 0,7784 pada tahun 2023.



Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2016-2024

Gambar 2. 53. IDM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2023

Secara rinci status desa di Kabupaten Purbalingga paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, pada tahun 2016 masih ada 2 desa sangat tertinggal di Kabupaten Purbalingga yaitu Desa Tamansari (Kec. Karangmoncol) dan Desa Kertanegara (Kec. Kertanegara). Kemudian kedua desa tersebut naik statusnya menjadi desa tertinggal. Begitu pula dengan desa tertinggal yang semula berjumlah 18 desa pada tahun 2015 kemudian menurun menyisakan 2 desa di tahun 2021 yaitu Desa Sirau (Kec. Karangmoncol) dan Desa Banjarsari (Kec. Bobotsari). Pada tahun 2022 sudah tidak ada desa tertinggal karena naik statusnya menjadi desa berkembang. Kondisi penurunan jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan kondisi yang bagus karena desa-desa tersebut menunjukkan mampu mengatasi faktor kerentanan seperti terjadinya guncangan ekonomi, penanganan bencana alam maupun terjadinya konflik sosial.

Sementara itu untuk desa berkembang di Kabupaten Purbalingga jumlahnya fluktuatif selama kurun waktu 9 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya tambahan

desa yang naik statusnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang ataupun penurunan karena kenaikan status desa berkembang menjadi desa maju maupun desa mandiri. Kenaikan status desa berkembang menjadi desa maju maupun desa mandiri biasanya terjadi karena adanya perkembangan kemampuan desa dalam mengelola potensi dan memberikan inovasi kewirausahaan sehingga mendukung gerak kemajuan desa. Sampai dengan tahun 2023 masih ada 24 desa dengan status berkembang.

Sedangkan desa maju dan mandiri ada di Kabupaten Purbalingga jumlahnya semakin meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2023. Desa maju pada tahun 2015 sebanyak 8 desa meningkat menjadi 151 desa di tahun 2023. Untuk desa mandiri, yang mulai muncul pada tahun 2018 sebanyak 1 desa yaitu Desa Bojongsari (Kec. Bojongsari) kemudian meningkat menjadi 49 desa di tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan kemampuan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan yang membawanya menjadi desa mandiri. Secara rinci perkembangan jumlah status desa di Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil IDM yang bersumber dari Kementerian Desa PDTT dalam kurun waktu 9 tahun dapat dilihat pada tabel II.39.

Tabel II.39. Perkembangan Status Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2023

No.	Status Desa	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	desa	0	0	0	1	1	2	4	6	49
2	Persentase Desa Mandiri	persen	0	0	0	0,45	0,45	0,89	1,79	2,68	21,88
3	Maju	desa	8	21	21	38	40	51	65	81	151
4	Berkembang	desa	16	148	159	155	169	162	153	137	24
5	Tertinggal	desa	18	50	41	30	14	9	2	0	0
6	Sangat Tertinggal	desa	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2016-2024

Untuk selanjutnya pada perencanaan tahun 2025-2045 capaian pembangunan desa akan diukur menggunakan Indeks Desa (ID). Berdasarkan Surat B.0308/Seskab/PMK/06/2023 atas kesepakatan bersama antara PPN/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kemenko PMK, Sekretaris Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, BPS dan Kementerian Keuangan, menjadikan Indeks Desa sebagai indeks tunggal pengukuran pembangunan desa untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa, dimana:

- Sumber Data : berasal dari pengumpulan data primer oleh Kepala Desa (atau yang ditugaskan) dengan didampingi Pendamping Lokal Desa. Indeks Desa tidak lagi berbasis data Podes (BPS) karena mempertimbangkan kesinambungan data (Podes tidak dimutakhirkan setiap tahun).

- b. Verifikasi data : dilakukan secara berjenjang di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi oleh OPD didampingi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), sehingga lebih menjamin kualitas data.
- c. Dimensi dan Indikator : terdapat 6 Dimesi yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Pengurangan barang modal di sisi lain mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, PMTB di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel II.40.

Tabel II.40. Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No.	PTMB	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB ADHK)	miliar rupiah	3.382,69	3.551,05	3.372,54	3.578,70	3.658,63	3.804,29
2	PDRB ADHB	miliar rupiah	23.190,33	24.918,08	25.081,59	26.393,81	28.820,82	31.224,55
3	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	20,55	20,42	19,64	20,18	19,57	19,48

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024 (diolah)

2.3.4.2 Kapabilitas Inovasi

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dihitung berdasarkan 4 komponen dan dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Salah satunya terdapat pilar kapabilitas inovasi yang menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses- proses secara

tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. Pilar kapabilitas inovasi menggambarkan 2 dimensi yang berupa: keanekaragaman dan kolaborasi, serta riset dan komersialisasi dengan 12 indikator di dalamnya. Indikator kapabilitas meliputi keanekaragaman tenaga kerja, pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset serta aplikasi merek dagang.

Pada dasarnya kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Kapabilitas inovasi digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Hal tersebut dikarenakan akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.

Pengukuran IDSD yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir skor IDSD di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 2,90 di tahun 2022 menjadi 3,06 di tahun 2023. Dalam pilar kapabilitas inovasi (pilar 12) juga terdapat peningkatan dari 1,06 menjadi 1,70. Skor tersebut masih dalam skala yang rendah.

Tabel II.41. Skor IDSD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2023

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,19	2,34	3,06	2,68	4,08	2,76	2,42	2,89	3,14	1,16	5,00	1,06	2,90
2023	4,39	1,82	4,33	2,98	4,10	3,14	2,41	2,65	2,00	4,38	2,86	1,70	3,06

Sumber: BRIN, 2023-2024

Secara rinci indikator dalam pilar Kapabilitas Inovasi untuk Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel II.42. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Purbalingga masih sangat kurang dalam indikator publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset serta indeks keunggulan lembaga riset.

Tabel II.42. Skor Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Dimensi	Indikator	Skor
1	Keanekaragaman dan Kolaborasi	Keanekaragaman tenaga kerja	4,13
2	Riset	Publikasi ilmiah	2,31
		Aplikasi Kekayaan intelektual (KI)	1,43
		Belanja riset	0,03
		Indeks keunggulan lembaga riset	0,02
3	Komersialisasi	Aplikasi merek dagang	2,28

Sumber: BRIN, 2024

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Kemajuan fungsi penunjang pemerintahan dapat dilihat dari indikator yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional yaitu: nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP bermanfaat sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, Nilai SAKIP di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai yang semula dalam 5 tahun berada pada nilai CC sampai dengan tahun 2019 (dengan nilai 61,50) kemudian meningkat menjadi nilai B dengan angka 67,02 pada tahun 2023 seperti dapat dilihat dalam Tabel II.39. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel II.43. Rincian Penilaian SAKIP Kab. Purbalingga Tahun 2015 - 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	18,45	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14	21,14	21,86	22,43
2	Pengukuran Kinerja	25	7,47	9,55	12,24	12,39	13,26	14,10	14,57	18,15	18,27
3	Pelaporan Kinerja	15	9,71	8,96	10,05	10,32	10,60	9,95	10,10	10,43	10,58
4	Evaluasi Internal	10	5,25	5,62	5,27	6,06	6,21	6,37	6,53	15,50	15,74
5	Capaian Kinerja	20	9,32	8,06	11,31	10,86	11,41	11,37	11,72	N/A	N/A
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,20	50,03	57,75	58,79	61,50	62,27	64,06	65,94	67,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC	CC	CC	CC	B	B	B	B

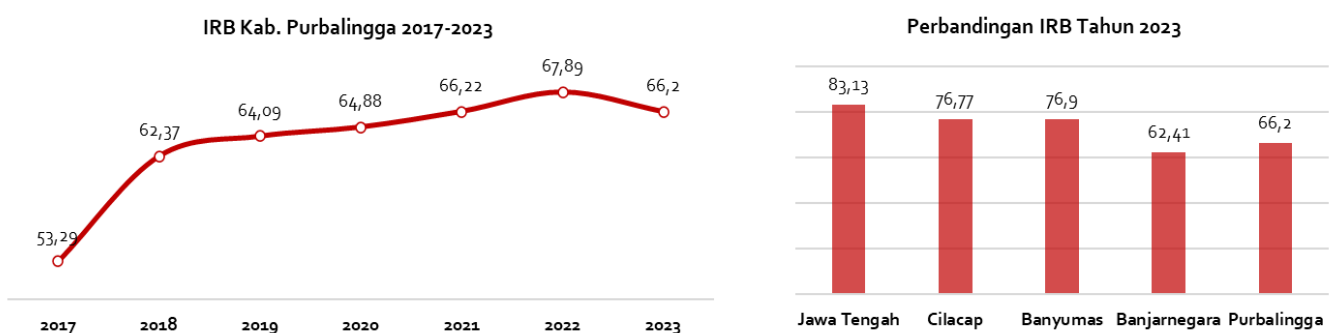
Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2016-2024

Selain SAKIP, pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pula dari nilai IRB. IRB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. IRB terdiri dari 8 area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

IRB Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan. Mulai dari tahun 2017 dengan nilai 53,29 kemudian meningkat menjadi 67,89 pada tahun 2022. Namun kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 66,20 dengan komponen penilaian RB General (62,04) dan RB Tematik (4,16). Tahun 2023 komponen penilaian IRB berbeda dengan penilaian sebelumnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Penilaian tersebut menekankan pada indikator penilaian: Strategi Pelaksanaan RB General, Capaian Pelaksanaan RB General, Capaian Sasaran Strategis dan Strategi Pelaksanaan RB Tematik. Penilaian IRB didasarkan pada tujuan pencapaian “Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”, dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Reformasi Birokrasi yaitu :

1. RB General
 - a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
 - b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional
2. RB Tematik
 - a. Penekanan pada penyelesaian isu tematik

Penilaian untuk Kabupaten Purbalingga masih perlu ditingkatkan pada RB Tematik khususnya penekanan pada strategi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, realisasi investasi dan penanganan stunting. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Banyumas, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara.



Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2018-2024

Gambar 2. 54. IRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017– 2023

2.4.2 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Penilaian IRH pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah 57,89 dengan kategori CC (Cukup). Adapun hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel II.44. Hasil Penilaian IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	49,45
2	Nilai Apresiasi	8,44
3	Nilai Akhir	57,89

Sumber: KemenkumHAM, 2024

Tabel II.45. Rincian Variabel dan Indikator Nilai Awal IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	10,3
1	1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundangundangan c. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-O1.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	9,6
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	3,6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	3,6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	2,4

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	7	0,7
II	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas	25	21,2
1	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	12	9,6
2	Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi untuk Pengangkatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dengan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM32.SM.03.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan.	7	5,6
3	Tingkat keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	6	6
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	35	6,7
1	Proporsi tahunan jumlah peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang dievaluasi	12	1,2
2	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota)	15	1,5
3	Tingkat ketercapaian penyusunan Raperda sesuai dengan perencanaan	8	4
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Produk Hukum di daerah	-	-
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15	11,25
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	15	11,25
NILAI AWAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	49,45

Sumber: KemenkumHAM, 2024

2.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE atau *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 1,94 pada tahun 2019 dengan predikat cukup menjadi 3,04 pada tahun 2020 dengan predikat baik. Namun kemudian pada tahun 2021, Indeks SPBE turun menjadi 2,23 dengan predikat cukup dikarenakan adanya penurunan terhadap semua domain baik dalam domain kebijakan SPBE, domain tata kelola dan domain layanan SPBE. Di tahun 2022, indeks SPBE naik menjadi 3,20 dengan predikat baik dan di tahun 2023 kembali naik menjadi 3,83 dengan predikat sangat baik.

Kenaikan terjadi pada semua domain, khususnya pada domain tata kelola yang secara keseluruhan penerapan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Namun Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang SMKI. Disamping itu juga masih terdapat beberapa kelemahan khususnya pada C.

Tabel II.46. Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2023

No.	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2019	2020	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2021	2022	2023
1	Domain Kebijakan SPBE	1,47	2,88	Domain Kebijakan SPBE	1,90	3,2	4,00
	Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,00	2,71	Kebijakan Internal terkait SPBE	1,90	3,2	4,00
	Kebijakan Layanan SPBE	1,80	3,00				
2	Domain Tata Kelola	1,29	2,43	Domain Tata Kelola	1,90	2,8	3,80
	Kelembagaan	1,00	1,5	Perencanaan Strategis SPBE	1,50	2,5	3,75
	Strategi dan Perencanaan	1,50	3,00	TIK	2,00	2,75	3,25
	TIK	1,33	2,67	Penyelenggaraan SPBE	2,50	3,5	5,00
3	Domain Layanan SPBE	2,42	3,39	Domain Layanan SPBE	2,89	3,63	4,07
	Administrasi Pemerintahan	2,29	3,43	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60	3,5	3,90
	Pelayanan Publik	2,67	3,33	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	3,83	4,33
4				Domain Manajemen SPBE	1,18	2,64	3,09
				Penerapan Manajemen SPBE	1	2,88	3,25
				Audit TIK	1,67	2	2,67
NILAI INDEKS SPBE		1,94	3,04	NILAI INDEKS SPBE	2,23	3,2	3,83
PREDIKAT SPBE		CUKUP	BAIK	PREDIKAT SPBE	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2020-2024

2.4.4 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indeks pelayanan publik diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian aspek-aspek tersebut.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 3,9 di tahun 2021 menjadi 4,51 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 menurun menjadi 3,94. Angka tersebut termasuk pada kategori B (Baik). Pada Tahun 2023, Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di 3 (tiga) Unit Pelayanan Publik (UPP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosdaldukKBP3A), Kecamatan Kutasari dan RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata.

2.4.5 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Indeks Integritas Nasional dihitung berdasarkan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK RI. SPI dilakukan pada 629 instansi yaitu 88 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI tahun 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan skor 69,91.

Dari nilai tersebut, berikut adalah rangkuman terkait integritas yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

- Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.
- Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan

honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.

- Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/ jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi agar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- Instansi ini dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/ mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
- Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/ kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/ penyaluran bantuan.
- Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional. terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- Kalangan eksternal menilai setidaknya ada satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan yang masih memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/ layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
- Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/ pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/ pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

2.5.1 Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

Pada dasarnya dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 berakhir pada tahun 2025 dan perlu adanya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang periode selanjutnya sebagai respon terhadap tuntutan kinerja pembangunan yang ada. Namun, sebelum dilakukan penyusunan dokumen RPJPD periode selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 baik terhadap kebijakannya, pelaksanaannya maupun hasil dari RPJPD tersebut. Hal itu dikarenakan evaluasi dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindak lanjut yang tepat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025. Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 adalah: ***"Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia"***. Visi Kabupaten Purbalingga tersebut akan diwujudkan melalui enam misi pembangunan yaitu sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
- Misi 2: Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum;
- Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme;
- Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan;
- Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;
- Misi 6: Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Untuk sasaran pokok pembangunan Kabupaten Purbalingga selaras dengan misi pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu:

- Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik
- Terwujudnya Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum
- Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme
- Terwujudnya Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan
- Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah
- Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2005 telah menunjukkan kemajuan meskipun dalam perjalanannya terdapat dinamika yang cukup kompleks. Pembangunan tersebut tidak lepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 dan kemudian diterjemahkan ke dalam pembangunan lima tahunan di dokumen RPJMD 4 periode yaitu: RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2010, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Kemudian pembangunan tersebut dioperasionalkan ke dalam pembangunan tahunan di dokumen RKPD.

Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 pada dasarnya bersifat kualitatif, dengan tidak ada angka target untuk menilai kinerja indikator yang ada dalam setiap sasaran pokoknya. Hal ini disebabkan pedoman perencanaan yang mengatur hal tersebut baru ditetapkan pada tahun 2017, jauh setelah RPJPD Kabupaten Purbalingga ditetapkan yakni Permendagri 86 tahun 2017. Oleh karena itu, penilaian tingkat capaian RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 dilakukan dengan melakukan kuantifikasi terhadap indikator sasaran pokok dengan mempedomani pencapaian sasaran tiap periode RPJMD Kabupaten Purbalingga yang sudah dilaksanakan selama 4 periode. Rata-rata nilai capaian selama 4 periode tahapan yaitu: 56,44% (rendah) pada periode 1, 71,76% (sedang) pada periode 2, 86,34% (tinggi) pada periode 3 dan 93,46% (tinggi) pada periode 4.

Indikator penilaian yang digunakan adalah pendekatan proksi sasaran RPJPD terhadap komparasi dari setiap RPJMD pada rentang 2005 sampai dengan 2025 yang terdiri dari 101 indikator. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 per tahapan jangka menengah yaitu sebagai berikut :

1. Capaian Tahap I RPJPD (Periode RPJMD 2005-2010) adalah 56,43 % atau Kriteria Rendah. Hal ini dikarenakan terdapat 45 indikator yang tidak tersedia datanya karena memang dalam tahapan dimaksud, indikatornya belum diberlakukan;
2. Capaian Tahap II RPJPD (Periode RPJMD 2011-2015) adalah 71,76 % atau Kriteria Sedang. Hal ini dikarenakan terdapat 29 indikator yang tidak tersedia datanya karena memang dalam tahapan dimaksud, indikatornya belum diberlakukan;
3. Capaian Tahap III RPJPD (Periode RPJMD 2016-2021) adalah 86,34 % atau Kriteria Tinggi. Hal ini dikarenakan terdapat 17 indikator yang tidak tersedia datanya karena memang dalam tahapan dimaksud, datanya sudah tidak publish;
4. Capaian Tahap IV RPJPD (Periode RPJMD 2021-2025) adalah 93,46 % atau Kriteria Tinggi. Hal ini dikarenakan terdapat 19 indikator yang tidak tersedia datanya karena memang dalam tahapan dimaksud datanya sudah tidak publish.

Tabel II.47. Rincian Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab. Purbalingga terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purbalingga			
			Periode I (2005-2010)	Periode II (2010-2015)	Periode III (2016-2021)	Periode IV (2021-2026)
Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	Sasaran Pokok 1: Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100	105,15	100
		Opini Audit Keuangan BPK	75	75	100	100
		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	0	0	105,81	104,31
		Jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor	0	90,66	101,19	102,77
		Nilai SAKIP	0	0	99,19	96,97
		Terwujudnya website e-procurement	90	100	530,67	0
		Indeks Reformasi Birokrasi	0	0	101,38	96,99
		Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu	100	100	100,00	87,5
		Penetapan APBD tepat waktu	100	100	102,04	100
		Persentase OPD yang memiliki website aktif	90	100	100	157,27
		Persentase korban bencana yang terlayani	100	100	100	126,91
		Persentase pelayanan bencana kebakaran	100	100	181,82	100,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI DAN SASARAN POKOK 1			62,92	72,14	143,94	97,73
Misi 2: Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum	Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum	Angka konflik sosial	0	96	0	100,00
		Angka kriminalitas	0	70,42	104,71	95,03
		Kasus tindak kekerasan dalam masyarakat	0	100	10,34	0
		Persentase penegakkan perda	51,06	100	100	98,18
		Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0	0	0	329,44
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)	94,97	75,44	73	100
		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	0	0	0	100,13
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI DAN SASARAN POKOK 2			20,86	63,12	41,15	117,54
Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme	Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	94,94	100	99,96	99,96
		Usia Harapan Hidup	106,71	104,30	99,78	99,97
		Angka Harapan lama sekolah	100	89,18	94,41	100
		Rata-Rata Lama Sekolah	103,67	75,11	93,30	100
		Angka melek huruf	100,71	101,35	100	100
		Angka Kematian Ibu	181,16	75,17	141,98	75,01
		Angka Kematian Bayi	159,43	80,00	119,69	77,14
		Prevalensi balita gizi buruk	21,43	136,36	70,83	113,12
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,70	90,12	140,58	100,30
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	114,31	104,46	100	99,72
		Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	0	100	100	116,67
		Persentase Kekerasan Anak Tertangani	0	85	100	100
		Kabupaten Layak Anak	0	0	73,49	94,82

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab. Purbalingga terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purbalingga			
			Periode I (2005-2010)	Periode II (2010-2015)	Periode III (2016-2021)	Periode IV (2021-2026)
		Laju pertumbuhan penduduk	77,33	147,06	63,29	130,25
		Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	94	322,14	110,13	110,83
		APK SD/Sederajat	94,25	100	106,59	99,35
		APK SMP/Sederajat	99,60	100	138,16	94,00
		APM SD/Sederajat	94,90	95,67	117,56	103,55
		APM SMP/Sederajat	91,91	86,63	161,96	71,26
		Angka kunjungan ke perpustakaan	0	64,78	0,02	0
		Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional	0	0	1,54	614,29
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	0	0	0	100
		Intensitas pementasan seni budaya daerah	110	165,00	124,32	0
		Jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional	0	99,68	89	0
		Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	0	0	199,57	329,44
		Persentase pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	0	100	0	0
		Kegiatan forum lintas etnis dan agama	100	183,33	0	0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI DAN SASARAN POKOK 3			68,33	96,50	90,60	108,51
Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan	Indeks Ketahanan Pangan	0	0	0	98,45
		Skor Pola Pangan Harapan	0	99,65	89,50	96,44
		Ketersediaan Pangan Utama	99,95	100	54,05	0
		Pertumbuhan Ekonomi	131,86	100	0,00	100
		Angka inflasi	163,69	100	100,00	77,04
		Angka kemiskinan	135,03	96,20	95,50	100
		Nilai PDRB Per Kapita	100	189,84	114,00	107,79
		Nilai PDRB Sektor Industri	100	100	127,78	106,62
		Nilai PDRB Sektor Pertanian	100	100	103,03	114,92
		Produksi Padi	100	100	72,07	100
		Produksi Jagung	100	100	165,12	100
		Produksi Kedelai	100	100	74,79	100
		Produksi Daging	100	100	103,19	100
		Nilai tukar petani	0	94,57	0	0
		Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	0	0	98,38	108,95
		Produksi Ikan Konsumsi	0	0	122,09	98,90
		Tingkat Pengangguran Terbuka	100	92,98	65,57	87,17
		Pertambahan nilai investasi baru	0	0	109,89	183,36
		Lama waktu perijinan investasi	0	0	131,43	120
		Jumlah PMA	100	100	0	100
		Nilai investasi PMA	0	100	94,96	184,38
		Jumlah kunjungan wisata	100	107	48,02	126,72
		Persentase koperasi sehat	102,32	0	104,16	114,75
		Jumlah usaha mikro bersertifikat/berijin	0	0	177,69	153,15

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab. Purbalingga terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purbalingga			
			Periode I (2005-2010)	Periode II (2010-2015)	Periode III (2016-2021)	Periode IV (2021-2026)
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI DAN SASARAN POKOK 4			68,04	74,17	85,47	103,28
Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	Persentase luas oncoran air irigasi	97,42	100	100	108,57
		Persentase bangunan perairan dalam kondisi baik	0	0	96,36	100,15
		Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	100	0	0	99,92
		Luasan kawasan kumuh perkotaan	100	0	160,24	40,10
		Persentase Rumah Layak Huni	98,51	93,26	103,32	100,61
		Cakupan akses air minum layak	101,7	100,13	92,05	102,49
		Cakupan sanitasi layak	99,06	100,35	92,26	101,31
		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	0	0	0	103,32
		Indeks jalan mantap	105,35	107,11	97,07	105,30
		Rasio konektivitas angkutan jalan	0	0	0	87,01
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	0	0	95,45	0
		Persentase laju jalan minimal 5,5 meter	0	0	91,08	0
		Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	0	0	82,00	0
		Rasio elektrifikasi	100	100	98,11	87,01
		Indeks Desa Membangun	0	0	95,43	96,34
		Persentase desa dengan kategori desa mandiri dan maju	0	0	0	97,76
		Persentase tanah milik pemerintah daerah yang bersertifikat	0	0	71,28	100,31
		Indek Gini	100	73,33	0	0
		Indek Williamson	0	61,22	0	0
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI DAN SASARAN POKOK 5			47,48	38,71
Misi 6: Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Sasaran Pokok 6: Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0	100	102,12	98,42
		Cakupan timbulan sampah terlayani	99,77	183,60	129,53	102,19
		Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	95,45	80,95	0	100,00
		Penurunan emisi gas rumah kaca	0	0	33,43	0
		Persentase lahan kritis di kawasan lindung	0	100	0	0
		Persentase lahan kritis di kawasan budidaya pertanian	0	55,3	0	0
		Persentase kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup	0	100	100,0	100
		Persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL)	100	100	12,42	100
		Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	122,8	0	114,38	100,00
		Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	0	0	91,6	104,49
		Jumlah kelompok peduli lingkungan	0	100	350	0
		Jumlah penggalian tambang tanpa ijin	0	0,0	0	0
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI DAN SASARAN POKOK 6			34,84	68,32
Rata-rata capaian kinerja (%)			56,29	71,63	86,31	93,74
Predikat Kinerja			Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

Rekapitulasi rata-rata capaian kinerja RPJPD Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2005 – 2025 berdasarkan misi dan sasaran pokoknya yaitu sebagai berikut.

Tabel II.48. Rata-Rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2005 – 2025 berdasarkan Misi dan Sasaran Pokoknya

Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pokok Pada Setiap Misi				
		Periode I (2005-2010)	Periode II (2010-2015)	Periode III (2016-2021)	Periode IV (2021-2026)	Rata-Rata Capaian
Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik	62,92	72,14	143,94	97,73	94,18
Misi 2: Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum	Terwujudnya Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum	20,86	63,12	41,15	117,54	60,67
Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme	Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme	68,33	96,50	90,60	108,51	90,98
Misi 4: Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan	Terwujudnya Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan	68,04	74,17	85,47	103,28	82,74
Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	47,48	38,71	67,09	70,01	55,82
Misi 6: Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	34,84	68,32	77,79	58,76	59,93

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

Dari evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 yang diterjemahkan ke dalam 4 periode RPJMD tersebut, dapat dilihat adanya kemajuan capaian pembangunan di Kabupaten Purbalingga dari rendah menjadi tinggi. Kemajuan pencapaian pembangunan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memajukan pembangunan daerah. Kemajuan perkembangan pembangunan tersebut juga merupakan hasil kolaborasi dari berbagai faktor seperti: kepemimpinan, kebijakan dan komitmen pimpinan; integritas tata kelola pemerintahan; ketersediaan SDM, infrastruktur, sarana prasarana dan anggaran; kerjasama kelembagaan dengan instansi vertikal maupun dengan swasta dan masyarakat; serta dukungan regulasi.

2.5.2 Rekomendasi Penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Periode Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi dari Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 dilihat dari capaian 6 indikator makro Pembangunan yang meliputi: IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan PDRB Perkapita, 2 indikator diantaranya menunjukkan capaian masih di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu IPM dan Kemiskinan. Di samping itu juga terdapat indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah yang perlu diperhatikan ke depannya, meliputi: Penurunan emisi gas rumah kaca, Luasan kawasan kumuh perkotaan, Kasus tindak kekerasan dalam masyarakat, Persentase tanah milik pemda yang bersertifikat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan APM SMP/Sederajat.

Di samping itu juga terdapat beberapa rekomendasi untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, diantaranya:

- Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (untuk mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman Pembangunan wilayah;
- Penyusunan visi harus mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita yang akan diwujudkan dalam 20 tahun mendatang dengan merumuskan visi menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*);
- Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok mempedomani rekomendasi tindak lanjut evaluasi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci pernyataan visi, mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja, serta memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal;
- Penyusunan sasaran pokok didasarkan pada prioritas masing-masing misi yang dapat menjelaskan keterhubungannya dan menunjukkan indikator kinerja beserta targetnya dengan memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang baik periode jangka panjang, menengah maupun pendek, serta target kinerja indikator makro yang memperhatikan target provinsi;
- Perumusan arah/prioritas Pembangunan pada setiap periode RPJPD sebagai Upaya strategis untuk meningkatkan Pembangunan SDM dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat; serta menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.

2.6 Proyeksi Demografi

2.6.1 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan suatu metode peramalan atau perkiraan mengenai jumlah penduduk suatu wilayah pada waktu tertentu di masa depan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dan faktor-faktor demografis. Kemampuan prediktif dari proyeksi penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan prediktif sebuah analisis dampak kependudukan maupun pembangunan.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga dalam 10 tahun terakhir dimulai dari tahun 2013 - 2022 mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Purbalingga dalam pengendalian kuantitas penduduk. Oleh karena itu pencapaian tersebut dijadikan dasar perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga selama 20 tahun mendatang dimulai dari proyeksi tahun 2023. Proyeksi penduduk Kabupaten Purbalingga per lima tahun sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

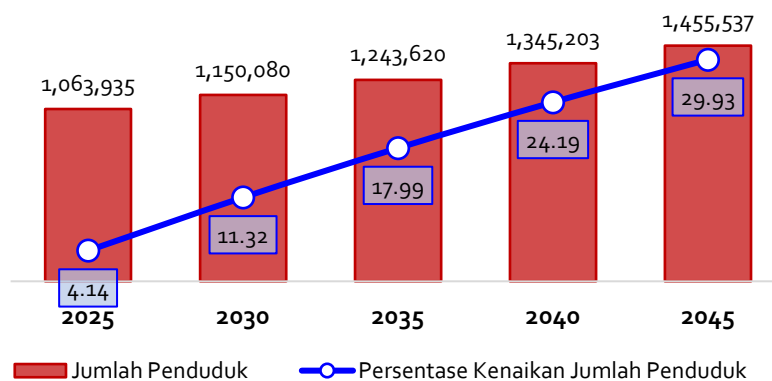
**Tabel II.49. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
– 2045**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1.	Kemangkon	66.096	68.660	75.719	83.503	92.088	101.555
2.	Bukateja	80.709	83.676	91.229	99.463	108.441	118.229
3.	Kejobong	52.507	54.538	59.688	65.324	71.492	78.243
4.	Kaligondang	67.556	70.113	76.107	82.614	89.677	97.343
5.	Purbalingga	57.071	59.406	60.118	60.839	61.569	62.308
6.	Kalimanah	59.203	61.283	65.653	70.336	75.353	80.727
7.	Kutasari	67.519	69.777	75.889	82.536	89.765	97.627
8.	Mrebet	80.505	83.357	90.762	98.824	107.602	117.160
9.	Bobotsari	54.406	56.669	60.483	64.554	68.898	73.536
10.	Karangreja	48.171	49.389	53.499	57.951	62.774	67.998
11.	Karanganyar	41.206	42.779	46.357	50.235	54.437	58.991
12.	Karangmoncol	60.209	62.060	67.219	72.807	78.860	85.415
13.	Rembang	69.982	72.436	78.939	86.027	93.750	102.168
14.	Bojongsari	64.470	66.717	70.934	75.418	80.186	85.255
15.	Padamara	48.169	49.844	53.971	58.439	63.277	68.515
16.	Pengadegan	42.095	43.548	46.833	50.366	54.166	58.252
17.	Karangjambu	29.040	29.866	32.523	35.416	38.566	41.997
18.	Kertanegara	38.419	39.819	44.157	48.968	54.303	60.219
Jumlah		1.027.333	1.063.935	1.150.080	1.243.620	1.345.203	1.455.537

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di atas, dapat dilihat bahwa secara umum terdapat trend pertumbuhan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Kenaikan jumlah penduduk tersebut mempengaruhi total populasi Kabupaten Purbalingga yang meningkat sampai dengan 29,93% di tahun

2045. Jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan yang kurang dari 80.000 jiwa berada di 9 kecamatan, yaitu: Kecamatan Karangjambu, Pengadegan, Karanganyar, Kertanegara, Purbalingga, Karangreja, Padamara, Bobotsari dan Kejobong. Sedangkan kecamatan yang penduduknya lebih dari 80.000 jiwa namun kurang dari 100.000 jiwa berada di 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kalimanah, Bojongsari, Karangmoncol, Kaligondang dan Kutasari. Sedangkan kecamatan yang penduduknya lebih dari 100.000 jiwa berada di 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bukateja, Mrebet, Rembang dan Kemangkon. Kecamatan Bukateja dengan jumlah penduduk tertinggi mencapai 118.229 jiwa.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 55. Proyeksi Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2045

Peningkatan jumlah penduduk di tiap kecamatan tersebut dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, kebijakan pembangunan, maupun faktor lainnya. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menjadi suatu tantangan bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk sesuai dengan daya tampung wilayah yang ada, khususnya untuk peruntukan permukiman sebagai wadah tempat tinggal bagi para penduduk ke depannya.

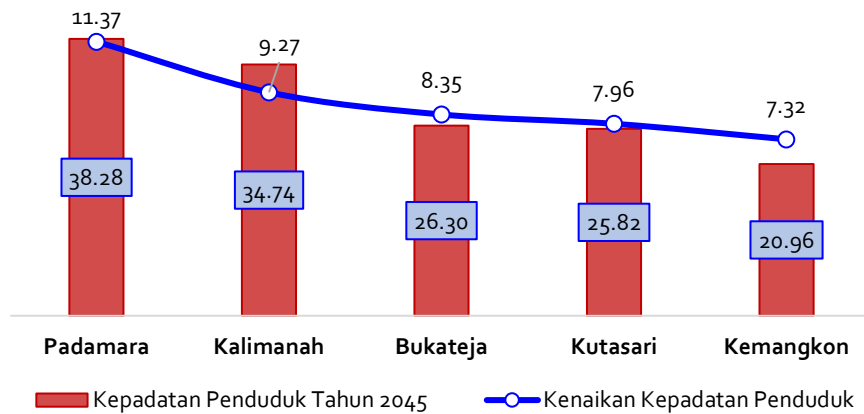
Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga sebesar 13,32 jiwa/ha naik dari tahun sebelumnya. Proyeksi kepadatan jumlah penduduk diperlukan untuk mengestimasi mengenai seberapa padat atau jarang penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu di masa depan. Kepadatan penduduk diukur dengan cara membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut. Oleh karena itu proyeksi kepadatan penduduk bergantung pada proyeksi jumlah penduduk dan perkiraan perubahan luas wilayah.

**Tabel II.50. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun
2025 – 2045**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk Tahun 2023 (Jiwa/ha)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1.	Kemangkon	4.846	13,64	15,21	16,78	18,50	20,41	22,50
2.	Bukateja	4.496	17,95	19,73	21,52	23,46	25,58	27,88
3.	Kejobong	4.014	13,08	13,64	14,93	16,34	17,88	19,57
4.	Kaligondang	5.144	13,13	13,87	15,06	16,35	17,74	19,26
5.	Purbalingga	1.566	36,45	40,36	40,84	41,33	41,83	42,33
6.	Kalimanah	2.324	25,47	27,22	29,17	31,25	33,48	35,86
7.	Kutasari	3.781	17,86	13,19	14,35	15,60	16,97	18,46
8.	Mrebet	5.143	15,65	17,41	18,95	20,64	22,47	24,46
9.	Bobotsari	3.554	15,31	17,56	18,74	20,00	21,34	22,78
10.	Karangreja	6.201	7,77	6,63	7,18	7,78	8,43	9,13
11.	Karanganyar	3.521	11,70	14,00	15,17	16,44	17,82	19,31
12.	Karangmoncol	7.198	8,37	10,30	11,15	12,08	13,08	14,17
13.	Rembang	9.879	7,08	7,93	8,65	9,42	10,27	11,19
14.	Bojongsari	4.499	14,33	22,81	24,25	25,78	27,41	29,15
15.	Padamara	1.790	26,91	28,86	31,25	33,84	36,64	39,67
16.	Pengadegan	4.125	10,21	10,43	11,22	12,06	12,97	13,95
17.	Karangjambu	4.895	5,93	6,48	7,06	7,68	8,37	9,11
18.	Kertanegara	3.601	10,67	10,47	11,61	12,88	14,28	15,84
Jumlah		80.577	12,75	12,75	14,80	16,00	17,31	18,72

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan proyeksi kepadatan penduduk di atas, dapat dilihat bahwa tren peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga terlihat pada sebagian besar kecamatan. Kenaikan kepadatan penduduk yang signifikan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan terjadi di Kecamatan Padamara, Kalimanah, Bukateja, Kutasari dan Kemangkon. Sementara itu sampai dengan tahun 2045 kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purbalingga, kemudian diikuti dengan Kecamatan Padamara, Kalimanah, Bukateja dan Kutasari. Sebagian besar kepadatan penduduk tinggi (>25 jiwa/ha) berada di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi persebaran penduduk di Kabupaten Purbalingga cenderung mendekati pusat-pusat fasilitas yang berada di kawasan perkotaan Purbalingga dan perluasannya sampai dengan Kalimanah, Padamara dan Kutasari. Sementara itu di Bukateja juga mulai berkembang menjadi kawasan perkotaan baru seiring dengan semakin lengkapnya fasilitas di dalamnya.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 56. Proyeksi Kepadatan Penduduk Tertinggi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2045

Kepadatan penduduk di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas wilayah, fungsi kawasan, urbanisasi maupun faktor lainnya. Peningkatan kepadatan penduduk tersebut menjadi tantangan bagi Kabupaten Purbalingga untuk mengendalikan dan mengantisipasi pertumbuhan dan kepadatan penduduk terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi dengan kebijakan atau program yang menggalakkan edukasi keluarga berencana serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi.

2.6.2 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada estimasi atau perkiraan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di setiap kecamatan. Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin (*sex ratio*) dikatakan meningkat apabila jumlah penduduk laki-laki per seribu perempuan meningkat dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Proyeksi *sex ratio* tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan dalam tingkat kelahiran, kematian maupun migrasi diantara kelompok gender.

Hasil proyeksi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), dapat dilihat bahwa sampai dengan 20 tahun ke depan beberapa kecamatan memiliki rasio lebih tinggi dari 100 yaitu sejumlah 14 kecamatan meliputi: Kecamatan Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangmoncol, Rembang, Bojongsari, Padamara, Pengadegan, Karangjambu dan Kertanegara. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan kecamatan yang memiliki rasio sekitar 100 atau bahkan di bawah 100 yaitu Kecamatan Kemangkon, Karanganyar, Bojongsari dan Pengadegan menunjukkan lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan laki-laki.

Beberapa kecamatan mengalami peningkatan sex ratio yang signifikan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan yaitu di Kecamatan Kejobong, Kaligondang, Mrebet, Karangmoncol dan Kertanegara menunjukkan adanya perubahan distribusi jenis kelamin dalam populasi di kecamatan tersebut dengan jumlah penduduk laki-laki naik secara signifikan. Sementara itu adapula kecamatan yang mengalami penurunan rasio yaitu di Kecamatan Kemangkon, Karanganyar, Bojongsari dan Pengadegan. Kemungkinan kondisi yang dapat terjadi dikarenakan munculnya masalah baik dalam hal pekerjaan dan pasar tenaga kerja, potensi konflik dan sosial budaya serta masalah kesehatan yang berkaitan dengan gender. Penurunan rasio tersebut menjadi suatu tantangan bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat mengantisipasi masalah yang timbul baik melalui program edukasi dan penguatan kebijakan mengenai kesetaraan gender maupun program pemberdayaan perempuan untuk menciptakan perubahan positif dalam struktur sosial dan ekonom, sehingga dapat memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar bagi seluruh penduduk khususnya bagi kelompok rentan seperti Perempuan, lansia termasuk disabilitas dan anak-anak.

Tabel II.51. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2023			Proyeksi Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio
1.	Kemangkon	33.135	32.961	100,53	35.297	41.169	85,74	39.103	45.305	86,31	43.390	49.659	87,38	47.865	54.625	87,63	52.856	59.885	88,26
2.	Bukateja	40.446	40.263	100,45	42.959	41.169	104,35	46.822	45.305	103,35	51.115	49.659	102,93	55.475	54.625	101,56	60.270	59.885	100,64
3.	Kejombang	26.427	26.080	101,33	28.177	26.667	105,66	31.169	29.146	106,94	34.534	31.730	108,84	38.039	34.665	109,73	41.942	37.745	111,12
4.	Kaligondang	34.118	33.438	102,03	35.258	33.458	105,38	38.444	35.824	107,31	41.986	38.205	109,90	45.586	40.890	111,49	49.546	43.616	113,60
5.	Purbalingga	28.307	28.764	98,41	32.079	30.735	104,37	33.462	31.879	104,96	34.960	32.935	106,15	36.313	34.147	106,34	37.756	35.285	107,00
6.	Kalimantan	29.747	29.456	100,99	32.026	30.691	104,35	34.534	33.347	103,56	37.298	36.090	103,35	40.049	39.197	102,17	43.046	42.428	101,46
7.	Kutasari	34.371	33.148	103,69	34.027	31.909	106,64	36.434	34.297	106,23	39.075	36.719	106,42	41.663	39.451	105,61	44.468	42.244	105,26
8.	Mrebet	40.907	39.598	103,31	37.631	34.930	107,73	39.105	36.174	108,10	40.703	37.314	109,08	42.118	38.626	109,04	43.628	39.850	109,48
9.	Bobotsari	27.422	26.984	101,62	29.772	28.008	106,30	32.021	30.235	105,91	34.497	32.511	106,11	36.946	35.081	105,32	39.611	37.727	104,99
10.	Karangreja	24.469	23.702	103,24	28.317	26.324	107,57	31.845	29.712	107,18	35.871	33.403	107,39	40.170	37.687	106,59	45.031	42.377	106,26
11.	Karanganyar	21.129	20.077	105,24	21.760	21.126	103,00	21.039	23.188	90,73	20.375	25.351	80,37	19.616	27.815	70,52	18.905	30.415	62,16
12.	Karangmoncol	30.944	34.328	90,14	27.600	24.966	110,55	28.334	25.373	111,67	29.135	25.686	113,43	29.783	26.094	114,13	30.477	26.420	115,36
13.	Rembang	35.654	29.265	121,83	32.817	30.574	107,34	34.009	31.918	106,55	35.302	33.189	106,37	36.430	34.634	105,19	37.633	36.020	104,48
14.	Bojongsari	32.739	31.731	103,18	32.251	30.060	107,29	33.342	31.414	106,14	34.526	32.700	105,58	35.543	34.159	104,05	36.627	35.563	102,99
15.	Padamar	24.251	23.918	101,39	29.098	27.501	105,81	33.215	31.157	106,61	37.977	35.159	108,01	43.167	39.817	108,41	49.117	44.940	109,29
16.	Pengadegan	21.025	21.070	99,79	24.856	23.880	104,09	27.858	26.896	103,58	31.274	30.174	103,64	34.902	33.971	102,74	38.992	38.118	102,30
17.	Karangjambu	15.000	14.040	106,84	19.027	17.189	110,69	22.293	20.117	110,81	26.161	23.451	111,56	30.522	27.435	111,25	35.646	31.987	111,44
18.	Kertanegara	19.643	18.776	104,62	21.243	19.633	108,20	23.948	21.934	109,18	27.040	24.408	110,78	30.354	27.257	111,36	34.109	30.337	112,43
Jumlah		519.734	507.599	102,39	544.196	519.990	104,66	586.977	563.220	104,22	635.221	608.345	104,42	684.541	660.178	103,69	739.658	714.842	103,47

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.3 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia belum produktif (>65 tahun). Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut akan diketahui rasio ketergantungan penduduk untuk mengukur hubungan jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk yang tergolong sebagai kelompok yang tergantung atau kelompok yang dianggap bergantung pada penduduk usia produktif.

Tabel II.52. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Rasio Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1.	0 – 4	66.096	79.393	80.558	81.740	81.345	80.920
2.	5 – 9	80.709	80.548	79.846	79.150	76.951	74.785
3.	10 – 14	52.507	79.701	78.760	77.830	75.432	73.080
4.	15 – 19	67.556	80.114	82.919	85.822	87.118	88.400
5.	20 – 24	57.071	87.101	98.104	110.497	122.062	134.787
6.	25 – 29	59.203	75.460	79.101	82.917	85.247	87.608
7.	30 – 34	67.519	79.387	84.256	89.422	93.081	96.853
8.	35 – 39	80.505	79.126	83.830	88.815	92.286	95.855
9.	40 – 44	54.406	76.097	82.480	89.400	95.036	100.990
10.	45 – 49	48.171	73.577	80.116	87.236	93.163	99.454
11.	50 – 54	41.206	74.651	86.409	100.020	113.547	128.856
12.	55 – 59	60.209	60.584	69.842	80.515	91.035	102.889
13.	60 – 64	69.982	53.979	63.824	80.180	92.616	110.268
14.	65 – 69	64.470	32.350	39.785	48.930	59.019	71.160
15.	70 – 74	48.169	25.770	31.080	37.485	44.340	52.429
16.	=>75	42.095	28.896	34.602	41.436	48.665	57.133
Jumlah		1.027.333	1.066.734	1.155.514	1.261.396	1.350.944	1.455.567

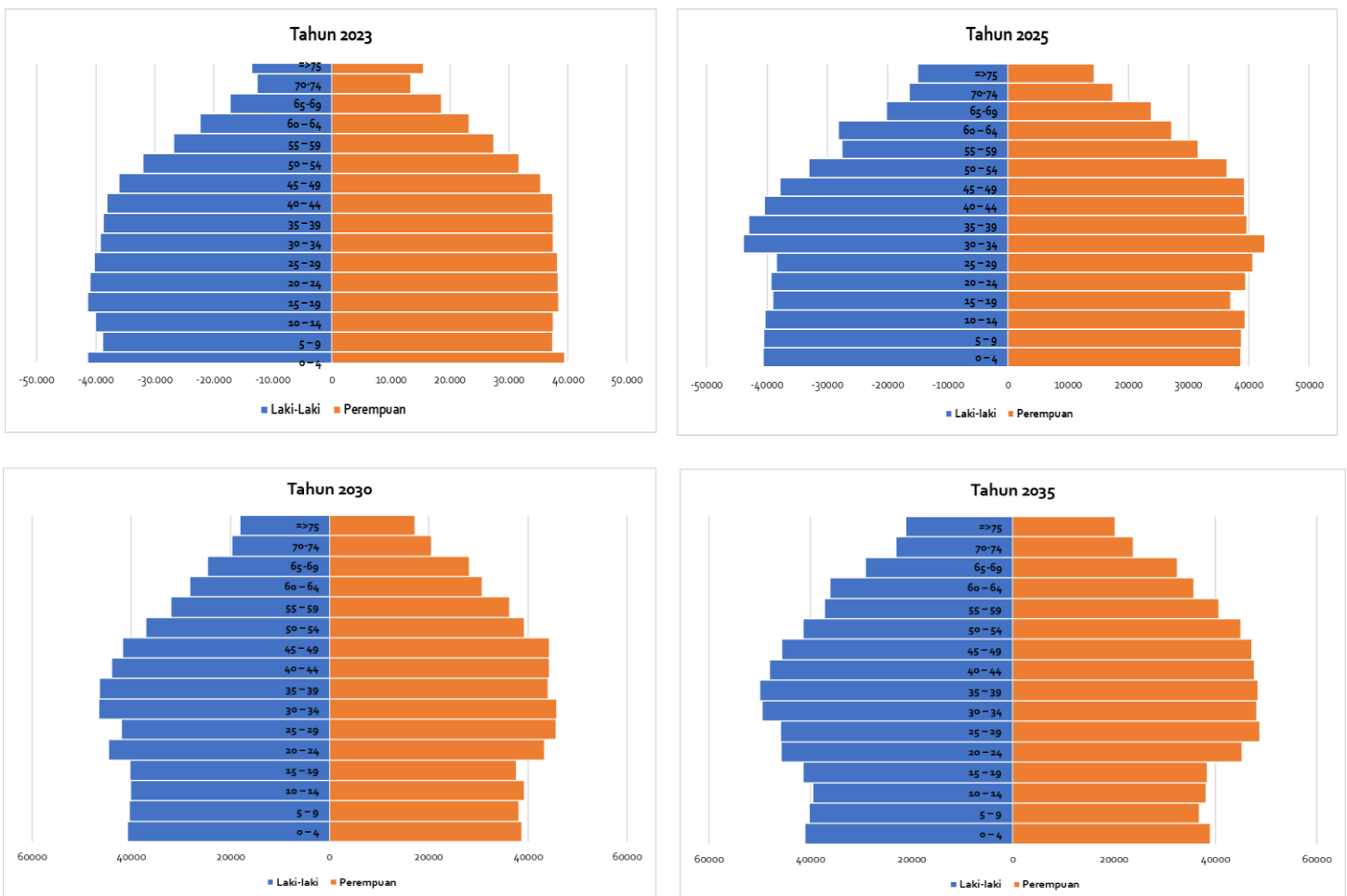
Sumber: Hasil Analisis, 2024

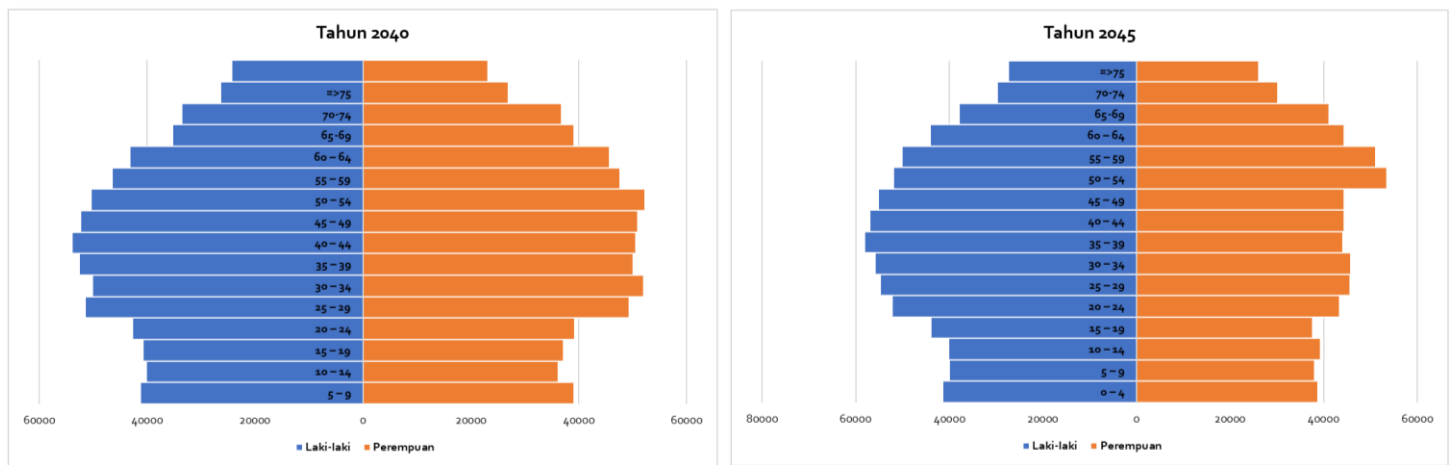
Hasil proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk khususnya pada jumlah penduduk usia produktif (15-64 thn). Terjadi perubahan struktur penduduk di Kabupaten Purbalingga dengan semakin lebarnya kelompok usia produktif dan diikuti dengan kelompok usia lanjut (tidak produktif). Kondisi tersebut menunjukkan suatu kondisi bonus demografi yang akan memberikan peluang adanya penduduk usia produktif dengan jumlah yang lebih banyak menciptakan tenaga kerja yang melimpah dan menjadi salah satu pertanda bahwa perekonomian sedang dalam keadaan berkembang. Namun bonus demografi tersebut menjadi suatu tantangan bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat

menyediakan kebutuhan serta lapangan pekerjaan yang memadai, serta mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif tersebut.

Sementara itu untuk penduduk usia tidak produktif (>65 thn) juga semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan kondisi kualitas kesehatan semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Namun di sisi lain menjadi suatu tantangan bagi Kabupaten Purbalingga ada kondisi transisi demografi menuju penduduk usia tua yang semakin meningkatkan angka beban ketergantungan dan diperlukan perhatian terhadap kebijakan kesehatan, kesejahteraan dan pelayanan bagi lansia. Di samping itu juga diperlukan persiapan infrastruktur yang mendukung kebutuhan penduduk yang semakin menua seperti fasilitas kesehatan lansia.

Gambar 2.54 menunjukkan piramida proyeksi penduduk menurut kelompok umur yang menunjukkan bonus demografi sampai dengan tahun 2045.





Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 57. Piramida Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2030 - 2045

Berdasarkan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia di atas juga dapat diketahui rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga 20 tahun mendatang. Rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2022 sebesar 50,51, yang artinya setiap 100 penduduk produktif (15-64 tahun) masih menanggung beban 50 penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Kondisi di tahun 2045 menunjukkan kondisi baik dengan rasio ketergantungan penduduk semakin menurun berada pada angka 39,15 yang artinya setiap 100 penduduk produktif di tahun 2045 masih menanggung beban 39 penduduk tidak produktif.

Walaupun menunjukkan kondisi yang baik, rasio ketergantungan penduduk tersebut menunjukkan penduduk usia produktif masih menanggung beban penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Kabupaten Purbalingga untuk mendorong kualitas penduduk usia belum produktif 0-14 tahun) yang ke depannya benar-benar menjadi penduduk produktif sebagai pelaku pembangunan yang berkualitas. Di samping itu, Kabupaten Purbalingga juga perlu mendorong terciptanya penduduk usia lanjut/tidak produktif (>65 tahun) untuk menjadi lansia yang produktif agar dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Tabel II.53. Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Proyeksi Penduduk Usia Belum Produktif (0-14 thn)	Proyeksi Penduduk Usia Produktif (15-64 thn)	Proyeksi Penduduk Usia Tidak Produktif (>65)	Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk
1.	2025	1.066.734	239.642	740.077	87.016	44,14
2.	2030	1.155.514	239.164	810.882	105.468	42,50
3.	2035	1.261.396	238.720	894.825	127.851	40,97
4.	2040	1.350.944	233.728	965.192	152.024	39,97
5.	2045	1.455.467	228.785	1.045.960	180.722	39,15

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Periode bonus demografi di Kabupaten Purbalingga sudah dimulai pada tahun 2025 dan pada tahun 2045 jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Purbalingga mencapai puncak yang mengindikasikan bahwa akan terdapat lebih besar kesempatan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Purbalingga karena jumlah angkatan kerja lebih banyak. Kondisi bonus demografi tersebut didominasi oleh generasi milenial yang mana akan menjadi incaran tenaga produktif yang mampu merespon permintaan pasar tenaga kerja baik skala local, nasional maupun global.

Puncak dan akhir bonus demografi memerlukan kebijakan khusus yang dapat memanfaatkan keuntungan dari bonus demografi. Hal tersebut tentu saja diperlukan berbagai hal yaitu menciptakan pasar kerja yang fleksibel mengikuti perubahan lapangan kerja yang cepat dan menciptakan tenaga kerja dengan keahlian tinggi sesuai kebutuhan pasar kerja. Di samping itu juga diperlukan perlindungan pekerja yang menjangkau sektor informal. Bonus demografi di Kabupaten Purbalingga tersebut akan berkualitas yang dapat dilihat melalui penyiapan lapangan kerja yang cukup, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan SDM, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas infrastruktur agar konektivitas antar wilayah lebih optimal.

2.7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Sarana prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam pembangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sarana dalam pembangunan dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis proyek pembangunan, tujuan dan konteks geografis. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana melibatkan pendekatan strategis yang memperhitungkan perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap sarana dan prasarana yang ada, serta proyeksi pertumbuhan untuk menentukan kecukupan atau kekurangan yang mungkin terjadi. Dengan merinci kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, kebutuhan air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya, akan dapat memberikan dasar bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk merencanakan investasi dan pengembangan yang tepat guna, serta memastikan bahwa perkembangan wilayah dapat diimbangi dengan fasilitas yang memadai.

2.7.1 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Pada dasarnya sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Akhir (SMA)/sederajat. Saat ini juga sudah berkembang pada sarana pendidikan berupa perguruan tinggi yang terdapat di pusat perkotaan Purbalingga yang terdiri dari: Universitas Perwira Purbalingga (Unperba), Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga

(ITBMP), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed, Fakultas Teknik) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Saizu.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan 20 tahun ke depan diperlukan untuk mengembangkan keterpaduan antar hirarki sarana pendidikan. Terlebih lagi saat ini di Indonesia mewajibkan wajib belajar 12 tahun bagi penduduknya.

A. Ketersediaan Sarana Pendidikan

Dilihat dari kuantitasnya, jumlah sekolah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.3513 sekolah yang terdiri dari: 518 sekolah pada jenjang PAUD, 652 sekolah pada jenjang SD, 119 sekolah pada jenjang SMP dan 62 sekolah pada jenjang SMA. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 ada penambahan 20 sekolah yang terdiri dari: 2 sekolah jenjang PAUD, 3 sekolah jenjang SD, 4 sekolah jenjang SMP dan 11 sekolah jenjang SMA.

Dari keseluruhan jumlah sekolah tersebut, pada jenjang PAUD hanya 4,65 % yang memiliki akreditasi A atau sekitar 42 sekolah. Sementara pada jenjang SD hanya terdapat 26,68 % yang berakreditasi A atau sebesar 174 sekolah. Kemudian pada jenjang SMP terdapat 62,18 % yang berakreditasi A atau sekitar 74 sekolah. Kualitas satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan SD masih perlu peningkatan dan pemerataan untuk mengurangi kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan.

Tabel II.54. Perkembangan Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No.	Sekolah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PAUD	unit	597	515	513	516	518	518
	TK Negeri		5	6	6	6	6	6
	TK Swasta		256	260	258	262	262	262
	RA		246	249	249	248	250	250
2	SD/MI	unit	648	648	646	652	652	652
	SD Negeri		459	459	459	459	459	459
	SD Swasta		7	7	9	10	10	10
	MI Negeri		3	3	3	3	3	3
	MI Swasta		179	179	175	180	180	180
3	SMP/MTS	unit	116	117	117	118	119	119
	SMP Negeri		60	60	60	60	60	60
	SMP Swasta		16	17	17	17	17	17
	MTs Negeri		3	3	3	3	3	3
	MTs Swasta		37	37	37	38	39	39
4	SMA/SMK/MA	unit	60	60	61	62	62	62
	SMA Negeri		10	10	10	10	10	10
	SMA Swasta		6	6	6	6	6	6
	SMK Negeri		12	12	12	12	12	12
	SMK Swasta		22	22	22	22	22	22
	MA Negeri		1	1	1	1	1	1
	MA Swasta		9	9	10	11	11	11

No.	Sekolah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah	unit	1331	1340	1337	1348	1351	1351

Sumber: Dindikbud dan Kemenag Kab. Purbalingga, 2019-2024

Dilihat dari jumlah ruang kelas pada jenjang SD dan SMP, pada tahun 2022 jumlah ruang kelas SD sebanyak 3.987 unit, sedangkan jumlah ruang kelas SMP sebanyak 1.930 unit. Secara ideal, jumlah murid dalam satu ruang kelas untuk jenjang SD adalah paling banyak 28 siswa dan untuk jenjang SMP paling banyak 32 siswa. Kondisi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan setiap ruang kelas pada jenjang SD rata-rata dapat menampung 25 siswa, sedangkan pada jenjang SMP dapat menampung rata-rata 26 siswa.

B. Kebutuhan Sarana Pendidikan

Penentuan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada proyeksi penduduk dan peraturan atau standar terbaru yang berlaku. Peraturan dan standar yang digunakan diantaranya adalah:

1. SNI 03 1733 2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
2. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
3. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
4. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Dari hasil analisis kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, dibutuhkan tambahan sejumlah sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP maupun SMA seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sampai tahun 2045. Untuk jenjang PAUD sampai dengan tahun 2045 dibutuhkan sebanyak 293 sekolah baik itu berupa TK maupun RA. Kemudian untuk jenjang SD sampai dengan tahun 2045 dibutuhkan sebanyak 367 sekolah baik itu berupa SD Negeri maupun MI. Sedangkan untuk jenjang SMP sampai dengan tahun 2045 dibutuhkan sebanyak 21 SMP berupa SMP Negeri maupun MTs. Sementara itu untuk jenjang SMA sampai dengan tahun 2045 dibutuhkan 25 sekolah baik itu berupa SMA Negeri, SMK maupun MA.

Tabel II.55. Kebutuhan Sarana Pendidikan (PAUD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Kecamatan	Jumlah PAUD 2023	Proyeksi Tahun														
			2025			2030			2035			2040			2045		
			Jumlah PAUD	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah PAUD	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah PAUD	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah PAUD	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah PAUD	Jumlah Kelas	Gap
1.	Kemangkon	40	47	236	7	50	252	10	50	252	10	51	255	11	50	251	10
2.	Bukateja	58	63	314	5	64	320	6	64	321	6	65	324	7	64	321	6
3.	Kejobong	27	42	210	15	42	212	15	42	209	15	42	208	15	41	205	14
4.	Pengadegan	25	31	154	6	33	165	8	33	166	8	33	166	8	33	164	8
5.	Kaligondang	36	50	252	14	52	261	17	53	263	17	53	264	17	52	260	16
6.	Purbalingga	36	39	196	3	44	219	9	44	220	8	45	224	9	44	221	8
7.	Kalimanah	24	41	203	17	43	215	19	43	214	19	43	217	19	43	216	19
8.	Padamara	18	36	180	18	35	177	19	36	180	18	37	185	19	37	186	19
9.	Kutasari	25	59	296	34	53	267	31	55	274	30	56	282	31	56	282	31
10.	Bojongsari	24	51	256	27	50	251	28	50	251	26	52	258	28	52	260	28
11.	Mrebet	21	66	331	45	65	323	44	64	322	43	65	324	44	64	322	43
12.	Bobotsari	23	41	206	18	42	210	21	43	214	20	44	218	21	43	214	20
13.	Karangreja	20	42	209	22	39	193	19	39	194	19	39	197	19	40	198	20
14.	Karangjambu	21	25	124	4	24	118	3	23	117	2	24	118	3	24	118	3
15.	Karanganyar	29	34	169	5	34	169	5	34	168	5	34	170	5	34	168	5
16.	Kertanegara	22	30	149	8	31	156	9	31	156	9	31	156	9	31	153	9
17.	Karangmoncol	35	48	241	13	49	245	13	48	242	13	48	241	13	47	237	12
18.	Rembang	34	55	277	20	55	277	21	55	275	20	56	278	21	55	277	20
Jumlah		518	801	4.005	283	806	4.029	288	808	4.029	290	817	4.087	299	811	4.055	293

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Keterangan: Jumlah Kelas PAUD (1 PAUD 5 kelas)

Tabel II.56. Kebutuhan Sarana Pendidikan (SD/MI) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Kecamatan	Jumlah SD/MI 2023	Proyeksi Tahun														
			2025			2030			2035			2040			2045		
			Jumlah SD/MI	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SD/MI	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SD/MI	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SD/MI	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SD/MI	Jumlah Kelas	Gap
1.	Kemangkon	50	66	395	16	54	321	4	55	331	5	63	378	13	63	380	13
2.	Bukateja	53	85	515	32	70	420	17	70	419	17	80	481	27	81	484	28
3.	Kejobong	38	56	335	18	46	278	8	46	277	8	52	313	14	52	311	14
4.	Pengadegan	31	44	261	13	35	210	4	36	217	5	41	248	10	41	249	10
5.	Kaligondang	48	68	408	20	56	338	8	57	343	9	66	394	18	66	394	18
6.	Purbalingga	35	57	340	22	45	271	10	48	287	13	55	331	20	56	335	21
7.	Kalimanah	33	59	355	26	46	276	13	47	281	14	54	322	21	54	325	21
8.	Padamara	25	49	294	24	40	237	15	39	233	14	45	271	20	46	278	21
9.	Kutasari	41	75	451	34	63	379	22	59	353	18	69	413	28	71	423	30
10.	Bojongsari	33	72	430	39	56	338	23	55	329	22	63	378	30	65	387	32
11.	Mrebet	45	87	520	42	72	433	27	71	432	26	80	483	35	81	485	36
12.	Bobotsari	29	56	337	27	46	275	17	46	278	17	54	322	25	54	325	25
13.	Karangreja	28	54	325	26	45	271	17	42	254	14	49	292	21	49	296	21
14.	Karangjambu	20	31	188	11	27	160	7	26	154	6	29	176	9	30	177	10
15.	Karanganyar	33	45	270	12	38	225	5	37	222	4	42	252	9	42	254	9
16.	Kertanegara	24	41	246	17	34	202	10	34	205	10	39	233	15	39	233	15
17.	Karangmoncol	38	64	384	26	54	322	16	53	320	15	60	363	22	60	360	22
18.	Rembang	51	77	460	26	62	370	11	60	363	9	69	413	18	69	416	18
Jumlah		652	1.085	6.510	433	888	5.326	236	881	5.288	229	1.010	6.061	358	1.019	6.113	367

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Keterangan: Jumlah Kelas SD/MI (1 SD/MI 6 kelas)

Tabel II.57. Kebutuhan Sarana Pendidikan (SMP/MTS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Kecamatan	Jumlah SMP/MTS 2023	Proyeksi Tahun														
			2025			2030			2035			2040			2045		
			Jumlah SMP/MTS	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SMP/MTS	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SMP/MTS	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SMP/MTS	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SMP/MTS	Jumlah Kelas	Gap
1.	Kemangkon	7	10	261	3	9	245	2	6	236	-1	9	236	2	9	236	2
2.	Bukateja	11	12	329	1	12	318	1	9	299	-2	11	299	0	11	300	0
3.	Kejobong	5	8	213	3	8	204	3	6	197	1	7	197	2	7	195	2
4.	Pengadegan	4	6	164	2	6	163	2	4	155	0	6	155	2	6	155	2
5.	Kaligondang	7	10	266	3	9	254	2	7	245	0	9	245	2	9	246	2
6.	Purbalingga	11	9	232	-2	8	211	-3	6	205	-5	8	205	-3	8	206	-3
7.	Kalimanah	4	8	229	4	8	222	4	6	200	2	7	200	3	7	201	3
8.	Padamara	3	7	193	4	7	183	4	5	166	2	6	166	3	6	170	3
9.	Kutasari	6	11	294	5	10	279	4	8	251	2	9	251	3	10	259	4
10.	Bojongsari	5	11	285	6	10	264	5	7	234	2	9	234	4	9	236	4
11.	Mrebet	6	12	337	6	12	323	6	9	302	3	11	302	5	11	301	5
12.	Bobotsari	7	8	225	1	8	204	1	6	198	-1	7	198	0	7	201	0
13.	Karangreja	6	8	205	2	7	202	1	6	181	0	7	181	1	7	182	1
14.	Karangjambu	6	5	127	-1	4	115	-2	3	110	-3	4	110	-2	4	110	-2
15.	Karanganyar	4	7	177	3	6	167	3	5	158	1	6	158	2	6	157	2
16.	Kertanegara	5	6	157	1	6	156	1	4	146	-1	5	146	0	5	146	0
17.	Karangmoncol	13	9	243	-4	9	243	-4	7	228	-6	8	228	-5	8	226	-5
18.	Rembang	9	11	294	2	11	286	2	8	258	-1	10	258	1	10	257	1
Jumlah		119	157	4.230	38	150	4.037	31	109	3.769	-10	140	3.769	21	140	3.781	21

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Keterangan: Jumlah Kelas SMP/MTS (1 SMP/MTS 27 kelas)

Tabel II.58. Kebutuhan Sarana Pendidikan (SMA/SMK/MA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Kecamatan	Jumlah SMA/SMK/ MA 2023	Proyeksi Tahun														
			2025			2030			2035			2040			2045		
			Jumlah SMA/SMK/ MA	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SMA/SMK /MA	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SMA/SMK/ MA	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SMA/SMK/ MA	Jumlah Kelas	Gap	Jumlah SMA/SMK/ MA	Jumlah Kelas	Gap
1.	Kemangkon	3	6	161	3	6	149	3	6	112	3	4	112	1	5	147	2
2.	Bukateja	6	8	208	2	8	194	2	7	142	1	5	142	-1	7	187	1
3.	Kejobong	2	5	134	3	5	129	3	5	94	3	3	94	1	5	23	3
4.	Pengadegan	1	4	104	3	4	99	3	4	73	3	3	73	2	4	97	3
5.	Kaligondang	2	6	168	4	6	156	4	6	116	4	4	116	2	6	153	4
6.	Purbalingga	9	6	149	-3	5	127	-4	5	94	-4	3	94	-6	5	128	-4
7.	Kalimanah	3	5	141	2	5	130	2	5	94	2	3	94	0	5	125	2
8.	Padamara	2	5	123	3	4	113	2	4	79	2	3	79	1	4	104	2
9.	Kutasari	3	7	187	4	7	178	4	7	123	4	5	123	2	6	159	3
10.	Bojongsari	3	6	170	3	6	160	3	6	113	3	4	113	1	5	146	2
11.	Mrebet	3	8	212	5	8	201	5	7	145	4	5	145	2	7	188	4
12.	Bobotsari	6	5	142	-1	5	128	-1	5	93	-1	3	93	-3	5	125	-1
13.	Karangreja	2	5	126	3	5	130	3	5	87	3	3	87	1	4	113	2
14.	Karangjambu	1	3	78	2	3	74	2	3	53	2	2	53	1	3	69	2
15.	Karanganyar	4	4	110	0	4	104	0	4	76	0	3	76	-1	4	98	0
16.	Kertanegara	2	4	99	2	4	95	2	4	69	2	3	69	1	3	91	1
17.	Karangmoncol	5	6	154	1	5	151	0	6	109	1	4	109	-1	5	142	0
18.	Rembang	2	7	182	5	7	174	5	6	123	4	5	123	3	6	161	4
Jumlah		62	98	2.647	36	95	2.492	33	92	1.796	30	67	1.796	5	87	2.357	25

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Keterangan: Jumlah Kelas SMA/SMK/MA (1 SMA/SMK/MA 27 kelas)

2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

A. Ketersediaan Sarana Kesehatan

Di Kabupaten Purbalingga telah tersedia Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 masing-masing sejumlah 22 unit dan jumlah puskesmas pembantu sejumlah 48 unit. Apabila keduanya digabungkan untuk menghitung rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk yaitu sejumlah 70 unit.

Dengan jumlah tersebut rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk yaitu sebesar 1: 14.799. Rasio ideal puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1: 16.000, sehingga secara umum rasio puskesmas di Kabupaten Purbalingga masih masuk dalam range kriteria standar. Namun demikian, melihat proyeksi jumlah penduduk yang naik 20 tahun ke depan, guna menjaga rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk dalam kondisi ideal diperlukan adanya peningkatan sarana kesehatan berupa puskesmas maupun puskesmas pembantu di Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan dilihat dari jumlah rumah sakit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin meningkat. Pada tahun 2022, telah tersedia 8 unit dengan 7 unit diantaranya merupakan RS Umum dan 1 unit merupakan RS Khusus. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk yaitu sebesar 1: 129.495, sedangkan rasio *bed*/tempat tidur per 1000 penduduk adalah 0,91. Berdasarkan standar WHO 1 *bed* untuk 1.000 penduduk, maka rasio *bed* rumah sakit di Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar dan perlu adanya peningkatan.

Tabel II.59. Perkembangan Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023

No.	Sekolah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Puskesmas	unit	22	22	22	22	22	22
2	Puskesmas Pembantu	unit	48	48	48	48	48	48
3	Rumah Sakit	unit	6	6	6	7	8	8
	RS Umum		5	5	5	6	7	7
	- RS Umum Milik Daerah		2	2	2	2	2	2
	- RS Umum Milik Swasta		3	3	3	4	5	5
	RS Khusus		1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2019-2024

B. Kebutuhan Sarana Kesehatan

Dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan hidup masyarakat dengan menjamin hak yang sama untuk semua penduduk dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi akses pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat

yang diproyeksi bertambah setiap tahunnya, diperlukan rencana proyeksi kebutuhan kesehatan.

Penentuan kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada proyeksi penduduk dan peraturan atau standar terbaru yang berlaku seperti standar WHO yang menetapkan satu tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Kemudian standar rasio puskesmas yang diatur dengan standar 1:120.000 jumlah penduduk dan puskesmas pembantu yang diatur dengan standar 1:30.000 jumlah penduduk.

Tabel II.6o. Kebutuhan Sarana Kesehatan (Puskesmas) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas 2023	2025			2030			2035			2040			2045		
			Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas	Gap	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas	Gap	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas	Gap	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas	Gap	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas	Gap
1	Kemangkon	2	68.660	2	0	75.719	2	0	83.503	2	0	92.088	2	0	101.555	2	0
2	Bukateja	1	83.676	2	1	91.229	2	1	99.463	2	1	108.441	2	1	118.229	2	1
3	Kejobong	1	54.538	1	0	59.688	1	0	65.324	1	0	71.492	1	0	78.243	2	1
4	Kaligondang	2	70.113	2	0	76.107	2	0	82.614	2	0	89.677	2	0	97.343	2	0
5	Purbalingga	2	59.406	2	0	60.118	2	0	60.839	2	0	61.569	2	0	62.308	2	0
6	Kalimanah	1	61.283	2	1	65.653	2	1	70.336	2	1	75.353	2	1	80.727	2	1
7	Kutasari	1	69.777	1	0	75.889	2	1	82.536	2	1	89.765	2	1	97.627	2	1
8	Mrebet	2	83.357	2	0	90.762	2	0	98.824	2	0	107.602	2	0	117.160	2	0
9	Bobotsari	1	56.669	1	0	60.483	1	0	64.554	2	1	68.898	2	1	73.536	2	1
10	Karangreja	1	49.389	1	0	53.499	1	0	57.951	1	0	62.774	1	0	67.998	1	0
11	Karanganyar	1	42.779	1	0	46.357	1	0	50.235	1	0	54.437	1	0	58.991	1	0
12	Karangmoncol	1	62.060	1	0	67.219	2	1	72.807	2	1	78.860	2	1	85.415	2	1
13	Rembang	1	72.436	2	1	78.939	2	1	86.027	2	1	93.750	2	1	102.168	2	1
14	Bojongsari	1	66.717	1	0	70.934	2	1	75.418	2	1	80.186	2	1	85.255	2	1
15	Padamara	1	49.844	2	1	53.971	1	0	58.439	1	0	63.277	1	0	68.515	1	0
16	Pengadegan	1	43.548	1	0	46.833	1	0	50.366	1	0	54.166	1	0	58.252	1	0
17	Karangjambu	1	29.866	1	0	32.523	1	0	35.416	1	0	38.566	1	0	41.997	1	0
18	Kertanegara	1	39.819	1	0	44.157	1	0	48.968	1	0	54.303	1	0	60.219	1	0
Jumlah		22	1.063.935	26	4	1.150.080	28	6	1.243.620	29	7	1.345.203	29	7	1.455.537	30	8

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel II.61. Kebutuhan Sarana Kesehatan (Puskesmas Pembantu) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas Pembantu 2023	2025			2030			2035			2040			2045		
			Jumlah Penduduk	Jumlah Pustu	Gap	Jumlah Penduduk	Jumlah Pustu	Gap	Jumlah Penduduk	Jumlah Pustu	Gap	Jumlah Penduduk	Jumlah Pustu	Gap	Jumlah Penduduk	Jumlah Pustu	Gap
1	Kemangkon	2	68.660	2	0	75.719	3	1	83.503	3	1	92.088	3	1	101.555	3	1
2	Bukateja	4	83.676	3	-1	91.229	3	-1	99.463	3	-1	108.441	4	0	118.229	4	0
3	Kejobong	2	54.538	2	0	59.688	2	0	65.324	2	0	71.492	2	0	78.243	3	1
4	Kaligondang	3	70.113	2	-1	76.107	3	0	82.614	3	0	89.677	3	0	97.343	3	0
5	Purbalingga	1	59.406	2	1	60.118	2	1	60.839	2	1	61.569	2	1	62.308	2	1
6	Kalimanah	2	61.283	2	0	65.653	2	0	70.336	2	0	75.353	3	1	80.727	3	1
7	Kutasari	1	69.777	2	1	75.889	3	2	82.536	3	2	89.765	3	2	97.627	3	2
8	Mrebet	7	83.357	3	-4	90.762	3	-4	98.824	3	-4	107.602	4	-3	117.160	4	-3
9	Bobotsari	3	56.669	2	-1	60.483	2	-1	64.554	2	-1	68.898	2	-1	73.536	2	-1
10	Karangreja	2	49.389	2	0	53.499	2	0	57.951	2	0	62.774	2	0	67.998	2	0
11	Karanganyar	2	42.779	1	-1	46.357	2	0	50.235	2	0	54.437	2	0	58.991	2	0
12	Karangmoncol	3	62.060	2	-1	67.219	2	-1	72.807	2	-1	78.860	3	0	85.415	3	0
13	Rembang	3	72.436	2	-1	78.939	3	0	86.027	3	0	93.750	3	0	102.168	3	0
14	Bojongsari	3	66.717	2	-1	70.934	2	-1	75.418	3	0	80.186	3	0	85.255	3	0
15	Padamara	3	49.844	2	-1	53.971	2	-1	58.439	2	-1	63.277	2	-1	68.515	2	-1
16	Pengadegan	3	43.548	1	-2	46.833	2	-1	50.366	2	-1	54.166	2	-1	58.252	2	-1
17	Karangjambu	2	29.866	1	-1	32.523	1	-1	35.416	1	-1	38.566	1	-1	41.997	1	-1
18	Kertanegara	2	39.819	1	-1	44.157	1	-1	48.968	2	0	54.303	2	0	60.219	2	0
Jumlah		48	1.063.935	35	-13	1.150.080	38	-10	1.243.620	41	-7	1.345.203	45	-3	1.455.537	49	1

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dari hasil analisis kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, dibutuhkan tambahan sejumlah puskesmas dan puskesmas pembantu untuk mencukupi rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sampai tahun 2045. Saat ini sudah ada 22 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan tahun 2045 masih dibutuhkan sebanyak 8 unit untuk mencukupi kebutuhan total puskesmas sebanyak 30 unit. Sementara itu untuk puskesmas pembantu, saat ini sudah tersedia 48 unit, sehingga kebutuhan puskesmas pembantu sampai dengan tahun 2045 yaitu sebanyak 1 unit untuk mencukupi kebutuhan total puskesmas pembantu sebanyak 49 unit.

2.7.3 Proyeksi Kebutuhan Rumah

Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga akan mengalami pertambahan. Kondisi tersebut tentu saja akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal. Meningkatnya kebutuhan rumah ini harus diarahkan agar tidak berdampak pada munculnya permukiman kumuh baik *squater* maupun *slum*. Dengan mengetahui jumlah kebutuhan perumahan di masa mendatang, pemerintah bisa mengambil kebijakan atau perencanaan dalam menyediakan lahan untuk permukiman.

Menurut Permenpera No 10 Tahun 2012, setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.

Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Untuk mengetahui kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2045 dengan menggunakan konsep pembangunan hunian yaitu rasio perbandingan pembangunan antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah adalah 3 : 2 : 1. Untuk perhitungan luas rumah sederhana diasumsikan seluas 72 m², rumah menengah diasumsikan seluas 120 m² dan rumah mewah diasumsikan seluas 200 m².

Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2045 mencapai 363.885 unit dengan perkiraan kebutuhan rumah tertinggi terdapat di Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Mrebet. Dilihat dari kebutuhan lahan permukiman hingga tahun 2045 mencapai 3.978 ha yang terbagi untuk hunian:

rumah mewah (1), menengah (2) dan sederhana (3). Kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga ini dapat disediakan secara swadaya masyarakat, pengembang maupun pemerintah. Meningkatnya kebutuhan rumah tiap tahunnya dapat menjadi potensi investasi bagi swasta/pengembang dalam penyediaan rumah di Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.62. Kebutuhan Rumah dan Lahan Perumahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2040

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tahun 2023	Jumlah Penduduk Tahun 2022	2025		2030		2035		2040	
				Kebutuhan Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (m²)	Kebutuhan Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (m²)	Kebutuhan Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (m²)	Kebutuhan Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (m²)
1	Kemangkon	18.268	65.402	17.165	1.876.707	18.930	2.069.653	20.876	2.282.415	23.022	2.517.072
2	Bukateja	20.636	80.006	20.919	2.287.144	22.807	2.493.593	24.866	2.718.655	27.110	2.964.054
3	Kejobong	12.899	52.023	13.635	1.490.705	14.922	1.631.472	16.331	1.785.523	17.873	1.954.115
4	Kaligondang	16.400	67.024	17.528	1.916.422	19.027	2.080.258	20.654	2.258.116	22.419	2.451.171
5	Purbalingga	14.563	57.364	14.852	1.623.764	15.030	1.643.225	15.210	1.662.933	15.392	1.682.886
6	Kalimanah	14.810	58.813	15.321	1.675.069	16.413	1.794.515	17.584	1.922.517	18.838	2.059.649
7	Kutasari	15.321	66.894	17.444	1.907.238	18.972	2.074.299	20.634	2.255.984	22.441	2.453.577
8	Mrebet	18.600	79.789	20.839	2.278.425	22.691	2.480.828	24.706	2.701.189	26.901	2.941.121
9	Bobotsari	12.320	54.158	14.167	1.548.953	15.121	1.653.202	16.139	1.764.476	17.225	1.883.212
10	Karangreja	10.115	47.758	12.347	1.349.966	13.375	1.462.306	14.488	1.583.994	15.694	1.715.823
11	Karanganyar	9.542	40.919	10.695	1.169.293	11.589	1.267.091	12.559	1.373.090	13.609	1.487.945
12	Karangmoncol	13.417	59.777	15.515	1.696.307	16.805	1.837.319	18.202	1.990.058	19.715	2.155.507
13	Rembang	19.771	69.437	18.109	1.979.917	19.735	2.157.666	21.507	2.351.405	23.438	2.562.500
14	Bojongsari	14.803	64.147	16.679	1.823.598	17.734	1.938.863	18.855	2.061.425	20.047	2.191.751
15	Padamara	10.846	47.721	12.461	1.362.403	13.493	1.475.207	14.610	1.597.333	15.819	1.729.571
16	Pengadegan	10.966	41.833	10.887	1.190.312	11.708	1.280.102	12.592	1.376.671	13.542	1.480.537
17	Karangjambu	6.106	28.778	7.467	816.337	8.131	888.962	8.854	968.037	9.642	1.054.137
18	Kertanegara	8.469	37.997	9.955	1.088.386	11.039	1.206.958	12.242	1.338.459	13.576	1.484.282
Jumlah		247.852	1.019.840	265.984	29.080.945	287.520	31.435.520	310.905	33.992.280	336.301	36.768.909

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel II.63. Kebutuhan Rumah dan Lahan Permukiman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tahun 2023	Jumlah Penduduk Tahun 2023	2045								
				1 (Rumah Mewah)	2 (Rumah Menengah)	3 (Rumah Sederhana)	Kebutuhan Rumah (unit)	1 (Rumah Mewah)	2 (Rumah Menengah)	3 (Rumah Sederhana)	Proyeksi Total Kebutuhan Lahan (m²)	Luas Kebutuhan Lahan Permukiman (ha)
1	Kemangkon	18.268	66.096	4.231	8.463	12.694	25.389	846.292	1.015.550	913.995	2.775.837	278
2	Bukateja	20.636	80.709	4.926	9.852	14.779	29.557	985.242	1.182.290	1.064.061	3.231.593	323
3	Kejobong	12.899	52.507	3.260	6.520	9.780	19.561	652.025	782.430	704.187	2.138.642	214
4	Kaligondang	16.400	67.556	4.056	8.112	12.168	24.336	811.192	973.430	876.087	2.660.709	266
5	Purbalingga	14.563	57.071	2.596	5.192	7.789	15.577	519.233	623.080	560.772	1.703.085	170
6	Kalimanah	14.810	59.203	3.364	6.727	10.091	20.182	672.725	807.270	726.543	2.206.538	221
7	Kutasari	15.321	67.519	4.068	8.136	12.203	24.407	813.558	976.270	878.643	2.668.471	267
8	Mrebet	18.600	80.505	4.882	9.763	14.645	29.290	976.333	1.171.600	1.054.440	3.202.373	320
9	Bobotsari	12.320	54.406	3.064	6.128	9.192	18.384	612.800	735.360	661.824	2.009.984	201
10	Karangreja	10.115	48.171	2.833	5.667	8.500	17.000	566.650	679.980	611.982	1.858.612	186
11	Karanganyar	9.542	41.206	2.458	4.916	7.374	14.748	491.592	589.910	530.919	1.612.421	161
12	Karangmoncol	13.417	60.209	3.559	7.118	10.677	21.354	711.792	854.150	768.735	2.334.677	233
13	Rembang	19.771	69.982	4.257	8.514	12.771	25.542	851.400	1.021.680	919.512	2.792.592	279
14	Bojongsari	14.803	64.470	3.552	7.105	10.657	21.314	710.458	852.550	767.295	2.330.303	233
15	Padamara	10.846	48.169	2.855	5.710	8.564	17.129	570.958	685.150	616.635	1.872.743	187
16	Pengadegan	10.966	42.095	2.427	4.854	7.282	14.563	485.433	582.520	524.268	1.592.221	159
17	Karangjambu	6.106	29.040	1.750	3.500	5.250	10.499	349.975	419.970	377.973	1.147.918	115
18	Kertanegara	8.469	38.419	2.509	5.018	7.527	15.055	501.825	602.190	541.971	1.645.986	165
Jumlah		247.852	1.027.333	60.647	121.295	181.942	363.885	12.129.483	14.555.380	13.099.842	39.784.705	3.978
								40% (RTH + Prasarana + Sarana)			1.591	
								Luas Kebutuhan Lahan Perkim Tahun 2045 (ha)			5.570	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.7.4 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan prasarana di lingkungan hunian Purbalingga, salah satunya berupa kebutuhan air bersih. Air bersih sebagai kebutuhan primer digunakan oleh penduduk lingkungan hunian Purbalingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air bersih di lingkungan hunian Purbalingga disalurkan oleh PDAM dan non PDAM yang mengalami peningkatan jumlah air setiap tahunnya.

Menggunakan SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial yang menyebutkan penyediaan debit harian sebesar 120 liter/orang/hari, kebutuhan air bersih di Kabupaten Purbalingga pada tahun 1945 sebesar 209 juta liter/hari. Kebutuhan ini harus disediakan oleh layanan penyediaan air bersih di Kabupaten Purbalingga. Untuk itu, diperlukan adanya penyediaan air bersih non perpipaan dengan mempertimbangkan perspektif keberlanjutan.

Pengembangan unit pengolahan air baku pada skala yang kecil dan tersebar pada wilayah dengan layanan air bersih non perpipaan merupakan salah satu inovasi layanan yang dapat dilakukan. Skala yang kecil merupakan respon terhadap keterbatasan lahan Kabupaten Purbalingga sehingga tidak memungkinkan untuk pengadaan fasilitas yang masif.

2.7.5 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan prasarana lainnya yaitu kebutuhan jaringan listrik. Ketersediaan jaringan listrik eksisting perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan kebutuhan listrik non domestik berupa: industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan.

Ketersediaan jaringan listrik yang ada di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik, dengan rasio elektrifikasi sudah mencapai 100% dan tersebar hampir di seluruh kecamatan. Penyediaan listrik di kabupaten akan terus tumbuh berkembang dikarenakan adanya pertumbuhan permukiman dan meningkatnya taraf perekonomian. Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan standar sebagai berikut:

- Kebutuhan Domestik, yakni kebutuhan 900 watt per KK/hari
- Kebutuhan Non Domestik, meliputi: untuk penerangan jalan sebesar 10% dari kebutuhan domestik, untuk kebutuhan jasa, perdagangan dan industri sebesar 20% dari kebutuhan domestik; dan untuk kebutuhan sosial sebesar 20% serta untuk kehilangan sebesar 25%.

Tabel II.64. Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045			
			Total Kebutuhan Debit Harian Air Bersih (liter/hari)	Total Kebutuhan Debit Harian Air Bersih (liter/hari)	Total Kebutuhan Debit Harian Air Bersih (liter/hari)	Total Kebutuhan Debit Harian Air Bersih (liter/hari)	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Debit Harian Rumah Tangga (liter/hari)	Asumsi Kebutuhan Debit Harian Sarana Dasar Perkotaan (liter/hari)	Total Kebutuhan Debit Harian Air Bersih (liter/hari)
1	Kemangkon	66.096	9.887.040	10.903.536	12.024.432	13.260.672	101.555	12.186.600	2.437.320	14.623.920
2	Bukateja	80.709	12.049.344	13.136.976	14.322.672	15.615.504	118.229	14.187.480	2.837.496	17.024.976
3	Kejobong	52.507	7.853.472	8.595.072	9.406.656	10.294.848	78.243	9.389.160	1.877.832	11.266.992
4	Kaligondang	67.556	10.096.272	10.959.408	11.896.416	12.913.488	97.343	11.681.160	2.336.232	14.017.392
5	Purbalingga	57.071	8.554.464	8.656.992	8.760.816	8.865.936	62.308	7.476.960	1.495.392	8.972.352
6	Kalimanah	59.203	8.824.752	9.454.032	10.128.384	10.850.832	80.727	9.687.240	1.937.448	11.624.688
7	Kutasari	67.519	10.047.888	10.928.016	11.885.184	12.926.160	97.627	11.715.240	2.343.048	14.058.288
8	Mrebet	80.505	12.003.408	13.069.728	14.230.656	15.494.688	117.160	14.059.200	2.811.840	16.871.040
9	Bobotsari	54.406	8.160.336	8.709.552	9.295.776	9.921.312	73.536	8.824.320	1.764.864	10.589.184
10	Karangreja	48.171	7.112.016	7.703.856	8.344.944	9.039.456	67.998	8.159.760	1.631.952	9.791.712
11	Karanganyar	41.206	6.160.176	6.675.408	7.233.840	7.838.928	58.991	7.078.920	1.415.784	8.494.704
12	Karangmoncol	60.209	8.936.640	9.679.536	10.484.208	11.355.840	85.415	10.249.800	2.049.960	12.299.760
13	Rembang	69.982	10.430.784	11.367.216	12.387.888	13.500.000	102.168	12.260.160	2.452.032	14.712.192
14	Bojongsari	64.470	9.607.248	10.214.496	10.860.192	11.546.784	85.255	10.230.600	2.046.120	12.276.720
15	Padamara	48.169	7.177.536	7.771.824	8.415.216	9.111.888	68.515	8.221.800	1.644.360	9.866.160
16	Pengadegan	42.095	6.270.912	6.743.952	7.252.704	7.799.904	58.252	6.990.240	1.398.048	8.388.288
17	Karangjambu	29.040	4.300.704	4.683.312	5.099.904	5.553.504	41.997	5.039.640	1.007.928	6.047.568
18	Kertanegara	38.419	5.733.936	6.358.608	7.051.392	7.819.632	60.219	7.226.280	1.445.256	8.671.536
Jumlah		1.027.333	153.206.928	165.611.520	179.081.280	193.709.376	1.455.538	174.664.560	34.932.912	209.597.472

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel II.65. Kebutuhan Listrik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045				
			Total Kebutuhan Listrik (watt)	Total Kebutuhan Listrik (watt)	Total Kebutuhan Listrik (watt)	Total Kebutuhan Listrik (watt)	Proyeksi Penduduk	Jumlah KK	Kebutuhan Listrik Domestik (watt)	Kebutuhan Listrik Non Domestik (watt)	Total Kebutuhan Listrik (watt)
1	Kemangkon	66.096	18.538.200	20.444.130	22.545.810	24.863.760	101.555	25.389	22.849.875	4.569.975	27.419.850
2	Bukateja	80.709	22.592.520	24.631.830	26.855.010	29.279.070	118.229	29.557	26.601.525	5.320.305	31.921.830
3	Kejobong	52.507	14.725.260	16.115.760	17.637.480	19.302.840	78.243	19.561	17.604.675	3.520.935	21.125.610
4	Kaligondang	67.556	18.930.510	20.548.890	22.305.780	24.212.790	97.343	24.336	21.902.175	4.380.435	26.282.610
5	Purbalingga	57.071	16.039.620	16.231.860	16.426.530	16.623.630	62.308	15.577	14.019.300	2.803.860	16.823.160
6	Kalimanah	59.203	16.546.410	17.726.310	18.990.720	20.345.310	80.727	20.182	18.163.575	3.632.715	21.796.290
7	Kutasari	67.519	18.839.790	20.490.030	22.284.720	24.236.550	97.627	24.407	21.966.075	4.393.215	26.359.290
8	Mrebet	80.505	22.506.390	24.505.740	26.682.480	29.052.540	117.160	29.290	26.361.000	5.272.200	31.633.200
9	Bobotsari	54.406	15.300.630	16.330.410	17.429.580	18.602.460	73.536	18.384	16.545.600	3.309.120	19.854.720
10	Karangreja	48.171	13.335.030	14.444.730	15.646.770	16.948.980	67.998	17.000	15.299.550	3.059.910	18.359.460
11	Karanganyar	41.206	11.550.330	12.516.390	13.563.450	14.697.990	58.991	14.748	13.272.975	2.654.595	15.927.570
12	Karangmoncol	60.209	16.756.200	18.149.130	19.657.890	21.292.200	85.415	21.354	19.218.375	3.843.675	23.062.050
13	Rembang	69.982	19.557.720	21.313.530	23.227.290	25.312.500	102.168	25.542	22.987.800	4.597.560	27.585.360
14	Bojongsari	64.470	18.013.590	19.152.180	20.362.860	21.650.220	85.255	21.314	19.182.375	3.836.475	23.018.850
15	Padamara	48.169	13.457.880	14.572.170	15.778.530	17.084.790	68.515	17.129	15.415.875	3.083.175	18.499.050
16	Pengadegan	42.095	11.757.960	12.644.910	13.598.820	14.624.820	58.252	14.563	13.106.700	2.621.340	15.728.040
17	Karangjambu	29.040	8.063.820	8.781.210	9.562.320	10.412.820	41.997	10.499	9.449.325	1.889.865	11.339.190
18	Kertanegara	38.419	10.751.130	11.922.390	13.221.360	14.661.810	60.219	15.055	13.549.275	2.709.855	16.259.130
Jumlah		1.027.333	287.262.990	310.521.600	335.777.400	363.205.080	1.455.538	363.885	327.496.050	65.499.210	392.995.260

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Kebutuhan jaringan listrik di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2045 mencapai 392.995 KWH yang meliputi kebutuhan domestik 327.496 KWH dan kebutuhan non domestik mencapai 65.499 KWH. Dilihat proyeksi dari kebutuhan tahun 2045, perlu adanya penambahan pasokan listrik di Kabupaten Purbalingga, terutama daerah-daerah yang masih jauh dari perkotaan. Kendala dalam penambahan jaringan dan pasokan listrik terutama di daerah Purbalingga bagian utara adalah karena faktor kelerengan. Dengan kelerengan yang termasuk curam, dapat mempersulit dalam pemasangan jaringan karena daerah tersebut rawan akan gerakan tanah/ longsor.

2.7.6 Proyeksi Persampahan

Potensi timbulan sampah dihitung berdasarkan standar timbulan sampah domestik pada SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman yang menyatakan bahwa timbulan sampah kota besar sebanyak 3 liter/orang/hari dan kota kecil 2,5 liter/orang/hari. Sedangkan untuk berat jenis sampah, menggunakan asumsi 200-300 kg/m³ (0,2 – 0,3 kg/liter). Proyeksi persampahan di Purbalingga menurut kecamatan disajikan dalam Tabel II.62.

Tabel II.66. Proyeksi Persampahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Kemangkon	66.096	33,385	35,157	37,024	38,990	41,060
2	Bukateja	80.709	40,839	43,008	45,291	47,696	50,229
3	Kejobong	52.507	26,555	27,965	29,450	31,014	32,661
4	Kaligondang	67.556	34,213	36,029	37,942	39,957	42,079
5	Purbalingga	57.071	29,282	30,836	32,474	34,198	36,014
6	Kalimanah	59.203	30,021	31,615	33,294	35,062	36,014
7	Kutasari	67.519	34,146	35,959	37,869	39,879	41,997
8	Mrebet	80.505	40,729	42,891	45,169	47,567	50,093
9	Bobotsari	54.406	27,645	29,113	30,659	32,287	34,001
10	Karangreja	48.171	24,378	25,672	27,036	28,471	29,983
11	Karanganyar	41.206	20,887	21,996	23,164	24,394	25,689
12	Karangmoncol	60.209	30,514	32,133	33,840	35,636	37,529
13	Rembang	69.982	35,444	37,326	39,308	41,395	43,593
14	Bojongsari	64.470	32,744	34,483	36,314	38,242	40,273
15	Padamara	48.169	24,359	25,652	27,015	28,449	29,960
16	Pengadegan	42.095	21,354	22,487	23,681	24,939	26,263
17	Karangjambu	29.040	14,690	15,470	16,291	17,156	18,067
18	Kertanegara	38.419	19,396	20,425	21,510	22,652	23,855
Jumlah		1.027.333	520,577	548,219	577,330	607,986	640,270

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah menjadi hal krusial agar semua dapat terproses dengan baik, diantaranya seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya. Pelayanan jaringan persampahan melayani sampah domestik, non domestik, dan fasilitas sosial. Analisis jumlah sampah dan kebutuhan prasarana persampahan di Kabupaten Banyumas berpedoman pada SNI 3242 2008. Kebutuhan sarana persampahan dihitung dengan kriteria meliputi:

- Jumlah sampah domestik adalah 0,3 kg/jiwa/hari;
- Kapasitas mesin cacah (gibrik) 1,5 ton/jam;
- Kerja mesin per hari adalah 8 jam;
- Kapasitas mesin 12 ton/hari; dan
- Kebutuhan sarana berupa TPST.

2.8 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.8.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Purbalingga adalah: “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan”. Dari tujuan tersebut mengandung makna:

- a) **Pengembangan Pusat Kegiatan**
Perkotaan Purbalingga diharapkan tumbuh menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yaitu kawasan yang menjadi hirarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional yang berada di bagian Barat-Selatan Provinsi Jawa Tengah, yang didukung dengan pengembangan pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan di sekitarnya.
- b) **Pengembangan Agribisnis**
Purbalingga tumbuh berbasis usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, dengan perusahaan pengelolaan hasil pertanian didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi serta sistem pengolahan dan pemasaran yang handal. Aktivitas pertanian disusun dalam kerangka sistematis dan strategis yang siap bersaing dalam pasar global.
- c) **Pengembangan Industri dan Pariwisata**
Sektor industri sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat

Purbalingga baik berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan perlu terintegrasi dengan sistem infrastruktur wilayah. Pengembangan industri dan pariwisata diarahkan untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pola pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

2.8.1.1 Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, dapat dilihat pada sistem perkotaan dan pengembangan kawasan budidaya. Sistem perkotaan terdiri atas struktur perkotaan dan sistem wilayah dengan struktur perkotaan terbentuk berdasarkan pola geografis wilayah dan pola jaringan aksesibilitas, sedangkan sistem wilayah berupa pembagian wilayah pengembangan.

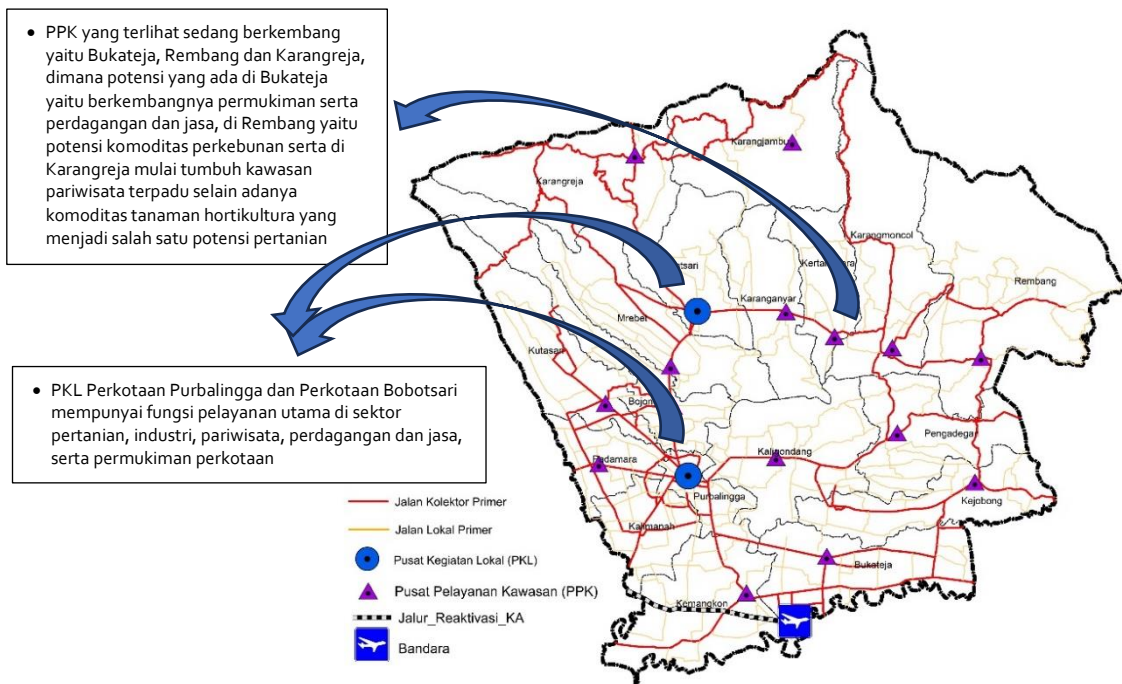
Struktur perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL di Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari dengan skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional kabupaten. Fungsi pelayanan utama pada PKL Purbalingga dan Bobotsari yaitu di sektor: pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan. Ekonomi pertanian didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi dan dikembangkan pula kawasan agropolitan ramah lingkungan serta agribisnis. Untuk sektor industri didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian untuk menjadi agroindustri dan industri berkelanjutan. Sedangkan pariwisata tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan.

PKL Purbalingga dan PKL Bobotsari didukung oleh PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan, dan Karangjambu yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kondisi 5 tahun terakhir menunjukkan beberapa PPK terlihat sedang berkembang yaitu: Bukateja, Rembang, Karangreja dan Kejobong. Potensi yang ada di Bukateja yaitu berkembangnya permukiman serta perdagangan dan jasa, di Rembang berkembang beberapa potensi komoditas perkebunan serta di Karangreja mulai tumbuh kawasan pariwisata terpadu selain adanya komoditas tanaman hortikultura yang menjadi salah satu potensi pertanian.

Perkembangan beberapa PPK tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan pembangunan bagian selatan dan utara Kabupaten Purbalingga. Selama ini pengembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga, sebagian besar lebih

berpusat pada bagian selatan karena adanya PKL Purbalingga dan PPK Bukateja sebagai pendukung. Sementara itu di bagian utara dengan semakin berkembangnya PKL Bobotsari serta PPK Karangreja dan PPK Rembang sebagai pendukung, dapat meningkatkan perkembangan wilayah utara. Pengembangan wilayah utara tersebut perlu dihubungkan dengan *nodes-nodes* jaringan jalan yang lebih ditingkatkan untuk mendukung aksesibilitas, mobilitas serta koleksi dan distribusi hasil pertanian wilayah utara.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 58. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

Untuk sistem wilayah, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Cilacap-Purbalingga-Banyumas (Cibalingmas). Fungsi dan peran Kabupaten Purbalingga dalam konstelasi regional didukung sistem jaringan jalan berupa jalan provinsi (jalan kolektor primer dua/JKP-2) dan jalan kabupaten (jalan kolektor primer empat/JKP-4, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal) yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di sekitarnya, yaitu PKN Kawasan Perkotaan Cilacap dan PKW Kawasan Perkotaan Purwokerto.

Dilihat dari jaringan prasarana yang mendukung sistem perkotaan di Kabupaten Purbalingga, kondisi jaringan transportasi menunjukkan kondisi perkerasan jalan yang sebagian besar sudah cukup baik. Namun memang masih ada

beberapa ruas jalan di wilayah utara Kabupaten Purbalingga (wilayah bukit dan pegunungan) masih menggunakan perkerasan batu dan tanah.

Pengembangan transportasi darat di Kabupaten Purbalingga juga didukung oleh terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Bobotsari dan terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Purbalingga. Selain itu juga terdapat terminal penumpang tipe C yang terdiri dari: Terminal Bukateja, Kejobong, Penaruban, dan Jompo. Untuk transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga, selain angkutan kota dan angkutan desa juga terdapat transportasi umum massal yaitu BRT (*Bus Rapid Transit*) dengan rute Purwokero-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja dengan *shelter* yang terpusat pada konektivitas Terminal Jompo, Terminal Purbalingga dan Terminal Bukateja. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan angkutan darat di Purbalingga dapat dilihat dalam gambar 2.59.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

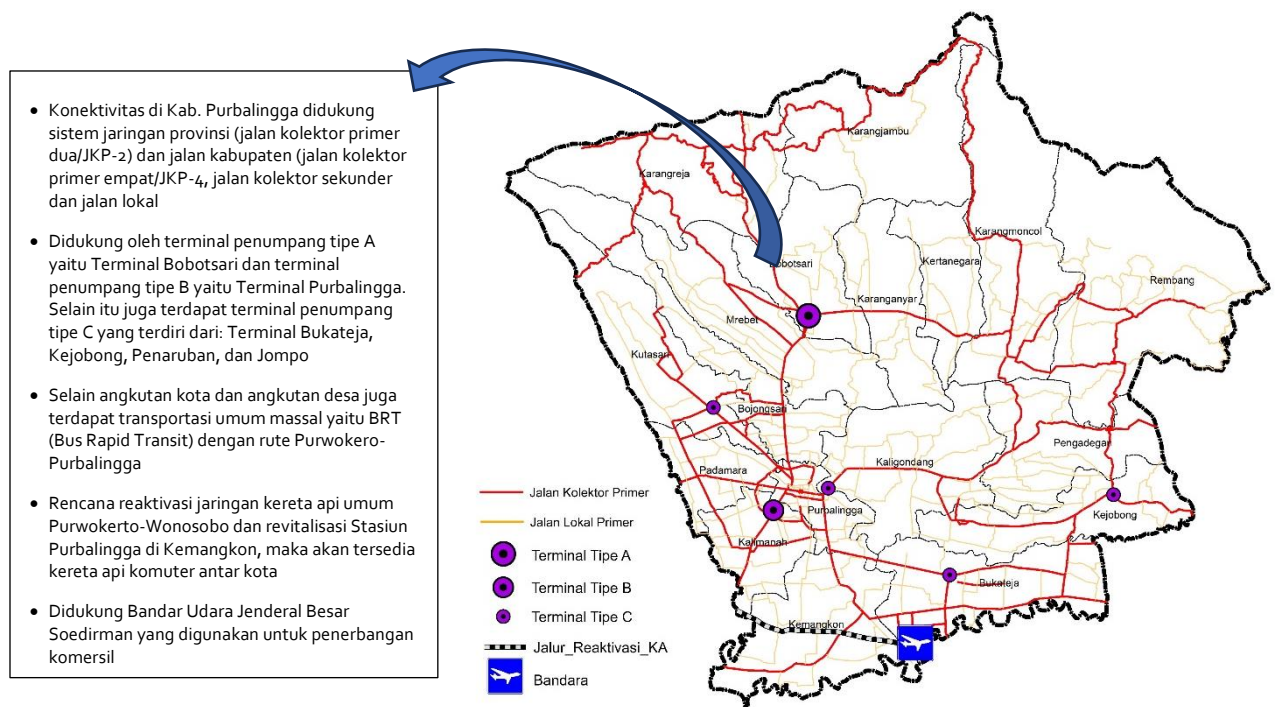
Gambar 2. 59. Potensi Pengembangan Transportasi Terintegrasi di Kabupaten Purbalingga

Keberadaan beberapa terminal di Kabupaten Purbalingga tersebut mempunyai potensi untuk pengembangan moda transportasi publik berbasis kemitraan dengan memanfaatkan teknologi, berorientasi pelayanan inklusif, dan terintegrasi melalui peningkatan koridor: Terminal Purbalingga-Bobotsari, Terminal Purbalingga-Bukateja, Terminal Purbalingga-Pagembrungan dan Penambahan Koridor Terminal Purbalingga-Bandara JBS. Di samping itu, pengembangan moda

transportasi publik juga dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan transportasi pendidikan antar wilayah dengan konektivitas infrastruktur transportasi wilayah yang menghubungkan Pusat Pendidikan Tinggi Purwokerto dan Purbalingga dengan koridor : UIN Purwokerto – Unsoed Purwokerto – UMP Purwokerto – UIN Prof. Saizu Purbalingga – ITBMP Purbalingga – Politeknik Madyatika - Universitas Perwira Purbalingga – Unsoed Fakultas Teknik.

Di samping transportasi umum angkutan dan bus, apabila rencana reaktivasi jaringan kereta api umum Purwokerto – Purbalingga – Banjarsari – Purwonegoro - Banjarnegara – Wonosobo terealisasi, akan dilakukan revitalisasi stasiun lama untuk rencana pengoperasian kereta komuter antar kota yaitu Stasiun Purbalingga yang terletak di Kemangkon.

Untuk sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga juga sudah didukung dengan keberadaan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman yang saat ini digunakan untuk penerbangan komersil dan *feeder* umroh. Keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas di Kabupaten Purbalingga akan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya. Selain jaringan transportasi, struktur ruang di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan sistem jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan energi serta jaringan prasarana lainnya.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 6o. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Purbalingga

2.8.1.2 Pengembangan Kawasan Budidaya

Berdasarkan tujuan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga diarahkan pada perwujudan ruang kabupaten berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan. Secara kewilayahan, kawasan budidaya yang ada di Kabupaten Purbalingga baik kawasan pertanian, permukiman, peruntukan industri dan pariwisata mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan tingkat regional khususnya yang berada di PKL Purbalingga maupun PKL Bobotsari.

Kawasan pertanian di Kabupaten Purbalingga baik lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun perikanan, dapat dikembangkan menjadi potensi dengan komoditas pertanian yang bervariasi. Hasil komoditas seperti beras, ketela, sayuran, buah-buahan, kapulaga, gula kristal, glagah arjuna, ayam potong maupun bibit ikan, menyediakan adanya interaksi ekonomi baik dalam regional kabupaten maupun antar kabupaten sebagai penerima hasil pertanian maupun tujuan perdagangan. Secara lokasi kawasan pertanian tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

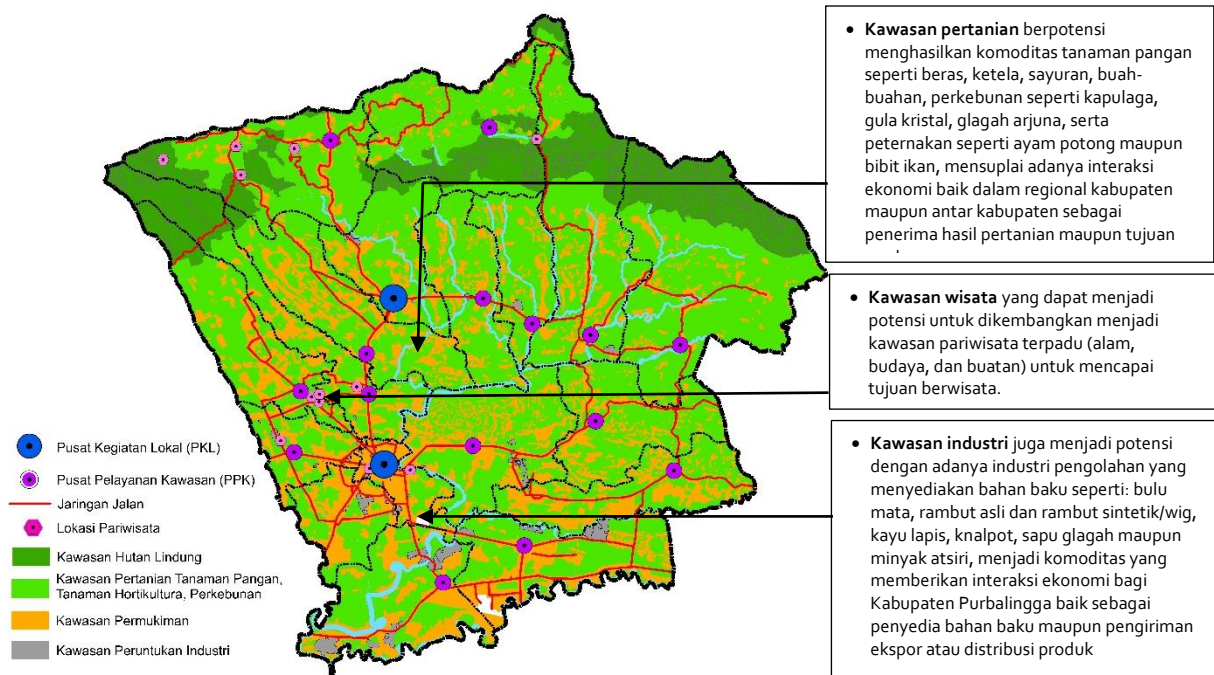
Di samping itu kawasan industri juga menjadi potensi di Kabupaten Purbalingga, dengan adanya industri pengolahan yang menyediakan bahan baku seperti: bulu mata, rambut asli dan rambut sintetis/wig, kayu lapis, knalpot, sapu glagah maupun minyak atsiri, menjadi komoditas yang memberikan interaksi ekonomi bagi Kabupaten Purbalingga baik sebagai penyedia bahan baku maupun pengiriman ekspor atau distribusi produk. Secara lokasi rencana kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkon, Kutasari, Padamara dan Purbalingga dengan total luas ±875 ha.

Selain potensi kawasan pertanian dan industri, di Kabupaten Purbalingga juga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan yang dapat dikunjungi karena memiliki keindahan alam dan panorama; kebudayaan yang diminati oleh wisatawan; serta bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Potensi pariwisata tersebut ke depannya dapat dikembangkan menjadi pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) untuk mencapai tujuan berwisata. Beberapa kawasan wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga diantaranya:

- Pariwisata alam yang terdiri dari: Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja; Goa Lawa (Golaga) di Kecamatan Karangreja; Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja.
- Pariwisata buatan yang terdiri dari: Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang; Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga; Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga; Situs cagar

budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten; serta Desa Wisata yang berbasis budaya.

- Pariwisata buatan yang terdiri dari: Kolam Renang Tirto Asri Walik di Kecamatan Kutasari; Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) di Kecamatan Bojongsari; Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara; Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari; Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari; Purbalingga *City Park* (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 61. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dikembangkan dalam skala regional yaitu dengan pengembangan kawasan wisata regional terintegrasi antara 5 Kabupaten dalam wilayah Sabuk Gunung Slamet dengan menghubungkan beberapa kawasan wisata:

- 1) Baturaden, Kabupaten Banyumas;
- 2) Serang, Kabupaten Purbalingga;
- 3) Pulosari, Kabupaten Pemalang;
- 4) Guci, Kabupaten Tegal; dan
- 5) Sirampog, Kabupaten Brebes.

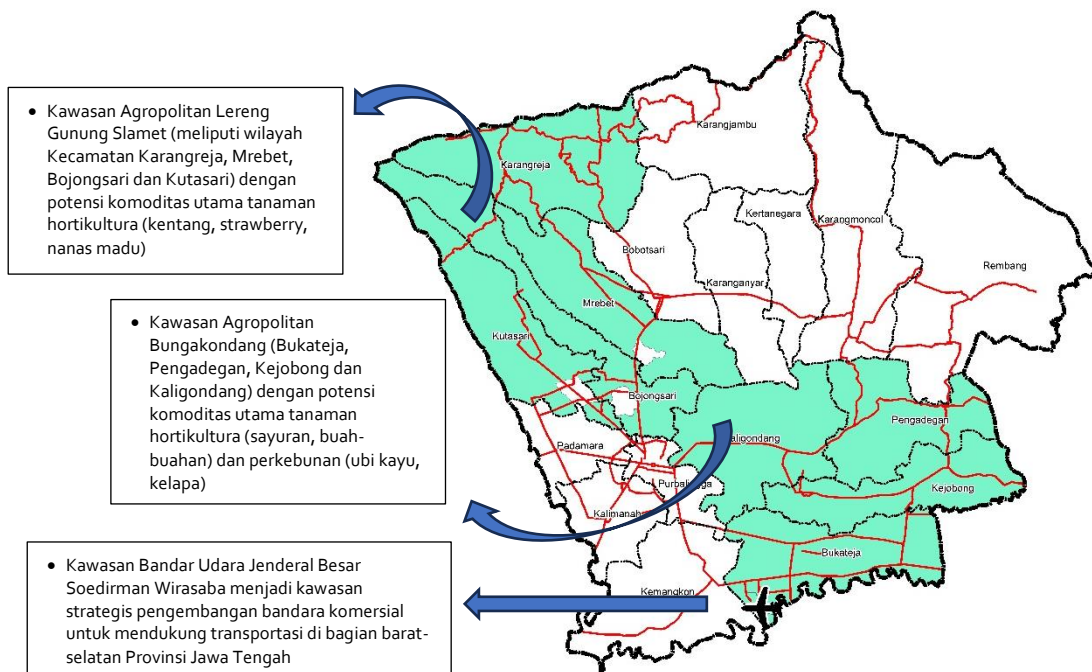
Potensi pengembangan tersebut akan dapat terwujud didukung dengan kerjasama antar wilayah dan dukungan dari Provinsi Jawa Tengah untuk penyediaan koridor transportasi wisata Sabuk Gunung Slamet.

2.8.1.3 Pengembangan Kawasan Strategis

Di dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, terdapat pengembangan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut berupa kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan Agropolitan Bungakondang, kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet, serta kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba.

Kedua kawasan agropolitan yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut merupakan bagian dari kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang-Purbalingga-Tegal-Brebes-Banyumas) Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Agropolitan Bungakondang (meliputi wilayah Kecamatan Bukateja, Pengadegan, Kejobong dan Kaligondang) mempunyai potensi komoditas utama tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan) dan perkebunan (ubi kayu, kelapa). Sedangkan untuk kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet (meliputi wilayah Kecamatan Karangreja, Mrebet, Bojongsari dan Kutasari) mempunyai potensi komoditas utama tanaman hortikultura (kentang, strawberry, nanas madu).

Kemudian untuk kawasan strategis lainnya yaitu kawasan Bandar Udara Jenderal Besar (JB) Soedirman yang terdapat di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja. Kawasan tersebut menjadi kawasan strategis pengembangan bandara komersial untuk mendukung transportasi di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu pemanfaatan Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) mempunyai



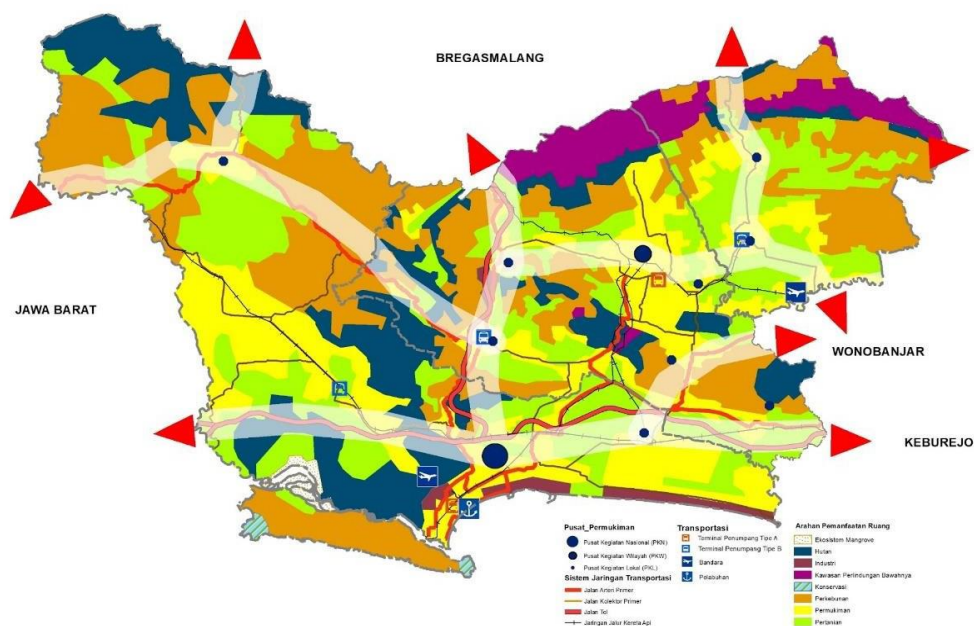
Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 62. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Purbalingga

2.8.2 Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRWN

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Saat ini sedang dilakukan revisi terhadap dokumen tersebut.

Dalam Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Cilacap-Purbalingga-Banyumas (Cibalingmas). WP Cibalingmas diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap–Purwokerto-Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas.



Sumber : Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2023 - 2043

Gambar 2. 63. Arah Pengembangan Wilayah WP Cibalingmas

Untuk meningkatkan pergerakan distribusi WP Cibalingmas maka perlu mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor di wilayah selatan, pengembangan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan

budidaya. Beberapa industri yang dikembangkan pada kawasan ini antara lain adalah industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam. Dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah serta mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan Kabupaten Purbalingga dalam sistem pusat permukiman yaitu menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL tersebut meliputi kawasan perkotaan Purbalingga dan kawasan perkotaan Bobotsari yang mempunyai fungsi pelayanan di sektor pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan.

Adapun jaringan-jaringan dalam struktur perkotaan untuk skala provinsi yang akan dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu: pengembangan ruas jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi Jl. Soekarno Hatta, Jl. Mayjen Sungkono, Jl. Kalimanah-Purbalingga, Jl. Klampok-Purbalingga, Lingkar Barat Purbalingga, dan Jl. Purbalingga-Bobotsari. Di samping itu juga terdapat pengembangan terminal penumpang Tipe A di Terminal Bobotsari dan Tipe B di Terminal Purbalingga. Sementara itu untuk transportasi udara juga ada pengembangan bandar udara pengumpan berupa Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman.

Kemudian untuk pengembangan sistem jaringan irigasi di Kabupaten Purbalingga yaitu berupa Daerah Irigasi Banjarcarya yang merupakan kewenangan pusat dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga, serta Daerah Irigasi Bodag, Dwicupaksari, Pribadi dan Krenceng yang merupakan sistem jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Provinsi. Dalam sistem pengendalian banjir di Kabupaten Purbalingga, direncanakan pengembangan jaringan pengendali banjir berupa embung Kedungjati dan *longstorage* Kaliayer, serta bangunan pengendali banjir yang berupa Bendung Dwicupaksari, Krenceng dan Pribadi.

Di samping itu dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga akan dikembangkan SPALD Regional di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan non domestik, seluruh kabupaten/kota yang berbatasan yang merupakan kewenangan provinsi.

Dalam konteks pengembangan kawasan budidaya untuk skala provinsi yang akan dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu berupa: Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan hutan produksi, Kawasan perkebunan rakyat, Kawasan pertanian, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan pengembangan pariwisata yang berupa

destinasi pariwisata Baturraden dan sekitarnya, Kawasan transportasi (TR) dan Kawasan pertahanan dan keamanan.

Sedangkan untuk pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu Kawasan Gunung Slamet berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga, yang menjadi KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.8.3 Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Purbalingga

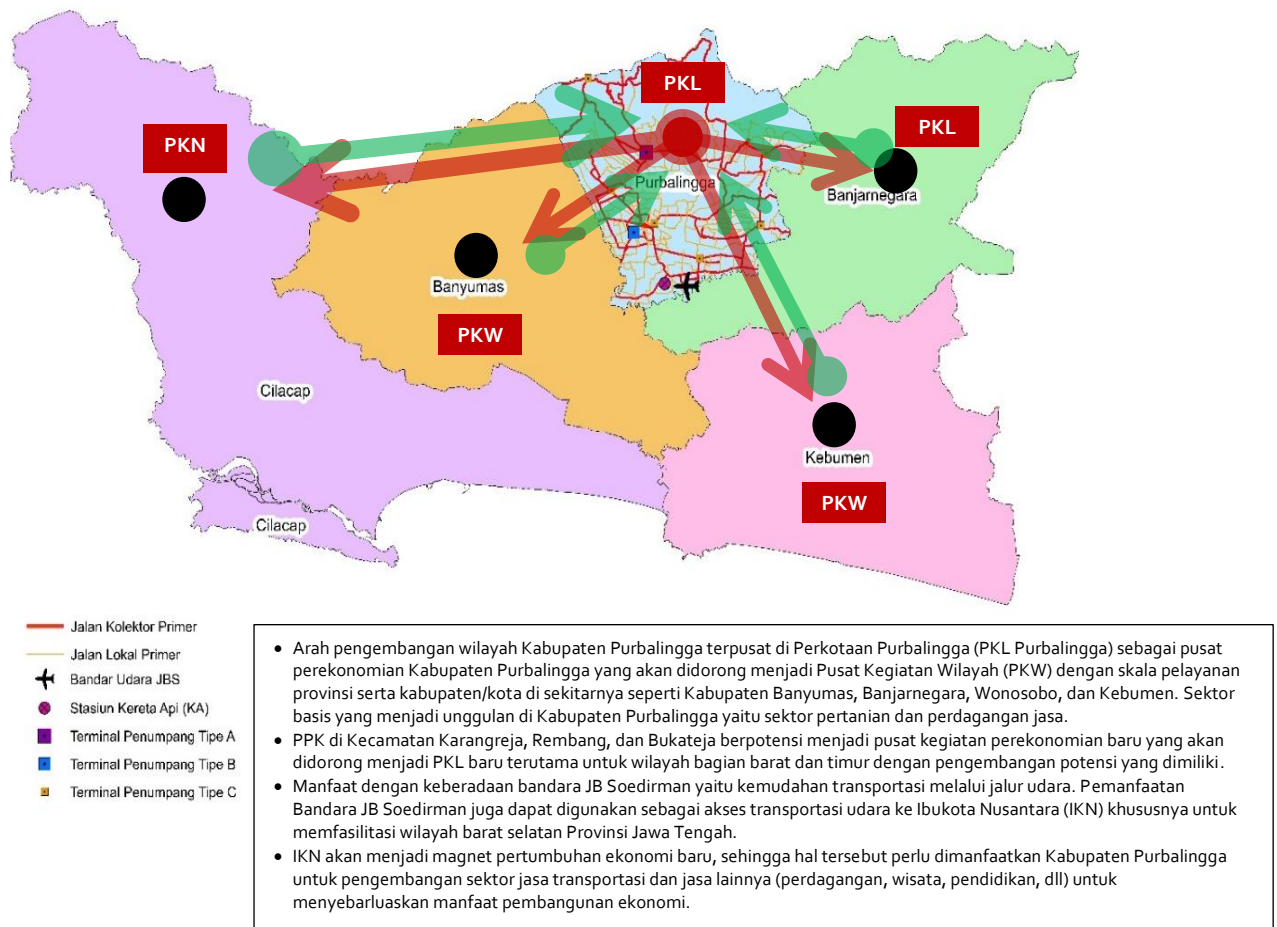
Pusat pertumbuhan wilayah merujuk pada daerah atau lokasi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah biasanya memiliki berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan seperti investasi, infrastruktur, akses ke pasar, sumber daya manusia dan lain-lain. Pusat pertumbuhan wilayah dapat berupa kota besar, kawasan perkotaan, ibukota kecamatan maupun kawasan fungsional tertentu.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir struktur perekonomian menurut lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa komoditas di bidang pertanian, industri, dan perdagangan mengalami pengembangan yang cukup pesat. Pasca pandemic covid-19 tahun 2020, industri pengolahan menggeser peranan pertanian di dalam struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga. Industri pengolahan memiliki lebih besar proporsinya dibandingkan dengan pertanian. Di tahun 2023 tercatat industri pengolahan berada di angka 28,29% sedangkan pertanian di angka 25,60%.

Sedangkan dilihat dari sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga yang berguna untuk mendukung dan mendorong perkembangan sektor lainnya, baik sektor yang memanfaatkan output sebagai input maupun yang menyuplai input dalam kegiatan produksi, terdapat 7 sektor yang merupakan sektor basis yaitu: sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan penggalian; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Transportasi dan pergudangan; Jasa pendidikan; Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta Jasa lainnya. Sektor-sektor unggulan tersebut merupakan sektor yang tangguh dan andal serta dapat dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi.

Merujuk pada hasil analisis sektor unggulan Kabupaten Purbalingga dan peran Kabupaten Purbalingga dalam tata ruang sebagai Kawasan Strategis Agropolitan Mangga Emas dan Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, pada dasarnya menunjukkan adanya kesinambungan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor transportasi dan pergudangan dan jasa lainnya yang merupakan sektor basis, dapat dikembangkan dan menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai kawasan strategis agropolitan (Bungakondang dan Lereng

Gunung Slamet) dan penyedia transportasi udara bagi wilayah di sekitarnya yakni Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, dan Cilacap.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 64. Konstelasi Regional Kabupaten Purbalingga

Manfaat dengan keberadaan bandara JB Soedirman yaitu kemudahan transportasi melalui jalur udara. Pemanfaatan Bandara JB Soedirman juga dapat digunakan sebagai akses transportasi udara ke Ibukota Nusantara (IKN) khususnya untuk memfasilitasi wilayah barat selatan Provinsi Jawa Tengah. IKN akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga hal tersebut perlu dimanfaatkan Kabupaten Purbalingga untuk pengembangan sektor jasa transportasi dan jasa lainnya (perdagangan, wisata, pendidikan, dll) untuk menyebarkan manfaat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan transportasi dengan konektivitas yang baik untuk peningkatan arus perdagangan dan jasa.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 65. Potensi Kewilayahan Kabupaten Purbalingga

Struktur perkotaan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan RTRW Kabupaten Purbalingga pada dasarnya terdiri dari PKL Purbalingga dan PKL Bobotsari yang didukung oleh PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan, dan Karangjambu yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Peran wilayah merupakan kemanfaatan sebuah wilayah dalam melayani *hinterland*-nya atau wilayah di sekitarnya. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Purbalingga terpusat di Kawasan Perkotaan Purbalingga (PKL Purbalingga) sebagai pusat perekonomian Kabupaten Purbalingga yang akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan skala pelayanan provinsi serta kabupaten/kota di sekitarnya seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen.

Pembangunan permukiman dan fasilitas pendukungnya seperti sarana perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan perkantoran diharapkan mampu melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021-2041 dimana penataan Kawasan Perkotaan Purbalingga bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan kawasan permukiman perkotaan yang aman, nyaman dan ramah lingkungan.

Sedangkan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043, Kawasan Perkotaan Bobotsari (PKL Bobotsari) diarahkan sebagai Kota Dagang dan Pusat Pengembangan Wilayah utara Kabupaten Purbalingga berbasis agrobisnis, ekowisata, dan industri yang berkelanjutan. Kawasan Perkotaan Bobotsari menjadi

simpul pelayanan yang mampu melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dalam hal perdagangan dan jasa di Kabupaten Purbalingga.

Keberadaan PKL Purbalingga dan Bobotsari tersebut didukung dengan keberadaan PPK di Kecamatan Karangreja, Rembang, dan Bukateja yang berpotensi menjadi pusat kegiatan perekonomian baru. PPK tersebut didorong menjadi PKL baru terutama untuk wilayah bagian barat dan timur dengan pengembangan potensi yang dimiliki Kabupaten Purbalingga maupun sektor-sektor basis Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Bukateja dapat berpotensi berkembang sebagai simpul transportasi karena terdapat Bandara Jenderal Besar Soedirman yang melayani transportasi udara wilayah di sekitarnya yakni Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, dan Cilacap. Pengembangan tersebut juga perlu didukung dengan penguatan konektivitas antar wilayah agar menjadi lebih *integrated* dan berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Purbalingga terbagi atas 18 kecamatan yang memiliki berbagai pusat pertumbuhan, baik yang tumbuh secara organik maupun didorong untuk tumbuh melalui intervensi kebijakan. Dalam hal ini pusat pertumbuhan dapat dipandang sebagai suatu simpul (*node*) wilayah yang menjadi pusat kegiatan maupun aglomerasi yang memiliki keterkaitan fungsi. Beberapa PPK yang terlihat sedang berkembang yaitu Bukateja, Karangreja, Rembang dan Kejobong. Melihat perkembangan wilayah saat ini, pengembangan pusat pertumbuhan pada beberapa PPK yang ada di Kabupaten Purbalingga disajikan dalam tabel II.67.

Tabel II.67. Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan di Kabupaten Purbalingga

No.	WP (Wilayah Pengembangan)	Sektor Unggulan dan Potensi Wilayah	Tema Pengembangan	Arah dan Fokus Pengembangan
1	PKL Purbalingga	Perdagangan dan jasa, industri, permukiman perkotaan	Mengendalikan perkembangan fisik wilayah dengan mengoptimalkan fungsi permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan terutama perkembangan permukiman perkotaan. Pembangunan hunian dapat dilakukan secara vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan. • Perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan fungsi perdagangan (perubahan kelembagaan pengelola pasar melalui BLUD/ perusahaan daerah, regulasi untuk penataan toko modern, penataan kawasan Pedagang Kaki Lima) dan mengendalikan perkembangan sektor industri yang ada. • Melengkapi fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis untuk mendorong sebagai PKW utamanya pada Pasar Badog, Purbalingga <i>Food Center</i> (PFC), serta realisasi pembangunan Purbalingga <i>Boulevard</i> dan Purbalingga Islamic Center. • Pengembangan moda transportasi publik berbasis teknologi, berorientasi pelayanan inklusif, dan terintegrasi melalui peningkatan koridor Terminal Purbalingga-Bobotsari, Terminal Purbalingga-Bukateja, Terminal Purbalingga-Pagembrungan, dan penambahan koridor Terminal Purbalingga-Bandara JBS. • Mengintegrasikan transportasi pendidikan antar wilayah dengan konektivitas infrastruktur transportasi wilayah yang menghubungkan Pusat Pendidikan Tinggi Purwokerto – Purbalingga dengan koridor UIN Purwokerto – Unsoed Purwokerto – UMP Purwokerto – UIN Prof. Saizu Purbalingga – ITBMP Purbalingga – Politeknik Madyatika - Universitas Perwira Purbalingga. • Kelembagaan pengelolaan transportasi publik melalui BLUD/Perusahaan Daerah. • Optimalisasi Terminal C Bukateja untuk melayani transportasi yang menuju ke exit tol IC Patikraja-IC Purbalingga. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PKL Purbalingga, Optimalisasi TPS3R menjadi TPST, TPA menjadi TPST. • SPAM JBS yang melayani kebutuhan air Bandara dengan perluasan pelayanan hingga PKL Purbalingga dan PPK Bukateja. • Pembangunan IPLT untuk melayani kecamatan yang belum terlayani oleh IPLT Regional. • Peningkatan drainase perkotaan yang terintegrasi dan komprehensif.

No.	WP (Wilayah Pengembangan)	Sektor Unggulan dan Potensi Wilayah	Tema Pengembangan	Arah dan Fokus Pengembangan
2	PKL Bobotsari	Perdagangan dan jasa, industri, permukiman perkotaan	Mengendalikan perkembangan fisik wilayah dengan mengoptimalkan fungsi perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan terutama perkembangan permukiman perkotaan. • Mengendalikan sektor industri yang ada serta mengoptimalkan fungsi perdagangan dan jasa di dalamnya melalui perubahan kelembagaan pengelola pasar melalui BLUD/perusahaan daerah, regulasi untuk penataan toko modern, penataan kawasan Pedagang Kaki Lima. • Melengkapi fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis dengan pengembangan moda transportasi publik yang terintegrasi dengan peningkatan koridor Terminal Purbalingga-Bobotsari. • Kelembagaan pengelolaan transportasi publik melalui BLUD/Perusahaan Daerah. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PKL Bobotsari, Optimalisasi TPS₃R menjadi TPST. • Peningkatan drainase perkotaan yang terintegrasi dan komprehensif.
3	PPK Bukateja	Agrobisnis (pertanian sawah, hortikultura)	Mendorong pengembangan kawasan agrobisnis (pertanian lahan sawah)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong agribisnis yang didukung sektor pertanian pangan (padi) dan hortikultura (buah). • Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan pertanian pangan dan hortikultura dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi. • Mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis salah satunya Jembatan Lamuk-Bukateja. • Kelembagaan pengelolaan transportasi publik melalui BLUD/Perusahaan Daerah. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PPK Bukateja, Optimalisasi TPS₃R menjadi TPST. • SPAM JBS yang melayani kebutuhan air minum Bandara dengan perluasan pelayanan hingga PKL Purbalingga dan PPK Bukateja .
4	PPK Karangreja	Agrobisnis (hortikultura), pariwisata	Mendorong pengembangan kawasan agrobisnis (hortikultura) dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong agribisnis yang didukung sektor pertanian hortikultura (sayur, buah) dan perkebunan (kopi, tembakau, kapulaga, glagah, aren). • Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan pertanian hortikultura dan perkebunan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi. • Optimalisasi Tata Kelola Sub Terminal Agribisnis Kutabawa sebagai pusat perdagangan antar kabupaten/wilayah. • Mengembangkan wisata alam Serang dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi alam.

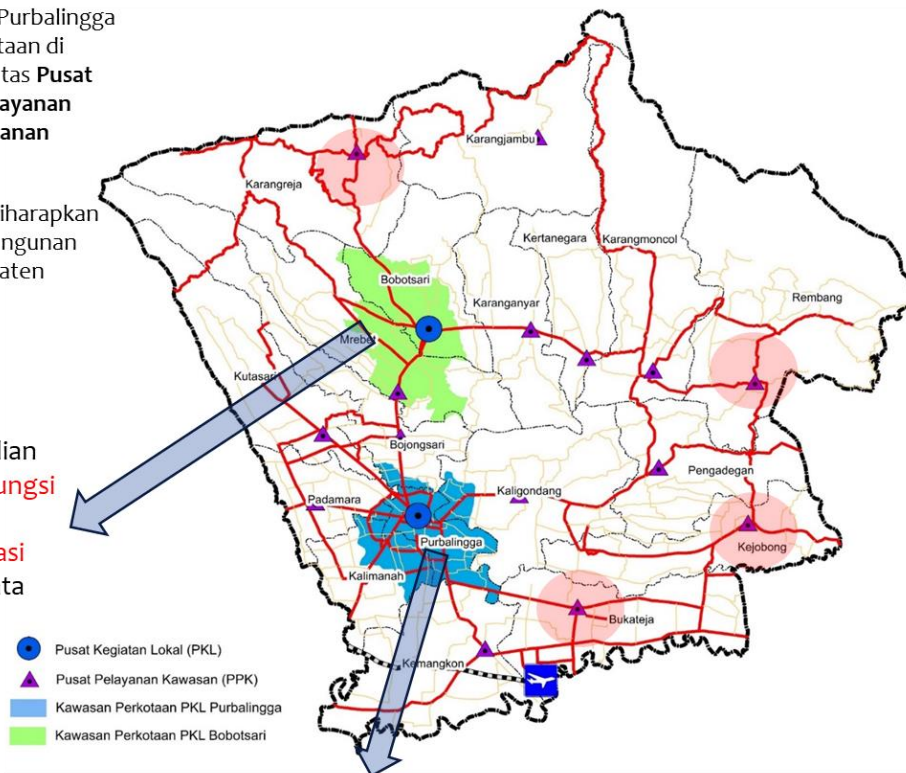
No.	WP (Wilayah Pengembangan)	Sektor Unggulan dan Potensi Wilayah	Tema Pengembangan	Arah dan Fokus Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis yang terkoneksi dengan objek wisata Baturaden – Guci – Sirampog – Kaligua. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PPK Karangreja, Optimalisasi TPS₃R menjadi TPST.
5	PPK Rembang	Agrobisnis (perkebunan), pariwisata	Meningkatkan pengembangan kawasan agrobisnis (perkebunan) dan wisata alam	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong agribisnis yang didukung sektor perkebunan (kapulaga, vanili, kopi). • Mengembangkan wisata alam dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi alam, wisata buatan (MTL Soedirman) dan kesenian tradisional dengan melestarikan warisan budaya. • Mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PPK Rembang, Optimalisasi TPS₃R menjadi TPST, TPA menjadi TPST. • SPAM Gintung yang melayani kebutuhan air minum PPK Rembang dan PPK Kejobong.
6	PPK Kejobong	Agrobisnis (perkebunan dan peternakan)	Meningkatkan pengembangan kawasan agrobisnis (perkebunan dan peternakan)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong agribisnis yang didukung sektor perkebunan (lada, kopi, kapulaga), hortikultura (sayur, buah) dan peternakan (kambing, ayam). • Mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PKL Purbalingga, Optimalisasi TPS₃R menjadi TPST, TPA menjadi TPST. • SPAM Gintung yang melayani kebutuhan air minum PPK Rembang dan PPK Kejobong.

Sumber : Hasil Analisis, 2024

- Berdasarkan RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, struktur perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**, **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** dan **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

- Perkembangan beberapa PPK diharapkan dapat mengintegrasikan pembangunan bagian selatan dan utara Kabupaten Purbalingga

- PKL Bobotsari:** Pengendalian permukiman, **Optimalisasi fungsi Perdagangan**, Pengendalian Industri, **Integrasi transportasi publik berbasis teknologi**, tata kelola sampah, SPAM, dan drainase.



- PKL Purbalingga :** Pengendalian permukiman, Optimalisasi fungsi Perdagangan, Pengendalian Industri, Peningkatan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis (**PFC, Revitalisasi Pasar Badog dan Pasar Padamara, Pembangunan Boulevard**), **Integrasi transportasi publik berbasis teknologi**, **Integrasi Moda Transportasi Koridor Pendidikan**, tata kelola sampah, SPAM, dan IPLT

- PPK Karangreja:** Peningkatan sektor pertanian hortikultura (**sayur dan buah**), perkebunan (**kopi, tembakau, kapulaga, glagah, aren**). Optimalisasi tata kelola **Sub Terminal Agribisnis Kutabawa**, Wisata Alam Serang mempertahankan fungsi konservasi, fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis terkoneksi **OW Baturaden-Guci-Sirampog-Kaligua**, tata kelola sampah

- PPK Rembang:** Peningkatan sektor perkebunan (**kapulaga, kopi, vanili**), wisata alam, wisata buatan (**MTL Soedirman**) dan kesenian tradisional (**ebeg, dayakan dll**), tata kelola sampah, SPAM, dan drainase.

- PPK Kejobong:** Peningkatan sektor perkebunan (**lada, kopi, kapulaga**), hortikultura dan peternakan (**kambing, ayam**), tata kelola sampah, SPAM Gintung

- PPK Bukateja:** Peningkatan sektor pertanian pangan (**padi**) dan hortikultura (**jeruk**), Peningkatan fasilitas pendukung (**jembatan lamuk-bukateja**), integrasi transportasi publik, tata kelola sampah, dan SPAM

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 66. Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Purbalingga

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan makro yang sifatnya lintas sektor. Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai atau kondisi riil yang terjadi saat ini dengan rencana atau standar yang ingin dicapai. Kesenjangan atau gap tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor penghambat maupun pendorong. Kompleksitas faktor penyebab permasalahan ini membutuhkan penyelesaian dengan pendekatan *cross cutting strategy*.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purbalingga yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang mencakup aspek geografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum. Beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Aspek Geografi

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan aspek geografi diantaranya:

1. Lahan sawah mengalami penurunan secara luasan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana ada beberapa lahan sawah yang telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan. Sementara itu luasan bukan lahan sawah (kebun campur maupun tegalan) dan lahan bukan pertanian (perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan) mengalami kenaikan. Perubahan tata guna lahan tersebut dapat menyebabkan degradasi lahan dan berkurangnya lahan produktif pertanian.
2. Risiko bencana di Kabupaten Purbalingga berupa ancaman bencana tanah longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara wilayah-wilayah yang masuk dalam cakupan kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas yang secara lokasi berada di lereng Gunung Slamet. Adanya risiko bencana tersebut belum didukung oleh pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*) di kawasan rawan bencana, edukasi pada masyarakat tentang

penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana.

3. Masih adanya pencemaran air yang ditunjukkan pada Indeks Kualitas Air baik pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia) yang melebihi baku mutu pada sungai dengan status cemar ringan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga serta pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai. Kondisi tersebut akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak untuk kehidupan serta penurunan kualitas lingkungan.
4. Sebesar 10,08 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Hal tersebut akan berpengaruh pada akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat karena belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal.
5. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tren emisi GRK naik sebesar 6%. Salah satu sektor yang berkontribusi menghasilkan emisi paling tinggi yaitu sektor energi yang didominasi dari kegiatan transportasi, industri manufaktur dan residensial. Peningkatan emisi GRK tersebut pada gilirannya akan berdampak pada perubahan iklim seiring dengan belum diimbangi dengan upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK.
6. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan, sementara itu laju kenaikan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbulan sampah yg ditangani baik itu yang berasal dari TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok, masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada. Kondisi tersebut terjadi karena masih belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, apabila tidak ditangani secara inklusif permasalahan sampah lambat laun dapat menjadikan penurunan kualitas lingkungan.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun angka kemiskinan

tersebut menempati peringkat ke-5 terbesar di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo dan Pemalang. Disamping itu, masih ada 1,18 persen kemiskinan ekstrem yang perlu diselesaikan agar mendekati target 0 persen. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebagian besar merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SMP dan penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal.

2. Walaupun nilai IPM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan namun laju pertumbuhannya kecil. Apabila dilihat dari komposisinya, Usia Harapan Hidup (UHH) masih berada pada angka 73,98 tahun yang jika dilihat dari posisi relatif di Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-3 terbawah. Disamping itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada pada 7,34 tahun yang menunjukkan bahwa penduduk bersekolah di Kabupaten Purbalingga rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP dimana posisi relatif RLS tersebut menempati peringkat ke-9 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) berada pada 12,02 tahun yang menunjukkan bahwa warga Purbalingga berpeluang untuk melanjutkan sekolahnya hingga 12 tahun lamanya atau sampai lulus SMA dan lanjut ke Diploma 1. RLS tersebut menempati peringkat ke-4 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Dari posisi relatif komposit IPM tersebut menunjukkan permasalahan terkait sumber daya manusia yang disebabkan belum optimalnya akses layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
3. Masih terdapat jumlah kasus kematian ibu yang ditunjukkan dari Angka Kematian Ibu (AKI) yang pada tahun 2023 mengalami kenaikan dikarenakan jumlah kelahiran hidup yang menurun. Sementara itu jumlah kematian ibu berada pada kisaran 13 kasus yang sebagian besar terjadi akibat adanya pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil.
4. Masih adanya permasalahan stunting yang terjadi karena malnutrisi pada ibu dan anak. Penyebab secara tidak langsung terjadinya stunting yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat.
5. Masih adanya kasus tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga yang perlu mendapat perhatian. Walaupun *treatment coverage* TB meningkat, namun pengobatan secara tuntas sampai sembuh sangat diperlukan

untuk memutus penularan TBC di masyarakat. Hal tersebut juga perlu didukung oleh perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat itu sendiri.

6. Persentase kepesertaan JKN sudah mencapai 100% yang artinya seluruh penduduk sudah terlayani BPJS Kesehatan. Namun permasalahan dan tantangan ke depannya yaitu belum meratanya fasilitas kesehatan yang memadai terutama di pelosok desa. Masyarakat harus menuju ke faskes yang sebagian besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu dalam memanfaatkan layanan JKN yang dimiliki. Kondisi tersebut tentu saja akan menambah biaya masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.
7. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
8. Kondisi kebudayaan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan adanya penurunan, yaitu dilihat dari masih kecilnya persentase penetapan cagar budaya yang ada dan objek pokok kebudayaan daerah yang dilestarikan, berkurangnya minat masyarakat terhadap museum, serta masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan dan taman baca masyarakat. Kondisi tersebut juga dikarenakan semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak benda, belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian budaya dan kesenian, serta pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal.
9. Tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, namun angka tersebut masih di bawah di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen, namun masih di atas Nasional dan Kabupaten Cilacap. Salah satu dimensi IKG yang menyebabkannya dikarenakan perempuan yang duduk di parlemen masih kecil sehingga peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang.

C. Aspek Daya Saing

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan aspek daya saing diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pasca covid-19 masih mengalami penurunan, bahkan di tahun 2023 menurun dari 5,41 di

tahun 2022 menjadi 4,51. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut ditandai dengan lemahnya daya beli akibat kesulitan finansial. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran.

2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Walaupun secara laju pertumbuhannya cenderung stabil. Penurunan ini disebabkan oleh belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian baik dikarenakan permasalahan pupuk dan hama tanaman, serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian. Selain itu permasalahan dan tantangan lain yang terjadi yaitu masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil.
3. Walaupun bukan merupakan sektor basis, namun sektor industri pengolahan memberikan *share* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Namun terdapat tantangan yang terjadi pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga. Industri yang ada saat ini sebagian besar merupakan industri padat karya yang kondisinya sangat terpengaruh oleh perekonomian global apabila terjadi penurunan ekspor dan pasar domestik dikuasai oleh barang impor. Hal tersebut akan mengakibatkan kinerja yang melambat. Bahkan efek dari pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Disamping itu, permasalahan sektor industri juga terjadi karena belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga dimana ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri juga menjadi permasalahan tersendiri yang akan mempengaruhi perkembangan sektor industri ke depannya.
4. Sektor perdagangan di Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga dimana sektor perdagangan juga menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan pertanian. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan yaitu belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan.
5. Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi

tujuan wisata. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (pariwisata) di Kabupaten Purbalingga cenderung stabil dan meningkat, namun persentasenya kecil. Beberapa permasalahan yang terjadi di sektor pariwisata yaitu belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibilitas pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih rendah serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

6. Jumlah total UMKM di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun, beberapa kesulitan yang menjadi kendala bagi UMKM adalah kurangnya pemodal, akses pasar dan distribusi pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM. Pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga juga menjadi permasalahan dimana rasio kewirausahaan semakin menurun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.
7. Kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang ditunjukkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) capaiannya masih di bawah angka nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga masih kecil persentasenya. Bahkan masih ada Anak Tidak Sekolah (ATS) pada anak umur 13-15 tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan.
8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 dan usia 13-15 tahun hampir memenuhi capaian SPM (100 persen), namun APS usia 16-18 tahun masih menunjukkan perkembangan yang masih sangat rendah. Masih ada penduduk di Kabupaten Purbalingga yang belum/tidak bersekolah khususnya pada jenjang usia 16-18 tahun. Faktor penyebabnya dilihat dari *supply-demand side* yaitu kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan.
9. Kualitas pendidikan yang dilihat dari skor kemampuan literasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kondisi baik. Sementara itu skor kemampuan numerasi pada jenjang SD dan SMP tersebut termasuk dalam kategori sedang. Belum optimalnya kemampuan literasi numerasi tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan

membaca baik di sekolah maupun di rumah dan kemajuan teknologi informasi.

10. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan masih ditemukannya kondisi jalan yang rusak dan rusak berat. Penanganan terhadap kondisi jalan baik itu jalan kabupaten maupun jalan desa sangat berkaitan juga dengan fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan. Lambat laun, kondisi jalan yang rusak secara langsung dapat berpengaruh pada aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
11. Kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Purbalingga juga masih perlu ditingkatkan. Terdapat penurunan rasio konektivitas angkutan jalan di Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa titik ruas jalan karena tingginya volume kendaraan yang melintas pada waktu tertentu.
12. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih dan sanitasi layak dan aman. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak Kabupaten Purbalingga paling rendah dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan Kebumen. Begitu pula dengan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Purbalingga juga masih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Kondisi tersebut disebabkan belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
13. Masih terdapat 24 desa dengan status desa berkembang dengan potensi dan sumber daya yang ada dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi belum mencapai desa maju dan mandiri. Hal tersebut disebabkan kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergal.

D. Aspek Pelayanan Umum

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan aspek pelayanan umum diantaranya:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga dinilai cukup baik dengan adanya peningkatan pelaksanaan reformasi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 dan secara posisi relatif IRB Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah,

Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Masih terdapat tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan ke depannya. Beberapa tantangan dan permasalahan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dari predikat cukup menjadi sangat baik. Namun terdapat tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi ke depannya, yaitu masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM.

Berdasarkan uraian permasalahan pada aspek geografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum, dapat disimpulkan bahwa masalah utama Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. **Kualitas Manusia yang Belum Optimal**

Dari permasalahan yang diuraikan terkait dengan pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa adanya kondisi yang belum optimal terkait dengan kualitas manusia. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang berpendidikan dan sehat yang akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya menuju kesejahteraan. Kualitas hidup tersebut dapat dilihat dari peningkatan penghasilan, kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Kualitas hidup yang tinggi juga akan mempengaruhi kualitas manusia.

Perwujudan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan pendidikan ditunjukkan dengan adanya permasalahan belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar berupa pendidikan secara merata dan inklusif. Kondisi tersebut ditunjukkan pada pencapaian RLS dan HLS yang belum maksimal dan penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih rendah. Penduduk dengan pendidikan rendah merupakan penduduk rentan miskin di Kabupaten Purbalingga. Bahkan masih terdapat Anak tidak Sekolah (ATS) yang menunjukkan bahwa akses pendidikan belum merata.

Sementara itu kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga juga menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dengan masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan balita, masih tingginya kasus stunting serta

masih terdapat penemuan penyakit menular dan tidak menular. Lain dari itu akses fasilitas kesehatan juga masih terbatas sarana prasarannya dan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan mempunyai prioritas layanan unggulan.

Demikian juga halnya perlindungan sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini juga masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kondisi masih adanya kantong-kantong kemiskinan serta pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran. Selain kehidupan sosial, kehidupan budaya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami pergeseran dimana semakin berkurangnya regenerasi budaya dan pelestariannya yang lambat laun dapat mengikis nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi yang Belum Merata dan Optimal

Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan tersebut antara lain pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi, daya saing angkatan kerja masih rendah, penurunan kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri yang kurang kondusif, kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal, kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal serta pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing.

Perekonomian Kabupaten Purbalingga perlu didorong tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang masih mengalami fluktuasi pasca covid-19 juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Diperlukan pemerataan ekonomi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah yang menjadi daya, kekuatan dan kemampuan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan yang dilihat dari kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didorong dan dioptimalisasi untuk mewujudkan kemandirian daerah.

3. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien sehingga reformasi birokrasi belum terselenggarakan dengan optimal. Upaya reformasi birokrasi ditujukan untuk memungkinkan pemerintah dalam

berkerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik sehingga dapat memenuhi harapan dari masyarakat.

Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sebagai perangkat pemerintah yang belum sesuai juga menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan. Minimnya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan penggunaan teknologi, merupakan faktor lain yang perlu diperhatikan di seluruh perangkat daerah. Apabila diimbangi dengan sumber daya aparatur yang kompatibel serta transformasi digital tata kelola pemerintahan yang diterapkan melalui inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan memadai, maka ke depannya akan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.

4. Kualitas Lingkungan Hidup yang Mengalami Degradasi

Permasalahan kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan: daya dukung lingkungan masih rendah, penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat dan terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon. Kualitas lingkungan hidup menjadi tolok ukur untuk keberlanjutan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak didukung dengan kesadaran dan edukasi akan lingkungan serta perilaku hidup bersih akan sangat mempengaruhi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Disamping itu, tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya, akan mempengaruhi daya dukung serta daya tampung air dan pangan. Di sisi lain, perubahan iklim juga semakin dirasakan ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim tersebut sebagai dampak dari meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

5. Pengembangan Wilayah yang Belum Optimal

Pengembangan wilayah yang belum optimal merupakan permasalahan utama dari infrastruktur pengembangan wilayah yang belum merata dan penataan ruang yang belum optimal. Kedua hal tersebut merupakan hasil pembangunan yang harus diperhatikan permasalahannya untuk keberlanjutan pembangunan ke depannya. Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan pada dasarnya menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Disamping itu, kualitas pelayanan transportasi juga perlu

ditingkatkan terutama untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kondisi jaringan jalan dan transportasi yang merata secara kuantitas dan kualitas akan menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Permasalahan infrastruktur lain yaitu terkait dengan pemenuhan sarpras air bersih, sanitasi dan hunian yang menjadi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pemenuhan sarpras tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan wilayah juga disebabkan oleh kondisi penataan ruang, dimana penataan ruang yang belum optimal baik dalam pemanfaatan maupun pengendalian ruang akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan seperti misalnya dalam pemanfaatan lahan pertanian dan non pertanian maupun optimalisasi kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten Purbalingga. Semua permasalahan terkait penataan ruang terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.

Secara lebih rinci permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada pemetaan tabel III.1.

Tabel III.1. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah di Kabupaten Purbalingga

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
1	Rendahnya tingkat pendidikan dari kelompok rentan miskin	Pendidikan berkualitas yang belum merata	Kualitas manusia yang belum optimal
2	Belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan sehingga capaian RLS dan HLS belum maksimal serta persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih kecil		
3	Kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan		
4	Kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan membaca baik di sekolah maupun di rumah dan kemajuan teknologi informasi sehingga kemampuan literasi numerasi belum optimal		
5	Masih terdapat jumlah kasus kematian ibu yang disebabkan jumlah kelahiran hidup yang menurun, kasus pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil	Derajat kesehatan yang masih rendah	
6	Terjadinya stunting karena malnutrisi pada ibu dan anak, rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat		
7	Masih adanya kasus penyakit menular tuberkulosis yang belum tuntas penanganannya		

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
8	Belum meratanya fasilitas kesehatan yang memadai terutama di pelosok desa, dimana masyarakat harus menuju ke faskes yang sebagian besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu dalam memanfaatkan layanan JKN yang dimiliki		Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal
9	Masih adanya kantong-kantong kemiskinan yang belum terselesaikan penanganannya	Perlindungan sosial yang belum optimal	
10	Pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran, tata kelola kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat yang belum efektif		
11	Semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak benda perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian	Pergeseran nilai-nilai sosial budaya	
12	Pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal		
13	Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang		
14	Pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran	Pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi	Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal
15	Belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	Daya saing angkatan kerja masih rendah	
16	Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian baik dikarenakan permasalahan pupuk dan hama tanaman, serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian.	Penurunan kontribusi sektor pertanian	
17	Masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil		
18	Pengaruh perekonomian global menyebabkan sektor ekspor menurun mengakibatkan kinerja industri pengolahan melambat	Kontribusi sektor industri yang kurang kondusif	
19	Belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal	
20	Belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibilitas pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih renda serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal	
21	Kurangnya pemodal, akses pasar dan distribusi pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM	Pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing	
22	Belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.		
23	Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
	pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama		
24	Masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM	Kurangnya inovasi pelayanan publik	
25	Bencana terjadi karena belum didukung oleh pemasangan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di wilayah rawan bencana, edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana	Daya dukung lingkungan masih rendah	
26	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga		
27	Pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai	Penurunan kualitas lingkungan	Kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi
28	Belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah		
29	Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal	Berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat	
30	Belum adanya upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK	Terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon	
31	Fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan		
32	Menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat	Infrastruktur pengembangan wilayah belum merata	
33	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.		
34	Kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergal		Pengembangan wilayah yang belum optimal
35	Perubahan tata guna lahan dimana beberapa lahan sawah telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan		
36	Belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri. Disamping itu juga terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.	Penataan ruang yang belum optimal	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

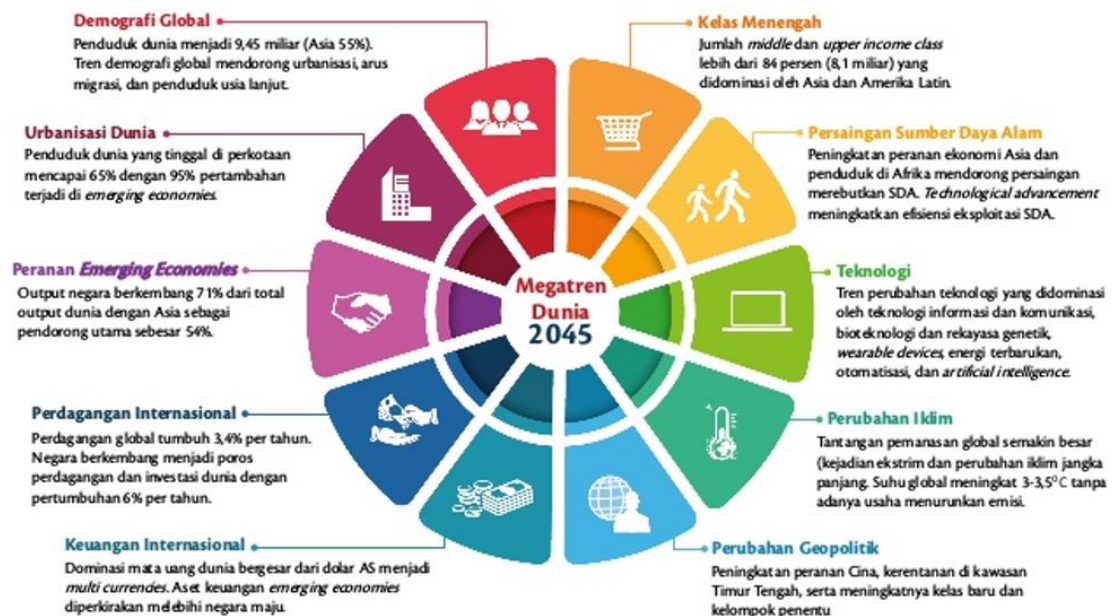
3.2 Isu Strategis Pembangunan

3.2.1 Isu Strategis Global

Pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga dalam dua puluh tahun ke depan dipengaruhi oleh berbagai macam tren perubahan global yang saat ini terjadi dan melanda global, nasional, dan regional. Perubahan global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi karena berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat masif, yang dapat berdampak pada proses pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga

jangka panjang. Perubahan global tersebut disebut dengan megatren dunia. Megatren Dunia Tahun 2045 menjadi pertimbangan secara tidak langsung dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.

Terdapat delapan megatren dunia yang akan dihadapi pada tahun 2045. Megatren dunia memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, namun di sisi lain juga memberikan disrupti. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: 1). perkembangan demografi global; 2). peningkatan urbanisasi dunia; 3). peningkatan peran emerging economies; 4). peningkatan peran perdagangan internasional; 5). perubahan keuangan internasional; 6). peningkatan penduduk kelas menengah (*middle class*); 7). peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam; 8). Kemajuan teknologi; 9). perubahan iklim; dan 10). perubahan geopolitik.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 3. 1. Megatren Dunia 2045

Beberapa isu megatren dunia yang memiliki keterkaitan erat dengan Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya:

1) **Perkembangan Demografi Global**

Tidak dapat dipungkiri apabila meningkatnya demografi global dan urbanisasi dunia maka akan didapatkan permasalahan tenaga kerja khususnya tenaga kerja Indonesia, pasalnya produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar USD7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar USD8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih

didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja.

2) **Peningkatan Urbanisasi Dunia**

Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen pertambahan terjadi di *emerging economies*. Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

3) **Peningkatan Peran Perdagangan Internasional**

Kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan dan investasi dunia. Antisipasi industri nasional terhadap dampak dari perubahan ini dapat diupayakan melalui penguatan kerja sama internasional serta perdagangan dan investasi dalam kawasan. Dalam pasar tenaga kerja yang terus tumbuh dan berkembang, terutama dinegara yang ekonominya baru berkembang, permintaan dan penawaran tenaga kerja seringkali tidak seimbang. Kekuatan ekonomi di negara barat akan diimbangi oleh kekuatan ekonomi secara global. Hal ini mengakibatkan munculnya persaingan baru sebagai dampak dari masalah geografis dan sumber daya alam, sehingga mendorong munculnya profil pelaku ekonomi yang berbeda dengan profil pelaku ekonomi sebelumnya.

4) **Peningkatan Penduduk Kelas Menengah (*Middle Class*)**

Secara ekonomi, kelas menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya pendapatan per kapita akan mendorong pengeluaran serta meningkatkan tabungan dan investasi. Khusus Indonesia, penduduk yang tergolong *consuming class* pada 2015 adalah sebanyak 45 juta, dan akan terus meningkatsehingga pada 2045 mencapai 258 juta orang atau 80 persen dari penduduk Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan melihat industri apa yang diperlukan untuk 258 juta *consuming class* Indonesia.

5) **Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika menyebabkan adanya gejolak persaingan memperebutkan Sumber Daya Alam (SDA). Akibatnya, ketersediaan SDA diperkirakan tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan yang melonjak meskipun efisiensi penggunaan SDA telah dioptimalisasi dengan bantuan teknologi.

6) **Kemajuan Teknologi**

Kemajuan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), robotika, dan bioteknologi, diperkirakan akan terus berlangsung pada tahun 2045. Kemajuan teknologi akan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga menimbulkan risiko pengangguran dan ketidaksetaraan.

7) Perubahan Iklim

Pemanasan global menjadi tantangan yang semakin besar bagi kehidupan masyarakat. Dimulai dengan kejadian ekstrim hingga perubahan iklim jangka panjang. Suhu global akan terus meningkat 3 – 3,5 derajat apabila fenomena perubahan iklim tidak berusaha dicegah dengan terus menerus melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi gas.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Terdapat lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 yakni mewujudkan negara nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Indonesia diharapkan memiliki pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia meningkat, daya saing Sumber Daya Manusia berkualitas dan setara negara maju, dan emisi gas rumah kaca menurun menuju *Net Zero Emission* (NZE).

Sasaran, misi (agenda), Arah (tujuan) dan indikator pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapan misi, tujuh belas arah dan empat puluh lima indikator utama Indonesia Emas 2045, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan berlandaskan Pancasila.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola; (ii) Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu: Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan (iii) Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu: Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang memiliki keterkaitan erat dengan Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya:

1) Tingkat Produktivitas Ekonomi yang Rendah

Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh sebesar 0,66. Kondisi produktivitas rendah disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal dan

kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010 ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama 2010-2015. Produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial dan bahkan terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 3. 2. Visi Indonesia Emas 2045

2) Deindustrialisasi Dini

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat ketrampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut kemudian menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005

menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022. Sementara itu produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dari Rp 41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp 22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

3) Pariwisata di Bawah Potensinya

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang cenderung masih rendah. Disamping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Kemudian inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk serta akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

4) Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggungnya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau dapat ditujukan pada peningkatan efisiensi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi; pengembangan transportasi ramah lingkungan; penerapan ekonomi sirkular; pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian; serta perkuatan implementasi sistem insentif disinsentif fiskal maupun fiskal untuk mendorong produk hijau melalui *green financing* dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi hijau. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi tercermin dari porsi untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen dan emisi GRK 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi. Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah serta masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air,

pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp 22,8 triliun per tahunnya. Lebih lanjut peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim tersebut mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024, yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai. Daya tampung kualitas air, lahan dan lingkungan diperkirakan akan terus menurun. Daya tampung kualitas air akan mengalami krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Komponen Indeks Kualitas Air (IKA) nasional memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata sebesar 52,35 (KLHK 2021) dimana nilai IKA merupakan yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas, persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi lahan hutan ke lahan pertanian dan perkebunan.

5) Infrastruktur Digital yang Belum Optimal dan Rendahnya Literasi Digital

Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran tantangan Pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, kapasitas data center dan rendahnya penerapan kebijakan TIK.

6) Kualitas SDM yang Makin Rendah

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan dimana rasio ketergantungan di bawah 50% akan diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan sehingga Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai modal utama pembangunan. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih

terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382. Capaian tersebut masih di bawah siswa dari negara-negara OECD yang sebesar 488,33.

7) Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Tata Kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan public yang berkualitas. Selama ini tata keola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah.

8) Kesenjangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar

Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya. Sistem angkutan umum massal perkotaan yang masih terbatas terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api serta angkutan perairan masih perlu ditingkatkan. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antar periode pemerintahan terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta ketersediaan sarana prasarana dasar yang belum berketahanan bencana.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah.

2) Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, *dan up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga.

3) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana dan sarana juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat (peningkatan inklusivitas layanan transportasi yang memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana tersebut tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta berpedoman pada rencana tata ruang.

4) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan

terjaganya sumber daya alam dan lestarynya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

5) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, dan jaminan perlindungan sosial.

6) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

7) Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme ko-kreasi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif).

3.2.4 Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga kondisi lingkungan, maka dirumuskan 5 (lima) isu strategis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yaitu sebagai berikut.

1) Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan pemerataan distribusi kesejahteraan

Melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebesar 15,33% pada tahun 2022.

Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,93% pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga masih lebih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah belum optimalnya praktik keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri serta memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan kondisi keluarga ideal dapat dilakukan dengan perkawinan pada usia ideal, memiliki pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memiliki anak dengan jumlah ideal. Di Kabupaten Purbalingga masih terdapat kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi yaitu sebesar 10,33%. Selain itu, masih kurangnya keterlibatan perempuan di Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan persentase keterwakilan perempuan pada lembaga eksekutif hanya 22,22%.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang layak serta dukungan ekonomi masyarakat akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, sehat dan berdaya saing. Masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama terkait dengan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Belum optimalnya akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup ditandai dengan masih tingginya prevalensi stunting pada balita yang mencapai 26,8% pada tahun 2022. Melihat kondisi kesehatan di Kabupaten Purbalingga, terdapat permasalahan terkait penuntasan penyakit menular, terabaikan, dan tidak menular. Masih terdapat 12 orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit terabaikan (filariasis dan kusta) pada tahun 2021, sedangkan prevalensi penyakit darah tinggi mencapai 36,49%.

Selain kesehatan, permasalahan terkait pendidikan di Kabupaten Purbalingga yaitu masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ sederajat yang masih rendah. Pada tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga hanya 7,33 tahun atau hanya hingga tingkat sekolah menengah pertama kelas tujuh. Sedangkan APK SD/MI/ sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2022 yaitu 107,19. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional.

2) **Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi**

Ancaman penurunan kualitas sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi ditunjukkan dengan masih terdapat masyarakat yang menggunakan sarana sanitasi berupa jamban sehat semi permanen (JSSP) sebanyak 18.848 KK (6,17%), sehingga perlu didorong untuk

meningkatkan sarana sanitasi menjadi jamban sehat permanen (JSP). Belum optimalnya pengelolaan sanitasi berdampak pada penurunan kualitas air. Nilai indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 sebesar 56,67 yang termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, BOD, COD, dan fecal coliform. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa air sungai tercemar oleh limbah padat maupun cair dari kegiatan domestik, industri, dan kegiatan non domestik lainnya. Sedangkan, hasil pengujian air sumur, parameter yang melebihi baku mutu yaitu nitrit, nitrat, kromium, e-coli, dan coliform. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa air sumur tercemar oleh limbah padat maupun cair dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian.

Terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2022 total sampah yang terkelola hanya mencapai 23,36% yang terdiri dari pengurangan sampah sebesar 1,40% dan penanganan sampah sebesar 21,96%. Sehingga, masih terdapat sampah yang belum terkelola diperkirakan mencapai 76,64%. Kondisi pengelolaan sampah juga diperburuk dengan kondisi TPA Banjaran yang sudah melebihi kapasitas dan TPA Kalipancur yang diperkirakan akan penuh pada tahun 2025. Dengan demikian, perlu optimalisasi pengelolaan sampah melalui 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

3) Belum optimalnya pelestarian hutan yang mengancam peningkatan risiko bencana dan dampak perubahan iklim

Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kawasan Gunung Slamet sehingga memiliki potensi pada sumber daya hutan. Berdasarkan Data Kawasan Hutan No. SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Kabupaten Purbalingga memiliki kawasan hutan seluas 14.312,07 Ha (17,76%) yang terdiri dari hutan lindung seluas 10.385,23 Ha (12,89%), hutan produksi seluas 641,74 Ha (0,80%), dan hutan produksi terbatas seluas 3.285,10 Ha (4,08%). Adapun hutan rakyat seluas 25.669,39 Ha (31,86%). Guna meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, hutan lindung di Kabupaten Purbalingga dapat ditingkatkan statusnya menjadi kawasan hutan konservasi.

Dengan kondisi topografi Kabupaten Purbalingga yang berbukit pada bagian utara serta bagian selatan yang cenderung datar, maka bencana yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga adalah bencana banjir dan tanah longsor. Dilihat dari nilai indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 139,78 yang termasuk dalam kategori sedang.

4) Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan ramah lingkungan

Sektor industri menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga namun laju pertumbuhan industri manufaktur tidak selalu

meningkat karena sangat bergantung dengan kondisi pasar serta faktor lain seperti saat terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2022 laju industri manufaktur sebesar 3,76% turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,8% setelah sebelumnya pada tahun 2020 laju industri manufaktur menunjukkan nilai minus. Selain sektor industri, sektor pariwisata juga mengalami penurunan ketika masa pandemi covid-19. Kondisi tersebut terlihat dari terjadinya penurunan kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang tercatat hanya 6 wisatawan saja pada tahun 2022.

Berkembangnya industri di Kabupaten Purbalingga juga akan berdampak terhadap lingkungan. Tren emisi GRK cenderung meningkat selama kurun waktu 2017-2021 dengan kontributor terbesar penghasil emisi GRK di Kabupaten Purbalingga adalah sektor energi yaitu sebesar 408,91 Gg CO₂e. Untuk itu perlu didorong sebagai bentuk transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Upaya di sektor industri manufaktur dengan menaati instrumen-instrumen lingkungan, mengelola seluruh limbahnya, mengembangkan sirkuler ekonomi, serta memproduksi produk-produk ramah lingkungan dan teregistrasi. Selain itu juga perlu untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan menjadi energi primer sekaligus menurunkan GRK di Kabupaten Purbalingga saat ini.

Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga kualitas pekerja rendah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menunjukkan angka 5,23%. Angka tersebut masih belum mencapai target nasional. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada kelas kecil sampai menengah yaitu melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, terdapat masalah di Kabupaten Purbalingga yaitu masih minimnya akses UMKM ke layanan keuangan. Pada tahun 2021 hanya 0,52% UMKM yang memiliki akses terhadap layanan keuangan.

5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah

Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purbalingga terkait dengan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi, terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta perlindungan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban umum. Sistem pencatatan merupakan hal yang penting baik bagi masyarakat maupun birokrasi sendiri. Pemanfaatan teknologi dalam pencatatan informasi serta akses data informasi memiliki keuntungan meliputi pelayanan informasi dapat tersedia 24 jam, 7 hari dalam seminggu sehingga dapat diakses dimana saja, adanya keterbukaan, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Namun demikian, untuk

Kabupaten Purbalingga perlu peningkatan kesiapan karena penggunaan internet di Kabupaten Purbalingga masih di bawah target nasional yaitu sebesar 55% pada tahun 2022.

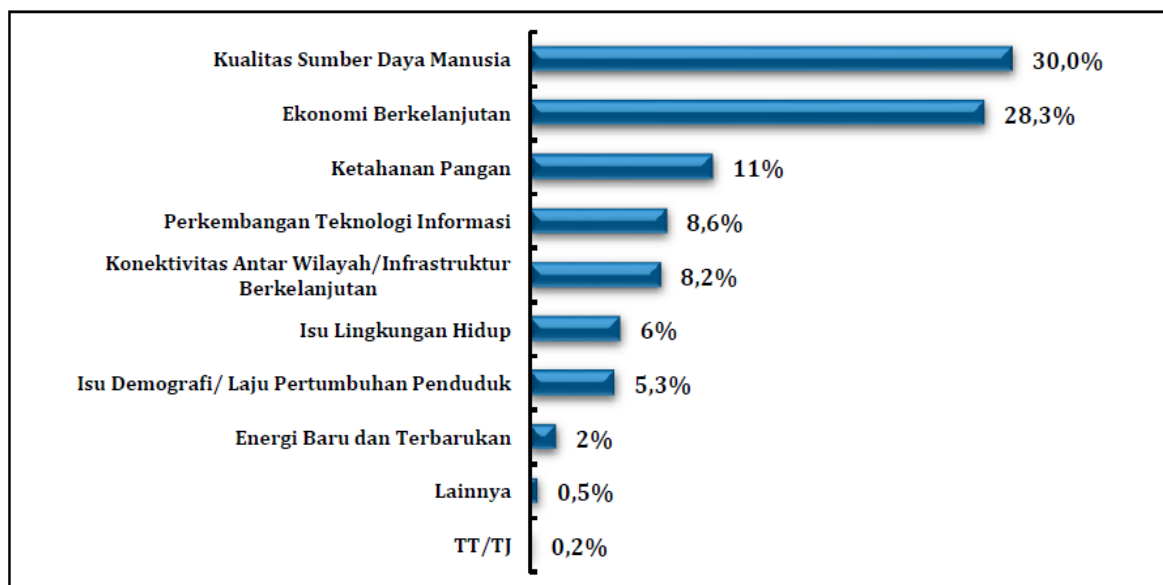
Permasalahan terkait terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilihat dari rasio kemandirian Kabupaten Purbalingga yang masih rendah hanya 17,84% pada tahun 2022, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,53%. Kondisi rasio kemandirian Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Pola instruktif tersebut membuat ketergantungan pemerintah Kabupaten Purbalingga dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

3.2.5 Isu Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Salah satu tahapan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 adalah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat berupa survei isu dan harapan masyarakat jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga. Sasaran dari survei tersebut adalah masyarakat di Kabupaten Purbalingga sebagai responden. Survei tersebut menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengetahui isu utama yang harus diantisipasi di Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 20 tahun ke depan dan menjadi acuan untuk menyusun RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan isu di Kabupaten Purbalingga adalah kualitas sumber daya manusia (30%), ekonomi berkelanjutan (28,3%), ketahanan pangan (11%), perkembangan teknologi informasi (8,6%), konektivitas antar wilayah/infrastruktur berkelanjutan (8,2%), isu lingkungan hidup (6%), isu demografi/laju pertumbuhan penduduk (5,3%), energi baru dan terbarukan (2%) yang dapat dilihat dalam gambar 3.3.

Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa isu utama di Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat adalah kualitas sumber daya manusia dan ekonomi berkelanjutan. Isu tersebut menjadi salah satu penentu terwujudnya Indonesia Emas 2045.



Sumber: Analisis Penyusun, 2023

Gambar 3. 3. Isu Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Purbalingga

3.2.6 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

Berdasarkan pertimbangan hasil analisis kondisi umum yang memunculkan beberapa permasalahan pembangunan, telaahan dokumen perencanaan dan sektoral, isu strategis dan tantangan global, nasional, isu strategis dalam dokumen KLHS RPJPD, dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat/survey isu, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yaitu:

1) Transformasi Kualitas Manusia

Manusia menjadi modal dalam pembangunan karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi utama pembangunan. Manusia yang berkualitas dapat memegang peran utama dalam proses transformasi suatu wilayah karena dapat membawa implikasi yang sangat penting dalam beberapa aspek yang menopang pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2045 diproyeksikan akan meningkat dengan jumlah penduduk usia produktif (15 – 65 tahun) menjadi yang terbesar. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat mengoptimalkan potensi manusia atau penduduk tersebut melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penting dilakukan investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan sosial budaya terhadap manusia yang menjadi subjek pembangunan. Dalam konteks pembangunan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar diperlukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam konteks kesehatan masyarakat, perwujudan tingkat harapan hidup yang tinggi baik untuk laki-laki dan perempuan menjadi dampak keberhasilan bagi pembangunan. Tentu saja hal tersebut perlu ditopang dengan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Dalam hal perlindungan sosial, tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan berdaya saing. Apabila kebutuhan dasar terlayani dengan baik dan didukung dengan perlindungan sosial yang merata, maka angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga dapat teratasi. Sedangkan dalam konteks pembangunan sosial kebudayaan, untuk mewujudkan masyarakat Purbalingga dengan ketahanan sosial budaya, diperlukan penguatan terhadap pembangunan kebudayaan dan kerukunan umat beragama dimana keseluruhannya dimulai dari edukasi dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hal tersebut karena pengaruh globalisasi dan modernisasi ke depannya dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang perlu diantisipasi dengan membangun ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Purbalingga.

2) Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Purbalingga perlu didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah dengan mengedepankan potensi sumberdaya lokal. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor dalam PDRB ADHK, sektor primer berupa pertanian cenderung mengalami kenaikan namun dengan peningkatan yang kecil. Sementara itu, sektor sekunder berupa industri pengolahan ketika pandemi covid-19 mengalami kontraksi dan penurunan yang signifikan kemudian dapat merangkak naik. Sementara itu, sektor tersier berupa perdagangan besar dan eceran serta jasa cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan sangat signifikan terjadi pada sektor jasa transportasi dan pergudangan, seiring dengan meningkatnya distribusi maupun ekspedisi barang antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga saat ini berada pada pemulihan kinerja ekonomi pasca pandemi covid-19. Pembangunan

ekonomi inklusif merepresentasikan tantangan ke depan bahwa transformasi pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor-sektor perekonomian berbasis kekuatan sumber daya manusia dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi inklusif ke depannya diperlukan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Disamping itu juga tidak mengesampingkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau dan ramah lingkungan sebagai upaya menerapkan ekonomi hijau.

3) **Transformasi Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Tata kelola pemerintah menjadi isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan partisipasi dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Transformasi tata kelola birokrasi ini menjadi penting di tengah kondisi birokrasi publik yang masih kurang kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan birokrasi yang *agile* yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat serta didukung keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga 20 tahun mendatang, mengingat penerapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga pada saat ini bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

4) **Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Purbalingga selanjutnya yang membutuhkan perhatian serius adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penggunaan lahan akan meningkat khususnya untuk kawasan hunian. Dalam kurun waktu 10 tahun

terakhir, perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga terdapat kenaikan pada lahan terbangun baik itu untuk perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan, sementara lahan sawah semakin menurun luasannya. Apabila dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada produktivitas lahan pertanian. Disamping itu juga, meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah dan emisi gas rumah kaca. Kedua dampak lingkungan tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Keberlanjutan juga dapat terwujud dengan melakukan pendidikan kesadaran kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga tentang alternatif pelestarian lingkungan dengan melakukan aktivitas yang lebih ramah lingkungan khususnya terkait dengan ketahanan air, pengelolaan sampah dan penyediaan ruang terbuka hijau. Lebih lanjut dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana alam dan perubahan iklim.

5) Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur merupakan tantangan penting yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Purbalingga membutuhkan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur untuk transportasi guna meningkatkan keterhubungannya antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) serta interaksi dengan kabupaten sekitar. Konektivitas wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga baik dari sektor primer berupa pertanian, sektor sekunder berupa industri pengolahan maupun sektor tersier berupa perdagangan dan jasa. Makin meningkatnya ketersediaan jalan dan sistem transportasi umum akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu, untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga ketersediaan air bersih, sanitasi dan jaringan listrik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih ada beberapa daerah di Kabupaten Purbalingga yang masih kesulitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang layak, sehingga mempengaruhi aspek kesehatan dan kebersihan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya serius untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur, peningkatan sarana prasarana air bersih, sanitasi, listrik, serta koordinasi yang

lebih baik antar pemerintah adalah langkah-langkah kunci untuk menciptakan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan

Tantangan lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang juga akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan kelengkapan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal. Pemanfaatan ruang akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut. Tantangan ke depannya adalah upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga 20 tahun mendatang, mengingat implementasi dan konsistensi penerapan kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga memiliki rencana pola ruang wilayah yang beragam dan cukup strategis.

Keselarasan isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat sandinganya pada tabel berikut.

Tabel III.2. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga

Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045	Isu Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045
<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan Demografi Global Peningkatan Urbanisasi Dunia 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas SDM yang Makin Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan pemerataan distribusi kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas sumber daya manusia isu demografi/laju pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Kualitas Manusia
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Peran Perdagangan Internasional Peningkatan Penduduk Kelas Menengah (<i>Middle Class</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Produktivitas Ekonomi yang Rendah Deindustrialisasi Dini Pariwisata di Bawah Potensinya 	<ul style="list-style-type: none"> Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Ekonomi Inklusif
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perubahan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan pangan yang berkelanjutan Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelestarian hutan yang mengancam peningkatan risiko bencana dan dampak perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan pangan Isu lingkungan hidup Energi baru dan terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> Kemajuan Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur Digital yang Belum Optimal dan Rendahnya Literasi Digital Kesenjangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan teknologi informasi Konektivitas antar wilayah/infrastruktur berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan
	<ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola pemerintahan yang dinamis 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah 		<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 *Logframe* (Kerangka Pikir) Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 adalah Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Berbagai dinamika pembangunan yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya baik dalam skala nasional maupun global menjadi refleksi untuk pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga ke depannya.

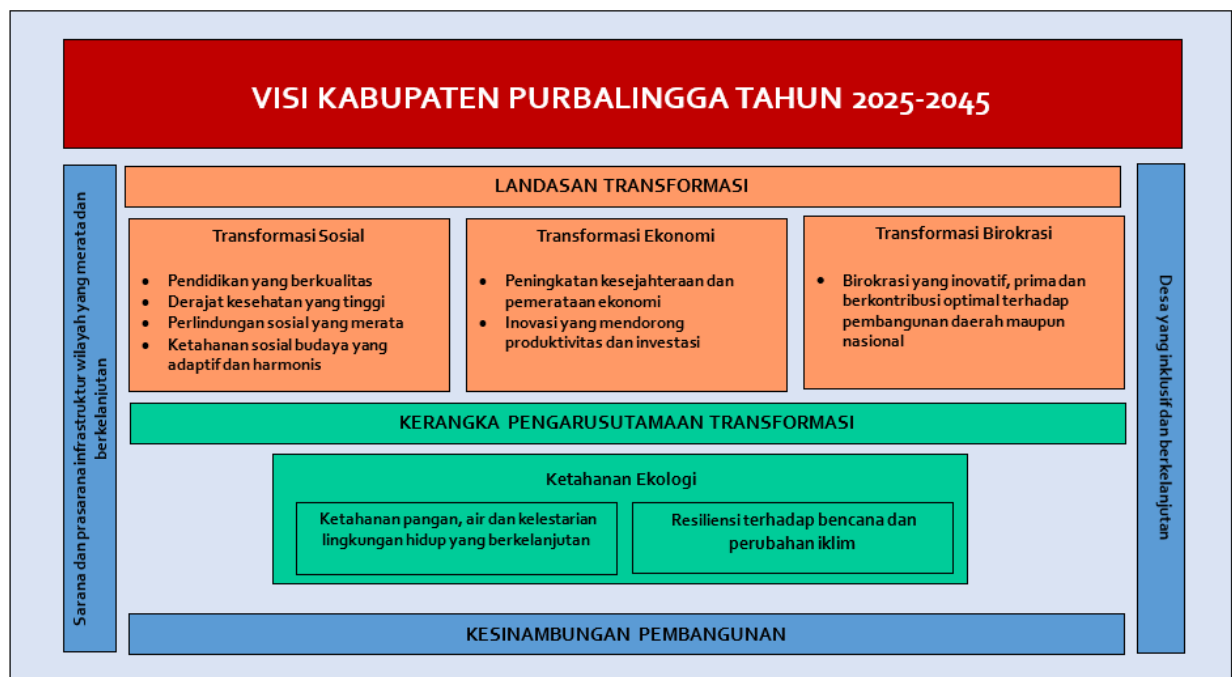
Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 juga diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2025-2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Disamping itu, untuk menciptakan keselarasan dengan Provinsi Jawa Tengah, pembangunan Kabupaten Purbalingga 2025-2045 juga harus mendukung visi Jawa Tengah 2025-2045 yaitu Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan.

Visi Kabupaten Purbalingga akan mengarahkan pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan agar dapat menghadapi dinamika global dan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan respon terhadap dinamika yang terjadi melalui percepatan pembangunan dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek pembangunan baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Landasan transformasi dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan kerangka pengarusutamaan transformasi yang dapat menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Perwujudan cita-cita Kabupaten Purbalingga 2025-2045 harus ditunjukkan dengan pencapaian pembangunan yang mandiri dan maju didukung dengan ketahanan ekologi untuk keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan. Dengan landasan berpikir tersebut, upaya transformasi dapat terwujud dan dijalankan dengan optimal apabila didukung dengan perekonomian yang mampu tumbuh dan bersaing melalui pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah yang tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tumbuhnya perekonomian juga didukung dengan kualitas manusia yang tangguh, berdaya saing

dan memiliki kompetensi serta kualifikasi yang mampu mendorong inovasi. Kualitas manusia tersebut juga mampu untuk menciptakan kondisi yang penuh toleransi, tenggang rasa, serta kehidupan harmonis yang menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal sehingga akan mendukung kinerja pembangunan.

Terciptanya transformasi pembangunan yang didukung dengan ketahanan ekologi berupa kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang optimal serta tahan terhadap risiko bencana, akan mewujudkan kesinambungan pembangunan yang didukung dengan pilar sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan serta pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 4. 1. Logframe (Kerangka Pikir) Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

4.2 Visi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar dalam *logframe* (kerangka pikir) di atas dan dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi dan permasalahan pembangunan daerah, serta isu dan tantangan global maupun daerah, maka visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 – 2045 adalah:

“PURBALINGGA MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Visi Pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 merupakan cita-cita pembangunan Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dalam periode dua puluh tahun ke depan. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan tetapi suatu komitmen dan upaya untuk merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi sangat penting dalam suatu kebijakan pembangunan, karena dengan adanya visi maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah dan memudahkan untuk dilakukan pengawasan terhadap semua kebijakan pembangunan.

Perumusan pokok-pokok visi yang diinginkan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2045 merupakan kondisi yang diinginkan sebagai hasil pembangunan 20 tahun ke depan. Rumusan kondisi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Rumusan kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perekat bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkannya.

Tabel IV.1. Pokok-Pokok Visi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

No.	Permasalahan Utama	Isu Strategis	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Kualitas manusia yang belum optimal	Transformasi kualitas manusia	MAJU, SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA	"PURBALINGGA MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"
2	Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal	Pembangunan Ekonomi Inklusif	MANDIRI, BERKELANJUTAN	
3	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Transformasi tata kelola pemerintahan	MAJU	
4	Kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	MAJU, BERKELANJUTAN	
5	Pengembangan wilayah yang belum optimal	Konektivitas antar wilayah dan infrastruktur berkelanjutan		

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri

Mandiri mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga tahun 2045 diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan

dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi diharapkan ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.

2. Maju

Maju mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdayasaing, sehingga masyarakat dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya. Maju diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah yang kuat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Tumbuhnya perekonomian juga didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang tangguh, berdaya saing dan memiliki kompetensi serta kualifikasi yang mampu mendorong inovasi. Disamping itu juga didukung dengan pengembangan infrastruktur, kesesuaian penataan ruang dan adopsi teknologi yang mendorong inovasi dan kesejahteraan masyarakat, serta dukungan kapasitas tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas. Dampak pertumbuhan tersebut maka seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial yang memadai.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan mengandung arti dimana pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam implementasinya, berkelanjutan juga ditujukan pada suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, konsep keberlanjutan harus menjadi pijakan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Purbalingga tahun 2045 yang selaras, serasi,

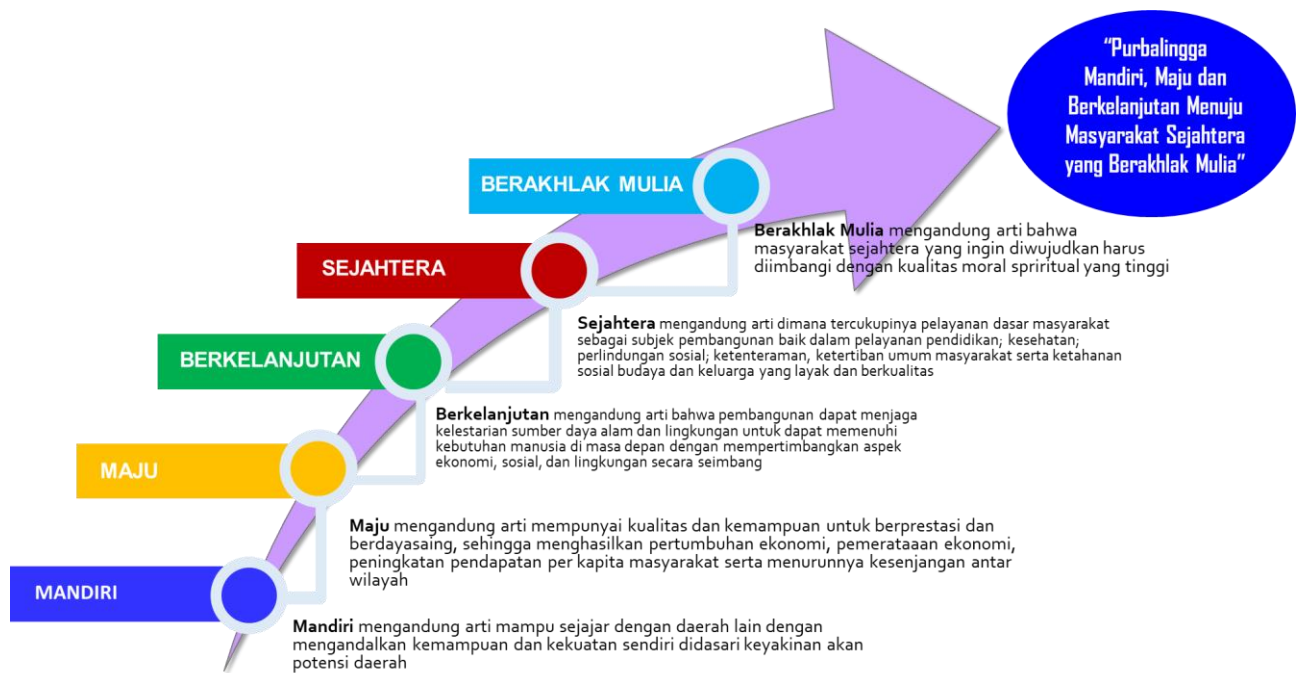
bertoleransi dan bersinergi dapat membentuk kekuatan atau modal bagi pembangunan. Kolaborasi tatanan kehidupan masyarakat yang mencakup hubungan antar stakeholders dan lingkungan hidup diwujudkan dengan kondisi yang aman dan tentram melalui pemahaman, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan hijau sehingga menciptakan kondisi yang harmonis.

4. Sejahtera

Sejahtera mengandung arti suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2045 dilakukan untuk semua (inklusi) dimana masyarakat dapat menikmati pembangunan secara merata. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Prinsip pembangunan bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan. Kesetaraan pembangunan terjadi di wilayah utara dan selatan Purbalingga untuk menjadi kawasan yang cepat tumbuh dan meminimalisir terjadinya kesenjangan wilayah. Disamping itu kesejahteraan diwujudkan dengan tercukupinya pelayanan dasar masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pelayanan pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas.

5. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2045 harus dilandaskan pada jati diri, yaitu iman dan taqwa seperti yang terdapat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Purbalingga. Peran iman dan taqwa sangat penting dalam membangun karakter generasi muda yang berperan aktif sebagai kekuatan moral serta agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Terciptanya kondisi masyarakat yang mempunyai budi pekerti yang baik dengan penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis disertai dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal, akan menciptakan kondisi yang minim konflik dan tindakan kriminal sehingga akan sangat mendukung kinerja pembangunan.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 4. 2. Visi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Purbalingga baik dilihat dari konteks geografis, demografis, sosial ekonomi, daya dukung lingkungan dan tata kelola pemerintah menjadi pertimbangan penting dalam perumusan pokok-pokok visi Kabupaten Purbalingga. Disamping itu, pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 juga memperhatikan arah pembangunan nasional dan provinsi untuk mewujudkan keselarasan dan kontribusi dalam mendukung pencapaian cita-cita Indonesia



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 4. 3. Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045 dengan Visi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045

Pada dasarnya visi dapat ditambahkan tema khusus yang menggambarkan cita-cita pembangunan daerah berdasarkan potensi unggulan, karakteristik daerah, dan arah pengembangan wilayahnya. Keselarasan pokok-pokok visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan visi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2. Keselarasan Pokok-Pokok Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan Visi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten Purbalingga
Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Purbalingga Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia
	a. Mandiri , meliputi substansi:Kuat, Handal, Tangguh
a. Maju , meliputi substansi: Daya saing, Modern, Inovatif, Mandiri, Tangguh, Aman	b. Maju , meliputi substansi: Unggul, Berdaya saing, Berprestasi, Inovatif, Modern
b. Berkelanjutan , meliputi substansi:Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, Risiko bencana	c. Berkelanjutan , meliputi substansi: Lestari, Harmonis, Hijau, Nyaman, Aman dan Tentram
c. Sejahtera	d. Sejahtera , meliputi substansi: Makmur, Layak, Berkualitas
d. Tema khusus: - Berbudaya - Penumpu pangan dan industri nasional	e. Tema khusus, , meliputi substansi: - Berakhlak Mulia

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dalam pencapaian visi Kabupaten Purbalingga tersebut tercermin dalam enam sasaran utama visi sebagai berikut:

- **Sasaran pertama:** Peningkatan daya saing sumberdaya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan daya saing sumberdaya manusia. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dicerminkan dari terjaminnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang merata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- **Sasaran kedua:** Peningkatan pendapatan per kapita untuk mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).
- **Sasaran ketiga:** Peningkatan tata kelola pemerintahan sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung implementasi pencapaian pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dan dinamis diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

- **Sasaran keempat:** Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mendukung sasaran visi nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Sasaran tersebut diukur dengan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif.

Tabel IV.3. Sasaran Utama Visi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Visi	Indikator Visi		Satuan	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	70,51	75,3	77,9	81,4	84,8	88,8
2.	Peningkatan pendapatan per kapita	1.	PDRB per Kapita	juta rupiah	30,39	33,03 - 33,25	62,73 - 91,84	91,85 - 120,96	120,97 - 152,58	152,59 - 179,21
		2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	5-6	5,55-5,62	5,62-5,70	5,70-5,78	5,78-5,85
		3.	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	angka	0,354	0,37	0,375	0,38	0,385	0,395
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan	1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	angka	66,2	69,47	72,10	76,60	81	82
4.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i>	1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	tonCO2eq	448.472,89	498.472,89	768.451,30	1.848.364,93	5.358.084,22	11.297.609,17

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Keselarasn sasaran dan indikator visi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 dengan sasaran dan indikator visi RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sandinganya pada tabel berikut.

Tabel IV.4. Keselarasan Sasaran dan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

No.	RPJPN		No.	RPJPD Prov. Jateng		No.	RPJPD Kab. Purbalingga	
	Sasaran Visi	Indikator Visi		Sasaran Visi	Indikator Visi		Sasaran Visi	Indikator Visi
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	1 GNI Per Kapita (US\$)	1	Peningkatan pendapatan per kapita	1 PDRB per Kapita (Rp. Juta)	1	Peningkatan pendapatan per kapita	1 PDRB per Kapita (Juta Rupiah)
		2 Kontribusi PDB Maritim (%)			2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Angka)			2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
		3 Kontribusi PDB Manufaktur (%)			3 Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)			3 Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Angka)
2	Kemiskinan menurun dan	1 Tingkat Kemiskinan (%)	2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1 Tingkat Kemiskinan (%)			
		2 Rasio Gini (indeks)			2 Rasio Gini (Angka)			

No.	RPJPN			No.	RPJPD Prov. Jateng			No.	RPJPD Kab. Purbalingga		
	Sasaran Visi	Indikator Visi			Sasaran Visi	Indikator Visi			Sasaran Visi	Indikator Visi	
	ketimpangan berkurang	3	Kontribusi PDRB KTI (%)			3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)				
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	1	Global Power Index (peringkat)	3	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	1	Kapasitas Institusi (Angka)	2	Peningkatan tata kelola pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Angka)
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	1	Indeks Modal Manusia (Angka)	4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1	Indeks Modal Manusia (Angka)	3	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Kumulatif	5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	1	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)Kumulatif	4	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	1	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (tonCO ₂ eq)

Sumber : Hasil Analisis, 2024

4.3 Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2045 akan dapat terwujud melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah. Rumusan misi membantu penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 4. 4. Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Kelima misi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial

Transformasi sosial dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif. Transformasi sosial diperlukan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari upaya meningkatkan pendidikan yang berkualitas; derajat kesehatan masyarakat; perlindungan sosial yang optimal serta ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis. Upaya penting dalam memajukan tingkat pendidikan masyarakat antara lain meningkatkan akses pendidikan guna mewujudkan program wajib belajar 13 tahun beserta implementasinya dengan mengoptimalkan mutu pendidikan, partisipasi dan kualitas layanan pendidikan secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah.

Sementara itu, derajat kesehatan masyarakat ditingkatkan melalui pemenuhan akses kesehatan baik itu berupa jaminan kesehatan dan infrastruktur serta layanan kesehatan untuk semua yang paripurna dan inklusif. Sedangkan upaya dalam meningkatkan perlindungan sosial yang optimal diwujudkan dalam penyediaan layanan yang memadai dan dengan penanganan yang holistik diantaranya dapat terdiri dari program jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan dana yang didanai oleh pemerintah

maupun kontribusi dari pesertanya. Dalam hal ini, perlindungan sosial merupakan rangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan.

Disamping itu, untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis diperlukan penguatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang berkualitas didukung dengan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif dan harmonis dalam implementasi nilai-nilai luhur sosial budaya sehingga dapat menjadi pembiasaan yang baik dimulai dari lingkup keluarga. Pembiasaan baik tersebut akan menjadikan pribadi seseorang mempunyai akhlak mulia yang dapat mendukung tatanan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Upaya-upaya transformasi sosial tersebut diharapkan akan menjadikan masyarakat Kabupaten Purbalingga menjadi tanggap terhadap dinamika pembangunan yang terjadi sehingga menjadi tangguh dan mampu beradaptasi dengan baik.

2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi ditunjukkan dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi. Upaya yang ada di dalam misi kedua ini terdiri dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta inovasi yang mendorong produktivitas dan investasi.

Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dimulai dari menguatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan produktivitas komoditas pertanian, manufaktur maupun perdagangan jasa. Agar tingkat produktivitas meningkat maka produksi sektor-sektor tersebut lebih didorong untuk mampu menuju hilirisasi didukung dengan digitalisasi yang berbasis pada riset dan inovasi. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan daya saing *small scale enterprise* agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global serta pengembangan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan ide dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi dalam rangka mendorong produktivitas dan investasi sehingga terwujud kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta ekonomi yang berbasis riset dan inovasi.

3. Misi 3: Mewujudkan Transformasi Birokrasi

Transformasi birokrasi menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Upaya yang ada di dalam misi keempat terkait pemerintahan yang baik adalah dimulai dengan penguatan *mindset* dan *culture set good governance*. Kemudian tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Penerapan *knowledge management* juga dilakukan guna mendorong kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga kapasitas tata kelola pemerintahan didorong untuk lebih inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun nasional seiring dengan perkembangan wilayah yang dinamis.

4. **Misi 4: Mewujudkan Ketahanan Ekologi**

Pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan apabila sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup tercipta dengan baik. Oleh karena itu, ketahanan ekologi diperlukan untuk memantapkan ketahanan pangan dan air, kelestarian lingkungan hidup, ketahanan perubahan iklim serta ketangguhan bencana.

Upaya yang ada di dalam misi ketiga ini dimulai dari penguatan ketahanan pangan dan ketahanan air serta penguatan kelestarian lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan melalui diversifikasi konsumsi pangan. Sementara itu untuk menjaga ketahanan air mulai dilakukan perapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air. Ke depannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulai pemantapan dengan penggunaan yang berbasis teknologi.

Disamping itu, untuk penguatan terhadap bencana dan perubahan iklim dimulai dengan penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi yang kemudian didukung dengan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam upaya penurunan risiko bencana dan emisi GRK. Penerapan teknologi mitigasi bencana dan penurunan emisi GRK yang andal diperlukan juga untuk mewujudkan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan.

5. **Misi 5: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan**

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan implementasi pembangunan yang berkesinambungan. Kestinambungan pembangunan dimulai dengan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata. Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur wilayah tersebut merupakan alat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara komprehensif, terpadu, efektif dan efisien. Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah dapat merata dan berkelanjutan dengan meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur. Kestinambungan pembangunan juga akan terwujud dengan dukungan perwujudan desa yang inklusif dan berkelanjutan yang menunjukkan bahwa pembangunan desa mengalami kemajuan baik dari meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Keselarasan misi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 dengan misi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sandinganya pada tabel berikut.

Tabel IV.5. Keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045									
No.	RPJPN			No.	RPJPD Prov. Jateng			No.	RPJPD Kab. Purbalingga
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/ Misi			Kelompok Agenda/Misi	Agenda/ Misi			
1	Transformasi Indonesia	1	Mewujudkan Transformasi Sosial	1	Landasan Transformasi	1	Mewujudkan Transformasi Sosial	1	Mewujudkan Transformasi Sosial
		2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi			2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola			3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	3	Mewujudkan Transformasi Birokrasi
2	Landasan Transformasi	4	Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	2	Kerangka Pengarusutamaan Tranformasi	4	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	4	Mewujudkan Ketahanan Ekologi
		5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		
3	Kerangka Implementasi Transformasi	6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	3	Kesinambungan Pembangunan	6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	5	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan
		7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			7	Mewujudkan Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan		
		8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan			8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan		

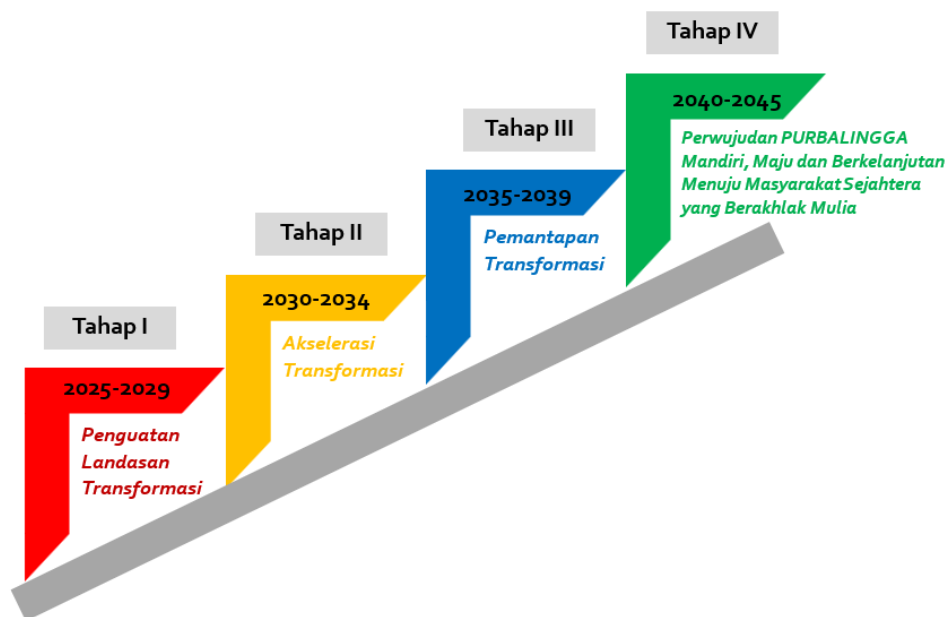
Sumber : Hasil Analisis, 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Visi dan misi pembangunan jangka panjang yang ditetapkan pada bab sebelumnya pada dasarnya menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama dua puluh tahun ke depan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Dengan mengikuti proses pentahapan tersebut, kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah. Tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 s.d. 2045 seperti disajikan dalam Gambar 5.1.



Gambar 5. 1. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Pada tahap pertama, penguatan landasan transformasi menjadi upaya pencapaian pembangunan yang dilakukan dengan melakukan penguatan, peningkatan dan pemenuhan kondisi sosial, ekonomi, ekologi, pemerintahan dan kesinambungan pembangunan. Tahap I (2025-2029) ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dimana pelayanan dasar disesuaikan dengan

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Terpenuhinya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Adapun kebijakan pengalokasian belanja daerah diutamakan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan prioritas utama antara lain belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tahap kedua, dilakukan akselerasi transformasi dengan peningkatan, pengembangan, dan pemerataan kondisi sosial, ekonomi, ekologi, pemerintahan dan kesinambungan pembangunan. Adanya akselerasi tersebut Tahap II (2030-2034) akan mewujudkan konektifitas antar pusat-pusat pertumbuhan, mewujudkan lingkungan inovasi untuk mendorong produktivitas dan investasi serta terbentuknya kepercayaan masyarakat (*society trust*) terhadap pemerintah. Hal tersebut terjadi ditandai dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat menjadi kategori Sangat Baik (BB) dimana akuntabilitas sangat baik mulai terwujud dengan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan pengukuran kinerja.

Pada tahap ketiga, dilakukan pemantapan transformasi dengan pemantapan kondisi sosial, ekonomi, ekologi, pemerintahan dan kesinambungan pembangunan. Tahap III (2030-2034) ditandai dengan peningkatan daya saing SDM, dimana Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada rentang 75-79 dengan komposit Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk bersekolah rata-rata mencapai sebelas tahun atau sampai kelas 1 SMA, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk bersekolah berpeluang untuk melanjutkan sekolahnya hingga 14 tahun lamanya atau sampai lulus Diploma 3 dan lanjut ke Sarjana, serta Usia Harapan Hidup (UHH) dimana bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 77 tahun. Di samping itu, terdapat peningkatan tata kelola pemerintahan ditandai dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat menjadi kategori Memuaskan (A) dimana instansi pemerintah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Sasaran visi lainnya pun menunjukkan pemantapan transformasi yaitu pada peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Pada tahap keempat, mulai terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu Purbalingga Mandiri, Maju dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia dimana masyarakat Kabupaten Purbalingga masuk pada kelompok pendapatan menengah atas (PDRB per kapita diatas US\$4.466) serta Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat > 80 yang menunjukkan kualitas SDM masuk pada kelompok sangat tinggi, sehingga dapat mewujudkan sinergitas pembangunan berkelanjutan dalam kolaborasi *penthahelix*.

Rincian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga setiap lima tahunan untuk 20 tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Arah Kebijakan Periode Tahun 2025-2029

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada kebijakan “Penguatan Landasan Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan birokrasi, yang disertai dengan penguatan ketahanan ekologi untuk pemenuhan kesinambungan pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Transformasi Sosial, diarahkan pada (1) penguatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berorientasi *demand-supply side* guna mewujudkan program wajib belajar 13 tahun, (2) penguatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan berbasis *demand-supply side* guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (3) penguatan perlindungan sosial melalui penyediaan layanan yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (4) penguatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang berkualitas melalui internalisasi nilai-nilai luhur sosial budaya.

Transformasi Ekonomi, diarahkan pada (1) penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui hilirisasi rantai komoditas pertanian, manufaktur, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dengan mengutamakan wisata berbasis ekologi, dan (2) mendorong inovasi pada pelaku ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan investasi.

Transformasi Birokrasi, diarahkan pada penguatan *mindset* kolaboratif, responsif dan akomodatif serta membangun interaksi positif terhadap perkembangan kebijakan.

Ketahanan Ekologi, diarahkan pada (1) penguatan ketahanan pangan melalui perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, penguatan ketahanan air melalui perlindungan sumber-sumber air dan penerapan manajemen air, penguatan kelestarian lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan (2) penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana serta penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi.

Kesinambungan Pembangunan, diarahkan pada (1) pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata dan memadai melalui penyediaan kualitas jalan dan jembatan sesuai standard, penyediaan fasilitas transportasi yang optimal, serta penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak; dan (2) pemenuhan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa.

2. **Arah Kebijakan Periode Tahun 2030-2034**

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada kebijakan “Akselerasi Transformasi”. Tahap kedua ini dilakukan dengan akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan birokrasi, didukung dengan peningkatan ketahanan ekologi dan perubahan iklim untuk peningkatan kesinambungan pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Transformasi Sosial, diarahkan pada (1) peningkatan partisipasi dan kualitas layanan pendidikan guna mewujudkan program wajib belajar 13 tahun, (2) peningkatan layanan kesehatan yang paripurna dan inklusif, (3) peningkatan perlindungan sosial melalui penanganan yang holistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (4) penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif dan harmonis (*creating persistence life situation*) dalam implementasi nilai-nilai luhur sosial budaya.

Transformasi Ekonomi, diarahkan pada (1) peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui hilirisasi rantai komoditas pertanian dan manufaktur, serta pengembangan wisata berbasis ekologi, dan (2) peningkatan inovasi pada pelaku ekonomi untuk mempercepat keberlanjutan produktivitas dan investasi.

Transformasi Birokrasi, diarahkan pada pengembangan dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan *knowledge management* guna mendorong kolaborasi dan partisipasi masyarakat.

Ketahanan Ekologi, diarahkan pada (1) peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi konsumsi pangan, penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan memperketat pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dan (2) peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana serta peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam upaya penurunan risiko bencana dan emisi GRK.

Kesinambungan Pembangunan, diarahkan pada (1) peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur melalui peningkatan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standard, peningkatan fasilitas transportasi yang optimal serta peningkatan perumahan dan kawasan permukiman layak dan (2) peningkatan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa.

3. **Arah Kebijakan Periode Tahun 2035-2039**

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada kebijakan “Pemantapan Transformasi”. Tahap ketiga ini dilakukan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan birokrasi, didukung dengan penguatan ketahanan ekologi dan perubahan iklim untuk pemantapan kesinambungan pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Transformasi Sosial, diarahkan pada (1) pemantapan partisipasi dan kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi, (2) pemantapan layanan kesehatan yang paripurna dan inklusif, (3) pemantapan kualitas perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (4) pemantapan implementasi nilai-nilai luhur sosial budaya dengan mengedepankan habituasi dimulai dalam lingkup keluarga.

Transformasi Ekonomi, diarahkan pada (1) pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui hilirisasi rantai komoditas pertanian dan manufaktur, serta pengembangan wisata berbasis ekologi, dan (2) penguatan inovasi pada pelaku ekonomi untuk memperkuat struktur ekonomi.

Transformasi Birokrasi, diarahkan pada pemantapan kapasitas tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Ketahanan Ekologi, diarahkan pada (1) pemantapan diversifikasi pangan, manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air serta pemantapan kualitas lingkungan hidup yang berbasis teknologi, dan (2) pemantapan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui penerapan teknologi mitigasi bencana dan penurunan emisi GRK yang andal.

Kesinambungan Pembangunan, diarahkan pada: (1) pemantapan pemerataan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur melalui pemantapan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan fasilitas transportasi berbasis teknologi serta pemerataan perumahan dan kawasan permukiman layak, dan (2) pemantapan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa.

4. Arah Kebijakan Periode Tahun 2040-2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada kebijakan “Purbalingga Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan birokrasi, didukung dengan perwujudan ketahanan ekologi dan keberlanjutan iklim untuk perwujudan kesinambungan pembangunan.

Transformasi Sosial, diarahkan pada (1) perwujudan pendidikan yang berkualitas, (2) perwujudan derajat kesehatan yang tinggi, (3) perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas, dan (4) perwujudan ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis.

Transformasi Ekonomi, diarahkan pada (1) perwujudan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan (2) perwujudan ekonomi yang berbasis riset dan inovasi.

Transformasi Birokrasi, diarahkan pada perwujudan birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun nasional.

Ketahanan Ekologi, diarahkan pada (1) perwujudan ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta (2) perwujudan ketahanan bencana dan iklim yang berkelanjutan.

Kesinambungan Pembangunan, diarahkan pada (1) perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan dan (2) perwujudan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel V.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Visi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
			Tahap I (2025-2029) Penguatan Landasan Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan Transformasi	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Purbalingga Mandiri & Maju Menuju masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia & Berkelanjutan
PURBALINGGA MANDIRI DAN MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERKELANJUTAN	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial		Peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur sosial budaya dan keluarga yang berkualitas	Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta aktualisasi nilai-nilai luhur sosial budaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berkualitas	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemantapan pembiasaan implementasi nilai-nilai luhur sosial untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berkualitas	Perwujudan kualitas pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta tatanan kehidupan yang berkualitas, adaptif dan setara
		1. Pendidikan yang berkualitas	Penguatan mutu pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berorientasi <i>demand-supply side</i> guna mewujudkan program wajib belajar 13 tahun	Peningkatan partisipasi dan kualitas layanan pendidikan guna mewujudkan program wajib belajar 13 tahun	Pemantapan partisipasi dan kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi	Perwujudan pendidikan yang berkualitas
		2. Derajat kesehatan yang tinggi	Penguatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan berbasis <i>demand-supply side</i> guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna dan inklusif	Pemantapan layanan kesehatan yang paripurna dan inklusif	Perwujudan derajat kesehatan yang tinggi
		3. Perlindungan sosial yang merata	Penguatan perlindungan sosial melalui penyediaan layanan yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan perlindungan sosial melalui penanganan yang holistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan kualitas perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas
		4. Ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis	Penguatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang berkualitas melalui internalisasi nilai-nilai luhur sosial budaya	Penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif dan harmonis (<i>creating persistence life situation</i>) dalam implementasi nilai-nilai luhur sosial budaya	Pemantapan implementasi nilai-nilai luhur sosial budaya dengan mengedepankan habituasi dimulai dalam lingkup keluarga	Perwujudan ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis
	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi		Penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing <i>small scale enterprise</i> berbasis riset dan inovasi	Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing <i>small scale enterprise</i> berbasis riset dan inovasi	Pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing <i>small scale enterprise</i> berbasis riset dan inovasi	Perwujudan perekonomian yang maju dan merata

Visi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
			Tahap I (2025-2029) Penguatan Landasan Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan Transformasi	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Purbalingga Mandiri & Maju Menuju masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia & Berkelanjutan
		1. Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	Penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing <i>small scale enterprise</i> melalui hilirisasi rantai komoditas pertanian dan manufaktur, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>) dengan mengutamakan wisata berbasis ekologi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah	Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing <i>small scale enterprise</i> melalui hilirisasi rantai komoditas pertanian dan manufaktur, serta pengembangan wisata berbasis ekologi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah	Pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan daya saing <i>small scale enterprise</i> melalui hilirisasi rantai komoditas pertanian dan manufaktur, serta pengembangan wisata berbasis ekologi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah	Perwujudan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
		2. Inovasi yang mendorong produktivitas dan investasi	Mendorong inovasi pada pelaku ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan investasi	Peningkatan inovasi pada pelaku ekonomi untuk mempercepat keberlanjutan produktivitas dan investasi	Penguatan inovasi pada pelaku ekonomi untuk memperkuat struktur ekonomi	Perwujudan ekonomi yang berbasis riset dan inovasi
	Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Birokrasi		Penguatan <i>mindset</i> dan <i>culture set</i> yang lebih profesional, produktif dan akuntabel	Pengembangan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif	Pemantapan integritas tata kelola pemerintahan dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan <i>agile</i>
		Birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun nasional	Penguatan <i>mindset</i> kolaboratif, responsif dan akomodatif serta membangun interaksi positif terhadap perkembangan kebijakan	Pengembangan dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan <i>knowledge management</i> guna mendorong kolaborasi dan partisipasi masyarakat	Pemantapan kapasitas tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas	Perwujudan birokrasi yang inovatif, kolaboratif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun nasional
	Misi 4 : Mewujudkan Ketahanan Ekologi		Perlindungan ketahanan pangan, air dan konservasi lingkungan hidup serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim	Peningkatan ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim	Pemantapan ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup serta kapasitas ketahanan bencana berbasis teknologi	Perwujudan fungsi lingkungan hidup yang optimal
		1. Ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penguatan ketahanan pangan melalui perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Penguatan ketahanan air melalui perlindungan sumber-sumber air dan penerapan manajemen air, serta Penguatan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi konsumsi pangan, penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan memperkuat pengawasan terhadap	Pemantapan diversifikasi pangan, manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air serta pemantapan kualitas lingkungan hidup yang berbasis teknologi	Perwujudan ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup

Visi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
			Tahap I (2025-2029) Penguatan Landasan Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Pemantapan Transformasi	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Purbalingga Mandiri & Maju Menuju masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia & Berkelanjutan
			melalui upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	pencemaran dan kerusakan lingkungan		
		2. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana serta penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi	Peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana serta peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam upaya penurunan risiko bencana dan emisi GRK	Pemantapan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui penerapan teknologi mitigasi bencana dan penurunan emisi GRK yang andal	Perwujudan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan
	Misi 5 : Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan		Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur pengembangan wilayah secara merata	Peningkatan kualitas sarana prasarana infrastruktur pengembangan wilayah	Peningkatan kualitas sarana prasarana infrastruktur pengembangan wilayah	Perwujudan sarana prasarana infrastruktur yang berkualitas
		1. Sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan	Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata dan memadai melalui penyediaan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, penyediaan fasilitas transportasi yang optimal, serta penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur melalui peningkatan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan fasilitas transportasi yang optimal serta peningkatan perumahan dan kawasan permukiman layak	Pemantapan pemerataan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur melalui pemantapan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan fasilitas transportasi berbasis teknologi serta pemerataan perumahan dan kawasan permukiman layak	Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan
		2. Desa yang inklusif dan berkelanjutan	Pemenuhan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa	Pemantapan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa	Perwujudan desa yang inklusif dan berkelanjutan

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat progresif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 ditetapkan 6 sasaran pokok dengan 11 arah pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga. Penjabaran misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan adalah sebagai berikut.

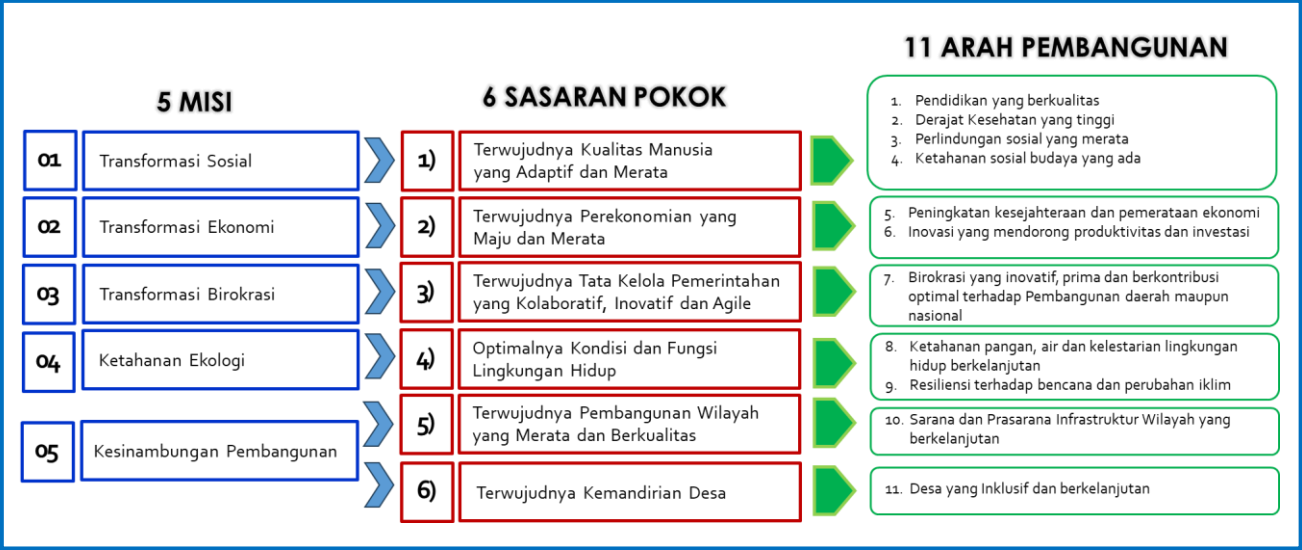
Transformasi Sosial, dilakukan dengan dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif terutama dalam hal pendidikan; derajat kesehatan masyarakat; perlindungan sosial serta ketahanan sosial budaya. Misi transformasi sosial ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu Terwujudnya Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata, dengan pencapaian sasaran pokok difokuskan pada empat arah pembangunan meliputi: Pendidikan yang berkualitas, Derajat kesehatan yang tinggi, Perlindungan sosial yang merata, dan Ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis.

Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan dilakukan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi. Misi transformasi ekonomi ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata, dengan pencapaian sasaran pokok difokuskan pada dua arah pembangunan meliputi: Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan Inovasi yang mendorong produktivitas dan investasi.

Transformasi Birokrasi, dilakukan dengan mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Misi transformasi birokrasi ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile, dengan pencapaian sasaran pokok difokuskan pada arah pembangunan Birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun nasional.

Ketahanan Ekologi, dilakukan dengan dilakukan memantapkan ketahanan pangan dan air, kelestarian lingkungan hidup, ketahanan perubahan iklim serta ketangguhan bencana. Misi ketahanan ekologi ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu Optimalnya Kondisi dan Fungsi Lingkungan Hidup, dengan pencapaian sasaran pokok difokuskan pada dua arah pembangunan meliputi: Ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kesinambungan Pembangunan, dilakukan dengan dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan dukungan perwujudan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Misi kesinambungan pembangunan ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas dan Terwujudnya Kemandirian Desa, dengan pencapaian sasaran pokok difokuskan pada dua arah pembangunan meliputi: Sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan Desa yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 5. 2. Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Sasaran 1: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata

Pencapaian sasaran untuk mewujudkan kualitas manusia dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan mulai dari tata kelola, akses dan mutu layanan sampai dengan pengembangan teknologi. Selain penyediaan layanan dasar, internalisasi nilai-nilai luhur sosial budaya juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan kualitas manusia yang adaptif.

Untuk mewujudkan sasaran pokok terwujudnya kualitas manusia yang merata dan adaptif difokuskan pada empat arah pembangunan yaitu pendidikan berkualitas, derajat kesehatan yang tinggi, perlindungan sosial yang merata dan ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis.

5.2.2.1 Pendidikan yang Berkualitas

Dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan menjadi hal yang penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang

lebih sejahtera. Pelayanan pendidikan yang merata dan berorientasi *demand-supply side* dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Arah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) percepatan wajib belajar 13 tahun melalui perluasan bantuan pembiayaan pendidikan dan penyediaan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal, 2) penyelenggaraan pendidikan berkualitas (mulai dari PAUD, SD, SMP) yang difokuskan pada penguatan kurikulum pendidikan berbasis *softskill* dan karakter, layanan pendidikan berbasis teknologi informasi dan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) serta penguatan potensi lokal daerah, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, solidasi penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat serta 3) peningkatan mutu Pendidikan Non Formal (PNF) melalui penguatan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitasi sarana dan prasarana yang baik, pemberian pembelajaran yang komprehensif serta fasilitasi pendanaan pendidikan.

5.2.2.2 Derajat Kesehatan yang Tinggi

Begitu pula halnya dengan kesehatan, kualitas hidup masyarakat juga akan dapat terwujud apabila masyarakat dapat hidup sehat untuk dapat beraktivitas menjadi masyarakat yang berdaya guna. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan sebagai perwujudan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi.

Arah kebijakan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, 2) pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan, 3) peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, 4) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap, 5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, 6) peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, 7) pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, 8) percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting, 9) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, 10) percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular, 11) penyediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, 12) penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan, serta 13) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

5.2.2.3 Perlindungan Sosial yang Merata

Perlindungan sosial ditujukan pada seluruh komponen masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Perlindungan sosial dilakukan melalui penanganan yang holistik dan merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan untuk mewujudkan perlindungan sosial yang merata untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan, 2) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan

peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, 3) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan, 4) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, 5) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, 6) percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga, dan 7) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau.

5.2.2.4 Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif dan Harmonis

Mewujudkan kualitas manusia juga harus didukung dengan ketahanan sosial dan budaya. Membangun ketahanan sosial dimulai dari dalam lingkup keluarga dengan internalisasi nilai-nilai luhur untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan berkualitas. Kondisi tersebut akan menciptakan pola pikir yang positif dan mendukung penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif dan harmonis (*creating persistence life situation*). Begitu pula dengan membangun ketahanan budaya dibutuhkan untuk memelihara sistem nilai budaya Jawa di tengah modernisasi dan globalisasi yang dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Adanya pola pikir yang berketahanan sosial dan budaya, maka masyarakat akan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi di tengah modernisasi dan globalisasi.

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya yang adaptif dan harmonis untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, 2) penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, 3) penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal, 4) peningkatan strategi pemajuan kebudayaan, 5) penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, 6) internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa pada anak-anak sekolah, 7) edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas budaya lokal, 8) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, 9) peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, 10) penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, 11) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, dan 12) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan

dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Terwujudnya kualitas manusia yang merata dan adaptif Kabupaten Purbalingga tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya seperti disajikan dalam tabel V.2.

Tabel V.2. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 1 RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata	Pendidikan yang berkualitas	1	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):							
				a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%	66,64	67,97	70,12	72,27	74,42	76,60
				b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	59,15	61,77	69,07	76,37	83,67	91,02
				c. Numerasi SD/Sederajat	%	49,30	49,91	58,91	67,91	76,91	85,81
				d. Numerasi SMP/Sederajat	%	42,42	43,27	52,82	62,37	71,92	81,55
			2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di atas 15 Tahun	tahun	7,34	9,53	10,38	11,23	12,08	12,99
			3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,02	12,56	13,16	13,76	14,36	14,89
			4	Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 Tahun	%	86,71	89,05	91,79	94,53	97,26	100
			5	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,93	5,44	6,05	6,66	7,26	7,87
		Derajat kesehatan yang tinggi	6	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,98	74,23	75,74	77,25	78,76	80,27
			7	Jumlah Kematian Ibu	kasus	13	10	9	7	5	3
			8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	26	24,22	19,75	15,3	10,84	6,38
			9	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	%	78,7	90	92,5	95	97,5	100
			10	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	91,17	91,51	92,36	93,21	94,06	95
			11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100,46	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
		Perlindungan sosial yang merata	12	Tingkat Kemiskinan	%	14,99	12,50-13,50	10,00-10,94	6,88-7,73	3,75-4,53	0,00-0,68
			13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *)	%	84,7	84,78	90,91	96,94	100	100
		Ketahanan sosial budaya	14	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0	0	0	0	0
			15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok	%	40,98	43,16	48,62	54,08	59,54	65,00

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan yang adaptif dan harmonis	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
				Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan *)							
			16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	18,41	44,99	46,34	47,73	49,16	61,44
			17	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	45,5	18,81	19,37	19,95	20,59	27,34
			18	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah *)	orang	24.432	25.669	29.042	32.858	37.176	42.061
			19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,04	0,06	0,56	1,06	1,56	2,09
			20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga) *)	angka	60,94	62,43-63,94	65,4-66,99	69,12-70,8	72,84-74,6	77,3-79,17
			21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,381	0,36-0,35	0,32 - 0,3	0,28 - 0,25	0,24 - 0,19	0,19-0,13

5.2.2 Sasaran 2: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata

Sebagai upaya untuk mewujudkan perekonomian yang maju dan merata dilakukan dengan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi yang ada. Sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah dikuatkan menjadi kegiatan yang memiliki produktivitas tinggi khususnya pada *small scale enterprise*. Pengembangan produktivitas pada *small scale enterprise* dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada diharapkan dapat meningkat daya saingnya dengan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. *Small scale enterprise* dikembangkan secara merata pada seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga dan menjadi titik berat pengembangan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengembangkan inovasi yang berbasis riset dan inovasi.

Disamping itu, kemajuan perekonomian juga didukung pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dengan mengutamakan wisata berbasis ekologi. *Sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Salah satu bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga yaitu ekowisata yang mengutamakan wisata berbasis ekologi. Dengan memanfaatkan potensi dan keindahan alam yang ada, dapat dikelola menjadi desa wisata dengan menjadikan beberapa atraksi wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Prinsip keberlanjutan dilakukan dengan tetap mengutamakan konservasi alam sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Untuk mewujudkan sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang maju dan merata difokuskan pada dua arah pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan inovasi yang mendorong produktivitas dan investasi.

5.2.2.1 Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Peningkatan produktivitas dengan mendorong hilirisasi rantai komoditas baik pertanian maupun manufaktur diperlukan dalam upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) mendorong "alih komoditas tanam" yang ramah konservasi pada *catchment area*, 2) hilirisasi rantai komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian, 3) pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah PPK Karangreja, PPK Rembang, PPK Kejobong dan PPK Bukateja disesuaikan dengan karakteristik wilayah, 4) peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (*smart farming, smart agriculture, climate smart agriculture, logistic system*), 5) peningkatan kapasitas, akses informasi dan pembiayaan bagi pelaku usaha pertanian, penguatan sistem distribusi produk pertanian, serta perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian, 6) peningkatan kualitas produk manufaktur, penanaman *mindset good manufacturing practice* serta

fasilitasi *link and match* dengan pabrikan, 7) pembentukan sentra-sentra industri untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas yang didukung dengan fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, serta penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai, 8) fasilitasi, peningkatan akses dan pengembangan industri kreatif, 9) penguatan standarisasi produk unggulan daerah dengan mengembangkan *branding* daerah sebagai motivasi dengan menciptakan potensi lokal berkelas global sehingga mampu bersaing di pasar, 10) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, 11) penguatan promosi, peningkatan kualitas destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah baik itu alam, budaya maupun masyarakatnya serta peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata, serta 12) kolaborasi masyarakat lokal dan pelaku wisata dalam penataan serta pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.

5.2.2.2 Inovasi yang Mendorong Produktivitas dan Investasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Inovasi perlu dilakukan pada pelaku ekonomi khususnya *small scale enterprise* untuk mempercepat keberlanjutan produktivitas dan investasi.

Arah kebijakan untuk mewujudkan inovasi yang mendorong produktivitas dan investasi untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) penguatan budaya, iklim, dan kreatifitas bagi pelaku ekonomi, 2) penguatan regulasi dan kelembagaan pelayanan penanaman modal dan investasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan digitalisasi, 3) inisiasi skema transfer teknologi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), 4) mendorong pengembangan *StartUP* berskala nasional/internasional, 5) penerapan inovasi yang berteknologi tinggi untuk mendorong peningkatan produktivitas dan investasi, 6) penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah, 7) penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, serta 8) penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan.

Terwujudnya perekonomian yang maju dan merata Kabupaten Purbalingga tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya seperti disajikan dalam tabel V.3.

Tabel V.3. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 2 RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata	Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,61	5,40-4,90	4,91 - 4,82	4,83 - 4,74	4,75 - 4,64	4,65 - 4,35
			23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,14	65,41	69,39	73,36	77,34	81,31
			24	PDRB Perkapita (ADHB)	juta rupiah	30,39	35,03 - 62,72	62,73 - 91,84	91,85 - 120,96	120,97 - 152,58	152,59 - 179,21
			25	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	28,29	28,95	30,64	32,32	34	35,78
			26	Kontribusi PDRB Pertanian	milyar rupiah	7.197	8.437	10.098	11.697	13.321	14.950
			27	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,66	2,7	3,59	4,48	5,37	6,29
			28	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara *)	orang	10	23	43	63	82	95
			29	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,6	3,85	5,46	7,07	8,68	8,95
			30	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,702	1,63	2,5	3,37	4,24	5,11
			31	Return on Aset (ROA) BUMD	%	3,07	2,14	3,55	4,94	6,35	7,75
			32	Disparitas Harga	%		± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
			33	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB **)	%	0,26	0,48	0,46	0,43	0,42	0,41
			34	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB *)	%	4,71	4,8	9,85	14,9	19,95	25
			35	Total Kredit/PDRB pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB *)	%	6,24	6,5	11,15	15,8	20,45	25
			36	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,18	20,58 - 20,78	21,58 - 21,78	22,58 - 22,78	23,58 - 25,78	24,58 - 26,78
		Inovasi yang mendorong produktivitas dan investasi	37	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	19,48	20,38	21,8	22,38	23,38	24,8
			38	Kapabilitas Inovasi *)	angka	1,7	2	2,64	2,81	3,23	3,64

5.2.3 Sasaran 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile

Tata kelola pemerintahan sangat diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Tata kelola yang optimal akan dapat mewujudkan transformasi birokrasi yang diharapkan semakin inovatif, adaptif, tangguh/agile, kolaboratif dan memiliki integritas yang kuat sehingga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dapat bekerja secara prima dan efektif efisien. Untuk mewujudkan sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan *agile*, arah pembangunan difokuskan pada:

5.2.3.1 Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berkontribusi Optimal Terhadap Pembangunan Daerah Maupun Nasional

Birokrasi sebagai institusi yang menjembatani antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat yang memanifestasikan kepentingan khusus perlu dibangun dengan kualitas sumber daya aparatur yang memadai. Penguatan *mindset* dan *culture set* yang lebih profesional, produktif dan akuntabel perlu ditanamkan terlebih dahulu pada setiap individu sumber daya aparatur agar memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya melalui penerapan *knowledge management* akan mendorong terciptanya inovasi dan kolaborasi yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah maupun nasional sehingga penyediaan layanan publik semakin prima dan berkualitas.

Arah kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun nasional untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, serta berorientasi keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat, 2) penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, 3) penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien, 4) akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta yang mendukung kinerja organisasi, 5) digitalisasi teknologi dalam mendukung *smart city* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, dilakukan melalui dukungan sumberdaya manusia serta kerangka kelembagaan yang dapat mengakomodir tata kelola transformasi digital di sektor pemerintahan, dukungan sarana dan prasarana khususnya koneksi jaringan yang terpadu dari satu daerah ke daerah lain dan mudah diakses oleh masyarakat, dukungan sistem digital melalui inovasi layanan publik pada proses bisnis tata kelola pemerintahan sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat, serta pengembangan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi antar pegawai dalam operasional serta pemberian layanan kepada masyarakat, 6) penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka pemberantasan korupsi, dan 7) penguatan kolaborasi, inovasi dan kerja sama antardaerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemberian layanan publik.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan *agile* Kabupaten Purbalingga tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya seperti disajikan dalam tabel V.4.

Tabel V.4. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 3 RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Birokrasi	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile	Birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah maupun nasional	39	Indeks Reformasi Hukum	angka	57,89	58,00	66,00	74,00	82,00	90,00
			40	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	angka	66,2	69,47	72,10	76,60	81,00	82,00
			41	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *)	angka	3,83	3,87	3,96	4,06	4,15	5
			42	Indeks Pelayanan Publik	angka	3,94	4,01	4,18	4,35	4,53	4,70
			43	Indeks Integritas Nasional	angka	69,91	71,54	75,61	79,68	83,75	87,82

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

5.2.4 Sasaran 4: Optimalnya Kondisi dan Fungsi Lingkungan Hidup

Keberlanjutan proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Adanya hal tersebut membuat kondisi dan fungsi lingkungan hidup akan terjaga dengan optimal akan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya bencana. Sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran pokok optimalnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup difokuskan pada dua arah pembangunan yaitu ketahanan pangan, air, dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

5.2.4.1 Ketahanan Pangan, Air dan Kelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup dapat terwujud dengan upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui diversifikasi konsumsi pangan. Sementara itu, untuk menjaga ketahanan air mulai dilakukan perapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa depan akan dilakukan dengan memperkuat pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulai pemantapan dengan penggunaan yang berbasis teknologi. Apabila ketiga hal tersebut (ketahanan pangan, air dan lingkungan hidup) dapat terjaga, akan mampu mewujudkan ketahanan ekologi demi keberlanjutan pembangunan ke depan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, air dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan, 2) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan, 3) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*), 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu, 5) pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian, 6) penguatan pengelolaan sumber daya air, 7) penerapan manajemen air sirkular, 8) pemulihan wilayah yang mengalami degradasi kualitas dan fungsi lingkungan hidup, 9) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya kepatuhan pemanfaatan wilayah sesuai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, 10) peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang memadai sebagai salah satu komponen peningkat daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mempertahankan fungsi ekologis, 11) pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga berbasis masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah, 12) pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir, serta 13) pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

5.2.4.2 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Penguatan terhadap bencana dan perubahan iklim dimulai dengan penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi

dan adaptasi yang kemudian didukung dengan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam upaya penurunan risiko bencana dan emisi GRK. Penerapan teknologi mitigasi bencana dan penurunan emisi GRK yang andal diperlukan juga untuk mewujudkan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang berkelanjutan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan relisiensi terhadap bencana dan perubahan iklim untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mengembangkan mitigasi di daerah rawan bencana tinggi, dan 2) penguatan aksi pembangunan rendah karbon melalui penerapan dekarbonisasi pada sektor industri, energi dan transportasi, pengelolaan lahan berkelanjutan dengan mempertahankan tutupan lahan, penanganan limbah dengan meningkatkan daur ulang dan pengomposan limbah padat domestik, pemanfaatan teknologi *Waste to Energy* (WtE), dan mendorong penggunaan alat transportasi rendah emisi, 3) penerapan konservasi energi agar lebih efisien melalui penerapan manajemen energi dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur EBT serta gerakan penghematan energi, 4) peningkatan kapasitas ketahanan manusia dalam rangka upaya adaptasi perubahan iklim.

Optimalnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut seperti disajikan dalam tabel V.5.

Optimalnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.5. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 4 RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 4 : Mewujudkan Ketahanan Ekologi	Optimalnya Kondisi dan Fungsi Lingkungan Hidup	Ketahanan pangan dan air	44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah **)	%	76,7	77,05	77,73	78,59	79,44	80,47
			45	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	10,08	10,02	8,18	6,34	4,5	2,65
			46	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	78,05	80,32	81,84	82,64	83,8	84,96
			47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	15,9	16,1	34,5	53	71,5	90
	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	130,82	127,77 - 127,16	120,15 - 118,02	112,54 - 108,87	104,92 - 99,73	97,3 - 90,59
			49	Penurunan Emisi GRK Kumulatif *)	tonCO ₂ eq	448.472,89	498.472,89	768.451,30	1.848.364,93	5.358.084,22	11.297.609,17

5.2.5 Sasaran 5: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Pembangunan wilayah merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi agar tumbuh secara baik serta menjaga keberlangsungan kehidupan melalui pelestarian dan keseimbangan lingkungan baik terhadap kawasan tersebut maupun antar kawasan. Pembangunan wilayah tersebut dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kemudahan akses dan konektivitas antar wilayah dalam mendorong produktivitas dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Untuk mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas arah pembangunan difokuskan pada sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan.

5.2.5.1 Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

Sarana prasarana infrastruktur merupakan suatu layanan dasar dalam kawasan permukiman yang bermanfaat sebagai komponen pelayan masyarakat yang berfungsi mendukung segala aktivitas yang ada melalui fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah perlu dilakukan secara merata dan berkelanjutan dengan pemerataan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa, 2) penyediaan fasilitas kelengkapan jalan untuk mendukung keselamatan jalan, 3) peningkatan dan pemantapan kualitas transportasi terutama angkutan umum massal yang berorientasi pelayanan melalui penyediaan moda transportasi publik berbasis teknologi dan ramah lingkungan dalam mendukung perwujudan *smart city* dan *smart mobility*, pengembangan moda transportasi yang saling terintegrasi antar wilayah dengan konektivitas trayek yang efektif dan efisien, serta kolaborasi dan kerjasama dengan provinsi maupun pusat dalam pengembangan moda transportasi massal yang memanfaatkan angkutan umum eksisting untuk menjadi *feeder*, 4) pengembangan simpul jaringan transportasi dengan memanfaatkan fungsi bandara, terminal dan pusat-pusat aktivitas lainnya untuk mengakomodir bangkitan dan tarikan perjalanan secara terintegrasi, 5) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, 6) penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat, dan 7) penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang.

Terwujudnya pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas Kabupaten Purbalingga tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya seperti disajikan dalam tabel V.6.

Tabel V.6. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 5 RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 5 : Mewujudkan Kesisambungan Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan	50	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota *)	%	78,83	79,50	82,00	84,50	87,00	89,50
			51	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota *)	%	31,12	31,33	31,55	31,76	31,97	32,19
			52	Rasio Konektivitas Jalan	%	75,61	72,09	74,42	76,74	79,07	81,40
			53	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kab/Kota *)	%	72	72,5	75	77,5	79	80
			54	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	90,61	92,25	95,50	97,91	99,50	100
			55	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,82	0,90	10	30	50	65
			56	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	34,53	40,48	55,36	70,24	85,12	100
			57	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet *)	%	48,54	80	98	98	100	100

5.2.6 Sasaran 6: Terwujudnya Kemandirian Desa

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terwujudnya kemandirian desa menunjukkan upaya efektif pemerintah dalam pemerataan pembangunan wilayah dengan pendekatan pemberdayaan desa yang berbasis potensi lokal dan dukungan kapasitas aparatur desa. Untuk mewujudkan kemandirian desa difokuskan pada arah pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2.6.1 Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan desa dimulai dengan adanya pemenuhan terhadap layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Pemenuhan tersebut dilakukan agar desa dapat bertransformasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat menuju kehidupan lebih baik. Dalam pembangunan desa tentunya melibatkan partisipasi seluruh masyarakatnya karena masyarakat mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan desa juga harus mampu menciptakan sistem dan infrastruktur yang berkelanjutan. Arah kebijakan untuk mewujudkan desa yang inklusif dan berkelanjutan untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal, 2) pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan, 3) penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa, dan 4) penguatan kerjasama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan.

Terwujudnya kemandirian desa Kabupaten Purbalingga tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya seperti dapat dilihat dalam tabel V.7.

Tabel V.7. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 6 RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
								2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Misi 5 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Terwujudnya Kemandirian Desa	Desa yang inklusif dan berkelanjutan	58	Persentase Desa Mandiri	%	21,88	10,71	15,63	24,55	32,14	37,5

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Keselarasan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 dengan sasaran pokok dan arah pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sandinganya pada Tabel V.8.

Tabel V.8. Keselarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

No.	RPJPD Prov. Jateng			No.	RPJPD Kab. Purbalingga		
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	1	Kesehatan untuk Semua	1	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Adaptif dan Merata	1	Derajat Kesehatan yang Tinggi
		2	Pendidikan Berkualitas secara Inklusif			2	Pendidikan yang Berkualitas
		3	Perlindungan Sosial yang Adaptif			3	Perlindungan Sosial yang Merata
2	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	4	Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter			4	Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif dan Harmonis
		5	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
3	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	6	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	2	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata	5	Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
		7	Penerapan Ekonomi Hijau			6	Inovasi yang Mendorong Produktivitas dan Investasi
		8	Transformasi Digital				
		9	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	3	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas		
		10	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			4	Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	11	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	5	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile	9	Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berkontribusi Optimal Terhadap Pembangunan Daerah Maupun Nasional
5		12	Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial				

No.	RPJPD Prov. Jateng			No.	RPJPD Kab. Purbalingga		
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	
	Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	13	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah				
		14	Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah				
6	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	15	Lingkungan Hidup Berkualitas	6	Optimalnya Kondisi dan Fungsi Lingkungan Hidup	10	Ketahanan Pangan, Air dan Kelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
16		Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	11			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
17		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					

Sumber : Hasil Analisis, 2024

BAB VI

PENUTUP

Periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025. Selanjutnya, dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujud integrasi dan sinergitas untuk mencapai pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Seluruh pemangku kepentingan, masyarakat serta pelaku dunia usaha di Kabupaten Purbalingga berkewajiban melaksanakan arah kebijakan dan sasaran pokok yang ada dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.

Dokumen RPJPD juga akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya, agar terwujudnya sinkronisasi, keselarasan dan kesinambungan pembangunan khususnya untuk penyusunan dokumen RTRW, RJPMD, Renstra, RKPD, Renja serta dokumen sektoral lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Tidak kalah penting, dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 ini akan menjadi pedoman bagi pasangan bagi calon bupati dan calon wakil bupati dalam menyusun visi dan misi. Paska Pilkada, visi misi pasangan kepala daerah terpilih akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga yang berjangka waktu lima tahunan dan RKPD Kabupaten Purbalingga yang berjangka waktu satu tahunan. Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 memperhatikan **kaidah pelaksanaan** meliputi:

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
2. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah;
3. Kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;
4. Sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya;

5. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
6. Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang dimana Visi Kabupaten Purbalingga adalah *"Purbalingga Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia"*. Visi tersebut dapat dicapai dengan misi:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Birokrasi
4. Mewujudkan Ketahanan Ekologi, dan
5. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Purbalingga sangat ditentukan oleh beberapa hal penting yaitu: komitmen pimpinan daerah, konsistensi kebijakan pemerintah, keberpihakan pembangunan kepada rakyat, serta kolaborasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi era pembangunan baru dengan segala dinamika dan tantangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, sinergitas dan kerjasama sangat diperlukan dalam menjawab tantangan, permasalahan dan isu strategis pembangunan guna mewujudkan cita-cita Kabupaten Purbalingga yang lebih baik untuk generasi mendatang.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 12